

LAPORAN **KINERJA** 2025



**DIREKTORAT
PEMBINAAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN
BLU**



Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, mengamanatkan bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi mandat, maka setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk transparansi pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, penggunaan alokasi anggaran, dan pencapaian

tujuan/sasaran strategis instansi. sehingga akuntabilitas yang merupakan salah satu azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat diwujudkan.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mempunyai tugas dan fungsi selaku pembina keuangan BLU. Dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi tersebut, pada Tahun 2025 Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU telah melaksanakan semua rencana kerja sesuai kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat agenda pengembangan aplikasi SAKTI BLU untuk modul pembayaran yang bekerja sama dengan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. Pengembangan aplikasi SAKTI BLU di tahun 2026 masih akan diteruskan untuk modul-modul lainnya.

LAKIN Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU tahun 2025 ini menjadi gambaran pengelolaan kinerja dari tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban. Diharapkan informasi yang didapat bisa dipergunakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik *stakeholders*, masyarakat. LAKIN ini sekaligus merupakan salah satu alat untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja seluruh jajaran pegawai Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, seiring dengan semakin berkembangnya peran Badan Layanan Umum sebagai wakil Pemerintah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Direktur,



Ditandatangani secara elektronik
Meirijal Nur



Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum adalah unit organisasi Eselon II Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan Badan Layanan Umum. Dalam menjalankan peran strategis tersebut, pelaksanaannya dilakukan antara lain melalui perumusan kebijakan di bidang pembinaan Badan Layanan Umum, pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Badan Layanan Umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan Badan Layanan Umum, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan Badan Layanan Umum, pelaksanaan dan analisis data Badan Layanan Umum, dan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU).

Secara rinci peran strategis dimaksud dapat dilihat dalam Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat PPKBLU Tahun 2025, sebagaimana yang akan diuraikan dalam Bab III tentang Akuntabilitas Kerja yang terdiri dari Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran dan Kinerja Lainnya. Pada tahun 2025 Direktorat Pembinaan PPK BLU menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis dengan 14 (empat belas) IKU yang telah tercapai secara keseluruhan. Selain itu, Direktorat PPKBLU juga telah menyampaikan Inisiatif Strategis untuk mendukung ketercapaian IKU yaitu SAKTI BLU, yang merupakan aplikasi khusus untuk mengakomodir kebutuhan BLU dalam mengelola keuangan sejak dari awal siklus mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Kebutuhan ini perlu diakomodir karena BLU memiliki beberapa fleksibilitas dan peraturan terkait pengelolaan keuangan yang berbeda daripada satker biasa.

Tahun 2025 juga terdapat inovasi yaitu pengukuran 9box performance. Inovasi ini bertujuan agar dapat melihat tingkat kepatuhan BLU terhadap pemenuhan syarat-syarat sebagai satker Badan Layanan Umum serta melihat kinerja Badan Layanan Umum. Hasil pengukurannya menjadi bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Badan Layanan Umum. Harapannya Badan Layanan Umum mematuhi syarat-syarat sebagai Badan Layanan Umum serta terus dapat meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	1
C. Peran Strategis.....	6
D. Sistematika Laporan	8
BAB II	10
PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Perencanaan Strategis.....	10
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	18
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	25
BAB III	29
AKUNTABILITAS KERJA	29
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	29
B. Realisasi Anggaran.....	88
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	89
D. Kinerja Lain-lain	90
BAB IV	93
PENUTUP	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	21
Tabel 2 Refinement Indikator Kinerja Utama (IKU)	24
Tabel 3 Inisiatif Strategis	24
Tabel 4 Alokasi Anggaran Kegiatan	25
Tabel 5 Perubahan IKU pada Kantor Vertikal	26
Tabel 6 IKU pada Kontrak Kinerja <i>Kemenkeu-Two</i> tahun 2026	28
Tabel 7 Nilai Kinerja Organisasi Dit PPK BLU Tahun 2025	29
Tabel 8 Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi Selama Beberapa Tahun	29
Tabel 9 Perhitungan Detail Nilai Kinerja Organisasi	31
Tabel 10 Sasaran Strategis 1	31
Tabel 11 Realisasi Capaian IKU 1a-CP	32
Tabel 12 Perhitungan IKU 1a-CP	35
Tabel 13 Perbandingan realisasi IKU 1a-CP selama 5 tahun terakhir	35
Tabel 14 Realisasi Capaian IKU 1b-N	37
Tabel 15 Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian	38
Tabel 16 Indeks Akurasi Proyeksi Pengesahan	38
Tabel 17 Rasio POBO	39
Tabel 18 Growth EBITDA	39
Tabel 19 Perbandingan realisasi IKU 1b-N selama 5 tahun terakhir	40
Tabel 20 Sasaran Strategis 2	41
Tabel 21 Realisasi Capaian IKU	42
Tabel 22 Capaian Kepuasan Pengguna Layanan	43
Tabel 23 Realisasi Capaian IKU 2b-N	45
Tabel 24 Perbandingan realisasi IKU 2b-N selama 5 tahun terakhir	46
Tabel 25 Sasaran Strategis 3	47
Tabel 26 Realisasi Capaian IKU 3a-CP	48
Tabel 27 Perbandingan realisasi IKU 3a-CP selama 5 tahun terakhir	49
Tabel 28 Realisasi Capaian IKU 3b-N	51
Tabel 29 Perbandingan Realisasi IKU 3b-N	52
Tabel 30 Sasaran Strategis 4	53
Tabel 24 Realisasi Capaian IKU 4a-CP	54
Tabel 32 Nilai Opini BPK	55
Tabel 33 Capaian LKPP dan LK BUN	56
Tabel 34 Realisasi Capaian IKU 4b-N	57
Tabel 35 Indeks Peningkatan Nilai Maturitas BLU	59
Tabel 36 Sasaran Strategis 5	61
Tabel 37 Realisasi Capaian IKU 5a-N	62
Tabel 38 Perbandingan IKU Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan	64
Tabel 39 Realisasi Capaian IKU 5b-N	66
Tabel 40 Detail Capaian IKU 5b-N	67
Tabel 41 Perbandingan realisasi IKU 5b-N selama 5 tahun terakhir	67
Tabel 42 Sasaran Strategis 6	69
Tabel 24 Realisasi Capaian IKU 6a-N	69
Tabel 44 Nilai Implementasi Learning Organization	73
Tabel 45 Rincian Nilai Leading Organization	73
Tabel 46 Perbandingan Capaian 6a-N pada Unit Serupa	75
Tabel 47 Sasaran Strategis 7	76
Tabel 48 Realisasi Capaian IKU 7a-CP	77
Tabel 49 Indeks Realisasi IKPA	79

Tabel 50 Nilai IKPA	79
Tabel 51 Sasaran Strategis 8	81
Tabel 52 Realisasi Capaian IKU 8a-CP	82
Tabel 53 Perbandingan realisasi IKU 8a-CP selama 5 tahun terakhir	84
Tabel 54 Realisasi Capaian IKU 8b-N	85
Tabel 55 Realisasi Masing-Masing Komponen	85
Tabel 56 Persentase Penyelesaian Indikator + Persentase Extra Mile	86
Tabel 57 Data Pagu dan Realisasi	88
Tabel 58 Rincian Akun Realisasi Belanja	89
Tabel 59 Realisasi Berdasarkan Program/Kegiatan	89
Tabel 60 Perbandingan Alokasi Anggaran Awal Tahun dengan Akhir Tahun	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pertumbuhan Jumlah BLU	4
Gambar 2 Komposisi BLU per Rumpun.....	4
Gambar 3 Komposisi SDM	5
Gambar 4 Struktur Organisasi.....	6
Gambar 5 Peta Strategi.....	19
Gambar 6 Mapping Sasaran Strategis (SS) dengan IKU	27
Gambar 7 Tren Capaian IKU 4a-CP Tahun.....	56
Gambar 8 Seminar BLU Preneur.....	92



BAB 1

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam UU No 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan atau output Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi mandat, maka setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk transparansi pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, penggunaan alokasi anggaran, dan pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. Bentuk Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam penyusunan LAKIN yang diterbitkan secara tahunan.

LAKIN Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada periode tahun 2025 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat PPKBLU, sekaligus sebagai alat kendali dan pemicu peningkatan kinerja setiap subdirektorat pada Direktorat PPKBLU. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga merupakan amanat peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Direktorat PPKBLU adalah unit organisasi Eselon II Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan Badan Layanan Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Pada Pasal 1132 disebutkan dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengelolaan Badan Layanan Umum;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengelolaan Badan Layanan Umum;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan dan pengelolaan Badan Layanan Umum;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang pembinaan dan pengelolaan Badan Layanan Umum;
5. pelaksanaan pengelolaan dan analisis data Badan Layanan Umum; dan
6. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Tujuan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum difokuskan untuk menciptakan tata kelola investasi dan tata kelola keuangan BLU yang inovatif dan modern yang mengarah pada pencapaian tujuan BLU.

Mempunyai peran sebagai sebuah organisasi yang melaksanakan reformasi birokrasi, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diharapkan mampu menjadi sebuah organisasi yang modern, ramping, efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta senantiasa mampu mengantisipasi perubahan. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum kemudian membentuk unit-unit Eselon III yang terdiri dari 5 (lima) Subdirektorat serta 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Unit-unit tersebut dirancang sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi yang berbasis pada pelayanan yang efisien, efektif dan fokus.

Struktur organisasi Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan terdiri dari beberapa unit-unit yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi Subdirektorat Peraturan dan Standardisasi Teknis Badan Layanan Umum

Subdirektorat Peraturan dan Standardisasi Teknis (PST) Badan Layanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan peraturan dan standardisasi teknis, penelitian dan pengembangan Badan Layanan Umum, serta melaksanakan asistensi teknis Badan Layanan Umum Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Subdirektorat Peraturan dan Standardisasi Teknis Badan Layanan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyempurnaan peraturan di bidang Badan Layanan Umum;
- b. pelaksanaan peraturan di bidang Badan Layanan Umum;

- c. penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Badan Layanan Umum;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan Badan Layanan Umum;
- e. pelaksanaan asistensi terhadap Badan Layanan Umum Daerah; dan
- f. perumusan program dan pelaksanaan kerja sama kelembagaan lingkup tugas Direktorat.

2. Tugas dan Fungsi Subdirektorat Tarif, Remunerasi, dan Informasi Badan Layanan Umum

Subdirektorat Tarif, Remunerasi, dan Informasi (TRI) Badan Layanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penelaahan tarif dan remunerasi Badan Layanan Umum, memproses penetapan tarif dan remunerasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, melaksanakan analisis, perancangan, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan sistem pengelolaan data pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan penyajian informasi Badan Layanan Umum.

Fungsi Subdirektorat Tarif, Remunerasi, dan Informasi Badan Layanan Umum

- a. pelaksanaan penelaahan tarif dan remunerasi Badan Layanan Umum;
- b. pelaksanaan penetapan tarif dan remunerasi Badan Layanan Umum; dan
- c. pelaksanaan analisis, perancangan, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan sistem pengelolaan data pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum serta penyajian informasi Badan Layanan Umum

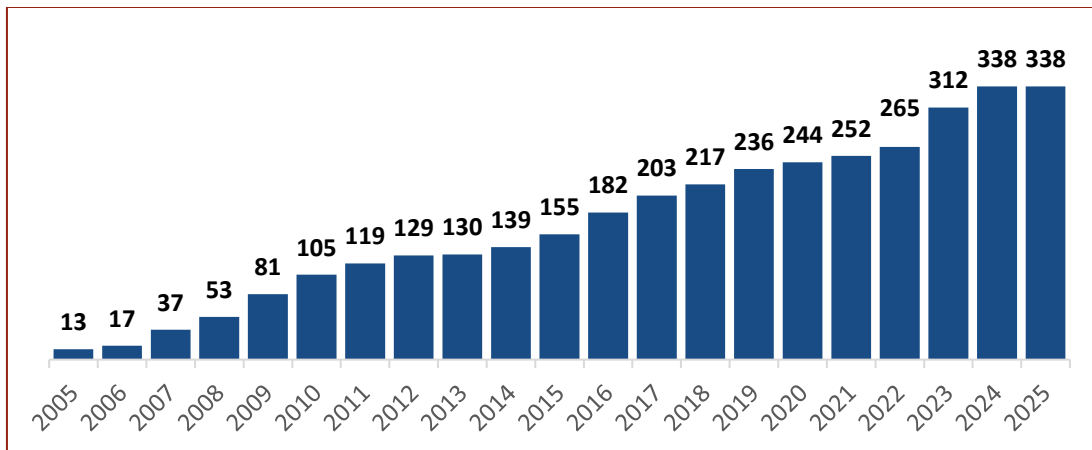
3. Tugas dan Fungsi Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum I/II/III

Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum I/II/III mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, penyuluhan, monitoring dan evaluasi, penelaahan syarat, penetapan, pencabutan, dan peningkatan status kelembagaan Badan Layanan Umum, melaksanakan koordinasi dan analisis atas laporan/rekomendasi Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, menyusun ikhtisar laporan keuangan Badan Layanan Umum, serta melaksanakan penyusunan kontrak kinerja dan penelaahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum.

Fungsi Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum I/II/III adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penelaahan persyaratan instansi pemerintah yang akan menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
- b. pelaksanaan penetapan, pencabutan, dan peningkatan status instansi pengelola keuangan Badan Layanan Umum;

- c. pelaksanaan koordinasi dan analisis atas laporan/rekomendasi Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
- d. penyiapan bahan dan pedoman bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi Badan Layanan Umum;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis Badan Layanan Umum;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Layanan Umum; dan;
- g. penyusunan ikhtisar laporan keuangan Badan Layanan Umum.



Gambar 1 Pertumbuhan Jumlah BLU



Kesehatan
127 BLU



Pendidikan
151 BLU



Pengelola Dana
9 BLU



Pengelola Kawasan
7 BLU



Pengelola Barang Jasa Lainnya
44 BLU

Gambar 2 Komposisi BLU per Rumpun

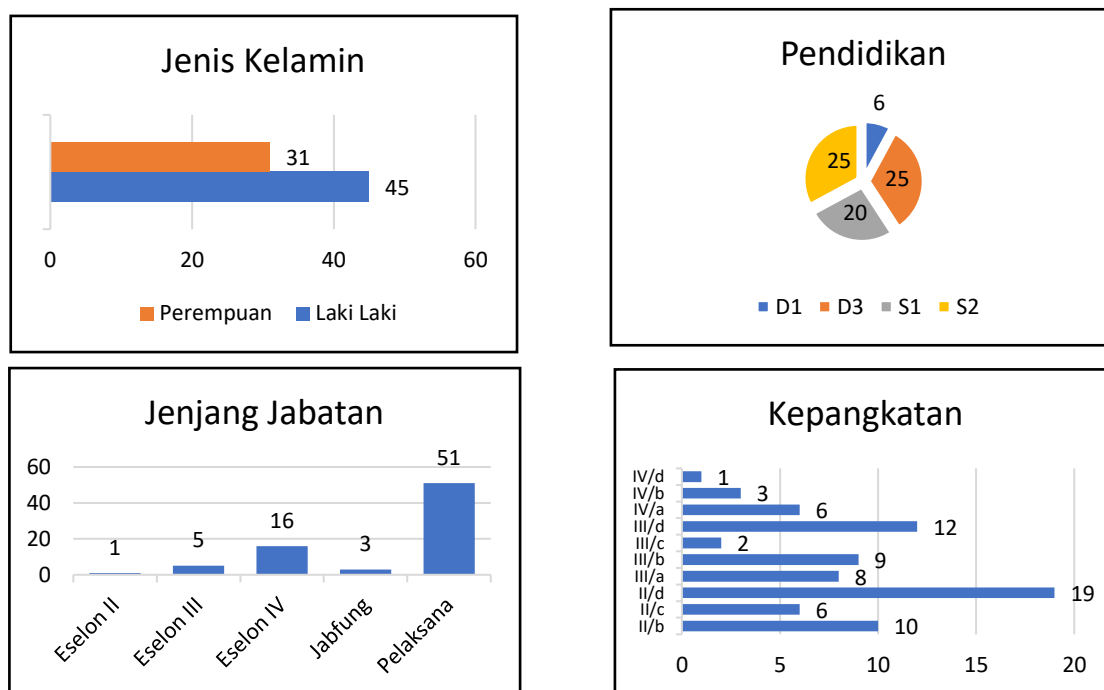
4. Struktur Organisasi

Pegawai merupakan salah satu aset organisasi yang paling penting. Oleh karena itu, pengelolaan yang tepat akan menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Perubahan struktur organisasi tanpa didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai tentu saja tidak akan membawa Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ke arah pencapaian misi yang dicita-citakan.

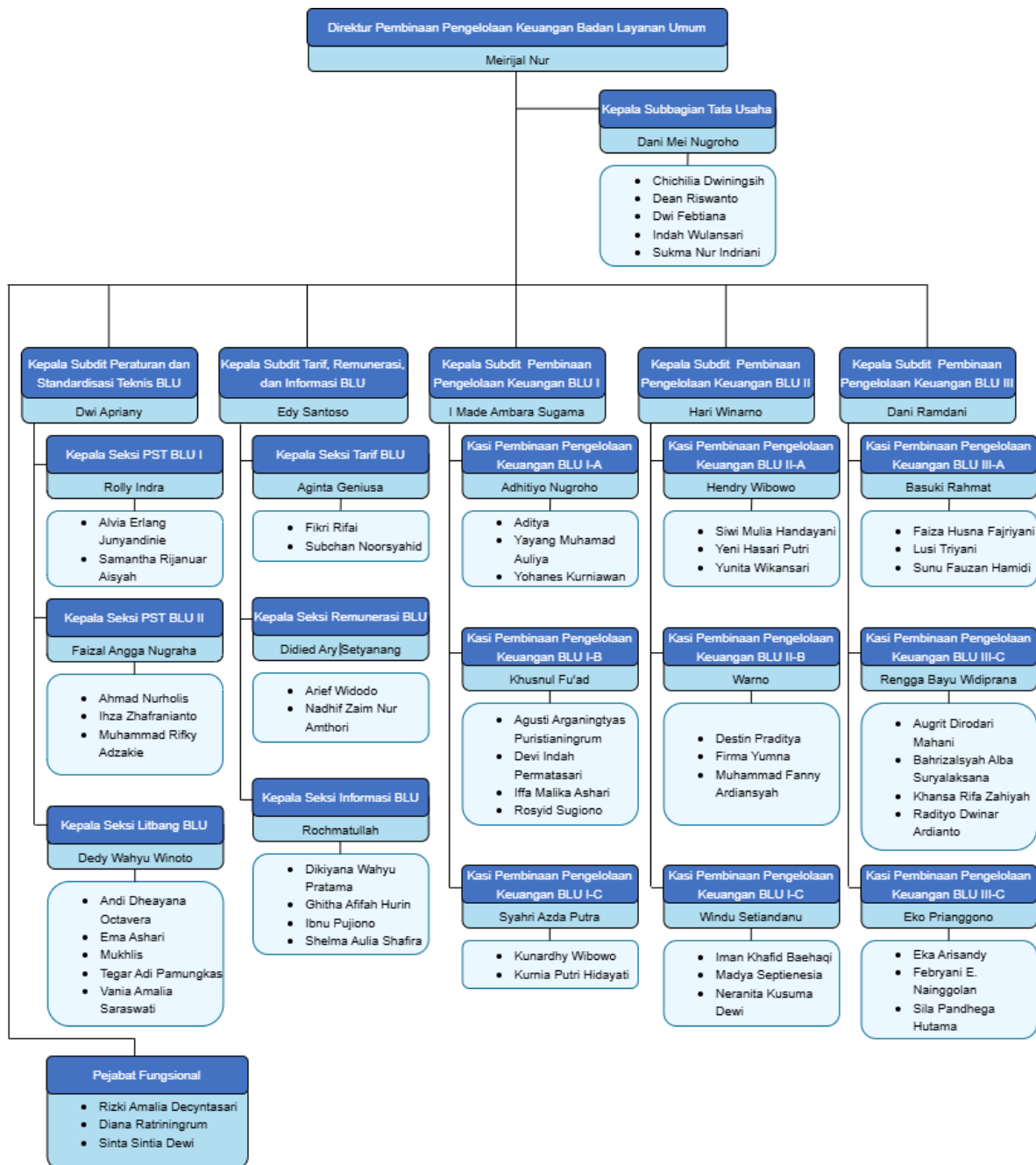
Jumlah pegawai Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 76 pegawai. Berdasarkan Pendidikan yaitu:

- Strata II (Magister) adalah sebanyak 25 pegawai;
- Strata I (Sarjana) adalah sebanyak 20 pegawai;
- Diploma III adalah sebanyak 25 pegawai;
- Diploma I adalah sebanyak 6 pegawai.

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai dengan gender perempuan adalah sebanyak 31 pegawai dan jumlah pegawai dengan gender lelaki sebanyak 45 pegawai, maka dengan banyaknya jumlah pegawai laki-laki diharapkan dapat mencapai tujuan strategis Badan Layanan Umum mudah dicapai dengan banyaknya SDM yang memiliki pendidikan yang tinggi. Jumlah pegawai: 76 orang.



Gambar 3 Komposisi SDM



Gambar 4 Struktur Organisasi

C. Peran Strategis

Tujuan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum difokuskan untuk 'Menciptakan tata kelola investasi dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern yang mengarah pada pencapaian tujuan Badan Layanan Umum'. Dalam tugas dan fungsi sebagai pembina pengelolaan keuangan BLU, arah kebijakan pembinaan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan kebijakan pengelolaan keuangan BLU, khususnya tata kelola BLU
2. Penajaman fungsi pembinaan melalui monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja

3. BLU berbasis Information Communication Technology (ICT)
4. Penguatan peran BLU dalam pemberdayaan UMKM di lingkup Ditjen Perbendaharaan
Peran strategis telah dilaksanakan dengan berbagai program diantaranya:
 1. Penyempurnaan standardisasi bimbingan teknis/penguatan kompetensi, penyusunan kontrak kinerja, dan pengkajian Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
 2. Penyempurnaan Information Communication Technology (ICT) Pengelolaan BLU dengan pengembangan BIOS dan SAKTI BLU.
 3. Penyusunan dan penetapan tarif dan remunerasi secara kolektif.
 4. Penyusunan kajian *Integrated Cash Management* BLU.

Isu-isu lain yang berimplikasi strategis terhadap Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum pada tahun 2025 serta peran dalam menghadapi isu tersebut antara lain:

1. Penyempurnaan Aplikasi BIOS.
BIOS sebagai salah satu alat pengambilan keputusan oleh pimpinan, memang sudah seharusnya bisa menyediakan gambaran data secara lebih menyeluruh. Kebutuhan data ini semakin banyak, sehingga Direktorat PPKBLU bersama dengan Direktorat SITP mengembangkan BIOS Next Gen yang digunakan untuk mengatasi kekurangan dan melakukan penyesuaian terhadap proses bisnis yang berjalan.
2. Pengembangan SAKTI BLU.
Tahun 2025 merupakan tahun dimulainya modul penganggaran pada Aplikasi SAKTI BLU. Pada awal tahun, satker BLU sudah menggunakan modul tersebut untuk melakukan revisi anggarannya. Modul-modul yang lain terus dikembangkan sampai dengan akhir tahun 2025 seperti modul pembayaran. Ke depan akan dikembangkan lagi ke modul-modul lain seperti bendahara, kas dan lain sebagainya.
3. Peningkatan kapasitas pegawai selaku pembina keuangan BLU
Dinamika perkembangan jumlah BLU dan kebutuhan jumlah pembina keuangan, tentunya perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan para pembina dengan pelatihan yang terstandardisasi secara nasional bahkan internasional. BLU yang dihadapi, umumnya memiliki sumber daya yang berkualitas, sehingga perlu diimbangi juga oleh para pembina.

D. Sistematika Laporan

Sistematika Penyusunan LAKIN Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum pendahuluan yang memuat tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan peran strategis Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan yang dimulai dengan penjelasan Renstra Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun, dilanjutkan dengan penjelasan penetapan/perjanjian kinerja antara Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta perbandingannya dengan realisasi anggaran tahun-tahun sebelumnya.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada sub bab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi yang meliputi efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, pemanfaatan aset dan teknologi informasi.

D. Kinerja Lain – lain

Pada sub bab ini diuraikan kinerja lainnya Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada tahun yang bersangkutan meliputi kinerja dalam inovasi manajemen/pelayanan, inisiatif pemberantasan korupsi, penghargaan, dan capaian lainnya.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah-lagkah perbaikan atas hasil rekomendasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Bagian Kepatuhan Internal.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Selain itu juga disampaikan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Lampiran LAKIN Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2025 meliputi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025, Matriks Cascading Tahun 2025, Formulir Pengukuran Kinerja Unit, Laporan Capaian Kinerja Triwulanan, Surat Keputusan tentang Penunjukkan Struktur Manajemen Kinerja, Dokumen Pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi, Dokumen Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi, Tabel Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2025, dan Format Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA



A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU memuat arah pelaksanaan dan pencapaian kebijakan strategis organisasi dengan mempertimbangkan dinamika organisasi, berkembangnya peran, jumlah, dan jenis layanan BLU serta bertambahnya satker yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLU.

Kebijakan strategis Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU disusun secara sistematis, berkelanjutan, bersinergi secara internal dan eksternal dalam hal ini bersinergi dengan unit-unit terkait lingkup Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga yang membawahi BLU dan dengan BLU yang sampai akhir tahun 2025 berjumlah 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) BLU.

Rencana strategis Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Keuangan BLU secara efektif dan efisien
- b. Pelayanan Publik yang prima
- c. Kepatuhan atas pengelolaan keuangan BLU yang tinggi
- d. Formulasi kebijakan pengelolaan keuangan BLU yang berkualitas
- e. Pembinaan kinerja BLU yang berkesinambungan
- f. Sistem Informasi PK BLU yang andal dan modern

1. Visi Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan sebagai institusi pemerintah, pada Tahun 2025-2029 mempunyai visi, yaitu *"Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"*, untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

2. Misi Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan upaya:

- 1) Merumuskan dan mengelola kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi.

- 2) Mencapai pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional.
- 3) Meningkatkan kualitas pengeluaran negara yang memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat.
- 4) Meningkatkan akuntabilitas dan inovasi pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko untuk mendorong tata kelola pembangunan yang baik.
- 5) Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

3. Visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Visi DJPb Tahun 2025-2029 adalah *"Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Profesional, Modern, Adaptif, Tepercaya dan Berorientasi pada Pelayanan Prima untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dalam rangka Mencapai Visi Kementerian Keuangan"* untuk mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan: *"Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"*.

4. Misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan

DJPb mendukung misi Kementerian Keuangan melalui:

- 1) Mendukung pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, berkualitas, terarah, transparan, akuntabel, dan berdampak;
- 2) Mewujudkan pengelolaan kas negara yang modern, kredibel, dan berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara melalui pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, dan kredibel;
- 4) Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah dan pemberian pinjaman yang strategis, inklusif, dan berkelanjutan;
- 5) Mewujudkan tata kelola keuangan BLU yang inovatif, akuntabel, dan berdampak;
- 6) Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang digital, adaptif, dan terintegrasi.

5. Visi Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Dalam rangka mendukung visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, "Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia" maka Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU menetapkan visi, yaitu:

“Mewujudkan pembinaan pengelolaan keuangan BLU yang efektif dan efisien dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat / *To be professional public service agencies supervisor for promoting good governance and service*”.

Pembina BLU artinya Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kebijakan dan standardisasi BLU berupa penyusunan norma, aturan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap BLU.

Profesional artinya memiliki kompetensi yang terstandar dalam melakukan pembinaan BLU dengan berpegang teguh terhadap aturan, norma dan nilai – nilai yang berlaku dalam organisasi.

Pelayanan dan tata kelola BLU yang baik artinya BLU yang memberikan pelayanan dengan efisien dan produktivitas dalam cara dan prinsip yang sesuai aturan yang berlaku (*comply with the rule*), sesuai dengan etika profesi dan norma masyarakat.

Visi ini disusun untuk memberi arah yang akan ditempuh oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU dan dapat mengartikulasikan sosok organisasi secara utuh mencakup seluruh fungsi *treasury* yang ada dan dapat diterjemahkan dan dipahami oleh seluruh elemen dengan mudah sekaligus menginspirasi sehingga mampu direalisasikan dengan baik menuju peningkatan kualitas pelayanan publik dan *good governance*.

6. Misi Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Untuk mewujudkan visinya, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum menjalankan misi yang sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum dan Misi Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang telah ditetapkan tersebut masih relevan dengan kondisi terkini sebagai langkah strategis dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat melalui fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, yaitu:

➤ Mendorong penerapan norma, aturan dan standardisasi pengelolaan BLU

Terkait dengan fungsi pengelolaan keuangan BLU, kinerja akan difokuskan untuk menciptakan mekanisme pengelolaan BLU yang fleksibel, efektif dan efektif melalui penguatan regulasi, tata kelola BLU yang tegas untuk dapat mendorong peningkatan kinerja Satker BLU, dalam rangka mendukung:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

- b. Peningkatan kesehatan kinerja keuangan satker BLU; dan
- c. Peningkatan kompetensi pengelola BLU.

➤ **Memberikan kepastian hukum atas tarif yang dibebankan kepada masyarakat**

Pada Subdirektorat Tarif, Remunerasi dan Informasi akan melakukan penelaahan tarif dengan mekanisme penelaahan dan proses penetapan tarif yang difungsikan untuk memberikan nilai kepastian hukum untuk tarif yang sesuai dibebankan kepada masyarakat.

➤ **Memberikan kepastian hukum atas remunerasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku**

Subdirektorat Tarif, Remunerasi dan Informasi akan melakukan penelaahan remunerasi yang disampaikan oleh BLU dengan mekanisme penelaahan dan proses penetapan remunerasi yang difungsikan untuk memberikan nilai kepastian hukum untuk remunerasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

➤ **Mendorong peningkatan kinerja dan kualitas layanan BLU**

Mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktek bisnis yang segat yang berguna untuk mendorong peningkatan kinerja dan kulaitas layanan BLU yang semakin baik untuk masa kini dan di masa mendatang.

Dalam rangka pencapaian misi-misi tersebut di atas, perlu ada langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan melakukan harmonisasi dan integrasi misi-misi yang telah dirumuskan ke dalam sebuah rumusan strategis yang memberikan gambaran yang jelas sehingga seluruh komponen Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dapat berkontribusi secara proaktif sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Sebagai bagian dalam melakukan penyempurnaan proses bisnis dan kualitas layanan, Direktorat Pembinaan PKBLU berupaya untuk terus melakukan penajaman fungsi-fungsi yang menjadi domain dan tanggung jawabnya secara berkelanjutan. Keseluruhan fungsi tersebut ditopang oleh semangat reformasi birokrasi untuk senantiasa melakukan penyempurnaan organisasi, tata kelola keorganisasian dan manajemen SDM yang bentuk dan kebijakannya senantiasa disesuaikan dengan perubahan, kebutuhan organisasi,

dan para pemangku kepentingan. Berkaitan dengan telah diimplementasikannya alat bantu proses pengelolaan kinerja berbasis *Balance Scorecard* dalam memetakan strategi, target, dan penilaian pencapaian kinerja, Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU dalam lima tahun ini pada prinsipnya bergerak paralel dan diselaraskan dengan Peta Strategi, sebagai produk dari pengelolaan kinerja berbasis *Balance Scorecard*.

7. Sasaran Strategis Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Strategi Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) sasaran strategis sebagaimana telah disampaikan di atas, adalah sebagai berikut:

- a. **Stakeholder Perspective** terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

Pengelolaan Keuangan BLU yang Inklusif dan Produktif

Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk meningkatkan kinerja keuangan BLU menjadi lebih baik sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat yang inklusif dan lebih produktif

- b. **Customers Perspective** terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BLU memiliki tugas khusus yang diamanatkan dan beberapa keistimewaan dibanding instansi pemerintah pada umumnya sehingga perlu mencapai/menyelesaikan tugas khusus secara efektif.

- c. **Internal Process Perspective** terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

1) Formulasi Kebijakan yang Implementatif dan Aplikatif

Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk mewujudkan tersedianya kebijakan atau regulasi mengenai pengelolaan keuangan BLU berdasarkan kajian dari sumber data yang kualitas.

2) Pengelolaan tugas khusus (special mission) yang efektif

Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk peningkatan pemahaman baik bagi pihak internal maupun eksternal BLU terhadap fungsi Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan dan kekayaan negara.

3) Komunikasi Publik dan Sinergi Antar-Organisasi yang Kolaboratif

Sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu Penyelesaian tugas dan pencapaian kinerja memerlukan komunikasi serta sinergi antar-organisasi yang saling berkolaborasi untuk meraih tujuan strategis organisasi.

- d. **Learning and Growth Perspective** terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

1) Pengelolaan Organisasi dan Pengendalian Internal yang Optimal

Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk meningkatkan kualitas SDM pada Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU khususnya yang terkait tugas utamanya sebagai pembina pengelolaan keuangan BLU.

2) Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang berkualitas meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada para *stakeholder*. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola secara efektif dan efisien, sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam rangka mencapai *output* yang diharapkan.

3) Pengelolaan IT yang Andal dan Data yang Berkualitas

Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya teknologi yang berkualitas untuk mendukung penyempurnaan layanan BLU kepada masyarakat.

8. Arah Kebijakan dan Strategis

a. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU

Dalam rangka peningkatan kualitas fungsi pembinaan pengelolaan keuangan dan penerapan tata kelola BLU yang lebih baik, arah kebijakan Direktorat PPK BLU Tahun 2025 difokuskan pada peningkatan tata kelola keuangan BLU yang strategis, inklusif, dan berdampak. Kebijakan tersebut diarahkan pada penguatan kinerja pengelolaan keuangan, peningkatan efisiensi dan kualitas layanan BLU, serta modernisasi pengelolaan BLU yang adaptif terhadap dinamika kebijakan dan perkembangan teknologi, dengan tetap berpedoman pada prinsip tata kelola yang baik dan praktik terbaik internasional (*international best practices*). Kebijakan tersebut dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- 1) penguatan tata kelola dan kinerja keuangan BLU yang akuntabel dan berorientasi pada hasil;
- 2) peningkatan belanja layanan BLU yang efektif dan responsif terhadap hasil survei kepuasan pengguna layanan; dan
- 3) digitalisasi dan modernisasi pengelolaan BLU untuk mendukung efektivitas proses bisnis dan kualitas pengambilan keputusan.

b. Kerangka Regulasi

Rancangan PP Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (PP 23/2005) memuat ekspektasi perbaikan regulasi BLU sesuai dengan perkembangan dan kompleksitas dalam pengelolaan BLU. Tiga aspek yang menjadi titik tolak RPP Perubahan PP 23/2005 adalah *asas*, *orientasi*, dan *outcome*.

Pertama, *asas* baru yang diharapkan dapat mengemuka dalam RPP Perubahan PP 23/2005 adalah *asas efisiensi dan kualitas* di samping *asas akuntabilitas dan produktivitas* yang telah tertuang dalam PP 23/2005.

Kedua, *orientasi* yang diharapkan dalam RPP Perubahan tersebut adalah beralih dari *produktivitas layanan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan* menjadi *peningkatan produktivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas kinerja keuangan dan layanan* guna meningkatkan mutu layanan.

Ketiga, *outcome* yang diharapkan dari RPP Perubahan PP 23/2005 adalah *peningkatan pertumbuhan BLU, peningkatan kemandirian fiskal BLU yang semakin baik, dan penguatan misi sosial BLU* sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses serta memperoleh layanan berkualitas dari BLU.

RPP Perubahan PP 23/2005 memuat lima pokok perubahan, yaitu:

- 1) penguatan landasan hukum;
- 2) harmonisasi dengan pengaturan lain;
- 3) penyederhanaan penetapan BLU;
- 4) pengaturan SDM; dan
- 5) penguatan kelembagaan BLU.

Saat ini draft RPP ada di Kemenko Polhukam sebagai penengah dari kebuntuan pembahasan dikarenakan Kementerian PAN dan RB belum menyetujui pengaturan SDM non ASN pada BLU. Menurut Kementerian PAN dan RB tidak ada pegawai selain ASN yang bekerja di instansi Pemerintah. Sementara hal ini akan mengurangi fleksibilitas di bidang SDM yang diberikan kepada BLU.

Semakin meningkatnya jumlah dan jenis layanan BLU mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang mudah dipahami oleh BLU. Pada tahun 2020 telah ditetapkan Regulasi BLU yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. Seiring dengan implementasi PMK tersebut, terdapat beberapa pengaturan yang

membutuhkan penyempurnaan. Untuk itu Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU melakukan perubahan terhadap PMK-129/PMK.05/2020 tersebut dengan latar belakang sebagai berikut:

- Penguatan pengaturan sesuai karakteristik dan tuntutan, yang meliputi fleksibilitas, proses bisnis dan tata kelola, kelembagaan;
- Penyelarasan regulasi, yang meliputi PNBK, pemanfaatan BMN dan pengelolaan piutang;
- Tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP 2021; dan
- Simplifikasi peraturan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, telah ditetapkan **PMK Nomor 76 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum**, dengan pokok-pokok pengaturan sebagai berikut:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 disusun sebagai penyempurnaan kerangka regulasi pengelolaan Badan Layanan Umum guna memperkuat fleksibilitas pengelolaan keuangan, meningkatkan akuntabilitas kinerja layanan, serta memperkuat tata kelola kelembagaan BLU secara menyeluruh. Pengaturan ini menegaskan bahwa BLU merupakan instrumen strategis pemerintah dalam penyediaan layanan publik yang menuntut keseimbangan antara prinsip efisiensi bisnis dan kepatuhan terhadap sistem keuangan negara.

Dalam aspek pengelolaan keuangan dan kas, regulasi ini memberikan ruang fleksibilitas yang lebih luas bagi BLU dalam mengelola likuiditas, termasuk optimalisasi pemanfaatan dana yang dimiliki dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Kebijakan ini diarahkan agar dana BLU dapat dikelola secara produktif namun tetap selaras dengan ketentuan pengelolaan kas negara dan pengendalian risiko keuangan.

Dari sisi remunerasi dan manajemen SDM, pengaturan menekankan pentingnya sistem remunerasi berbasis kinerja yang objektif, terukur, dan berkeadilan. Penetapan remunerasi tidak hanya didasarkan pada struktur jabatan, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi kinerja individu maupun kinerja organisasi. Selain itu, kompetensi pejabat pengelola keuangan BLU diperkuat melalui kewajiban peningkatan kapasitas dan sertifikasi yang relevan agar pengelolaan keuangan dilakukan secara profesional.

Dalam kerangka tata kelola dan kinerja organisasi, regulasi ini mempertegas kewajiban penyusunan kontrak kinerja antara pimpinan BLU dan

otoritas pembina sebagai instrumen pengendalian kinerja strategis. Selain itu, penguatan sistem penilaian tingkat kematangan organisasi (maturity rating) diatur sebagai alat ukur kualitas tata kelola dan efektivitas layanan BLU secara berkelanjutan.

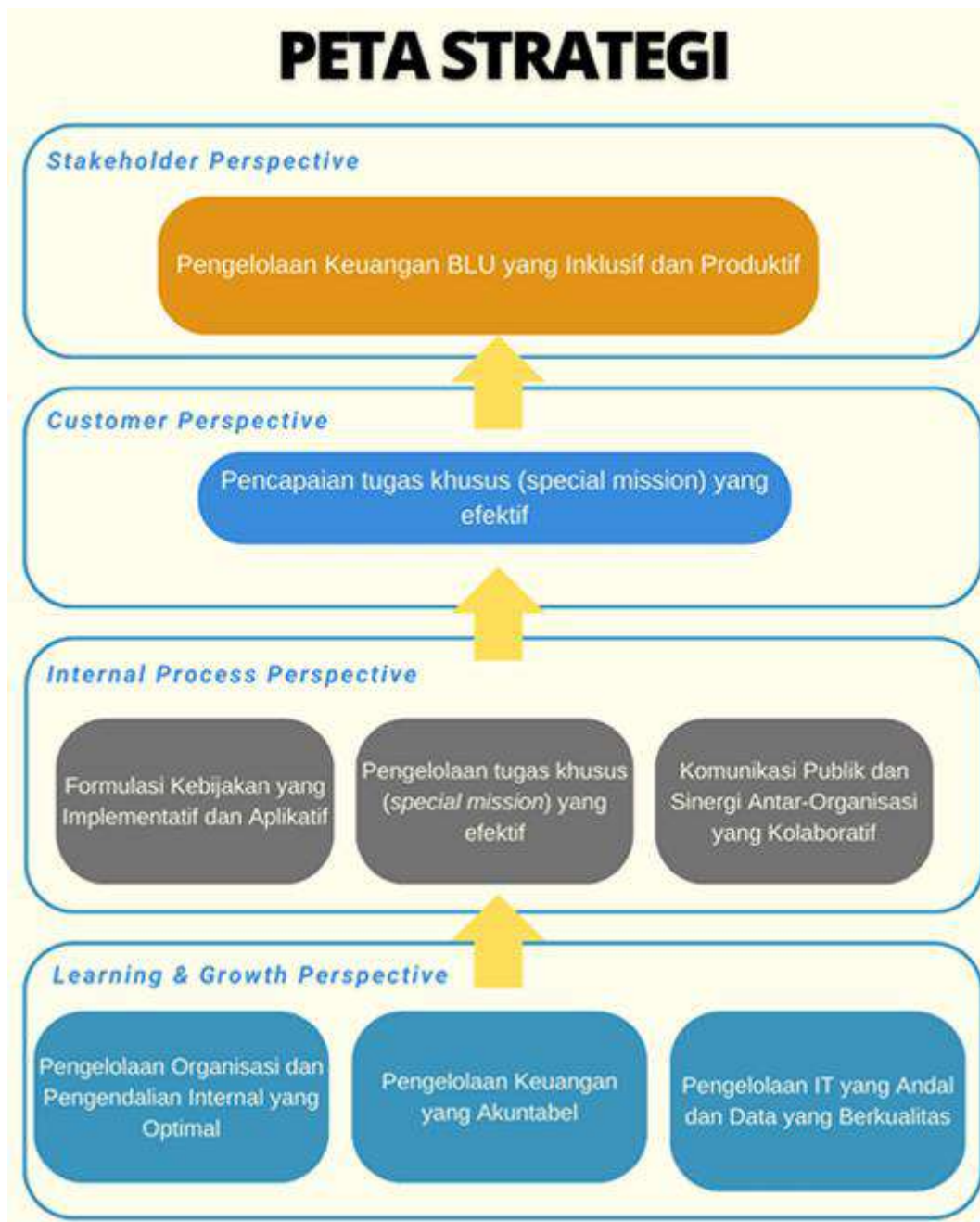
Terkait kelembagaan pengawasan, peraturan ini memperkuat peran Dewan Pengawas sebagai organ pengendalian internal strategis dengan penegasan fungsi, komposisi, serta dukungan kelembagaan melalui sekretariat dan komite audit. Penguatan struktur ini bertujuan memastikan bahwa setiap aktivitas pengelolaan BLU berjalan sesuai prinsip good governance, mitigasi risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pada aspek pengelolaan piutang dan aset, regulasi memberikan fleksibilitas operasional yang tetap berada dalam koridor hukum keuangan negara. BLU diberikan ruang untuk menetapkan pedoman internal pengelolaan piutang, termasuk mekanisme penyelesaian dan penghapusan, sepanjang memenuhi prinsip akuntabilitas dan optimalisasi penerimaan negara. Pengaturan pemanfaatan aset juga diperluas agar aset BLU dapat dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung layanan tanpa mengurangi nilai atau status kepemilikan negara.

Secara keseluruhan, PMK ini menegaskan arah kebijakan bahwa BLU harus dikelola dengan pendekatan korporasi yang sehat namun tetap berlandaskan prinsip pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, diharapkan BLU mampu meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat kemandirian keuangan, serta memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat dan negara.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penetapan Kinerja tahun 2025 dilakukan dengan penandatanganan Kontrak Kinerja Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang terjabarkan dalam 8 Sasaran Strategis dan 14 Indikator Kinerja Utama. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tersebut terangkum dalam Peta Strategi Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.



Gambar 5 Peta Strategi

Sasaran strategis Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum untuk mendukung pencapaian tujuan seperti telah disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan penerapan pengelolaan keuangan oleh BLU untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih baik dan profesional sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.
2. Mewujudkan dukungan manajemen yang efektif utamanya dalam rangka proses monitoring dan evaluasi kinerja BLU berdasarkan hasil survei kepuasan kepada pengguna layanan Dit PPKBLU. Bentuk dari peningkatan dapat diidentifikasi dari waktu

penyelesaian atas pertanyaan yang diajukan (*resolve time*) sesuai dengan target layanan yang telah ditetapkan pada *Service Level Agreement* (SLA) dan Proses monitoring dan evaluasi kinerja BLU berdasarkan dokumen yang disampaikan sesuai ketentuan.

3. Mewujudkan tersedianya kebijakan khususnya terkait pengelolaan BLU dan pemberdayaan UMKM yang harus terus disesuaikan dan diupdate mengikuti perubahan yang dinamis agar tetap *applicable*, *credible*, dan *accountable*.
4. Mewujudkan peningkatan pengelolaan BLU sebagai instansi pemerintah yang memiliki beberapa fleksibilitas tetap perlu memperhatikan efektivitas atau tepat guna atas sumber daya yang dimiliki.
5. Mewujudkan pelaksanaan tugas *special mission* secara optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Setera dengan sistem pengelolaan keuangan BLU memiliki tujuan khusus yang diamanatkan dan beberapa keistimewaan dibanding instansi pemerintah pada umumnya sehingga capaian yang diraih harus bisa optimal.
6. Mewujudkan organisasi yang memiliki pengelolaan SDM serta IT yang dapat saling melengkapi dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan. Fungsi IT harus dapat mempermudah dan mempercepat layanan dengan diimbangi kapasitas SDM yang mumpuni dalam mengelola IT. Dalam upaya memperkuat implementasi kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara, maka perlu ada upaya peningkatan pemahaman baik bagi pihak internal maupun eksternal BLU sehingga diperlukan sistem Informasi teknologi yang dapat memudahkan stakeholder untuk mendapatkan informasi secara cepat dan akurat.
7. Mewujudkan pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder dengan baik dan berkualitas. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.
8. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM pada Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU khususnya peningkatan kemampuan dan pengetahuan yang terkait tugas utamanya sebagai pembina pengelolaan keuangan BLU. Diperlukan adanya proses pengawasan serta pengendalian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi agar tujuan organisasi tercapai, risiko dapat dicegah, dan target-target tercapai.

Penyusunan Kontrak Kinerja Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Tahun 2025 dimulai sejak bulan Agustus 2024. Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Bagian Organisasi dan Tata Laksana secara intensif melakukan asistensi *refinement* Kontrak Kinerja. Proses refinement dimulai dengan dikirimkannya nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-3152/PB.1/2024 tanggal 15 Agustus 2024 hal Persiapan Refinement Kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025 dilanjutkan dengan undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor UND-443/PB.1/2024 tanggal 25 November 2024 hal Undangan Refinement Kinerja dan Risiko DJPb Tahun 2025. Selanjutnya kami menyampaikan manual IKU Kemenkeu Wide-One-Two kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Nota Dinas nomor ND-86/PB.5/2023 tanggal 7 Februari 2025.

Selanjutnya dilakukan koordinasi dalam pembahasan penentuan Peta Strategi, IKU, Inisiatif Strategis, Penetapan Target dan Manual IKU Direktorat PPK BLU. Sehubungan dengan itu telah dilaksanakan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 31 Januari 2025 sebagai langkah awal pelaksanaan Kinerja di awal tahun 2025 dan sebagai evaluasi atas capaian kinerja tahun 2024. Hasil evaluasi dijadikan sebagai tolok ukur untuk menentukan IKU Kemenkeu-*Two-Three-Four-Five* tahun 2025.

IKU yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* tahun 2025 terdiri dari 14 (empat belas) IKU, sebagai berikut:

NO	NAMA INDEKS KINERJA UTAMA
1.	Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU, dengan target 3 (skala 5)
2.	Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU, dengan target 3 (skala 5)
3.	Tingkat kepuasan pengguna layanan, dengan target 100
4.	Tingkat Perkembangan Pendapatan BLU, dengan target 100
5.	Indeks Kinerja Reformasi Hukum, dengan target 95,5
6.	Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan, dengan target 80
7.	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN, dengan target 92%
8.	Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating, dengan target 100
9.	Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, dengan target 4 (skala 5)
10.	Indeks Kualitas Penugasan BLU, asistensi BLUD dan UMKM, dengan target 4 (skala 5)
11.	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi, dengan target 100
12.	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu, dengan target 100
13.	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit, dengan target 100%
14.	Indeks Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU, dengan target 3 (skala 5)

Tabel 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Rincian penjelasan mengenai hasil perbandingan *refinement* IKU pada direktorat PPKBLU sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

No.	2024		2025		Keterangan Refinement
	Nama IKU	Target	Nama IKU	Target	
1.	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan	100	Merupakan IKU Mandatory
2.	Indeks Peningkatan Nilai Maturitas BLU	3,25	Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating	100	Penggabungan dengan IKU Persentase BLU yang Berkinerja Baik Sesuai Hasil Maturity Rating Assessment
3.	Persentase Pencapaian Target Pendapatan BLU	100	Tingkat Perkembangan Pendapatan BLU	100	Perubahan komponen perhitungan menjadi dua sub-iku
4.	Indeks Kepuasan Publik atas Layanan BLU dalam Rangka Evaluasi Standar Layanan yang Berkesinambungan	4,20	-	-	-
5.	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	89	Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan	4	Merupakan IKU Mandatory
6.	Nilai kinerja regulasi prioritas	95	Indeks Kinerja Reformasi Hukum	95,5	Merupakan IKU Cascading Kemenkeu Wide dan adanya kenaikan target
7.	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti	91	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	92	Perubahan nama IKU dan kenaikan target
8.	Indeks efektivitas kebijakan perbendaharaan,	3	Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan	80	Merupakan IKU Mandatory

	kekayaan negara dan risiko				
9.	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti BLU	80	-	-	-
10.	Indeks Kualitas Penugasan terkait BLU dan Asistensi Pembinaan BLUD Kewilayahan	3,5	Indeks Kualitas Penugasan BLU, asistensi BLUD dan UMKM	4	Kenaikan target
11.	Indeks Akurasi Proyeksi Pengesahan Pendapatan BLU	3,5	Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU	3	Terdapat perubahan komponen menjadi 3 (tiga) komponen
12.	Persentase pencapaian target Kontrak Kinerja Dirjen Perbendaharaan dengan Pimpinan BLU	94	-	-	-
13.	Persentase BLU yang Berkinerja Baik Sesuai Hasil Maturity Rating Assessment	97	-	-	-
14.	Indeks Kemandirian BLU	3	-	-	-
15.	Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi BIOS	86,5	Indeks Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU	3	Perubahan komponen
16.	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu	100	Merupakan IKU Cascading Kemenkeu-Wide
17.	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	100	Merupakan IKU Mandatory dari Setditjen
18.	-	-	Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU	3	Merupakan IKU baru

19.	-	-	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100	Merupakan IKU Cascading Kemenkeu-One
-----	---	---	---	-----	--------------------------------------

Tabel 2 Refinement Indikator Kinerja Utama (IKU)

Di samping penetapan 14 (empat belas) IKU tersebut, juga ditetapkan Inisiatif Strategis (IS) untuk mendukung pencapaian kinerja, sebagai berikut:

1. SS : Pengelolaan IT yang Andal dan Data yang Berkualitas
IS : SAKTI BLU
Output/Outcome : Aplikasi yang telah dikembangkan untuk digunakan khusus oleh Satker BLU dan dapat digunakan untuk melaksanakan siklus pengelolaan keuangan dari perencanaan hingga pelaporan

PIC IS ini adalah Subdirektorat Tarif, Remunerasi, dan Informasi BLU yang akan bekerja sama dengan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) selaku pengembang aplikasi pusat DJPb. Trayektori triwulanan dalam pelaksanaan IS ini sebagai berikut:

Kegiatan	Output	Periode
Penetapan User Requirement (UR) untuk modul yang akan dikembangkan	Laporan Kegiatan	Triwulan I
User Acceptance Test (UAT) untuk modul aplikasi yang telah dikembangkan	Laporan Hasil Uji Aplikasi	Triwulan II
Sosialisasi dan End User Training (EUT)	Laporan Pelaksanaan Bimtek	Triwulan III
Roll out modul terupdate kepada seluruh BLU	Laporan Monitoring Penggunaan aplikasi SAKTI BLU	Triwulan IV

Tabel 3 Inisiatif Strategis

Adapun pendanaan untuk kegiatan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU selama 2025 adalah sebesar **Rp2.398.857.000**.

Kegiatan		Anggaran	
1.	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp	1.699.635.000
	a. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	241.820.000
	b. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp	1.023.900.000
	c. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp	433.915.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp	699.222.000
	a. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	183.352.000
	b. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	515.870.000

Tabel 4 Alokasi Anggaran Kegiatan

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Proses *refinement* kinerja tahun 2026 sudah dimulai sejak triwulan IV tahun 2025 dengan mempertimbangkan arah kebijakan Kementerian Keuangan serta arahan pimpinan unit. Diawali dengan Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan nomor ND-3145/PB.1/2025 tanggal 11 September 2025 hal Manajemen Kinerja Periode Triwulan III Tahun 2025 hal Lingkup Kantor Pusat dan BLU DJPb, setiap unit diminta untuk mengusulkan *refinement* IKU Kemenkeu-Wide-One DJPb Tahun 2026. Selanjutnya, *refinement* IKU Kemenkeu Wide-One dibahas bersamaan dengan Biro Cankeu, Bagian OTL dan Unit Eselon II terkait. Dalam rapat tersebut, disampaikan gambaran secara umum arahan pimpinan terkait IKU yang akan dirumuskan untuk level Kemenkeu-One.

Usulan *refinement* kinerja baik untuk IKU kantor vertikal maupun IKU level Kemenkeu-Two disampaikan di awal tahun dengan mempertimbangkan arah kebijakan di Kementerian Keuangan termasuk internal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. IKU kantor vertikal yang menjadi kewenangan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Rincian hasil *refinement* IKU kami sajikan pada tabel berikut:

Semula		
Nama IKU	Target	Keterangan
Indeks Kualitas Penugasan terkait BLU dan Asistensi Pembinaan BLUD Kewilayahan	4 (skala 5)	IKU menilai gabungan dua penugasan terkait BLU dan asistensi BLUD

Menjadi		
Nama IKU	Target	Keterangan
Indeks Kualitas Penugasan terkait BLU, Asistensi BLUD dan Pemberdayaan UMKM	4,25 (skala 5)	Atas arahan pimpinan untuk simplifikasi, maka ada penggabungan tiga komponen perhitungan dalam IKU ini yaitu terkait penugasan BLU, asistensi BLUD, dan pemberdayaan UMKM.

Tabel 5 Perubahan IKU pada Kantor Vertikal

Selanjutnya, IKU level Kemenkeu-*Two non-cascading* maupun *non-mandatory* telah kami selesaikan. Secara ringkas hal-hal pokok yang dilakukan refinement pada nota dinas tersebut adalah:

1. Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU, mengukur kinerja keuangan dengan beberapa komponen diantaranya EBITDA, rasio POBO, dan akurasi proyeksi atas pendapatan. IKU ini merupakan **IKU lanjutan** dengan kenaikan target menjadi Indeks 3,25 (skala 5).
2. Tingkat Perkembangan Pendapatan BLU, merupakan **IKU yang diupdate** dengan dua Sub-IKU dengan target capaian menjadi indeks 3 (skala 5).
3. Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating, merupakan **IKU yang diupdate** dengan komponen menjadi compliance, Governance, dan Performance dengan target Indeks 3.
4. Indeks Kualitas Penugasan BLU, asistensi BLUD dan UMKM, yang diturunkan kepada Kanwil DJPb merupakan **IKU yang diupdate** sebagaimana telah kami jelaskan pada tabel di atas.
5. Indeks Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU, merupakan **IKU lanjutan** yang mengukur integrasi data BLU melalui webservice serta compliance pengisian data pada aplikasi BIOS dengan penyesuaian target menjadi 60%.

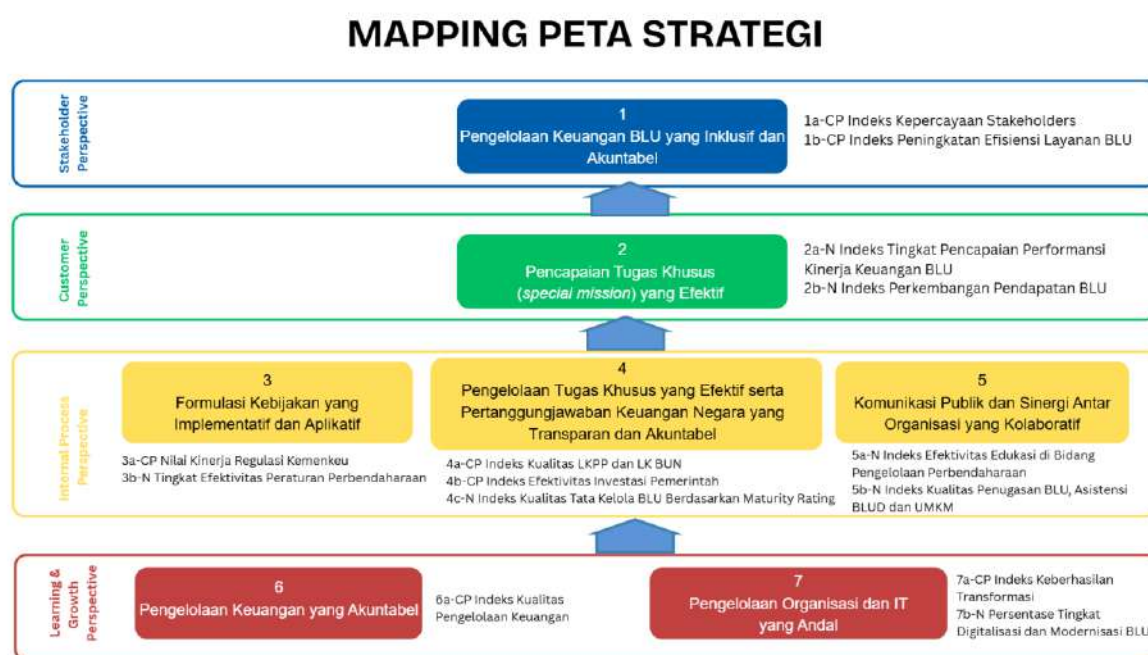
Tahun 2026 terdapat usulan IKU dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum untuk level Kemenkeu-*One* yang menghitung efisiensi layanan BLU. IKU baru ini diusulkan dengan nama Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU. Komponen perhitungan IKU ini ada tiga yaitu:

1. Indeks pertumbuhan layanan BLU yang menghitung peningkatan output layanan strategis tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
2. Indeks efisiensi belanja operasional layanan untuk beberapa layanan strategis dengan membandingkan tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
3. Rasio penggunaan Belanja non operasional.

Target pada usulan IKU ini menjadi Indeks 3,25 (skala 5) dengan pertimbangan agar target IKU lebih berkualitas. Pertimbangan lainnya karena komponen perhitungan ini cukup

sulit untuk dipilah datanya dan kepastian akan ketercapaian realisasi sangat bergantung dengan situasi dan kondisi kebijakan pemerintah. Contoh kebijakan pemerintah yang akan berimbas adalah efisiensi belanja Kementerian/Lembaga yang memang bisa menaikkan nilai efisiensi belanja BLU atas layanan namun komponen pertumbuhan layanan menjadi tidak pasti apakah naik, tetap, atau bahkan turun karena adanya efisiensi belanja terkait layanan mereka.

Gambaran umum peta strategi setelah disusun dan dimasukkan IKU cascading, non-cascading, dan *mandatory* sebagai berikut:



Gambar 6 Mapping Sasaran Strategis (SS) dengan IKU

IKU yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two tahun 2026 terdiri dari 14 (empat belas) IKU, sebagai berikut:

Indikator Kinerja		Target
1a-CP	Indeks Kepercayaan Stakeholders	100
1b-CP	Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU	3.25 (Skala 5)
2a-N	Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU	3.25 (Skala 5)
2b-N	Indeks Perkembangan Pendapatan BLU	3 (Skala 5)
3a-CP	Nilai Kinerja Regulasi BLU	90
3b-N	Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan	80
4a-CP	Indeks Kualitas LKPP dan LK BUN	100

4b-CP	Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah	4 (Skala 5)
4c-N	Indeks Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating	3 (Skala 5)
5a-N	Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan	4 (Skala 5)
5b-N	Indeks Kualitas Penugasan BLU, Asistensi BLUD dan UMKM	4.25 (Skala 5)
6a-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan	100
7a-CP	Indeks Keberhasilan Transformasi	100
7b-N	Persentase Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU	60%

Tabel 6 IKU pada Kontrak Kinerja *Kemenkeu-Two* tahun 2026



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kerja Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama pada setiap perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tahun 2025 sebesar **116,25**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada setiap perspektif sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

<i>PERSPECTIVE</i>	BOBOT	NILAI
STAKEHOLDER	30%	120,00
CUSTOMER	20%	113,48
INTERNAL PROCESS	25%	115,50
LEARNING AND GROWTH	25%	114,68
NILAI KINERJA ORGANISASI		116,25

Tabel 7 Nilai Kinerja Organisasi Dit PPK BLU Tahun 2025

Sebagaimana disajikan pada Tabel 8, seluruh perspektif kinerja Direktorat PPK BLU Tahun 2025 memperoleh nilai di atas 100. Nilai tertinggi terdapat pada Perspektif Stakeholder sebesar 120,00 dengan bobot 30%. Selanjutnya, Perspektif Internal Process memperoleh nilai 115,50 dengan bobot 25%, Perspektif Learning and Growth sebesar 114,68 dengan bobot 25%, dan Perspektif Customer sebesar 113,48 dengan bobot 20%.

Berdasarkan pembobotan tersebut, Nilai Kinerja Organisasi Direktorat PPK BLU Tahun 2025 tercatat sebesar 116,25. Seluruh perspektif memberikan kontribusi positif terhadap capaian kinerja organisasi pada tahun 2025.

Tahun	NKO
2021	110,53
2022	110,19
2023	111,41
2024	113,90
2025	116,25

Tabel 8 Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi Selama Beberapa Tahun

Dari tabel di atas, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat PPK BLU menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir.

Selama tahun 2025, dari 14 (empat belas) IKU Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum seluruhnya telah berstatus memenuhi target. Capaian keseluruhan IKU tersebut dapat dilihat pada data yang tersaji sebagai berikut:

Kode SS/IKU	SasaranStrategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
Stakeholder Perspective				120
1.	Pengelolaan Keuangan BLU yang Inklusif dan Produktif			120
1a – CP	Indeks peningkatan efisiensi layanan BLU	3 (skala 5)	3,9	120
1b – N	Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU	3 (skala 5)	4,12	120
Customer Perspective				113,48
2.	Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif			113,48
2a – N	Indeks Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan	100%	104,68%	104,68
2b – N	Tingkat Perkembangan Pendapatan BLU	100	119,97	119,97
Internal Process Perspective				115,50
3.	Formulasi Kebijakan Perbendaharaan yang Kredibel dan Akuntabel			115,23
3a – CP	Indeks Kinerja Reformasi Hukum	95,5	116,25	120
3b – N	Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan	80	88,36	110,45
4.	Pengelolaan Tugas Khusus (Special Mission) yang Efektif			111,28
4a – CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	92%	100%	108,70
4b – N	Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating	100	113,85	113,85
5.	Komunikasi Publik dan Sinergi Antar-Organisasi yang Kolaboratif			120
5a – N	Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan	4 (skala 5)	5	120
5b – N	Indeks Kualitas Penugasan BLU, asistensi BLUD dan UMKM	3,5 (skala 5)	4,92	120
Learning and Growth Perspective				114,68
6.	Pengelolaan Organisasi dan Pengendalian Internal yang Optimal			114,05
6a – N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100	114,05	114,05

7.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel			120
7a – CP	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu	100	99,64	120
8.	Pengelolaan IT yang Andal dan Data yang Berkualitas			110
8a – CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100	120	120
8b – N	Indeks Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU	3	3	100
NILAI KERJA ORGANISASI			116,25	

Tabel 9 Perhitungan Detail Nilai Kinerja Organisasi

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, realisasi keseluruhan IKU Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum telah mencapai target yang telah ditentukan. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis disajikan pada penjelasan di bawah ini:

1. Sasaran Strategis (SS):

Pengelolaan Keuangan BLU yang Inklusif dan Produktif

Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan BLU yang Inklusif dan Produktif diarahkan pada penerapan pengelolaan keuangan BLU yang semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Penguatan kinerja keuangan tersebut menjadi fondasi untuk mendorong peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, sehingga layanan yang diberikan tidak hanya lebih produktif, tetapi juga inklusif dan memberikan manfaat yang lebih luas. Dengan pengelolaan keuangan yang optimal, BLU diharapkan mampu menjalankan mandat khususnya secara berkelanjutan dan berdampak nyata bagi publik.

SS 1 : Pengelolaan Keuangan BLU yang Inklusif dan Produktif					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
1.	Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU	3	3,9	120	120
2.	Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU	3	4,12	120	120

Tabel 10 Sasaran Strategis 1

- Indikator Kinerja Utama (IKU) 1:

1a-CP Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU

Pertumbuhan Layanan Terpilih adalah Indikator yang mengukur tingkat peningkatan jumlah atau kualitas layanan utama yang disediakan oleh Badan Layanan Umum (BLU) dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini mencerminkan sejauh mana BLU mampu meningkatkan

aksesibilitas, kuantitas, atau kualitas layanan utama yang menjadi prioritas dalam mencapai tujuan strategisnya.

Rasio Efisiensi Layanan BLU adalah indikator yang mengukur tingkat efisiensi penggunaan belanja operasional BLU dalam memberikan layanan terpilih. Indikator ini menggambarkan seberapa besar biaya operasional yang dikeluarkan BLU untuk setiap unit layanan terpilih yang disediakan, dengan tujuan memastikan alokasi sumber daya dilakukan secara efektif dan efisien.

IKU Peningkatan Efisiensi Layanan BLU memiliki tujuan untuk mengukur peningkatan kinerja layanan BLU dan efisiensi belanja dalam melaksanakan layanan.

IKU ini pada tahun 2025 merupakan IKU *Cascading Peta*, dengan polarisasi: maximize, tingkat kendali: low, validitas: proxy, dan jenis konsolidasi periode *take last known value*, dan periode pelaporan triwulanan. Pada tahun 2025 IKU ini memiliki target tahunan sebesar 3 dengan realisasi sebesar 3,9, sehingga memiliki indeks capaian sebesar 120.

K-One	1. Pengelolaan Keuangan BLU yang Inklusif dan Produktif							
	1a – CP Indeks peningkatan efisiensi layanan BLU							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	Max/ TLKV
Realisasi	4,6	3,9	3,9	4,6	4,6	3,9	3,9	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 11 Realisasi Capaian IKU 1a-CP

Isu utama:

- Terjadi penurunan pada growth layanan BLU rumpun Pengelola Dana. Growth layanan BLU Rumpun pengelola dana paling kecil dibandingkan BLU Kawasan dan Barjas lainnya. Penurunan Growth Layanan pada BLU Pengelola dana berasal dari PIP, LPDB dan LPMUKP. Pada LPDB KUMKM terjadi penundaan penyaluran Dagulir pada Semester I karena sesuai arahan Pembina Teknis (Menteri Koperasi) untuk fokus pada KDMP. Pada PIP terjadi penurunan jumlah end user yang disebabkan karena penyalur belum melakukan penginputan pada SIKP. Pada LPMUKP penurunan terjadi karena dana kelolaan pada BA 999.03 pada awal tahun

2025 hanya tersedia sebesar Rp60 miliar sehingga dengan pengembalian dana di 2025 hanya mampu menyalurkan dana sebesar Rp131 miliar

- Penurunan growth layanan rumpun kawasan berasal dari PPK GBK yang jumlah even masih didominasi even lari, sedangkan even musik masih tidak sebanyak tahun lalu, dan BPO Borobudur yang mengalami penurunan peserta even lari.
- Pada Rumpun Kesehatan, terdapat kenaikan belanja operasional tahun 2025 sebesar 1,40% yoy. Kontributor utama kenaikan belanja operasional tahun 2025 bersumber dari peningkatan belanja pegawai pada Kementerian Kesehatan, yaitu terdapat peningkatan pegawai PPPK sebanyak 1.194 orang pada tahun 2025. Selain itu, terdapat penyesuaian layanan rawat inap rumah sakit sehubungan dengan pemberlakuan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)
- Pada rumpun pendidikan, secara garis besar belanja operasional mengalami peningkatan. Peningkatan belanja operasional paling besar terjadi pada BLU lingkup Kemendikisaintek yaitu mencapai 9%. Peningkatan belanja operasional pada Kemendikisaintek tidak diimbangi dengan peningkatan output layanan yang tinggi, sehingga menghasilkan growth efisiensi layanan yang kecil dibandingkan K/L lain seperti Kemenag, Kemenhub, Kemenkes. Bahkan pada layanan jumlah mahasiswa aktif perbandingan belanja operasional dan output layanan semakin meningkat dibanding tahun 2024 yang artinya semakin tidak efisien.

Implikasi:

- Penurunan growth layanan pada BLU Rumpun Pengelola Dana dan kawasan berpengaruh pada Nilai Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU Rumpun Pengelola Dana dan Kawasan yang lebih kecil dibanding BLU Barang/Jasa lainnya.
- Growth efisiensi pada BLU lingkup kemendikisaintek memiliki presentasi lebih kecil dibandingkan dengan BLU pada K/L lain karena peningkatan output layanan tidak setinggi peningkatan belanja operasional

Akar masalah:

- Arahan dari Menteri Koperasi LPDB terkait pengajuan pinjaman yang terpusat pada Koperasi Desa/Merah Putih
- Menipisnya saldo pada LPMUKP
- Kurang tertib dalam penginputan data end user pada SIKP

- Peningkatan belanja operasional BLU Kemendiktisaintek tidak diimbangi dengan peningkatan output layanan

Tindakan *extra-effort* yang telah dilaksanakan:

- Koordinasi dengan BLU terkait output layanan yang dihasilkan pada Triwulan IV 2025
- Melakukan evaluasi pada BLU rumpun pendidikan saat desk KPI agar BLU dapat lebih efisien terutama dalam belanja operasional.
- Melakukan evaluasi pada BLU rumpun Pengelola Dana dan Kawasan agar lebih efisien dalam belanja operasional dan memperhatikan growth layanan jumlah end user dan even agar dapat meningkat.
- Pembinaan kepada BLU agar dapat memaksimalkan potensi asetnya dalam rangka peningkatan layanan utama.
- Melakukan evaluasi terhadap seluruh BLU pendidikan pada aspek rasio dosen mahasiswa, jika rasio masih rendah maka bisa dimungkinkan untuk meningkatkan penerimaan jumlah mahasiswa baru.

Formula:

= (Indeks Rasio Efisiensi Layanan * bobot 80%) + (Indeks Rasio Pertumbuhan Layanan * bobot 20%)

Komponen	% Growth	Indeks	Bobot (%)	Nilai x Bobot
Growth Layanan	8,17%	3,50	20	0,7
Growth Efisiensi	-7,57%	4,00	80	3,2
INDEKS GABUNGAN				3,9
NILAI CAPAIAN				120

Tabel 12 Perhitungan IKU 1a-CP

Perbandingan IKU

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2025 sehingga tidak ada data perbandingan antar tahun. Berdasarkan kinerja tahunan didapatkan perbandingan target dan realisasi pada renja sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renja		Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	-	-	3 (skala 5)	3,9

Tabel 13 Perbandingan realisasi IKU 1a-CP selama 5 tahun terakhir

Efisiensi Sumber Daya

Sumber daya yang digunakan cukup efisien karena kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian IKU ini bersamaan dengan kegiatan tugas pokok dan fungsi Direktorat PPKBLU seperti monitoring dan evaluasi BLU. Rapat dan Koordinasi yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait juga dilakukan seefektif dan seefisien mungkin dengan menggunakan sarana dan media komunikasi *daring* tercepat.

GEDSI

Penerapan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) pada IKU Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU diwujudkan melalui pengukuran growth layanan dan efisiensi belanja operasional yang tidak hanya berorientasi pada capaian kuantitatif, tetapi juga memastikan akses layanan yang setara bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan di seluruh rumpun BLU (pengelola dana, kawasan, kesehatan, dan pendidikan). Pengendalian biaya operasional diarahkan agar tidak mengurangi kualitas dan keterjangkauan layanan publik, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan yang berdampak langsung pada kelompok rentan.

Selain itu, evaluasi kinerja secara triwulanan dan koordinasi lintas unit mendorong tata kelola yang transparan dan partisipatif, sehingga seluruh pemangku kepentingan memiliki ruang kontrol dan masukan yang setara. Dengan demikian, peningkatan efisiensi yang tercermin dalam indeks capaian tidak hanya memperkuat kinerja organisasi, tetapi juga memastikan manfaat layanan BLU dirasakan secara lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Rencana Aksi

Pada tahun 2026, terdapat penyesuaian komponen perhitungan dibandingkan dengan tahun 2025, sehingga rencana aksi atas IKU ini akan disusun setelah finalisasi manual IKU ditetapkan.

- Indikator Kinerja Utama (IKU) 2:

1b-N Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU

Performansi Kinerja Keuangan BLU yang baik dapat memastikan efisiensi, keberlanjutan, dan transparansi keuangan untuk mendukung layanan publik yang berkualitas, dengan menjaga EBITDA positif, optimalisasi pendapatan, investasi strategis, serta akuntabilitas melalui laporan keuangan yang sesuai standar dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU diukur melalui aspek Akurasi proyeksi pendapatan, aspek Rasio Efisiensi Belanja Operasional atau rasio POBO, dan aspek Growth EBITDA.

Tujuan IKU ini untuk mengukur performa kinerja keuangan BLU dengan 3 indikator.

IKU ini merupakan IKU *Non-Cascading*, dengan memiliki polarisasi: *maximize*, tingkat kendali: *low*, tingkat validitas: *proxy*, jenis konsolidasi periode: *take last known value*. Pada tahun 2025 memiliki target yang ditentukan sebesar indeks 3 (skala 5) dan terealisasi sebesar indeks 4,2, sehingga memiliki capaian sebesar 120. Ketercapaian IKU ini dikarenakan tindakan bimbingan intensif serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi BLU bekerja sama dengan Kanwil DJPb.

K-Two	1. Pengelolaan Keuangan BLU yang Inklusif dan Produktif							
	1b-N Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	Max/ TLKV
Realisasi	3.98	4.22	4.22	4.09	4.09	4,12	4,12	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 14 Realisasi Capaian IKU 1b-N

Isu utama:

Akurasi proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja telah melampaui target, namun masih diperlukan penguatan standardisasi metode proyeksi agar capaian tersebut konsisten dan merata diseluruh BLU.

Implikasi:

Akurasi pengesahan yang tinggi mendukung pengendalian anggaran dan mengurangi deviasi antara rencana dan realisasi.

Tindakan *extra-effort* yang telah dilaksanakan:

- Melakukan sosialisasi kepada BLU terkait akurasi proyeksi pendapatan dan perhitungan EBITDA karena kedua komponen tersebut merupakan perhitungan baru di tahun 2025.
- Melakukan reminder setiap awal bulan mengenai penyampaian proyeksi dan pengesahan pendapatan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi kepada BLU secara *on desk* maupun *onsite*.

Formula:

1. Akurasi Proyeksi Pendapatan (bobot 65%)

$$\Sigma = 40\% (\text{Rata - rata Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian} + 60\% (\text{Rata - rata Indeks Akurasi Proyeksi Pengesahan Pendapatan}$$

Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian:

Rincian Indeks	Ketepatan Waktu Penyampaian
----------------	-----------------------------

Indeks 5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU s.d tanggal 3 bulan berkenaan
Indeks 4,5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU s.d tanggal 4 bulan berkenaan
Indeks 4	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU s.d tanggal 5 bulan berkenaan
Indeks 3,5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU s.d tanggal 6 bulan berkenaan
Indeks 3	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU s.d tanggal 7 bulan berkenaan
Indeks 2,5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU s.d tanggal 8 bulan berkenaan
Indeks 2	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU s.d tanggal 9 bulan berkenaan
Indeks 1,5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU s.d tanggal 10 bulan berkenaan
Indeks 1	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU s.d tanggal 11 bulan berkenaan

Tabel 15 Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian

Indeks Akurasi Proyeksi Pengesahan:

Rincian Indeks	Akurasi Proyeksi Pengesahan
Indeks 5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 0% s.d 3%
Indeks 4,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 3,01% s.d 5%
Indeks 4	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 5,01% s.d 7%
Indeks 3,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 7,01% s.d 10%
Indeks 3	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 10,01% s.d 12,5%
Indeks 2,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 12,51% s.d 15%
Indeks 2	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 15,01% s.d 17,5%
Indeks 1,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 17,51% s.d 20%
Indeks 1	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan lebih dari 20%

Tabel 16 Indeks Akurasi Proyeksi Pengesahan

2. Rasio POBO (bobot 30%)

Hasil perhitungan dikonversi melalui indeksasi sebagai berikut:

Rincian Indeks	Rasio POBO
Indeks 5	>95%
Indeks 4,5	91%-95%
Indeks 4	86%-90%
Indeks 3,5	81%-85%
Indeks 3	75%-80%
Indeks 2,5	71%-75%

Indeks 2	66%-70%
Indeks 1,5	61%-65%
Indeks 1	<60%

Tabel 17 Rasio POBO

3. Growth EBITDA (bobot 5%)

$$\% \text{Growth} = \frac{(\sum \text{EBITDA BLU } Y) - (\sum \text{EBITDA } Y-1)}{(\sum \text{EBITDA } Y-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

perbandingan menyesuaikan periode dengan perhitungan data secara kumulatif

Hasil perhitungan dikonversi melalui indeksasi sebagai berikut:

Rincian Indeks	Growth EBITDA
Indeks 5	>120%
Indeks 4,5	111% - 120%
Indeks 4	101% - 110%
Indeks 3,5	91% - 100%
Indeks 3	81% - 90%
Indeks 2,5	71% - 80%
Indeks 2	61% - 70%
Indeks 1,5	51% - 60%
Indeks 1	<50%

Tabel 18 Growth EBITDA

Keberhasilan capaian ini tidak luput dari intensitas koordinasi yang dilakukan oleh pembina keuangan masing-masing BLU untuk dapat meningkatkan tata kelola BLU. Koordinasi dilakukan dengan daring maupun luring namun tetap memperhatikan aspek efisiensi. Kegiatan secara luring hanya dilakukan jika tidak memungkinkan dilakukan secara daring dan hanya kepada BLU yang perlu pendampingan khusus. Kebanyakan dari BLU sudah dapat berkonsultasi dan menindaklanjuti arahan pembina melalui jalur komunikasi daring sehingga biaya yang dikeluarkan sangat efisien sedangkan teknologi informasi yang dimanfaatkan sangat efektif.

Perbandingan IKU

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2025 sehingga tidak ada data perbandingan antar tahun. Berdasarkan kinerja tahunan didapatkan perbandingan target dan realisasi pada renja sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renja		Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-

2024	-	-	-	-
2025	-	-	3 (skala 5)	4,12

Tabel 19 Perbandingan realisasi IKU 1b-N selama 5 tahun terakhir

Efisiensi Sumber Daya

Sumber daya yang digunakan cukup efisien karena kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian IKU ini bersamaan dengan kegiatan tugas pokok dan fungsi Direktorat PPKBLU seperti monitoring dan evaluasi BLU. Rapat dan Koordinasi yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait juga dilakukan seefektif dan seefisien mungkin dengan menggunakan sarana dan media komunikasi daring tercepat.

GEDSI

Penerapan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) pada IKU Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU dilaksanakan melalui penguatan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan guna menjamin tersedianya layanan publik yang berkualitas dan inklusif. Pengukuran kinerja melalui aspek akurasi proyeksi pendapatan, rasio efisiensi belanja operasional (POBO), dan growth EBITDA tidak semata-mata berorientasi pada capaian finansial, tetapi juga memastikan keberlanjutan pendanaan layanan agar tetap dapat diakses secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan. Pelaksanaan bimbingan intensif serta monitoring dan evaluasi bersama Kanwil DJPb mencerminkan komitmen terhadap penguatan kapasitas pengelolaan keuangan yang partisipatif dan berkeadilan. Dengan capaian indeks yang melampaui target, performansi kinerja keuangan BLU diharapkan semakin mampu mendukung penyediaan layanan publik yang responsif, inklusif, dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat.

Rencana Aksi

1. Melakukan evaluasi atas hasil capaian di tahun 2025.
2. Melakukan asistensi khusus bagi BLU dengan capaian di bawah target guna mendorong pemerataan peningkatan kinerja.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara on desk maupun on site.
4. Memastikan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

2. Sasaran Strategis (SS):

Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif

Pencapaian Tugas Khusus (Special Mission) yang Efektif menegaskan komitmen BLU dalam menjalankan mandat khusus yang diberikan pemerintah secara optimal dan

berdampak nyata. Melalui penerapan pengelolaan keuangan yang semakin baik dan berbasis kinerja, BLU didorong untuk memperkuat kesehatan dan performa keuangannya sebagai fondasi peningkatan kualitas layanan. Dengan demikian, pelaksanaan tugas khusus tidak hanya tercapai secara efektif, tetapi juga mampu menghadirkan layanan yang lebih inklusif, produktif, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

SS 2 : Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
1.	Indeks Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan	100	104,68	104,68	104,68
2.	Tingkat Perkembangan Pendapatan BLU	100	119,17	119,17	119,17

Tabel 20 Sasaran Strategis 2

- Indikator Kinerja Utama (IKU) 1:

2a-N Indeks Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan dan stakeholders. Dalam menyelenggarakan survei, untuk menjamin independensi, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan lembaga/tim peneliti independen penyelenggara survei untuk dapat memperoleh nilai atau angka berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK) serta penyelesaian rekomendasi perbaikan pada masing-masing Unit Eselon I/LNSW berdasarkan survei yang dilakukan pada kota-kota yang ditunjuk untuk dapat menggambarkan pelayanan Kemenkeu secara keseluruhan.

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU bekerja sama dengan Universitas Negeri Jakarta sebagai pihak yang melakukan survey kepada para pengguna layanan BLU. Sebelum pelaksanaan survey, Tim UNJ melakukan serangkaian koordinasi dengan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU dan perwakilan dari BLU untuk menentukan kuesioner yang akan dibuat dan merumuskan ruang lingkupnya. Pelaksanaan survey dilakukan pada periode semester II tahun 2025 dan laporan hasil selesai pada akhir tahun 2025.

IKU ini merupakan IKU *Non-cascading*, dengan polarisasi: *maximize*, tingkat kendali: *moderate*, validitas: *proxy*, dan jenis konsolidasi periode *take last known*. Pada tahun 2025 IKU ini memiliki target tahunan yang telah ditentukan sebesar 100% dan realisasi sebesar 104,68% sehingga memiliki indeks capaian

sebesar 104,68% pencapaian target ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat selaku responden utama terhadap layanan BLU yang mereka terima.

K-Two	2. Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif							
	2a – N Indeks Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Max/ TLKV
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	104,68%	104,68%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	104,68%	104,68%	

Tabel 21 Realisasi Capaian IKU

Isu utama:

IKU ini bersifat mandatory dan capaiannya tanggung renteng dengan Unit Eselon II lain. Triwulan IV ini, capaian telah melampaui target namun tetap perlu melakukan peningkatan layanan

Implikasi:

Capaian Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan yang melampaui target mencerminkan bahwa kualitas layanan DJPb telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi ekspektasi pengguna layanan dan pemangku kepentingan;

Tindakan *extra effort* yang telah dilaksanakan:

- Menyelesaikan setiap permasalahan pada Hai DJPb sebelum batas waktu
- Memperkuat sinergi dan koordinasi lintas unit kerja DJPb dan pihak eksternal.
- Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM melalui pelatihan maupun diklat
- Melakukan evaluasi secara berkala atas hasil kepuasan pengguna layanan

Formula:

$$= (Komponen I \times 80\%) + (Komponen II \times 20\%)$$

Komponen I (80%):

- E-SKPL (90%)
- SKPK (10%)

Komponen II (20%):

- Hai DJPb

Capaian Direktorat PPK BLU sebagaimana hasil survey adalah:

Ket	Komponen I (80%)		Komponen II (20%)
	E-SKPL (90%)	SKPK (10%)	Hai DJPb
Target	4.67	4	3,2
Realisasi	4,69	4	3,9
Capaian Sub Komponen	100,43	100	121,88
Capaian Komponen	100,39		24,38

Tabel 22 Capaian Kepuasan Pengguna Layanan

Data realisasi capaian pada komponen I disediakan oleh Biro Umum Sekjen selaku pengusul dan pemberi *mandatory* IKU ini. Hasil capaian Komponen I berdasarkan ND Sekretaris Ditjen Perbendaharaan nomor ND-118/PB.1/2026 hal Koordinasi terkait Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan Pemangku Kepentingan (SKPLPK) lingkup Kantor Pusat dan BLU DJPb Periode Triwulan IV Tahun 2025.

Perbandingan IKU

Tidak ada target IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan dalam RPJMN, sehingga realisasi dan target RPJMN tidak dapat diperbandingkan.

IKU ini merupakan IKU Kemenkeu Wide-One yang dicascade kepada enam direktorat. Perhitungan survei kepuasan pengguna layanan dan survei kepuasan kepuasan pemangku kepentingan secara terpusat dilakukan oleh Setjen Kemenkeu. Adapun komponen pengukuran dalam IKU ini meliputi survei kepuasan pengguna layanan, survei pemangku kepentingan, serta layanan Hai DJPb. Dengan adanya perbedaan karakteristik layanan dan objek survei pada masing-masing unit, realisasi IKU ini tidak dapat diperbandingkan secara langsung dengan organisasi sejenis.

Efisiensi Sumber Daya

Upaya peningkatan capaian IKU Indeks Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan dilaksanakan dengan mengedepankan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara optimal, baik dari aspek anggaran, waktu, maupun kapasitas sumber daya manusia. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU mengoptimalkan koordinasi pelaksanaan survei melalui perencanaan yang terintegrasi serta pemanfaatan media komunikasi dan pengumpulan data secara digital untuk memperluas jangkauan responden, mempercepat proses pengolahan data, dan menekan biaya operasional. Pada aspek sumber daya manusia, peningkatan kualitas layanan ditempuh melalui penguatan kapasitas pegawai dalam

pengelolaan pengaduan, komunikasi layanan, dan pemanfaatan hasil survei sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, peningkatan tingkat kepuasan pengguna layanan dapat dicapai tanpa penambahan sumber daya yang signifikan, sehingga tetap sejalan dengan prinsip value for money dan tata kelola yang efisien.

GEDSI

Penerapan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) pada IKU ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan yang menjamin keterwakilan responden secara inklusif, mencakup perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya sebagai pengguna layanan BLU. Selain itu, dalam upaya penerapan juga menyediakan prasarana pendukung seperti toilet ramah disabilitas, ruang laktasi, serta berbagai sarana pendukung lainnya yang menunjang kenyamanan dan aksesibilitas. Pelaksanaan survei pada berbagai pengguna layanan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang objektif dan menyeluruh atas kualitas layanan yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Rencana Aksi

1. Menyusun rencana aksi perbaikan atas setiap rekomendasi hasil survei.
 2. Memperluas jangkauan responden secara proporsional dan representatif guna memastikan hasil survei mencerminkan persepsi seluruh pengguna layanan.
 3. Meningkatkan pengembangan kompetensi pegawai dalam aspek komunikasi layanan, manajemen pengaduan, dan service excellence.
 4. Melakukan evaluasi hasil survei secara triwulanan guna memastikan target tahunan dapat tercapai dan kualitas layanan terus meningkat.
- Indikator Kinerja Utama (IKU) 2:

2b-N Tingkat Perkembangan Pendapatan BLU

Indikator kinerja ini mengukur pencapaian dan perkembangan pendapatan BLU yang diukur melalui jumlah PNBPN yang diterima serta pertumbuhan PNBPN dibandingkan periode sebelumnya. Dalam IKU ini memperhitungkan

IKU ini merupakan IKU non-cascading, memiliki polarisasi: *maximize*, tingkat kendali: *low*, tingkat validitas: *proxy*, jenis konsolidasi periode: *take last known value*, dan periode pelaporan triwulanan. Tahun 2025 memiliki target yang ditentukan sebesar 100 dan terealisasi sebesar 119,97 sehingga memiliki capaian sebesar 119,97%.

K-Two	2. Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif							
	2b – N Tingkat Perkembangan Pendapatan BLU							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLKV
Realisasi	109.64	116.75	116.75	118.33	118.33	119,97	119,97	
Capaian	109.64	116.75	116.75	118.33	118.33	119,97	119,97	

Tabel 23 Realisasi Capaian IKU 2b-N

Isu utama:

- Realisasi PNBPN BLU Rumpun Kesehatan telah melampaui target dan menunjukkan pertumbuhan positif, namun keberlanjutan pertumbuhan tersebut perlu dijaga melalui penguatan perencanaan dan optimalisasi potensi penerimaan secara merata di seluruh BLU.
- Pada growth PNBPN Rumpun kawasan terjadi pertumbuhan minus dikarenakan pada BP Batam terjadi penurunan karena ada pendapatan dari BU SPAM di April 2024 sebesar Rp328 miliar yang tidak terulang lagi di 2025.

Implikasi:

- Capaian realisasi dan pertumbuhan PNBPN yang tinggi meningkatkan kapasitas pendanaan layanan dan memperkuat kemandirian keuangan BLU.

Tindakan *extra effort* yang telah dilaksanakan:

- Penandatanganan Kontrak Kinerja BLU dan Direktur Jenderal Perbendaharaan telah dilaksanakan pada bulan Januari 2025.
- Melakukan pembinaan terhadap BLU melalui reviu penetapan target PNBPN berbasis potensi layanan dan replikasi praktik terbaik BLU dengan kinerja tinggi.
- Mendorong pelaksanaan optimalisasi kas melalui investasi jangka pendek guna meningkatkan PNBPN BLU

Formula:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Indeks Cap Sub IKU 1} + \text{Indeks Cap Sub IKU 2}}{2}$$

SubIKU 1 (Target 100%)

Mengukur tingkat pencapaian PNBPN BLU dibandingkan dengan target triwulanan

$$= \frac{\% \text{ Realisasi}}{\% \text{ Target}} \times 100\%$$

SubIKU 2 (Target Indeks 3: -2,5% s.d. 0,5)

$$= \frac{\text{Avg Indeks}}{\text{Target Indeks}} \times 100\%$$

Sehingga, capaian kinerja jika dimasukkan ke dalam formula adalah sebagai berikut:

SubIKU 1

$$= \frac{123,27\%}{100\%} \times 100\% = 123,27$$

SubIKU 2

$$= \frac{5}{3} \times 100\% = 116,67$$

$$\text{Capaian} = \frac{123,27 + 116,67}{2} = 123,27$$

Perbandingan IKU

IKU ini merupakan IKU baru karena perbedaan formula pada tahun sebelumnya, sehingga target/realisasi IKU ini tidak dapat dibandingkan.

Tahun	Target Renja		Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	-	-	100%	119,97%

Tabel 24 Perbandingan realisasi IKU 2b-N selama 5 tahun terakhir

Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi sumber daya dalam pencapaian IKU pertumbuhan pendapatan BLU diwujudkan melalui integrasi kegiatan pembinaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PPK BLU tanpa memerlukan tambahan anggaran yang signifikan. Penandatanganan Kontrak Kinerja pada awal tahun, reviu penetapan target PNPB berbasis potensi layanan, serta replikasi praktik terbaik BLU berkinerja tinggi dilakukan dalam kerangka monitoring dan evaluasi rutin.

GEDSI

Penerapan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dalam IKU pertumbuhan pendapatan BLU memastikan bahwa peningkatan PNPB dan optimalisasi kas tetap mendukung penyediaan layanan yang inklusif dan setara. Strategi peningkatan pendapatan diarahkan untuk memperkuat

keberlanjutan layanan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan

Rencana Aksi

1. Melakukan reviu dan penetapan target PNBPU BLU Tahun 2026 berbasis analisis potensi dan tren historis.
2. Melaksanakan pemantauan realisasi PNBPU BLU secara triwulanan.
3. Mendorong pemanfaatan idle cash guna meningkatkan PNBPU BLU.

3. Sasaran Strategis (SS):

Formulasi Kebijakan yang Implementatif dan Aplikatif

Sasaran Strategis Formulasi Kebijakan yang Implementatif dan Aplikatif diarahkan pada penyusunan kebijakan pengelolaan perbendaharaan yang kredibel, sistematis, efisien, efektif, dan akuntabel sebagai dasar pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara. Kebijakan yang dirumuskan tidak hanya kuat secara konseptual, tetapi juga operasional dan mudah diterapkan oleh unit pelaksana. Untuk memastikan implementasi berjalan optimal, kebijakan tersebut disertai dengan edukasi dan komunikasi yang komprehensif kepada para pemangku kepentingan, sehingga dapat dipahami, dilaksanakan secara konsisten, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.

SS 3 : Formulasi Kebijakan yang Implementatif dan Aplikatif					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
1.	Indeks Kinerja Reformasi Hukum	95,5	116,25	120	120
2.	Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan	80	88,36	110,45	110,45

Tabel 25 Sasaran Strategis 3

- Indikator Kinerja Utama (IKU) 1:

3a-CP Indeks Kinerja Reformasi Hukum

Indeks Kinerja Reformasi Hukum (IKRH) mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional di lingkungan Kementerian Keuangan yang penilaiannya dilaksanakan oleh Kemenkum, serta optimalisasi penggunaan modul Digitalisasi Produk Hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik guna mendukung reformasi bidang hukum.

Cascade ke Unit Eselon I, Unit Eselon II koordinator hukum pada Unit Eselon I, dan Unit Eselon II pengusul/pemrakarsa regulasi prioritas Kemenkeu.

Peraturan Perundang-Undangan prioritas merupakan RUU Prakarsa Kementerian Keuangan, RPP dan/atau RPerpres Usulan Baru/Luncuran menjadi prioritas Kementerian Keuangan dan RPMK dan/atau RKMK Kebijakan Tahun 2025.

Tujuan IKU ini adalah untuk mengetahui progress penyusunan kebijakan/regulasi dan kepatuhan Kemenkeu terhadap regulasi nasional, mengukur akurasi angka makro fiskal KEM PPKF, serta mengukur efektivitas rekomendasi intelijen keuangan. IKU ini merupakan IKU *Cascading Peta*, dengan memiliki polarisasi: *maximize*, tingkat kendali: *moderate*, tingkat validitas: *proxy*, jenis konsolidasi periode: *take last known value*. Pada tahun 2025 memiliki target yang ditentukan sebesar 95,5 dan terealisasi sebesar 116,25. sehingga memiliki indeks capaian sebesar 120.

K-Wide One	3. Formulasi Kebijakan yang Implementatif dan Aplikatif							
	3a – CP Indeks Kinerja Reformasi Hukum							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ KP
Target	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95.5	Max/T LK
Realisasi	120	105,67	105,67	115,66	115,66	116,25	116,25	
Capaian	120	110,65	110,65	120	120	120	120	

Tabel 26 Realisasi Capaian IKU 3a-CP

Isu utama:

Penetapan peraturan dan regulasi yang dirancang melibatkan banyak pihak. tidak hanya internal Direktorat PPKBLU.

Implikasi:

Keterlibatan banyak pihak dalam proses penetapan regulasi mendorong kualitas peraturan yang lebih komprehensif dan akuntabel, namun memerlukan pengelolaan koordinasi yang efektif agar penetapan regulasi tetap tepat waktu.

Akar Masalah:

Perlu koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait karena penetapan peraturan bergantung pada banyak pihak bahkan dari Kementerian/Lembaga di luar Kementerian Keuangan. Ditambah dengan adanya penggunaan aplikasi baru untuk perumusan peraturan.

Tindakan *extra effort* yang telah dilaksanakan:

- Telah menyelesaikan legal drafting dan harmonisasi beberapa peraturan dalam bentuk KMK maupun PMK.
- Mengawasi setiap proses penetapan regulasi pada Direktorat PPK BLU.

Formula:

$(\text{Capaian komponen 1} \times (\text{bobot } 50\%)) + (\text{Capaian komponen 2} \times (\text{bobot } 25\%)) + (\text{Capaian komponen 3} \times (\text{bobot } 25\%))$

Perhitungan pada capaian IKU ini disampaikan melalui Nota Dinas dari Direktorat SP selaku koordinator IKU berdasarkan data dari Biro Hukum, Sekjen Kemenkeu.

Perbandingan IKU

IKU ini merupakan IKU Cascading Kemenkeu-Wide sehingga Unit Eselon II di kantor pusat DJPb memiliki IKU ini. Berdasarkan kinerja tahunan didapatkan perbandingan target dan realisasi pada renja sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renja		Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	-	-	95,6	116,25

Tabel 27 Perbandingan realisasi IKU 3a-CP selama 5 tahun terakhir

Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi sumber daya dalam pencapaian IKU Indeks Kinerja Reformasi Hukum dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran SDM internal melalui koordinasi intensif antara unit eselon I, unit eselon II koordinator hukum, tanpa penambahan sumber daya yang signifikan. Proses identifikasi, pemetaan, reregulasi, dan deregulasi regulasi dilakukan secara terintegrasi dengan tugas dan fungsi masing-masing unit, serta didukung oleh pemanfaatan modul Digitalisasi Produk Hukum untuk pembentukan peraturan secara elektronik. Untuk menekan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi waktu, pelaksanaan koordinasi dan pembahasan regulasi memanfaatkan sarana rapat daring maupun hybrid. Pendekatan ini memastikan proses reformasi hukum tetap berjalan efektif, kredibel, dan tepat waktu.

GEDSI

Penerapan GEDSI dalam IKU Indeks Kinerja Reformasi Hukum difokuskan pada penyusunan regulasi yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga responsif terhadap keberagaman kebutuhan masyarakat. Proses penyusunan dan evaluasi regulasi dilakukan melalui koordinasi dan konsultasi yang mempertimbangkan keterwakilan berbagai kelompok, termasuk perempuan dan kelompok rentan,

sehingga kebijakan yang dihasilkan bersifat adil dan non-diskriminatif. Secara internal, inklusivitas diperkuat melalui kerja kolaboratif lintas unit dan pemanfaatan sistem digital serta pola kerja hybrid yang memberikan kesempatan setara bagi seluruh pegawai untuk berkontribusi.

Rencana Aksi

1. Monitoring setiap proses penetapan regulasi dengan tetap berkoordinasi dengan pihak berwenang tidak hanya secara formal namun juga secara informal menggunakan sarana komunikasi tercepat.
2. Menyelesaikan proses rancangan peraturan yang belum terselesaikan di tahun 2025.

➤ Indikator Kinerja Utama (IKU) 2:

3b-N Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan

Efektivitas peraturan perbendaharaan merupakan hasil uji dampak terhadap implementasi peraturan perbendaharaan yang dilakukan dengan Metode RIA serta hasil kuisioner. Indeks Uji Dampak PMK dengan Metode RIA (Regulatory Impact Assessment).

Metode RIA (Regulatory Impact Assessment) adalah metode yang digunakan untuk menilai pengaruh suatu peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi peraturan yang sedang berjalan atau yang sedang diusulkan. RIA merupakan metode yang sistematis untuk mengukur dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan. Metode ini juga digunakan untuk membantu pengambil keputusan dalam membuat kebijakan yang tepat dan efektif.

Tujuan IKU adalah untuk menjamin Peraturan perbendaharaan yang diimplementasikan efektif dan mendukung terwujudnya good governance di bidang pengelolaan keuangan negara. IKU ini merupakan IKU *Cascading Peta*, dengan memiliki polarisasi: *maximize*, tingkat kendali: *moderate*, tingkat validitas: *exact*, jenis konsolidasi periode: *take last known value*. Pada tahun 2025 memiliki target yang ditentukan sebesar 80 dan terealisasi sebesar 88,36 sehingga memiliki capaian sebesar 110,45.

Peraturan yang menjadi objek penilaian efektivitas pada Direktorat PPKBLU yaitu PER-11/PB/2021 tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola dan Kinerja (Tingkat Maturitas) Badan Layanan Umum. Hasil penilaian tindak lanjut telah disampaikan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan kepada setiap direktorat pemrakarsa aturan sebagaimana terdapat dalam nota dinas Direktur SP nomor ND-28/PB.7/2026. Hasil triwulan IV Direktorat PPKBLU mendapatkan nilai 88,36 sebagaimana telah disampaikan melalui nota dinas Direktur SP nomor ND-28/PB.7/2026.

K-Two	3. Formulasi Kebijakan yang Implementatif dan Aplikatif							
	3b-N Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	20	40	40	60	60	80	80	Max/ TLK
Realisasi	20	40.36	40.36	68.36	68.36	88,36	88,36	
Capaian	100	100.9	100.9	113.93	113.93	110,45	110,45	

Tabel 28 Realisasi Capaian IKU 3b-N

Isu utama:

Pengukuran dampak dengan metode RIA ini baru diterapkan untuk menjadi perhitungan IKU pada tahun ini.

Implikasi:

Perlu pemahaman terkait metode RIA agar hasil pengukuran kebijakan sesuai dengan yang diharapkan dan memiliki manfaat yang signifikan.

Akar masalah:

- Perhitungan IKU ini merupakan yang pertama dan menjadi tantangan tersendiri karena dihitung oleh pihak eksternal.
- Penyelesaian peraturan melibatkan beberapa unit.

Tindakan *extra effort* yang telah dilaksanakan:

- Melakukan survei kepada stakeholders atas implementasi PER-11/PB.2021 tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola dan Kinerja (Tingkat Maturitas) Badan Layanan Umum.
- Menindaklanjuti hasil rekomendasi atas penilaian peraturan dengan metode RIA.

Formula:

- Capaian TW I, dihitung berdasarkan waktu penyampaian Nota Dinas PMK & Perdirjen yang akan di Uji Dampak dari Direktorat Sistem Perbendaharaan kepada direktorat teknis
- Capaian TW II dihitung berdasarkan rekapitulasi hasil kuisioner oleh direktorat pemrakarsa regulasi kepada stakeholders
- Capaian TW III, dihitung berdasarkan pelaksanaan penilaian peraturan dengan Metode RIA oleh profesional/pihak eksternal
- Capaian TW 4 dihitung berdasarkan penyampaian nota dinas tentang kajian dan rencana tindak lanjut regulasi yang telah dilakukan uji dampak pada

tahun 2025 berdasarkan hasil kuisioner dan penilaian profesional pada triwulan II dan III

Perbandingan IKU

Unit serupa di kantor pusat memiliki IKU ini, karena termasuk ke dalam IKU mandatori. Perbandingan reasasi IKU diperoleh dari nota dinas Direktur Sistem Perbendaharaan nomor ND-28/PB.7/2026 tanggal 8 Januari 2026 hal Penyampaian Capaian IKU Tingkat Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan Triwulan IV Tahun 2025 dan Permintaan Usulan Peraturan sebagai Sumber Data IKU Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan Tahun 2026.

No	Direktorat Pemrakarsa	Peraturan	Menyampaikan Tindak Lanjut	Realisasi Tw IV	Realisasi Tw III	Realisasi s.d. Tw IV	Target s.d. Tw IV	Capaian	Status
1	Dit. PA	PER-9/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan	☑	20,00	70,34	90,34	80	112,93%	Tercapai
2	Dit. PKN	Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK No. 155 Tahun 2023 tentang Perencanaan Kas Pemerintah Pusat	☑	20,00	71,17	91,17	80	113,96%	Tercapai
3	Dit. SITP	Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 156 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI	☑	20,00	71,50	91,50	80	114,38%	Tercapai
4	Dit. PPKBLU	PER-11/PB/2021 tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola dan Kinerja (Tingkat Maturitas) Badan Layanan Umum	☑	20,00	68,36	88,36	80	110,45%	Tercapai
5	Dit. APK	PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga	☑	20,00	70,58	90,58	80	113,23%	Tercapai
6	Dit. SMI	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah	☑	20,00	70,11	90,11	80	112,64%	Tercapai
Rata-Rata D/Pb				20,00	70,34	90,34	80	112,93%	Tercapai

Tabel 29 Perbandingan Realisasi IKU 3b-N

Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi sumber daya dalam pencapaian ini dilakukan melalui integrasi pelaksanaan uji dampak regulasi dengan proses evaluasi kebijakan yang telah berjalan, tanpa memerlukan pembentukan mekanisme baru yang terpisah. Penerapan metode RIA dan penyebaran kuesioner dilaksanakan secara terencana dengan memanfaatkan data, forum koordinasi, dan sumber daya internal yang tersedia. Selain itu, penggunaan sarana digital dalam pengumpulan data dan pembahasan hasil evaluasi turut menekan biaya operasional dan waktu pelaksanaan.

GEDSI

Penerapan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) pada IKU Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan dilakukan dengan memastikan bahwa uji dampak regulasi melalui metode RIA turut mempertimbangkan aspek keadilan, aksesibilitas, dan potensi dampak kebijakan terhadap berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan. Proses pengumpulan data dan evaluasi dilakukan secara inklusif agar masukan yang diperoleh merepresentasikan perspektif yang beragam. Dengan demikian, peraturan perbendaharaan yang dihasilkan tidak hanya efektif secara

administratif, tetapi juga mendukung tata kelola keuangan negara yang adil dan responsif.

Rencana Aksi

Rencana aksi yang akan dilakukan yaitu menyampaikan usulan regulasi (setingkat PMK atau lebih tinggi) yang akan dilakukan penilaian oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan. Selain itu, menindaklanjuti rekomendasi hasil kuesioner dan penilaian dengan metode RIA.

4. Sasaran Strategis (SS):

Pengelolaan Tugas Khusus (Special Mission) Yang Efektif

Dalam menjalankan mandat khususnya, BLU perlu mengoptimalkan fleksibilitas yang dimiliki dengan tetap menjunjung prinsip efektivitas dan tepat guna. Pengelolaan sumber daya—baik keuangan, SDM, maupun aset—harus diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan layanan secara optimal dan terukur. Dengan demikian, fleksibilitas BLU tidak hanya menjadi keistimewaan administratif, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

SS 4 : Pengelolaan Tugas Khusus (Special Mission) Yang Efektif					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
1.	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	92	100	108,70	108,70
2.	Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating	100	113,85	113,85	113,85

Tabel 30 Sasaran Strategis 4

- Indikator Kinerja Utama (IKU) 1:

4a-CP Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN

LKPP disusun berdasarkan gabungan laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) yang merupakan pertanggungjawaban Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan seluruh Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL). LKPP unaudited (belum diaudit) merupakan LKPP yang disusun paling lambat pada akhir Maret sebelum disampaikan ke BPK untuk diperiksa.

Pengukuran penyelesaian tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi BPK adalah rekomendasi atas temuan BPK pada LKPP dan LKBUN berdasarkan LHP yang telah selesai ditindaklanjuti oleh Pemerintah sebagaimana action plan dengan timeframe yang ditetapkan dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

- a. rekomendasi yang sesuai merupakan rekomendasi yang dinyatakan sesuai tuntas oleh BPK dan tercantum dalam PTL LHP atau berita acara pembahasan antara BPK dan Kementerian Keuangan;
- b. rekomendasi yang diusulkan sesuai merupakan rekomendasi yang diusulkan sesuai pada forum pembahasan bersama DJPb, Unit Eselon I, BA BUN terkait dan Itjen.

Tujuan IKU adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

IKU ini merupakan IKU *cascading peta* dengan memiliki polarisasi: *maximize*, tingkat kendali: *moderate*, tingkat validitas: *proxy*, jenis konsolidasi periode *take last known value*.

K-Wide	4. Pengelolaan Tugas Khusus (Special Mission) yang Efektif							
	4a-CP Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%	Max/ TLK
Realisasi	62,5%	75%	75%	75%	75%	100%	100%	
Capaian	120	120	120	120	120	108,70	108,70	

Tabel 31 Realisasi Capaian IKU 4a-CP

Hasil capaian triwulan IV berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-10/PB/2026 hal Penyampaian Capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti Triwulan IV Tahun 2026 yaitu 100% dengan target tahunan sebesar 98,8%, sehingga memiliki capaian sebesar 101,21.

Isu utama:

Rekomendasi yang diberikan perlu diselesaikan melalui kerja sama lintas unit Eselon II bahkan lintas Eselon I dan terkadang membutuhkan waktu cukup lama.

Implikasi:

Perlu berkoordinasi dengan pihak terkait yang memiliki wewenang dalam penyelesaian rekomendasi serta perlu menyamakan persepsi dengan pihak BPK agar memiliki pemahaman yang sama terutama terkait dengan regulasi maupun kebijakan.

Akar masalah:

- Beberapa tindak lanjut atas rekomendasi BPK melibatkan unit-unit lain sering tersapat kesulitan dalam koordinasi.
- Pada beberapa hal tertentu, masih terdapat perbedaan persepsi terkait pengelolaan BLU dan regulasi yang terkait antara pihak BPK dengan Direktorat PPKBLU.

Tindakan *extra effort* yang telah dilaksanakan:

- Melakukan komunikasi secara intens dengan pihak lain yang terlibat dalam rekomendasi bersama.
- Melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan BPK kepada unit-unit lain yang terkait.
- Melakukan koordinasi dengan Direktorat APK untuk memastikan bahwa seluruh tindak lanjut dapat disepakati selesai oleh BPK.

Formula:

- Triwulan I s.d. Triwulan III = Komponen B
- Triwulan IV = (85% x komponen A) + (15% x komponen B)

$$\frac{\sum \text{rekomendasi yang ditindaklanjuti BLU}}{\sum \text{rekomendasi yang mencapai batas waktu}} \times 100\%$$

Komponen A : Dihasilkan atas Opini BPK atas LKPP dan LKBUN 2024

Nilai	Keterangan
0	Tidak Wajar (Adverse)
25	Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)
50	WDP dengan >12 permasalahan penyebab kualifikasi atau lebih
80	WDP dengan 10-12 permasalahan penyebab kualifikasi
85	WDP dengan 7-9 permasalahan penyebab kualifikasi
90	WDP dengan 4-6 permasalahan penyebab kualifikasi
95	WDP dengan 1-3 permasalahan penyebab kualifikasi
120	WTP

Tabel 32 Nilai Opini BPK

Komponen B : Dihasilkan atas Opini BPK atas LKPP dan LKBUN 2024

$$Tw \text{ I s.d III} = \frac{(\text{jumlah rekomendasi BPK atas LKPP dinyatakan sesuai bds LHPTL} + \text{yg diusulikan sesuai bds Hasil/risalah pembahasan})}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2025}} \times 50\% +$$

$$\frac{((\text{jumlah rekomendasi BPK atas LKBUN dinyatakan sesuai bds LHPTL} + \text{yg diusulikan sesuai bds Hasil/risalah pembahasan}))}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2025}} \times 50\%$$

$$Tw \text{ IV} = \frac{(\text{jumlah rekomendasi BPK atas LKPP dinyatakan sesuai bds LHPTL} + \text{yg diusulikan sesuai bds hasil/risalah pembahasan} + \text{diusulikan sesuai bds penyampaian progres atau dokumen dukung akhir tahun})}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2025} + \text{jumlah rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKPP tahun 2024}} \times 50\%$$

$$+ \frac{(\text{jumlah rekomendasi BPK atas LKBUN dinyatakan sesuai bds LHPTL} + \text{yg diusulikan sesuai bds hasil/risalah pembahasan} + \text{diusulikan sesuai bds penyampaian progres atau dokumen dukung akhir tahun})}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2025} + \text{jumlah rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKBUN tahun 2024}} \times 50\%$$

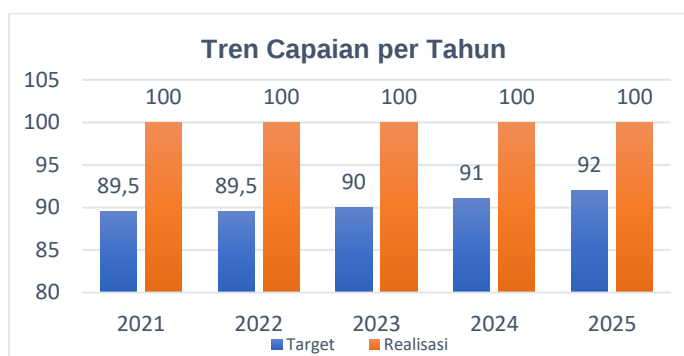
Perbandingan IKU

IKU ini dimiliki oleh beberapa unit serupa di kantor pusat, karena termasuk dalam IKU Cascading Kemenkeu-Wide. Berikut merupakan perbandingan realisasi IKU dari unit kerja eselon II lingkup kantor pusat DJPb:

UIC	LKPP					LKBUN				Capaian Triwulan IV 2025
	Rek Outstanding Awal Tahun	Rek LHP 2024	Jumlah Rek Outstanding	Rek Disusulkan Sesuai, Sesuai, dan TPTD	Capaian LKPP	Rek Outstanding Awal Tahun	Jumlah Rek Outstanding	Rek Disusulkan Sesuai dan Sesuai	Capaian LKBUN	
(a)	(b)	(c)	(d+b+c)	(e)	(f=(d/e))	(g)	(h+g+h)	(i)	(k=(h/i))	(l)=(f+k)/2
Direktorat Pelaksanaan Anggaran	12	6	18	17	94,44%	20	20	20	100,00%	97,22%
Direktorat Pengelolaan Kas Negara	10	2	12	12	100,00%	12	12	12	100,00%	100,00%
Direktorat Sistem Manajemen Investasi	7	0	7	7	100,00%	19	19	19	100,00%	100,00%
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU	2	0	2	2	100,00%	4	4	4	100,00%	100,00%
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	29	10	39	36	92,31%	12	12	12	100,00%	96,15%
Direktorat Sistem Perbendaharaan	8	2	10	9	90,00%	5	5	5	100,00%	95,00%
Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan	24	2	26	25	96,15%	20	20	20	100,00%	98,08%

Tabel 33 Capaian LKPP dan LK BUN

Tidak ada target IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN dalam renja, tetapi terdapat terdapat target renstra seperti target IKU. Berdasarkan tren capaian selama lima tahun terakhir, realisasi Direktorat PPK BLU pada IKU ini selalu konsisten mencapai 100%.



Gambar 7 Tren Capaian IKU 4a-CP Pertahun

Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi sumber daya dalam pencapaian IKU penyusunan LKPP dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK dilakukan melalui optimalisasi koordinasi dan pemantauan yang terintegrasi dengan proses penyusunan laporan keuangan yang telah berjalan. Komunikasi intensif dengan unit terkait, monitoring berkelanjutan atas tindak lanjut temuan, serta koordinasi dengan Direktorat APK dilaksanakan dengan memanfaatkan forum pembahasan rutin dan sarana komunikasi daring sehingga tidak memerlukan tambahan anggaran yang signifikan. Pendekatan ini memastikan percepatan penyelesaian rekomendasi BPK dan peningkatan akuntabilitas keuangan negara tetap dicapai secara efektif dan efisien.

GEDSI

Penerapan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) pada IKU ini tercermin melalui akses informasi dan proses tindak lanjut yang transparan, kontrol yang akuntabel melalui monitoring dan pembahasan bersama, serta partisipasi lintas unit yang inklusif tanpa diskriminasi. Manfaatnya adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan negara yang berdampak luas dan berkeadilan bagi masyarakat.

Rencana Aksi

Dalam rangka mencapai target IKU ini pada tahun 2026, berikut rencana aksi yang akan dilakukan oleh Direktorat PPK BLU:

1. Menyusun rencana aksi dan tindak lanjut sesuai dengan hasil temuan BPK;
2. Meningkatkan sinergi dengan pihak lain yang terkait guna memastikan keselarasan data dan penyelesaian rekomendasi secara komprehensif; dan
3. Melakukan evaluasi atas temuan berulang sebagai dasar perbaikan kebijakan.

➤ Indikator Kinerja Utama (IKU) 2:

4b-N Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating

Tingkat maturitas adalah tingkat kedewasaan/kematangan manajemen dalam mengelola BLU untuk mencapai tujuan dan menyelenggarakan tata kelola yang baik pada BLU. Untuk mengukur tingkat maturitas BLU telah dibentuk suatu perangkat yaitu BLU Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation. Tingkat maturitas diukur melalui aspek Keuangan, aspek Pelayanan, aspek Tata Kelola dan Kepemimpinan, aspek Inovasi, dan aspek Lingkungan.

Tujuan dari IKU ini adalah mewujudkan penerapan pengelolaan keuangan dan layanan yang efektif melalui peningkatan kinerja dan tata kelola oleh BLU dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

IKU ini merupakan IKU *non-cascading*, memiliki polarisasi: *maximize*, tingkat kendali: *moderate*, tingkat validitas: *proxy*, jenis konsolidasi periode: *Take Last Known Value*, dan periode pelaporan triwulanan. Tahun 2025 memiliki target yang ditentukan sebesar 100 dan terealisasi sebesar 113,85 sehingga memiliki capaian sebesar 113,85%.

K-Two	4. Pengelolaan Tugas Khusus (Special Mission) yang Efektif							
	4b - N Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	111,54	111.54	111.54	111.54	111.54	113,85	113,85	
Capaian	111,54	111.54	111.54	111.54	111.54	113,85	113,85	

Tabel 34 Realisasi Capaian IKU 4b-N

Isu utama:

- Maturity Rating perlu dimaknai tidak sekadar sebagai penilaian tahunan, melainkan sebagai indikator kualitas tata kelola BLU yang berkelanjutan.
- Isu pada kenaikan nilai matrat berasal dari BLU LPDUK yang sudah mengisi beberapa data di modul maturity rating tetapi tidak disampaikan ke kanwil sesuai batas waktu yang ditentukan.

Implikasi:

- Satker BLU perlu mempelajari kembali dan menjadi tantangan bagi Satker BLU yang kesulitan dalam meningkatkan nilai maturity ratingnya.

Akar masalah:

- Beberapa BLU baru belum terbiasa melakukan penilaian dengan sistem maturity rating.
- Terdapat BLU yang akan dibekukan karena adanya restrukturisasi organisasinya sehingga tidak memiliki motivasi untuk menyelesaikan maturity rating.
- BLU memiliki beragam kompleksitas dari segi layanan maupun kemampuan untuk memahami konsep maturity rating serta penentuan indikator yang sesuai

Tindakan *extra effort* yang telah dilaksanakan:

- Mendorong BLU untuk segera menyelesaikan proses self assessment maturity rating.
- Memberikan bimbingan teknis dan konsultasi baik secara langsung maupun melalui media komunikasi elektronik kepada BLU.
- Pendampingan kepada BLU baru maupun BLU yang nilai matratnya dibawah kategori baik.
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil maturity rating BLU.

Formula:

IKU ini memperhitungkan 2 sub-Iku, yaitu:

- a. Persentase BLU yang Berkinerja Baik Sesuai Hasil Maturity Rating Assessment
 - Triwulan I : memperhitungkan persentase BLU yang berkinerja baik dan telah melakukan evaluasi dengan membuat kertas kerja penilaian maturity rating
 - Triwulan II : memperhitungkan persentase BLU yang berkinerja baik dan telah melakukan evaluasi self assessment penilaian maturity rating

- Triwulan III : memperhitungkan persentase BLU yang berkinerja baik dan telah melakukan evaluasi self assessment penilaian maturity rating
- Triwulan IV : memperhitungkan persentase BLU yang berkinerja baik dan telah ditetapkan penilaian maturity rating dengan KEP Direktur PPKBLU

b. Indeks Peningkatan Nilai Maturitas BLU

$$\frac{\Sigma \text{BLU yang nilai matratnya naik}}{\Sigma \text{BLU yang memiliki 2 nilai matrat}} \times 100\%$$

- Triwulan I : aktivitas evaluasi dan perumusan tools
- Triwulan II : peningkatan Nilai Matrat (Y) Berdasarkan Self Assessment
- Triwulan III : peningkatan Nilai Matrat (Y) setelah verifikasi oleh Kanwil
- Triwulan IV : Peningkatan Nilai Matrat (Y) Berdasarkan KEP Dir

$$\text{Perhitungan Capaian} = \frac{\text{avg Indeks Nilai Matrat} + \text{avg Indeks Kenaikan Nilai Matrat}}{2}$$

Detail perhitungan capaian IKU sebagai berikut:

$$\frac{\text{Indeks capaian Sub-IKU 1} + \text{Indeks capaian Sub-IKU 2}}{2} = \frac{101,71 + 120}{2} = 113,85$$

Subdirektorat	Persentase BLU Kategori "Baik" Atau Di Atasnya	Kenaikan Nilai Matrat BLU (Dalam Indeks)
PPKBLU I	100%	5
PPKBLU II	97,86%	5
PPKBLU III	98,11%	5
Gabungan	98,66%	5
Target	97,66%	3,5

Tabel 35 Indeks Peningkatan Nilai Maturitas BLU

Hasil Penilaian Tata Kelola dan Kinerja (Tingkat Maturitas) dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut:

1. LUAR BIASA, untuk BLU dengan nilai 4,0 sampai 5,0;
2. SANGAT BAIK, untuk BLU dengan nilai 3,0 sampai 3,99;
3. BAIK, untuk BLU dengan nilai 2,0 sampai 2,99;
4. CUKUP, untuk BLU dengan nilai 1,0 sampai 1,99; dan
5. KURANG, untuk BLU dengan nilai dari 0 sampai 0,99

Berdasarkan hasil penilaian tingkat maturitas terhadap 303 (Tiga Ratus Tiga) BLU yang memenuhi syarat penilaian, diperoleh hasil:

- sebanyak 10 (sepuluh) BLU berada pada kategori LUAR BIASA;
- sebanyak 150 (seratus lima puluh) BLU berada pada kategori SANGAT BAIK;
- sebanyak 140 (seratus empat puluh) BLU berada pada kategori BAIK;
- sebanyak 10 (sepuluh) BLU berada pada kategori LUAR BIASA; dan
- sebanyak 3 (tiga) BLU berada pada kategori CUKUP.

Perbandingan IKU

IKU Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating merupakan IKU lama yang mengalami perubahan komponen di tahun 2025. Unit serupa di kantor pusat tidak ada yang memiliki IKU ini sehingga tidak bisa dibandingkan. Selain itu, IKU ini tidak masuk ke dalam Renja Kemenkeu maupun Ditjen Perbendaharaan.

Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi sumber daya dalam pencapaian IKU Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating dilakukan melalui pemanfaatan perangkat BLU Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation yang terstandar sehingga proses penilaian dapat dilaksanakan secara sistematis tanpa memerlukan mekanisme tambahan. Pengumpulan data dan evaluasi aspek keuangan, pelayanan, tata kelola, inovasi, dan lingkungan diintegrasikan dengan kegiatan monitoring dan pembinaan BLU yang telah berjalan. Selain itu, koordinasi dan pelaporan triwulanan memanfaatkan sarana digital untuk menekan biaya dan waktu pelaksanaan.

GEDSI

Penerapan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dalam IKU Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating diwujudkan melalui penilaian pada aspek pelayanan, tata kelola, dan kepemimpinan yang mendorong pengelolaan BLU secara lebih inklusif dan peka terhadap keberagaman kebutuhan masyarakat. Peningkatan tingkat maturitas tidak hanya menitikberatkan pada kinerja keuangan dan administratif, tetapi juga pada upaya memastikan layanan BLU tersedia secara setara bagi perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan.

Rencana Aksi

Rencana aksi Tahun 2026 atas IKU Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating diarahkan pada penguatan implementasi penilaian maturitas secara lebih konsisten dan terintegrasi dengan proses pembinaan BLU. Langkah yang akan dilakukan meliputi penyempurnaan instrumen penilaian, peningkatan kualitas self-assessment dan validasi data, serta pemanfaatan hasil penilaian sebagai dasar penyusunan program pembinaan yang lebih terarah.

5. Sasaran Strategis (SS):

Komunikasi Publik dan Sinergi Antar-Organisasi yang Kolaboratif

Pencapaian kinerja dan penyelesaian tugas organisasi memerlukan komunikasi yang efektif serta kolaborasi yang kuat antarunit dan pemangku kepentingan. Sinergi yang terbangun secara terbuka, terkoordinasi, dan saling mendukung menjadi kunci dalam menyelaraskan program, kebijakan, dan pelaksanaan tugas. Dengan komunikasi publik yang transparan dan kerja sama yang solid, tujuan strategis organisasi dapat dicapai secara lebih optimal, terintegrasi, dan berkelanjutan.

SS 5 : Komunikasi Publik dan Sinergi Antar-Organisasi yang Kolaboratif					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
1.	Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan	4	5	120	120
2.	Indeks Kualitas Penugasan BLU, asistensi BLUD dan UMKM	4	4,97	120	120

Tabel 36 Sasaran Strategis 5

- Indikator Kinerja Utama (IKU) 1:

5a-N Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan

Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (stakeholders) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode.

Untuk bimtek diukur dengan *posttest* sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialisasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada triwulan tersebut dibobot sebagai berikut: hasil pos test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan pembinaan teknis perbendaharaan

IKU ini merupakan IKU non-cascading, memiliki polarisasi: maximize, tingkat kendali: moderate, tingkat validitas: proxy, jenis konsolidasi periode: Take Last Known Value, dan periode pelaporan triwulanan. Tahun 2025 memiliki target yang ditentukan sebesar 4 dan terealisasi sebesar 5 sehingga memiliki capaian sebesar 120. Berikut rincian tabel untuk capaian triwulanan:

K-Two	5. Pencapaian Tugas Khusus (special mission) yang Optimal							
	5a –N Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	4	4	4	4	4	4	4	Max/ TLKV
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 37 Realisasi Capaian IKU 5a-N

Pada Triwulan I, masing-masing Subdirektorat telah melakukan kegiatan sosialisasi atau edukasi sebagaimana pada detail berikut:

a. Subdirektorat Peraturan dan Standardisasi Teknis:

Evaluasi e-Learning Dewas yang tahun lalu telah dilakukan. Tahun ini direncanakan kegiatan: Bimtek pelaksanaan tugas Dewas pada bulan Agustus 2025.

b. Subdirektorat Tarif, Remunerasi dan Informasi:

Evaluasi bimtek refreshment BIOS G2 telah dilakukan.

c. Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU-I:

Evaluasi bimtek maturity rating telah dilakukan. Tahun ini direncanakan kegiatan: Sosialisasi Perdirjen PER-6/PB.5/2025 tentang Kontrak Kinerja dan Evaluasi Kinerja Triwulanan.

d. Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU-II:

Evaluasi workshop mekanisme pembelian melalui fasilitator telah dilakukan.

e. Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU-III:

Evaluasi sosialisasi pengelolaan kas BLU.

Pada Triwulan II, telah dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya Bimtek SAKTI BLU modul penganggaran, Pelatihan Pendampingan Pemasaran Produk UMKM bekerja sama dengan PIP dan rapat pembahasan desain pembelajaran kegiatan pelatihan pada Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU dengan Pusdiklat AP.

Selanjutnya, di Triwulan III telah dilaksanakan E-learning dewan pengawas BLU pada tanggal 4 s.d 15 Agustus 2025. Penilaian efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan telah dilaksanakan pada 3 (tiga) kegiatan yaitu, Bimtek SAKTI BLU, Pelatihan Pendampingan Pemasaran Produk UMKM,

dan E-learning dewan pengawas BLU. Berdasarkan hasil kuesioner dari ketiga kegiatan tersebut, diperoleh nilai sebesar 92,99 sehingga capaian termasuk dalam kategori indeks 5. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan edukasi dan komunikasi telah berjalan sangat efektif serta memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Isu utama:

- Pelaksanaan edukasi dan komunikasi tidak hanya selesai pada satu kegiatan namun harus berkesinambungan dengan tetap memperhatikan sisi efisiensi..

Implikasi:

- Penilaian pada kegiatan tertentu dengan metode pre dan post test atau survei peserta atau pun tingkat kualitas penyelesaian pelatihan hanya memberi potret sebagian proses edukasi dan komunikasi..

Akar masalah:

- Pelaksanaan kegiatan edukasi dan komunikasi membutuhkan waktu yang lama.
- Pergantian Operator dan Approval aplikasi BIOS yang sering terjadi pada BLU.
- Konsep BLU merupakan hal yang baru bagi beberapa peserta bimtek dan sangat berbeda dengan pekerjaan mereka selama ini.

Tindakan *extra effort* yang telah dilaksanakan:

- Publikasi informasi terkait pengelolaan keuangan BLU melalui website blu.djpb.kemenkeu.go.id
- Menyediakan fitur helpdesk pada website blu.djpb.kemenkeu.go.id sebagai sarana peningkatan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan BLU
- Meng-update petunjuk manual operasionalisasi BIOS.
- Menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi dan komunikasi bekerja sama dengan BPPK melalui KLC.
- Menyelenggarakan Pelatihan SAKTI BLU Modul Penganggaran untuk Kanwil DJPb.

Formula:

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi didapatkan dari rata-rata tingkat efektivitas setiap kegiatan pelatihan/sosialisasi/workshop, yang berasal dari nilai kuesioner/pre/post-test kepada peserta.

Keterangan indeks:

$0\% < x \leq 20\%$ = Indeks 1

$20\% < x \leq 40\%$ = Indeks 2

40% < x ≤ 60% = Indeks 3

60% < x ≤ 80% = Indeks 4

80% < x ≤ 100% = Indeks 5

- Triwulan I : Persentase penyiapan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau edukasi dan semacamnya
- Triwulan II : Persentase kolaborasi perumusan kegiatan beserta materi sosialisasi, kolaborasi dengan BPPK atau penyelenggara lain
- Triwulan III : Persentase pelaksanaan kegiatan sosialisasi/pembelajaran/pelatihan/diklat dengan kolaborasi bersama BPPK atau pihak lainnya
- Triwulan IV : Nili rata-rata hasil pre-test & post-test atau hasil survey kepada responden atau persentase penyelesaian kegiatan pembelajaran (dikonversi dalam persentase)

Perbandingan IKU

IKU ini merupakan IKU Mandatory sehingga Unit Eselon II lain di kantor pusat DJPb memiliki IKU ini. Berdasarkan kinerja tahunan didapatkan perbandingan target dan realisasi pada renja sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renja		Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	4	4	4	5

Tabel 38 Perbandingan IKU Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan

Efisiensi Sumber Daya

Dalam pencapaian IKU Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, unit kerja mengoptimalkan sumber daya melalui sinergi antara penyelenggara kegiatan dan narasumber dalam setiap pelaksanaan bimtek maupun sosialisasi. Koordinasi dilakukan secara terstruktur sejak tahap perencanaan, penyiapan materi, penyusunan instrumen evaluasi (post test dan kuesioner), hingga pelaksanaan dan pengolahan hasil, sehingga proses edukasi dapat berlangsung efektif dan terukur. Selain itu, pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efisien melalui pembagian peran yang jelas, standarisasi materi, serta penggunaan mekanisme evaluasi yang proporsional, sehingga kualitas pembinaan tetap terjaga dan capaian kinerja dapat melampaui target.

GEDSI

Dalam pelaksanaan IKU Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, prinsip GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) diterapkan dengan memastikan seluruh kegiatan bimtek dan sosialisasi memberikan akses yang setara bagi seluruh stakeholders tanpa diskriminasi.

Rencana Aksi

Dalam meningkatkan capaian pada IKU ini, rencana aksi yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan sosialisasi maupun edukasi yang akan dilakukan;
2. Melakukan koordinasi dengan dengan narasumber dan penyelenggara kegiatan; dan
3. Menyiapkan instrumen evaluasi (post test dan kuesioner) guna perbaikan kegiatan selanjutnya.

➤ Indikator Kinerja Utama (IKU) 2:

5b-N Indeks Kualitas Penugasan BLU, asistensi BLUD, dan UMKM

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memiliki beberapa amanat yang harus dilaksanakan terkait pembinaan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 48/PB/2016 tentang perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU. Sasaran pembinaan oleh Kanwil DJPb menurut aturan tersebut ada 2 (dua), yaitu pembinaan internal dan pembinaan eksternal. Pembinaan secara internal mencakup instansi lingkup DJPb sedangkan eksternal mencakup BLU, BLUD, Kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, dan instansi pemerintah lainnya.

Kemudian pada tahun 2023, amanat Kanwil DJPb ditambah dengan ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-112/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini memiliki maksud dan tujuan untuk Mendorong belanja pemerintah untuk UMKM, Mendorong inklusi keuangan UMKM, Mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas sesuai dengan kriteria dalam keputusan dimaksud.

IKU ini memiliki tujuan Mengukur kualitas kinerja kanwil dalam tiga penugasan yaitu: pembinaan BLU, asistensi BLUD, dan pemberdayaan UMKM.

IKU ini pada tahun 2025 merupakan IKU *Non-Cascading*, dengan polarisasi: *maximize*, tingkat kendali: *moderate*, validitas: *proxy*, dan jenis konsolidasi periode *Take Last Known*, dan periode pelaporan triwulanan. Pada

tahun 2025 IKU ini memiliki target tahunan sebesar 3,5 dengan realisasi sebesar 4,92, sehingga memiliki indeks capaian sebesar 120. Secara umum, capaian baik Bidang PPA I maupun Bidang PPA II telah melampaui target.

K-Two	5. Pencapaian Tugas Khusus (special mission) yang Optimal							
	5b – N Indeks Kualitas Penugasan BLU, asistensi BLUD, dan UMKM							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	4	4	4	4	4	4	4	Max/ TLKV
Realisasi	4,96	4,99	4,99	5	5	4,92	4,92	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 39 Realisasi Capaian IKU 5b-N

Isu utama:

Adanya kebijakan efisiensi dan penyesuaian pagu belanja diserahkan kepada masing-masing Kanwil DJPb serta adanya kebijakan simplifikasi pelaporan rutin pada Kanwil DJPb.

Implikasi:

Alokasi belanja yang tidak seragam setiap Kanwil DJPb menjadi tantangan dalam pemenuhan IKU ini dan simplifikasi pelaporan akan membuat kesulitan bagi Direktorat PPKBLU selaku penilai karena isi laporan cenderung sama

Akar Masalah:

- Para pegawai kanwil yang baru dalam hal pekerjaan maupun dalam hal penempatan membutuhkan waktu dalam memahami IKU ini.
- Menjalin komunikasi dengan BLUD yang notabene bukan kewenangan secara langsung Kanwil dalam melakukan pembinaan.
- Kegiatan yang dilakukan selama ini hanya bersifat temporer (pameran, asistensi, sosialisasi, dll) belum ada kegiatan pemberdayaan yang komprehensif sampai dengan memantau perkembangan UMKM dan menentukan milestone capaian target bisnis secara rinci.

Tindakan *extra effort* yang telah dilaksanakan:

- Menyampaikan informasi secara formal & informal terkait tindak lanjut atas sosialisasi pemberdayaan UMKM.
- Telah dilakukan pemberian feedback penilaian kepada masing-masing Kanwil untuk dilakukan perbaikan periode berikutnya.

- Berkoordinasi dengan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan.

Formula:

Avg[50% Indeks Kualitas Penugasan terkait BLU + (50% (Indeks Kualitas Asistensi BLUD + Indeks Kualitas Pemberdayaan UMKM))]

Kualitas Asistensi BLUD dan Pemberdayaan UMKM yang diukur pada tiap periode menyesuaikan komponen dalam Nota Dinas Direktur PPKBLU.

$$\frac{\text{Avg Indeks PA I} + \text{Avg Indeks PA II}}{2} = \frac{4,85 + 5}{2} = 4,92$$

Detail capaian sebagai berikut:

Kanwil DJPb	PA I	PA II	
	Indeks Kualitas Penugasan BLU	Indeks Kualitas Asistensi BLUD	Indeks Kualitas Pemberdayaan UMKM
Avg Nilai (Avg Indeks)	4,84	5	5
	4,84	5	
Avg Indeks	4,92		

Tabel 40 Detail Capaian IKU 5b-N

Perbandingan IKU

IKU ini merupakan IKU dengan formulasi baru sehingga tidak bisa dibandingkan antar tahun. Unit serupa di kantor pusat juga memiliki IKU yang diturunkan ke Kantor Vertikal, namun IKU yang berbeda sehingga tidak bisa dibandingkan. Berdasarkan kinerja tahunan didapatkan perbandingan target dan realisasi pada renja sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renja		Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	4	4	4	4,92

Tabel 41 Perbandingan realisasi IKU 5b-N selama 5 tahun terakhir

Efisiensi Sumber Daya

Dalam pencapaian IKU Indeks Kualitas Penugasan BLU, Asistensi BLUD, dan UMKM, Kanwil DJPb mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya melalui integrasi pelaksanaan pembinaan, asistensi, dan pemberdayaan dalam satu

kerangka kerja yang terkoordinasi. Sinergi antara Bidang PPA I dan Bidang PPA II dilakukan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif tanpa duplikasi upaya. Selain itu, pemanfaatan metode asistensi yang terstruktur, pemetaan prioritas pembinaan, serta penguatan koordinasi dengan stakeholders memungkinkan kualitas output tetap terjaga dengan dukungan sumber daya yang proporsional, sehingga capaian kinerja mampu melampaui target yang ditetapkan.

GEDSI

Dalam rangka pencapaian IKU Indeks Kualitas Penugasan BLU, Asistensi BLUD, dan UMKM, prinsip GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) diintegrasikan dengan memastikan proses pembinaan dan asistensi memberikan akses dan kesempatan yang setara bagi seluruh pemangku kepentingan. Kanwil DJPb mendorong partisipasi yang inklusif, termasuk keterlibatan pelaku UMKM dari berbagai latar belakang, melalui pendekatan komunikasi yang terbuka dan adaptif.

Rencana Aksi

Rencana aksi pencapaian IKU 5b-N Indeks Kualitas Penugasan BLU, Asistensi BLUD, dan UMKM difokuskan pada penguatan koordinasi, peningkatan kualitas pembinaan, serta optimalisasi peran unit pelaksana. Langkah strategis dilakukan melalui penyusunan rencana pembinaan berbasis prioritas dan kebutuhan stakeholders, penguatan monitoring dan evaluasi triwulanan. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan dan menjalin komunikasi yang baik dengan Kanwil DJPb untuk menemukan solusi atas berbagai permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan pencapaian IKU ini, sehingga kualitas penugasan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

6. Sasaran Strategis (SS):

Pengelolaan Organisasi dan Pengendalian Internal yang Optimal

Diarahkan untuk memastikan proses perumusan kebijakan dan pembinaan BLU berjalan efektif, terstruktur, dan akuntabel. Penguatan dilakukan melalui penataan proses bisnis, kejelasan peran, penerapan manajemen risiko, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Dengan pengendalian internal yang kuat, Dit PPK BLU dapat menjaga kualitas kinerja dan meminimalkan risiko dalam pengelolaan BLU sesuai prinsip tata kelola yang baik.

SS 6 : Pengelolaan Organisasi dan Pengendalian Internal yang Optimal					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
1.	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	100	114,05	120	120

Tabel 42 Sasaran Strategis 6

6a-N Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup DJPb, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja.

Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup DJPb untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip *Strategy Focused Organization* (SFO).

Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJPb, Kantor Pusat DJPb melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing.

IKU ini merupakan IKU *non cascading*, memiliki polarisasi: *maximize*, tingkat kendali *moderate*, tingkat validitas: *proxy*, jenis konsolidasi periode: *take last known*, dan periode laporan triwulanan.

K-Two	6. Pengelolaan SDM dan Fungsi IT yang Kolaboratif							
	6a – N Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	104,27	120	120	108.81	108.81	114,05	114,05	
Capaian	104,27	120	120	108.81	108.81	114,05	114,05	

Tabel 43 Realisasi Capaian IKU 6a-N

Pada tahun 2025, realisasi IKU ini adalah 124,05% dari target 100%. Nilai ini diperoleh dari 3 komponen yaitu nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis SFO, nilai implementasi *learning organization*, dan nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal. Realisasi nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis SFO adalah 92,49, realisasi nilai implementasi *learning organization* adalah

109,59, dan realisasi nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal sebesar 95,96. Jika diperhitungkan rata-rata capaian adalah 114,05.

Isu utama:

- Ketiga komponen IKU ini memerlukan kerja sama seluruh pegawai Direktorat karena berkaitan dengan pemenuhan dokumen wajib yang bersifat individual.
- Kurangnya kesadaran pegawai dalam pemenuhan dokumen kinerja pegawai.

Implikasi:

- Setiap pegawai wajib disiplin dalam pemenuhan kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan penilaian kinerja organisasi ini.

Akar masalah:

- Secara umum, setiap komponen pada Tingkat Implementasi Learning Organization telah dijalankan oleh Dit. PPK BLU, namun perlu dilakukan pendokumentasian yang lebih komprehensif.

Tindakan *extra effort* yang telah dilaksanakan:

- Menginformasikan kepada pegawai baik secara formal melalui nota dinas atau pun informal melalui media komunikasi elektronik.
- Membuat tautan yang berisi monitoring penyelesaian dan upload dokumen pendukung LO.
- Monitoring pemenuhan dokumen dalam ketiga komponen IKU.
- Melakukan reminder secara intens atas pemenuhan dokumen LO maupun dokumen kinerja pegawai.

Formula:

IKU Tingkat kualitas Kinerja Organisasi terdiri dari tiga komponen yaitu:

- a. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis SFO lingkup DJPb;
- b. Nilai Implementasi Learning Organization; dan
- c. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal.

Komponen I: Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis SFO Lingkup DJPb

Sebagaimana amanat Menteri Keuangan dalam KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, bahwa seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan perlu mendorong peningkatan implementasi pengelolaan kinerja secara berkelanjutan. Sebagai salah satu langkah untuk mendorong komitmen pimpinan unit dan seluruh pegawai terhadap peningkatan kualitas pengelolaan kinerja, Manajer Kinerja Organisasi DJPb melaksanakan penilaian terhadap implementasi pengelolaan kinerja di masing-masing unit kerja di lingkungan DJPb.

Penilaian implementasi pengelolaan kinerja tersebut difokuskan terhadap hasil capaian kinerja yang telah direalisasikan, serta pemenuhan unsur-unsur

peningkatan kualitas pengelolaan kinerja berlandaskan Strategy Focused Organization (SFO).

Penilaian tersebut dilaksanakan terhadap 2 (dua) parameter sebagai berikut:

1. Nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode Triwulan III Tahun 2025; dan
2. NKO unit kerja periode tahun 2024.

IKU ini diukur berdasarkan rata-rata capaian nilai pengelolaan kinerja pada seluruh unit dengan target sebesar 85 dan realisasi sebesar 92,49. Hasil capaian IKU SFO sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor KEP-14/PB/2026 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Manajemen Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025.

Komponen II: Nilai Implementasi Learning Organization

Tingkat akulturasi learning organization merupakan nilai yang merepresentasikan level pembudayaan organisasi pembelajar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya (KEP-140/PP/2017).

Aktivitas implementasi LO diukur melalui 8 (delapan) subkomponen, sebagai berikut:

- a. Pendokumentasian dan pengorganisasian:
mengukur partisipasi unit kerja dalam pendokumentasian pengetahuan terkait pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam penyusunan aset intelektual dan publikasinya dalam Pusat Pengetahuan pada Kemenkeu Learning Center 2.
- b. Desain pembelajaran strategis:
mengukur partisipasi unit kerja dalam menentukan jenis dan model pembelajaran terintegrasi yang dibutuhkan unit kerja dalam 1 (satu) tahun mekanisme penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Pembelajaran (RAP) Sesuai ketentuan pada KMK 350/KMK.011/2022 dalam kerangka peran strategis organisasi, yaitu Treasurer, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor (TREFA).
- c. Desain pembelajaran individu:

mengukur partisipasi unit kerja dalam menentukan jenis dan model pembelajaran terintegrasi yang dibutuhkan pegawai per semester melalui penyusunan Individual Development Plan (IDP) beserta penyampaian dokumen bukti pembelajaran sesuai ketentuan pada KMK 350/KMK.011/2022.

d. Evaluasi pembelajaran:

mengukur partisipasi unit kerja dalam mendorong penyelesaian penugasan pembelajaran oleh pegawai dan partisipasi dalam pelaksanaan evaluasi pascapembelajaran yang diselenggarakan oleh BPPK.

e. Pembelajaran terstruktur:

mengukur akurasi pengiriman peserta pelatihan oleh unit kerja dalam program pembelajaran yang diselenggarakan oleh BPPK.

f. Belajar dari pengalaman kerja:

mengukur tingkat akomodasi unit kerja bagi pegawai untuk melaksanakan pembelajaran melalui praktik langsung dalam pekerjaan.

g. Kinerja organisasi:

mengukur dampak pembelajaran yang dilaksanakan pegawai terhadap perbaikan kinerja organisasi, melalui penciptaan inovasi di unit kerja.

h. Pimpinan sebagai pengajar:

mengukur keterlibatan pimpinan dalam proses pembelajaran di unit kerja melalui perannya sebagai pengajar (sumber belajar) dalam berbagai kegiatan.

Nilai Capaian IKU diperoleh dari hasil verifikasi atas dokumen bukti pendukung atas aktivitas LO yang dijabarkan pada Komponen dan Subkomponen penyusun IKU LO DJPb Tahun 2023 di atas. Dokumen bukti diunggah pada Aplikasi Training Modul Learning Organization. Selanjutnya, dokumen tersebut akan diverifikasi oleh Tim Implementasi LO Pusat pada Bagian SDM Sekretariat DJPb. Pada tahun 2025, capaian Nilai Implementasi Learning Organization adalah sebagai berikut:

K-Two	6. Pengelolaan SDM dan Fungsi IT yang Kolaboratif							
	Nilai Implementasi Learning Organization							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ KP
Target	30	50	50	70	70	90	90	Max/

Realisasi	31,28	68,36	68,36	76,17	76,17	109,59	109,59	TLK
Capaian	104,27	120	120	108,81	108,81	121,77	121,77	

Tabel 44 Nilai Implementasi Learning Organization

Berdasarkan nilai pada aplikasi training Modul LO dan berdasarkan nota dinas Sekretaris DJPb nomor ND 21/PB.1/2026 hal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Implementasi Learning Organization DJPb Triwulan IV 2025, nilai capaian implementasi Learning Organization sebesar 109,59. Adapun rincian nilai LO adalah sebagai berikut:

Subkomponen Penilaian	Nilai
Pengorganisasian dan Penyebarluasan	110
Rencana Aksi Pembelajaran	110
Individual Development Plan (IDP)	96,97
Evaluasi Pembelajaran	194,81
Hard Competency Pegawai	100
Structured Learning	100
Learning from Experiences	100
Pemenuhan Jam Pembelajaran (JP)	100
Organizational Performance	100
Leaders as Teachers	100
Leaders as Role Model	100
Capaian Nilai Learning Organization (LO)	109,53

Tabel 45 Rincian Nilai Leading Organization

Sesuai dengan rincian nilai per subkomponen dapat dijelaskan bahwa terdapat satu subkomponen yang belum bernilai maksimal yaitu pada subkomponen evaluasi pembelajaran dan Individual Development Plan (IDP). Hal ini dikarenakan terdapat pegawai yang tidak menyelesaikan kegiatan pelatihan serta adanya bukti dukung IDP yang tertolak oleh evaluator.

Komponen III: Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal

Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Badan Layanan Umum (BLU), Kantor Wilayah DJPb, dan KPPN. Penilaian pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh:

- a. Unit Kepatuhan Internal Tingkat I (UKI-I) terhadap pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal pada Direktorat, Kantor Wilayah, dan BLU di lingkup Ditjen Perbendaharaan Penilaian tersebut dilakukan oleh Sekretariat DJPb c.q. Bagian Kepatuhan Internal; dan

- b. Unit Kepatuhan Internal Tingkat II (UKI-II) terhadap pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal lingkup KPPN di wilayah kerjanya.

Penilaian tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-102/PB/2023 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal pada KPPN, terdiri atas:

1. Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)
2. Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern, Pengendalian Gratifikasi, Pelaporan LHKPN, serta Pemantauan Penegakan Integritas dan Nilai Etika (PPINE) (bobot: 55%)
3. Pengelolaan Pengaduan dan Tindak Lanjut Rekomendasi atas Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (bobot: 10%)

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-80/Pb/2025 Tentang Penetapan Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025, capaian IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Direktorat PPK BLU adalah 95,96 dari target 86.

Perhitungan capaian seluruh komponen:

$$\text{Rata-rata indeks capaian seluruh komponen} = \frac{92,49+109,59+95,96}{3} = 114,05\%$$

Perbandingan IKU

IKU ini tidak termasuk ke dalam renja dan renstra. Sebagai mandatory, IKU ini merupakan IKU baru yang menggabungkan beberapa komponen perhitungan yang menjadi Sub-IKU kemudian dinaikkan targetnya atau diubah formulanya. Unit serupa di kantor pusat seluruhnya memiliki IKU dengan perbandingan capaian sebagai berikut:

DIREKTORAT	SFO	LO	KI
Direktorat Pelaksanaan Anggaran	92,66	108,94	96,92
Direktorat Pengelolaan Kas Negara	88,34	103,45	92,89
Direktorat Sistem Manajemen Investasi	89,89	109,53	93,75
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	92,49	109,59	95,96
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	92,65	110	96,03
Direktorat Sistem Perbendaharaan	93,61	108,52	93,06

Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan	91,21	110	92,64
Pusat Investasi Pemerintah	87,47	-	-
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	91,36	-	-
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	89,15	-	-

Tabel 46 Perbandingan Capaian 6a-N pada Unit Serupa

Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi sumber daya diwujudkan melalui penerapan langkah peningkatan kinerja yang terstruktur dan berbasis prinsip Strategy Focused Organization (SFO), sehingga setiap unit dapat menjalankan action plan secara terarah tanpa duplikasi upaya. Implementasi pembelajaran secara online yang fleksibel, metode pembelajaran mandiri, serta integrasi learning while working memungkinkan peningkatan kompetensi tanpa mengganggu produktivitas kerja. Selain itu, penggunaan aplikasi training sebagai sarana pencatatan, monitoring, serta pelaksanaan coaching and counseling turut meningkatkan efisiensi waktu dan administrasi, baik bagi atasan langsung maupun pengelola SDM, sehingga pengelolaan kinerja dapat berjalan efektif dengan pemanfaatan sumber daya yang proporsional.

GEDSI

Dalam pelaksanaan IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi, prinsip GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) diterapkan dengan memastikan seluruh pegawai memiliki akses yang setara terhadap proses pengelolaan kinerja, pembelajaran, serta coaching and counseling. Skema pembelajaran *daring* yang fleksibel memberikan kesempatan yang inklusif bagi pegawai dengan berbagai kondisi dan kebutuhan, termasuk keterbatasan mobilitas maupun tanggung jawab domestik. Dengan demikian, peningkatan kualitas pengelolaan kinerja tidak hanya berorientasi pada capaian organisasi, tetapi juga menjunjung tinggi kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas di lingkungan kerja.

Rencana Aksi

Dalam meningkatkan capaian pada Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis SFO, akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun timeline kegiatan tahun 2026 guna memastikan pelaksanaan manajemen kinerja yang lebih baik;

2. Melakukan koordinasi secara intens antar subdirektorat guna memastikan ketercapaian IKU untuk meningkatkan nilai NKO; dan
3. Melakukan monitoring dan reminder atas dokumen kinerja pegawai.

Rencana aksi dalam Implementasi Learning Organization tahun 2026 antara lain dengan melakukan sosialisasi terkait pemenuhan dokumen learning organization, monitoring secara berkala terkait dengan penyusunan dokumen kepegawaian dan memastikan seluruh pegawai untuk memenuhi jam pembelajaran. Selain itu, melakukan reminder atas pelaksanaan dialog kinerja individu.

Berikut langkah-langkah untuk meningkatkan capaian pada nilai pelaksanaan tugas kepatuhan internal:

1. Melakukan identifikasi dan pemutakhiran peta risiko secara berkala;
2. Menyusun dan mereviu rencana mitigasi risiko atas risiko prioritas;
3. Melakukan sosialisasi dan penguatan pengendalian gratifikasi di lingkungan kerja;
4. Menyusun dokumen pemenuhan yang dapat diselesaikan di kesempatan pertama serta melakukan inventarisasi pemenuhan dokumen.

7. Sasaran Strategis (SS):

Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Pengelolaan keuangan yang akuntabel bertujuan mengoptimalkan penggunaan uang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

SS 7 : Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
1.	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu	100	120	120	120

Tabel 47 Sasaran Strategis 7

- Indikator Kinerja Utama (IKU) 1:

7a- CP Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu

Dana yang tersedia dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), harus dikelola secara tertib sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Pelaksanaan anggaran dilakukan

dengan menjunjung prinsip kehati-hatian, efisiensi, serta menghindari pemborosan, tanpa mengurangi pencapaian target keluaran yang telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran dan kualitas pelaporan keuangan. IKU ini merupakan IKU *Cascading* Peta dengan memiliki polarisasi: *maximize*, tingkat kendali: *moderate*, tingkat validitas: *proxy*, jenis konsolidasi periode: *take last known value* (akumulatif) dan periode pelaporan triwulanan. Tahun 2025 memiliki target yang ditentukan sebesar 100 dengan realisasi sebesar 99,64, sehingga memiliki capaian sebesar 120.

K-One	7. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	7a-CP Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLKV
Realisasi	100	94,54	94,54	98,02	98,02	99,64	99,64	
Capaian	120	99.52	99.52	120	120	120	120	

Tabel 48 Realisasi Capaian IKU 7a-CP

Isu utama:

- Adanya kebijakan efisiensi yang berimbas pada penyerapan karena banyak rencana kegiatan tidak dapat ter realisasi s.d. triwulan II, sehingga menumpuk pada triwulan III dan IV.

Implikasi:

- Perubahan dan penyesuaian rencana kegiatan dengan pengeluaran biaya seefisien mungkin namun penggunaan seefektif mungkin dengan output yang dihasilkan tetap optimal.

Akar masalah:

- Kurangnya ketepatan dalam membuat rencana penyerapan.
- Adanya kebijakan efisiensi yang perlu banyak dilakukan penyesuaian antara rencana dengan eksekusi kegiatan.

Tindakan *extra effort* yang telah dilaksanakan:

- Melakukan koordinasi dengan masing-masing pengelola kegiatan untuk memastikan bahwa seluruh anggaran dapat terserap dan output kegiatan dapat tercapai.
- Menyusun ulang rencana kegiatan di Triwulan II.
- Melakukan koordinasi internal dan komunikasi terhadap seluruh unit dalam rangka memastikan target pelaksanaan anggaran dapat tercapai.
- Menyusun kertas kerja monitoring realisasi keuangan.

Formula:

Indeks	IKPA
120	Realisasi IKPA $\geq$ 98.00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0.15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0.5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

Tabel 49 Indeks Realisasi IKPA

*Koefisien 0.15 = $(\text{Realisasi IKPA capaian 120} - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian 120} - \text{indeks capaian sesuai target}) = (98-95) / (120-100)$

** Koefisien 0.5 = $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian 80}) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian 80})$

INDIKATOR IKU	BOBOT	NILAI	HASIL
Revisi DIPA	0%	100	
Halaman III DIPA	15%	69.13	10,37%
Penyerapan Anggaran	0%	71	
Belanja Kontraktual	10%	100	10%
Penyelesaian Tagihan	10%	100	10%
Pengelolaan UP dan TUP	0%	100	
Dispensasi SPM	0%	100	
Capaian Output	25%	117.65	29,41%
Total	60%		59,78%
Nilai IKPA (Q4)	99,64%		
Target Nilai IKPA	95		

Tabel 50 Nilai IKPA

Perbandingan IKU

IKU ini tidak termasuk ke dalam renstra Direktorat PPKBLU tahun 2020 – 2024 namun merupakan IKU yang sudah lama ada sebagai mandatory dan diubah formulanya menyesuaikan komponen dan target yang diukur. Unit serupa di

kantor pusat seluruhnya memiliki IKU ini namun tidak dipublikasikan hasil penilaian *self assessment* masing-masing, sehingga tidak bisa dibandingkan.

Efisiensi Sumber Daya

Pelaksanaan anggaran pada tahun 2025 dilakukan dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, sejalan dengan kebijakan efisiensi yang diterapkan. Penyesuaian rencana kegiatan dilakukan melalui penyusunan ulang prioritas kegiatan setiap triwulan khususnya pada Triwulan II, sehingga penggunaan anggaran tetap diarahkan pada kegiatan yang memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian output. Meskipun terdapat pembatasan dan perubahan rencana kegiatan yang berdampak pada pola penyerapan anggaran yang menumpuk pada Triwulan III dan IV, pengelolaan anggaran tetap dilakukan secara tertib sehingga kualitas pelaksanaan anggaran tetap terjaga.

Upaya efisiensi sumber daya juga didukung melalui penguatan koordinasi dengan para pengelola kegiatan serta pemantauan realisasi keuangan secara berkala. Langkah tersebut memungkinkan dilakukannya penyesuaian secara cepat dan tepat terhadap dinamika pelaksanaan anggaran, sehingga penggunaan sumber daya keuangan dapat lebih terkendali dan output kegiatan tetap tercapai secara optimal. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Kinerja Anggaran sebesar 99,64 atau melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

GEDSI

Pelaksanaan anggaran dalam mendukung pencapaian Indeks Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan juga memperhatikan prinsip kesetaraan gender, inklusi sosial, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas (GEDSI). Hal ini diwujudkan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang memberikan kesempatan partisipasi yang setara bagi seluruh pegawai tanpa membedakan gender, kondisi fisik, maupun latar belakang sosial. Selain itu, pemanfaatan sumber daya anggaran diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan yang inklusif, baik dari sisi akses informasi maupun pelaksanaan kegiatan.

Dalam proses pengelolaan anggaran, prinsip transparansi dan akuntabilitas juga diterapkan secara konsisten sehingga seluruh pihak memperoleh akses informasi yang sama terkait pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Dengan demikian, pelaksanaan anggaran tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kinerja, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan kerja yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Rencana Aksi

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran pada periode berikutnya, akan dilakukan penyempurnaan perencanaan anggaran agar lebih realistis dan selaras dengan kebijakan yang berlaku. Penyusunan rencana kegiatan akan dilakukan lebih matang sejak awal tahun dengan mempertimbangkan prioritas program dan kemungkinan penyesuaian kebijakan, sehingga pola penyerapan anggaran dapat lebih merata sepanjang tahun.

Selain itu, penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran akan terus dilaksanakan melalui pemutakhiran kertas kerja monitoring realisasi keuangan dan peningkatan intensitas koordinasi dengan para pengelola kegiatan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan pelaksanaan kegiatan, menjaga konsistensi antara rencana dan realisasi anggaran, serta mempertahankan bahkan meningkatkan capaian Indeks Kinerja Anggaran pada periode selanjutnya.

8. Sasaran Strategis (SS):

Pengelolaan IT yang Andal dan Data yang Berkualitas

Pengelolaan IT yang Andal dan Data yang Berkualitas berfokus pada penguatan pengelolaan teknologi informasi dan data yang terintegrasi, akurat, serta dapat diandalkan guna mendukung tata kelola BLU. Optimalisasi infrastruktur dan kualitas data dilakukan untuk memastikan sistem informasi mampu mendukung proses bisnis dan pengambilan keputusan secara tepat. Dengan dukungan IT yang andal dan data yang berkualitas, peningkatan mutu layanan BLU kepada masyarakat dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

SS 8 : Pengelolaan IT yang Andal dan Data yang Berkualitas					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
1.	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100	120	120	120
2.	Indeks Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU	3	3	100	100

Tabel 51 Sasaran Strategis 8

- Indikator Kinerja Utama (IKU) 1:

8a-CP Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit

Transformasi yang dilakukan Kemenkeu dalam merespon tantangan domestik maupun ketidakpastian global perlu memperhatikan berbagai aspek, yaitu: kapasitas institusi, kredibilitas policy & regulasi, dan juga aspek Proses Bisnis (Probis), SDM dan IT. SDM, Organisasi, Aset, Anggaran, dan IT & Data

pada setiap UE1 merupakan milik Kementerian Keuangan, serta dikelola dan dimanfaatkan bersama untuk mencapai visi dan misi Kementerian Keuangan.

IKU ini bertujuan untuk Memonitor dan memastikan implementasi inisiatif strategis Kementerian Keuangan terlaksana sesuai dengan perencanaan baik dari sisi waktu dan kualitas.

IKU ini merupakan IKU Cascading Peta dengan memiliki polarisasi: maximize, tingkat kendali: moderate, tingkat validitas: proxy, jenis konsolidasi periode: take last known value (akumulatif) dan periode pelaporan triwulanan. Tahun 2025 memiliki target yang ditentukan sebesar 100 dengan realisasi sebesar 100.

K-Two	8. Pengelolaan IT yang Andal dan Data yang Berkualitas							
	8a-CP Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/K P
Target	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%	Max/ Avg
Realisasi	23,64 %	54,69 %	54,69 %	78,30 %	78,30 %	100 %	100 %	
Capaian	118,20	120	120	111.86	111.86	120	120	

Tabel 52 Realisasi Capaian IKU 8a-CP

IS RBTK level Kemenkeu tahun ini mengambil tema A New Beginning: Transforming Ecosystem and Strengthening Strategic Linkage. Transformasi yang dilakukan Kemenkeu dalam merespon tantangan domestik maupun ketidakpastian global perlu memperhatikan berbagai aspek. yaitu: kapasitas institusi, kredibilitas policy & regulasi, dan juga aspek Proses Bisnis (Probis), SDM dan IT. Sebagai turunan dari IS RBTK level Kemenkeu, DJPb memiliki lima IS RBTK:

- Allocative Efficiency APBN untuk Mendukung Visi Presiden dan Mendorong Pertumbuhan
- Kepemimpinan Kemenkeu dalam Strategic Diamond
- Penguatan Peran SMV sebagai Arm's Length Kemenkeu
- Pengembangan Modern Treasury
- Modernisasi Layanan

Direktorat PPKBLU ambil bagian pada IS RBTK nomor 3 terkait Penguatan Peran SMV sebagai Arm's Length Kemenkeu. Hasil capaian IKU ini berdasarkan

ND Kepala Pusat Manajemen Transformasi dan Perubahan nomor ND-1/TI.1/2026 tanggal 5 Januari 2026 hal Penyampaian Capaian Implementasi Inisiatif Strategis (IS) Kemenkeu dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%. Hasil konversi capaian sebesar 120 apabila realisasi maksimal.

Isu utama:

- Merupakan IKU baru yang monitoring progress dan perhitungan capaiannya disampaikan oleh pihak eksternal dalam hal ini BaTii.

Implikasi:

- Perlu pemahaman lebih dalam terkait IS RBTK Kementerian Keuangan yang terkait Direktorat PPKBLU dan pencapaiannya termasuk perhitungan IKUnya.

Akar masalah:

- Implementasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan tidak dapat diselesaikan langsung secara mandiri, perlu pihak-pihak lain yang berkompeten untuk bisa bekerja sama mencapai tujuan.

Tindakan *extra effort* yang telah dilaksanakan:

- Melakukan koordinasi dengan pihak Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku pengusul dan Koordinator IKU.
- Melakukan internalisasi IS RBTK.

Formula:

$\frac{\text{Realisasi Durasi Milestone A} + \text{Realisasi Durasi Milestone B} + \dots + \text{Realisasi Durasi Milestone n}}{\text{Total Durasi}}$	$\times \% \text{ Bobot Proporsional}$
---	--

Berikut pembobotan realisasi:

TW I	: 25%
TW II	: 50%
TW III	: 75%
TW IV	: 100%

Seluruh data capaian diperoleh dari BaTii selaku pengampu dan pemberi *mandatory* IKU ini. Sedangkan di lingkup DJPb, yang berperan sebagai koordinator adalah Direktorat Sistem Perbendaharaan.

Perbandingan IKU

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2025 sehingga belum dapat dibandingkan dalam 5 tahun terakhir. Selain itu, tidak ada target pada renja maupun renstra. Berdasarkan kinerja tahunan didapatkan perbandingan target dan realisasi pada renja sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renja		Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	-	-	100	100

Tabel 53 Perbandingan realisasi IKU 8a-CP selama 5 tahun terakhir

Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi sumber daya diwujudkan melalui pemanfaatan SDM, anggaran, aset, serta IT dan data secara terintegrasi antarunit di lingkungan Kementerian Keuangan. Implementasi inisiatif strategis dilakukan dengan mengoptimalkan infrastruktur dan sistem yang telah tersedia, sehingga tidak memerlukan pengembangan sumber daya baru yang signifikan. Selain itu, pemanfaatan data analytics sebagai dasar pengambilan keputusan turut meningkatkan ketepatan dan kecepatan pelaksanaan program, sehingga target implementasi dapat tercapai secara efektif dan melampaui rencana yang ditetapkan.

GEDSI

Dalam pelaksanaan Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit, prinsip GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) diintegrasikan dengan memastikan setiap inisiatif strategis dan pemanfaatan data analytics mempertimbangkan aspek kesetaraan. Perencanaan dan implementasi program dilakukan dengan membuka ruang partisipasi yang setara bagi seluruh pegawai, tanpa membedakan gender, kondisi disabilitas, maupun latar belakang sosial. Selain itu, pemanfaatan data didorong untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih adil dan responsif.

Rencana Aksi

IKU ini masih menunggu dan akan diinformasikan kembali oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku PMO/CTO DJPb mengenai keberlanjutan IKU IS RBTK. Sehingga, untuk rencana aksi belum bisa disampaikan.

- Indikator Kinerja Utama (IKU) 2:

8b-N Indeks Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU

Modernisasi Pengelolaan BLU adalah Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengelolaan BLU untuk menyajikan data dan informasi kepada internal dan eksternal secara handal yang dilakukan dengan pengembangan

sistem informasi terintegrasi sehingga sumber daya dapat dikelola secara efektif dan efisien dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat modernisasi BLU dalam rangka peningkatan layanan, akuntabilitas manajemen dan pemanfaatan data dalam rangka pengambilan keputusan (decision support system).

IKU ini merupakan IKU *Non Cascading* dengan memiliki polarisasi: maximize, tingkat kendali: moderate, tingkat validitas: proxy, jenis konsolidasi periode: take last known value dan periode pelaporan triwulanan. Tahun 2025 memiliki target yang ditentukan sebesar 3 dengan realisasi sebesar 3, sehingga memiliki capaian sebesar 100.

K-Two	8. Pengelolaan IT yang Andal dan Data yang Berkualitas							
	8b-N Indeks Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	Max/ TLK
Realisasi	2	2	2	3	3	3	3	
Capaian	66,67	66,67	66,67	100	100	100	100	

Tabel 54 Realisasi Capaian IKU 8b-N

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan capaian yang semakin membaik sepanjang tahun 2025. Pada triwulan I sampai dengan triwulan II, realisasi berada pada sebesar indeks 2 dari target 3 (66,67%). Namun, mulai triwulan III hingga akhir tahun, realisasi meningkat menjadi indeks 3 sehingga capaian mencapai 100% dan konsisten terjaga sampai Triwulan IV tahun 2025. Adapun realisasi dari masing-masing komponen belum maksimal sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Subdirektorat	Kelengkapan dan Kualitas Data	Extra Mile Webservice	Indeks
PPKBLU I	77,16	6,02	4
PPKBLU II	60,01	5,21	3
PPKBLU III	67,67	8,97	3
DIREKTORAT	68,28	6,73	3

Tabel 55 Realisasi Masing-Masing Komponen

Isu utama:

- Compliance Satker BLU dalam memenuhi kelengkapan dan kualitas data pada BIOS yang masih bisa ditingkatkan.
- Pemenuhan kepatuhan (compliance) Satker BLU perlu diimbangi dengan mekanisme reward and punishment yang jelas dan terukur agar BLU terdorong untuk mematuhi ketentuan secara konsisten.
- Pergantian pegawai secara internal pada masing-masing BLU yang menjadi operator BIOS dan admin webservice.

Implikasi:

- Perlu pengecekan dan validasi secara rutin oleh pembina keuangan bekerja sama dengan pembina teknis.

Akar masalah:

- Operator dan Approval baru pada Satker BLU karena alih tugas.
- Koordinasi internal dalam manajemen data pada Satker BLU.
- Pemimpin BLU yang tidak aware dengan target input/upload di BIOS.

Tindakan *extra effort* yang telah dilaksanakan:

- Melakukan berbagai kegiatan pendampingan dalam bentuk konsultasi, bimtek, pembinaan, pembelajaran dll kepada para stakeholder maupun pengguna layanan seintensif mungkin.
- Melakukan kolaborasi internal antar subdit dan eksternal dalam hal ini pembina teknis.
- Menyusun IKU Indeks Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU menjadi indikator kinerja utama pada Kontrak Kinerja Pemimpin BLU dengan Ditjen Perbendaharaan.

Formula:

% Capaian = Persentase Penyelesaian Indikator + Persentase Extra Mile

Indeks	% Capaian
Indeks 5	$90\% < Y$
Indeks 4	$80\% < Y \leq 90\%$
Indeks 3	$60\% < Y \leq 80\%$
Indeks 2	$30\% < Y \leq 60\%$
Indeks 1	$30\% \geq Y$

Tabel 56 Persentase Penyelesaian Indikator + Persentase Extra Mile

IKU Indeks Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

1. Integrasi Data (Extra Mile) - bobot 20%
 - a. Pengembangan Webservice pada Tahap Development

- b. Pengembangan Webservice pada Tahap Production
 - c. Kelengkapan Pengiriman Data
2. Operasionalisasi BIOS – bobot 80%
- Kelengkapan Data pada Modul BIOS:
- a. Profil non SDM
 - b. Profil SDM
 - c. Data Layanan
 - d. Data Keuangan
 - e. Rencana Bisnis Anggaran Indikatif
 - f. Rencana Bisnis Anggaran Definitif
 - g. Rencana Strategis Bisnis
 - h. Dokumen Kontrak Kinerja
 - i. Dokumentasi
 - j. Pembinaan
 - k. Dewas
 - l. Maturity Rating Assessment
 - m. Usulan Tarif
 - n. Laporan Pelaksanaan Tarif
 - o. Laporan Pelaksanaan Remunerasi

Perbandingan IKU

IKU ini tidak termasuk ke dalam renja maupun renstra DJPb dan Direktorat PPKBLU. IKU Indeks Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU merupakan IKU baru di tahun 2025 sehingga target dan realisasi tidak dapat dibandingkan selama 5 (lima) tahun terakhir.

Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi sumber daya pada IKU Modernisasi Pengelolaan BLU diwujudkan melalui pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan proses pengelolaan data, pelaporan, dan pengambilan keputusan dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Integrasi sistem mengurangi duplikasi pekerjaan, meminimalkan proses manual, serta mengoptimalkan penggunaan SDM dan infrastruktur TI yang telah tersedia. Dengan dukungan teknologi yang andal, pengelolaan BLU dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas manajemen tanpa memerlukan penambahan sumber daya yang signifikan.

GEDSI

Pada IKU Modernisasi Pengelolaan BLU diwujudkan melalui pengembangan sistem informasi yang aksesibel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna yang beragam. Pemanfaatan teknologi informasi memastikan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses data dan layanan. Selain itu, penyajian informasi yang terbuka dan berbasis data mendukung pengambilan keputusan yang lebih adil, inklusif, dan mempertimbangkan kepentingan berbagai kelompok masyarakat.

Rencana Aksi

Berikut rencana aksi yang akan dilakukan oleh Direktorat PPK BLU, yaitu:

1. Melakukan penyempurnaan formula IKU Tahun 2026 agar lebih relevan, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan modernisasi BLU;
2. Melakukan sosialisasi dan bimbingan secara intens kepada BLU;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan dashboard dan pelaporan digital untuk monitoring kinerja BLU; dan
4. Melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi BLU yang terintegrasi.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU) sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp2.343.697.629 atau 97,7%. Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, nilai pagu terjadi penurunan pagu sebesar Rp2.272.832.000, secara persentase terdapat peningkatan penyerapan sebesar 5,06%. Untuk jenis belanja di Direktorat PPKBLU hanya terdapat jenis belanja barang (52) karena belanja pegawai (51) dan belanja modal (53) semuanya ada di Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Data realisasi selama 5 (lima) tahun terakhir tersaji pada table berikut:

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum						
Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi DIPA (%)	Realisasi per Jenis Belanja		
				Pegawai (51)	Barang (52)	Modal (53)
2021	5.933.069.000	5.770.537.101	97,26%	0	5.770.537.101	0
2022	7.047.031.000	7.030.405.586	99,76%	0	7.030.405.586	0
2023	5.107.516.000	5.031.502.015	98,51%	0	5.031.502.015	0
2024	4.671.689.000	4.327.968.105	92,64%	0	4.327.968.105	0
2025	2.398.857.000	2.343.697.629	97,70%	0	2.343.697.629	0

Tabel 57 Data Pagu dan Realisasi

Rincian akun yang digunakan oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tahun 2024 hanya berkisar akun belanja barang (52). Dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), hanya terdapat delapan akun dengan masing-masing realisasinya sebagai berikut:

Akun	Uraian	Realisasi
521111	Belanja operasional	12.174.000
521211	Belanja bahan dan konsumsi	586.065.655
521213	Honor tim tarif dan remunerasi serta tim penetapan pencabutan BLU	90.000.000
522151	Honorarium narasumber	273.400.000
522191	Penyediaan jasa lainnya	222.035.375
524111	Perjalanan dinas luar kota	657.134.599
524113	Perjalanan dinas dalam kota	9.473.000
524114	Paket fullboard meeting dalam kota	404.900.000
524119	Paket fullboard meeting luar kota	88.515.000
TOTAL		2.343.697.629

Tabel 58 Rincian Akun Realisasi Belanja

Sedangkan untuk realisasi berdasarkan program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja awal tahun sebagaimana di bawah ini:

Program:	
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	1.666.043.730
Kegiatan:	
Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	220.148.100
Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	1.021.013.130
Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	424.882.500
Program:	
Dukungan Manajemen	677.653.899
Kegiatan:	
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	162.844.524
Pengelolaan Organisasi dan SDM	514.809.375

Tabel 59 Realisasi Berdasarkan Program/Kegiatan

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam merealisasikan capaian kinerja perlu mempertimbangkan efisiensi penggunaan. Selain berkaitan dengan pencapaian kinerja, secara ruti Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum telah melakukan efisiensi secara rutin. Diantara bentuk efisiensi yang dilakukan adalah

penghematan anggaran dengan pemotongan sebagaimana kebijakan pimpinan, optimalisasi penyelesaian tugas pokok dan fungsi dengan pegawai yang ada, pemanfaatan teknologi digital dalam menjalankan tugas keseharian.

Bila dilihat dari alokasi anggaran pada awal tahun dan akhir tahun, terdapat penurunan alokasi. Walaupun ada penurunan alokasi, output tetap tercapai dengan persentase penyerapan yang sedikit lebih rendah dibanding dengan tahun sebelumnya. Gambaran perbandingan alokasi anggaran di awal tahun dengan akhir tahun disajikan pada tabel di bawah:

Uraian Program/Kegiatan	Awal Tahun	Akhir Tahun
Program: Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	3.871.056.000	3.875.863.000
Kegiatan: Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	741.728.000	739.640.000
Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	2.365.780.000	2.455.649.000
Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	763.548.000	680.574.000
Program: Dukungan Manajemen	1.084.748.000	795.826.000
Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	438.212.000	59.576.000
Pengelolaan Organisasi dan SDM	646.536.000	795.826.000

Tabel 60 Perbandingan Alokasi Anggaran Awal Tahun dengan Akhir Tahun

Data di atas menunjukkan penurunan secara total sejumlah Rp284.115.000 atau 5,73% lebih rendah dari pagu awal. Beberapa program yang strategis memerlukan revisi penambahan pagu dari program lain yang dirasa kurang strategis sehingga dalam data terdapat beberapa yang mengalami kenaikan alokasi pagu.

Data efisiensi tidak hanya menggunakan angka rupiah saja, namun secara kuantitas pegawai tahun 2025 masih sama dengan tahun 2024. Kinerja pegawai dengan kemampuan mengoptimalkan teknologi yang ada telah berhasil melakukan efisiensi perjalanan dinas tanpa mengurangi realisasi output pekerjaan. Pemanfaatan fasilitas Microsoft Teams kini sudah dilakukan oleh seluruh pegawai.

D. Kinerja Lain-lain

Disamping 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan capaian sebagaimana

diuraikan sebelumnya, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum juga menghasilkan kinerja lain selama tahun 2025 yang tidak masuk dalam Kontrak Kinerja Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tetapi terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Kinerja lain tersebut adalah sebagai berikut:

1. Inovasi Manajemen/Pelayanan

a. Petunjuk Teknis Tata Kelola Masa Transisi Pasca Penetapan Satker BLU

Ruang lingkup juknis terhadap satker BLU yang baru ditetapkan meliputi: a. Kontrak Kinerja Pemimpin BLU, b. Penyelesaian kewajiban sebelum menjadi Satuan Kerja BLU, c. Pengelolaan rekening, d. Administrasi user BIOS, e. Pengesahan pendapatan dan belanja, f. Kelembagaan BLU, dan g. Penetapan tarif layanan BLU.

b. SAKTI BLU

Pada awal tahun 2025 mulai diterapkannya SAKTI BLU khususnya modul penganggaran yang telah dilakukan update dalam mendukung modul pelaksanaan. Beberapa pembaruan yang ada antara lain penambahan kode sumber dana dari saldo awal dan penambahan item input untuk revisi ambang batas. Untuk modul pelaksanaan juga dikembangkan sampai dengan proses user acceptance test.

c. 9 Box Performance

Pada tahun 2025, telah ditetapkan inovasi 9 Box Performance melalui Keputusan Direktur PPK BLU nomor KEP-19/PB.5/2025 tanggal 23 September 2025 hal Penetapan Inovasi 9 Box Performance. 9 Box Performance merupakan tools penilaian kinerja BLU yang dikembangkan untuk mendukung proses monitoring dan evaluasi (monev) secara on desk. Alat ini mengukur kinerja BLU dari dua dimensi utama, yaitu kinerja keuangan dan layanan serta kepatuhan dan fleksibilitas BLU. Penilaian dilakukan melalui parameter pemenuhan persyaratan substantif, teknis, administratif suatu Satuan Kerja menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU, kepatuhan BLU terhadap regulasi, serta pemanfaatan fleksibilitas yang diberikan dalam pola pengelolaan keuangan BLU.

2. Capaian Lainnya Pada Tahun 2025

1) Seminar BLU Preneur

Dalam rangka memperkuat peran kepemimpinan untuk mewujudkan Badan Layanan Umum (BLU) yang lebih produktif, inovatif, dan berdaya saing, Direktorat PPKBLU telah menyelenggarakan seminar BLU-Preneur dengan

tema “Business Mindset, Public Impact”, yang diharapkan dapat membuka perspektif baru bagi pimpinan BLU dalam hal leadership dan entrepreneurship. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara hybrid pada hari Selasa, tanggal 25 November 2025 dengan peserta seminar yang terdiri atas 43 (empat puluh tiga) pimpinan BLU yang hadir secara fisik (luring) di Aula Jusuf Anwar, Kantor Pusat DJPb, dan 295 (dua ratus sembilan puluh lima) perwakilan BLU yang bergabung secara online (daring).



Gambar 8 Seminar BLU Preneur



BAB 4 PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban visi misi Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tahun anggaran 2025 dan disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2015 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2025 capaian IKU Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum seluruhnya telah melebihi target yang ditetapkan, termasuk IKU Tingkat Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU yang mendukung IKU Kemenkeu *One*. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang harus diperbaiki guna capaian yang lebih baik. Untuk itu tahun berikutnya akan selalu dilakukan perbaikan melalui dukungan sumber daya, arah kebijakan, dan strategi perkembangan inovasi-inovasi untuk peningkatan kualitas layanan serta tata kelola BLU.

Selain pencapaian kinerja organisasi, beberapa pelaksanaan agenda strategis dilakukan selama tahun 2025 yang menjadi *highlight*. Integrasi data dan kualitas informasi untuk menunjang analisis sangat penting agar terwujud kebijakan atau keputusan yang tepat sasaran. Direktorat telah melakukan berbagai upaya mewujudkan hal tersebut dengan bekerja sama lintas instansi untuk pertukaran data, pengembangan aplikasi, serta peningkatan kapasitas pegawai dalam rangka pengolahan data serta analisis informasi. Kerja sama ini dilakukan tidak hanya secara internal Kementerian Keuangan namun juga dengan Kementerian lain atau lembaga profesional.

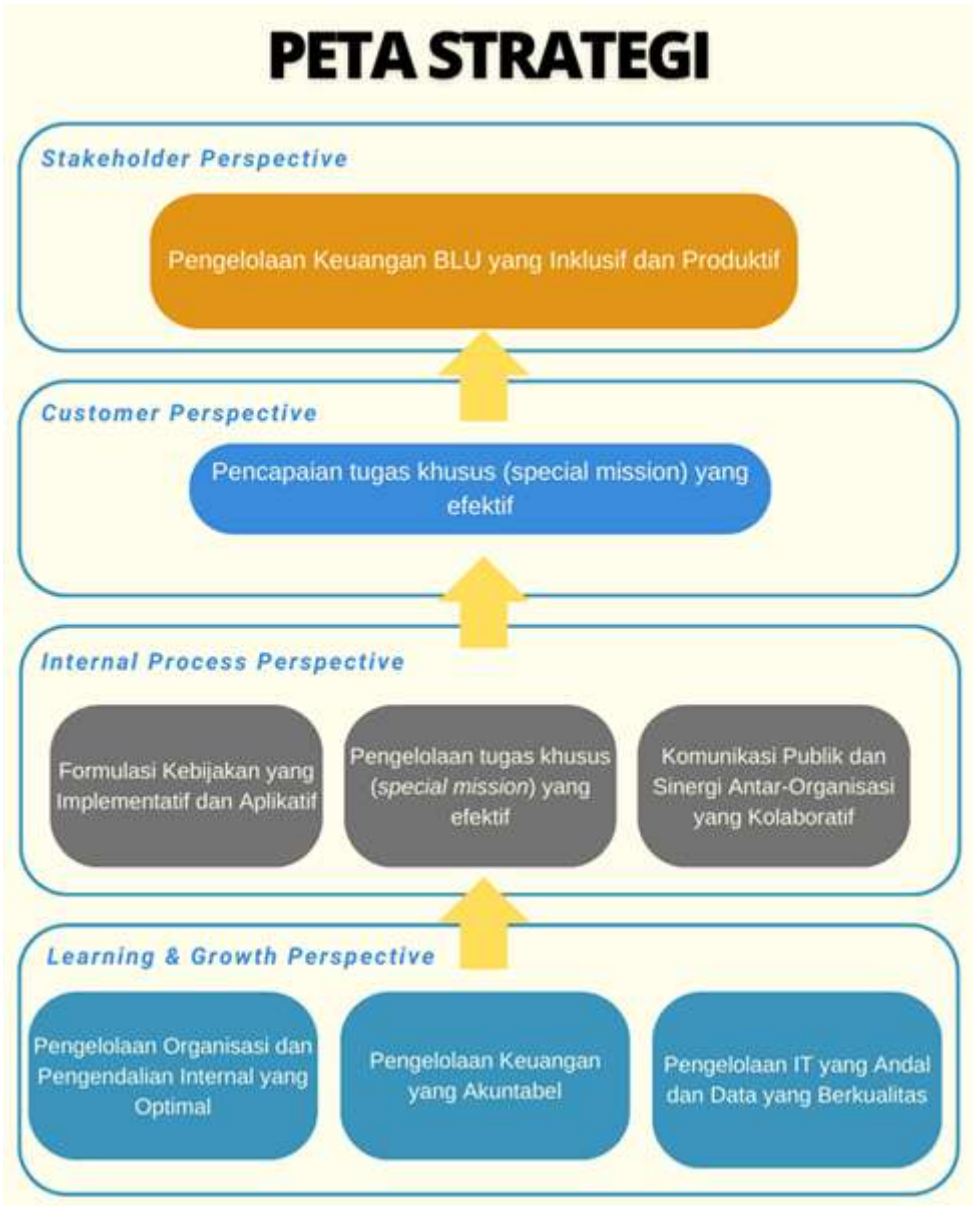
Perumusan kebijakan baru juga dilaksanakan di tahun ini, berupa petunjuk teknis pengelolaan unit usaha BLU. Petunjuk teknis ini diperlukan agar menjadi pedoman yang jelas bagi BLU untuk bisa mengoptimalkan aset yang dimiliki. Harapannya BLU tidak lagi ragu-ragu dalam mengelola aset yang *idle* dalam lingkungan mereka dan bisa dioptimalkan dengan adanya unit usaha BLU.

Komitmen di masa mendatang dalam pencapaian rencana strategis dan arah kebijakan Kementerian Keuangan khususnya lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan selalu ditingkatkan. Inovasi dan terobosan baru akan selalu diinisiasi agar dapat mencapai

tujuan strategis organisasi. Demikian pula dengan peningkatan kualitas pegawai agar dapat diandalkan dalam menghadapi perubahan jaman. Diharapkan dokumen ini dapat dijadikan sebagai pedoman segenap elemen Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dalam pengambilan kebijakan strategis selanjutnya guna mewujudkan visi Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-5/PB/2025
DIREKTUR PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
DIREKTUR PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan Keuangan BLU yang Inklusif dan Produktif	1a-CP	Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU	3 (skala 5)
		1b-N	Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU	3 (skala 5)
2	Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif	2a-N	Tingkat kepuasan pengguna layanan	100
		2b-N	Tingkat Perkembangan Pendapatan BLU	100
3	Formulasi Kebijakan yang Implementatif dan Aplikatif	3a-CP	Indeks Kinerja Reformasi Hukum	95.5
		3b-N	Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan	80
4	Pengelolaan tugas khusus (special mission) yang efektif	4a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	92%
		4b-N	Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating	100
5	Komunikasi Publik dan Sinergi Antar-Organisasi yang Kolaboratif	5a-N	Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan	4 (skala 5)
		5b-N	Indeks Kualitas Penugasan BLU, asistensi BLUD dan UMKM	4 (skala 5)
6	Pengelolaan Organisasi dan Pengendalian Internal yang Optimal	6a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100
7	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	7a-CP	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu	100
8	Pengelolaan IT yang Andal dan Data yang Berkualitas	8a-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%
		8b-N	Indeks Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU	3 (skala 5)

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Program:

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko Rp4,094,206,000

Kegiatan

1. Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pembina dan Pengelola Keuangan BLU Rp845,930,000
2. Rekomendasi atas Peningkatan Kinerja Keuangan BLU dan Investasi Pemerintah di Daerah Rp2,402,048,000



3.	Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Pengelolaan Keuangan BLU	Rp514,800,000
4.	Peraturan Lainnya Mengenai Pengelolaan Keuangan BLU	Rp331,428,000
Program:		
Program Dukungan Manajemen		Rp1,084,748,000
Kegiatan		
1.	Kerumahtanggaan	Rp145,800,000
2.	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	Rp176,160,000
3.	Layanan Perkantoran	Rp49,988,000
4.	Pengembangan SDM	Rp712,800,000

Jakarta, 5 Februari 2025

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani Secara Elektronik
Astera Primanto Bhakti

Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum



Ditandatangani Secara Elektronik
Ririn Kadariyah



RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Keuangan BLU yang Inklusif dan Produktif							
1a-CP	Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU	3	3	3	3	3	3	3 (skala 5)
1b-N	Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU	3	3	3	3	3	3	3 (skala 5)
2	Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif							
2a-N	Tingkat kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
2b-N	Tingkat Perkembangan Pendapatan BLU	100	100	100	100	100	100	100
3	Formulasi Kebijakan yang Implementatif dan Aplikatif							
3a-CP	Indeks Kinerja Reformasi Hukum	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
3b-N	Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan	20	40	40	60	60	80	80
4	Pengelolaan tugas khusus (special mission) yang efektif							
4a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%
4b-N	Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating	100	100	100	100	100	100	100
5	Komunikasi Publik dan Sinergi Antar-Organisasi yang Kolaboratif							
5a-N	Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan	4	4	4	4	4	4	4 (skala 5)
5b-N	Indeks Kualitas Penugasan BLU, asistensi BLUD dan UMKM	4	4	4	4	4	4	4 (skala 5)
6	Pengelolaan Organisasi dan Pengendalian Internal yang Optimal							
6a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100	100	100	100	100	100	100
7	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
7a-CP	Indeks Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	Kemenkeu							
8	Pengelolaan IT yang Andal dan Data yang Berkualitas							
8a-CP	Persentase Implementasi IS RBTk dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
8b-N	Indeks Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU	3	3	3	3	3	3	3 (skala 5)

Jakarta, 5 Februari 2025

Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum



Ditandatangani Secara Elektronik
Ririn Kadariyah



INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			
1	Pengelolaan IT yang Andal dan Data yang Berkualitas	SAKTI BLU	Aplikasi yang telah	Januari - Maret	Penetapan User Requirement (UR) untuk modul yang akan dikembangkan	Laporan Kegiatan	Triwulan I s.d. Triwulan IV	1. Subdirektora t Peraturan dan Standardisasi Teknis Badan Layanan Umum 2. Subdirektora t Tarif, Remunerasi, dan Informasi Badan Layanan Umum 3. Subdirektora t Pembinaan	0
			dikembangkan untuk	April - Juni	User Acceptance Test (UAT) untuk modul aplikasi yang telah dikembangkan	Laporan Hasil Uji Aplikasi			
			digunakan khusus oleh Satker	Juli - September	Sosialisasi dan End User Training (EUT)	Laporan Pelaksanaan Bimtek			
			BLU dan dapat digunakan untuk melaksanakan siklus pengelolaan keuangan dari	Oktober - Desember	Roll out modul terupdate kepada seluruh BLU	Laporan Monitoring Penggunaan aplikasi SAKTI BLU			



			perencanaan hingga pelaporan					Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum I 4. Subdirektora t Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum II 5. Subdirektora t Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum III	
--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--



Jakarta, 5 Februari 2025

Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum



Ditandatangani Secara Elektronik
Ririn Kadariyah



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Ririn Kadariyah		NAMA	Astera Primanto Bhakti
NIP	19720618 199703 2 002		NIP	19680120 199201 1 003
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum		JABATAN	Direktur Jenderal Perbendaharaan
UNIT KERJA	Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan Keuangan BLU yang Inklusif dan Produktif	Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU	3 (skala 5)	Penerima Layanan
		Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU	3 (skala 5)	Penerima Layanan
2	Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif	Tingkat kepuasan pengguna layanan	100	Penerima Layanan
		Tingkat Perkembangan Pendapatan BLU	100	Penerima Layanan
3	Formulasi Kebijakan yang Implementatif dan Aplikatif	Indeks Kinerja Reformasi Hukum	95.5	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan	80	Proses Bisnis
4	Pengelolaan tugas khusus (special mission) yang efektif	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	92%	Proses Bisnis

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 5 Februari 2025



		Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating	100	Proses Bisnis
5	Komunikasi Publik dan Sinergi Antar-Organisasi yang Kolaboratif	Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan	4 (skala 5)	Proses Bisnis
		Indeks Kualitas Penugasan BLU, asistensi BLUD dan UMKM	4 (skala 5)	Proses Bisnis
6	Pengelolaan Organisasi dan Pengendalian Internal yang Optimal	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu	100	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengelolaan IT yang Andal dan Data yang Berkualitas	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU	3 (skala 5)	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	



PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	



PERILAKU KERJA		
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Jakarta, 5 Februari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik

Astera Primanto Bhakti
19680120 199201 1 003



Ditandatangani secara elektronik

Ririn Kadariyah
19720618 199703 2 002

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 5 Februari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA

1.

77 pegawai

2.

Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU	3	3	3	3	3	3	3 (skala 5)
1b-N	Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU	3	3	3	3	3	3	3 (skala 5)
2a-N	Tingkat kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
2b-N	Tingkat Perkembangan Pendapatan BLU	100	100	100	100	100	100	100
3a-CP	Indeks Kinerja Reformasi Hukum	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
3b-N	Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan	20	40	40	60	60	80	80
4a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 5 Februari 2025



	4b-N	Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating	100	100	100	100	100	100	100
	5a-N	Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan	4	4	4	4	4	4	4 (skala 5)
	5b-N	Indeks Kualitas Penugasan BLU, asistensi BLUD dan UMKM	4	4	4	4	4	4	4 (skala 5)
	6a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100	100	100	100	100	100	100
	7a-CP	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu	100	100	100	100	100	100	100
	8a-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
	8b-N	Indeks Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU	3	3	3	3	3	3	3 (skala 5)
KONSEKUENSI									
	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								
	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.								



Jakarta, 5 Februari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Astera Primanto Bhakti

19680120 199201 1 003

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Ririn Kadariyah

19720618 199703 2 002

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 5 Februari 2025





**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-5/PB/2026
DIREKTUR PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



PETA STRATEGI



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026
DIREKTUR PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan Keuangan BLU yang Inklusif dan Akuntabel	1a-CP	Indeks Kepercayaan Stakeholders	100
		1b-CP	Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU	3.25 (skala 5)
2	Pencapaian Tugas Khusus (special mission) yang Efektif	2a-N	Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU	3.25 (skala 5)
		2b-N	Indeks Perkembangan Pendapatan BLU	3 (skala 5)
3	Formulasi Kebijakan yang Implementatif dan Aplikatif	3a-CP	Nilai Kinerja Regulasi Kemenkeu	90
		3b-N	Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan	80
4	Pengelolaan Tugas Khusus yang efektif serta Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Transparan dan Akuntabel	4a-CP	Indeks Kualitas LKPP dan LK BUN	100
		4b-CP	Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah	4 (skala 5)
		4c-N	Indeks Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating	3 (skala 5)
5	Komunikasi Publik dan Sinergi Antar-Organisasi yang Kolaboratif	5a-N	Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan	4 (skala 5)
		5b-N	Indeks Kualitas Penugasan BLU, Asistensi BLUD dan UMKM	4.25 (skala 5)
6	Pengelolaan Keuangan yang Akutabel	6a-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan	100
7	Pengelolaan Organisasi dan IT yang Andal	7a-CP	Indeks Keberhasilan Transformasi	100
		7b-N	Persentase Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU	60%

Program/Kegiatan 2026

Anggaran

Program:

Program Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko Rp1,195,088,000

Kegiatan

1. Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pembina dan Pengelola Keuangan BLU Rp95,061,000
2. Edukasi Satker terkait Peningkatan Fungsi Aplikasi BIOS Rp15,309,000
3. Penajaman Metode Data Analytical BLU Rp4,990,000
4. Rekomendasi atas peningkatan kinerja keuangan BLU dan Investasi Pemerintah di Daerah Rp718,124,000
5. Peraturan dan ketetapan mengenai pengelolaan keuangan badan Rp185,925,000



layanan umum	
6. Peraturan Lainnya Mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	Rp175,679,000
Program:	
Dukungan Manajemen	Rp431,154,000
Kegiatan	
1. Kerumahtanggaan	Rp91,854,000
2. Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	Rp78,254,000
3. Layanan Perkantoran	Rp44,989,000
4. Pengembangan SDM	Rp216,057,000

Jakarta, Januari 2026

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani Secara Elektronik
Astera Primanto Bhakti

Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum



Ditandatangani Secara Elektronik
Meirijal Nur



RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Keuangan BLU yang Inklusif dan Akuntabel							
1a-CP	Indeks Kepercayaan Stakeholders	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25 (skala 5)
2	Pencapaian Tugas Khusus (special mission) yang Efektif							
2a-N	Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25 (skala 5)
2b-N	Indeks Perkembangan Pendapatan BLU	3	3	3	3	3	3	3 (skala 5)
3	Formulasi Kebijakan yang Implementatif dan Aplikatif							
3a-CP	Nilai Kinerja Regulasi Kemenkeu	90	90	90	90	90	90	90
3b-N	Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan	20	40	40	60	60	80	80
4	Pengelolaan Tugas Khusus yang efektif serta Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Transparan dan Akuntabel							
4a-CP	Indeks Kualitas LKPP dan LK BUN	100	100	100	100	100	100	100
4b-CP	Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah	4	4	4	4	4	4	4 (skala 5)
4c-N	Indeks Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating	3	3	3	3	3	3	3 (skala 5)
5	Komunikasi Publik dan Sinergi Antar-Organisasi yang Kolaboratif							
5a-N	Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan	4	4	4	4	4	4	4 (skala 5)
5b-N	Indeks Kualitas Penugasan BLU, Asistensi BLUD dan UMKM	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25 (skala 5)
6	Pengelolaan Keuangan yang Akutabel							
6a-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan	100	100	100	100	100	100	100
7	Pengelolaan Organisasi dan IT yang Andal							



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7a-CP	Indeks Keberhasilan Transformasi	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Persentase Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU	30%	40%	40%	50%	50%	60%	60%

Jakarta, Januari 2026

Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum



Ditandatangani Secara Elektronik
Meirijal Nur



INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			
1	Pengelolaan Organisasi dan IT yang Andal	SAKTI BLU	Aplikasi yang telah dikembangkan khusus untuk Satker BLU yang digunakan untuk melaksanakan siklus pengelolaan keuangan dari perencanaan hingga pelaporan	Januari - Maret	User Requirement SAKTI BLU modul bendahara	Laporan Kegiatan	Triwulan I s.d Triwulan IV	1. Subdirektora t Tarif, Remunerasi, dan Informasi Badan Layanan Umum	0
				April - Juni	User Requirement SAKTI BLU modul kas	Laporan Kegiatan			
					User Requirement SAKTI BLU modul penerimaan	Laporan Kegiatan			
					Oktober - Desember	User Requirement SAKTI BLU modul utang			



Jakarta, Januari 2026

Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum



Ditandatangani Secara Elektronik
Meirijal Nur



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Meirijal Nur		NAMA	Astera Primanto Bhakti
NIP	19680519 199403 1 001		NIP	19680120 199201 1 003
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum		JABATAN	Direktur Jenderal Perbendaharaan
UNIT KERJA	Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan Keuangan BLU yang Inklusif dan Akuntabel	Indeks Kepercayaan Stakeholders	100	Penerima Layanan
		Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU	3.25 (skala 5)	Penerima Layanan
2	Pencapaian Tugas Khusus (special mission) yang Efektif	Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU	3.25 (skala 5)	Penerima Layanan
		Indeks Perkembangan Pendapatan BLU	3 (skala 5)	Penerima Layanan
3	Formulasi Kebijakan yang Implementatif dan Aplikatif	Nilai Kinerja Regulasi Kemenkeu	90	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan	80	Proses Bisnis
4	Pengelolaan Tugas Khusus yang efektif serta Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang	Indeks Kualitas LKPP dan LK BUN	100	Proses Bisnis
		Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah	4 (skala 5)	Proses Bisnis

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2026



	Transparan dan Akuntabel	Indeks Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating	3 (skala 5)	Proses Bisnis
5	Komunikasi Publik dan Sinergi Antar-Organisasi yang Kolaboratif	Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan	4 (skala 5)	Proses Bisnis
		Indeks Kualitas Penugasan BLU, Asistensi BLUD dan UMKM	4.25 (skala 5)	Proses Bisnis
6	Pengelolaan Keuangan yang Akutabel	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Pengelolaan Organisasi dan IT yang Andal	Indeks Keberhasilan Transformasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU	60%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	



PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	



PERILAKU KERJA		
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Jakarta, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Meirijal Nur

19680519 199403 1 001



Ditandatangani Secara Elektronik

Astera Primanto Bhakti

19680120 199201 1 003

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2026



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

DUKUNGAN SUMBER DAYA

1. 76 pegawai
2. Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks Kepercayaan Stakeholders	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25 (skala 5)
2a-N	Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25 (skala 5)
2b-N	Indeks Perkembangan Pendapatan BLU	3	3	3	3	3	3	3 (skala 5)
3a-CP	Nilai Kinerja Regulasi Kemenkeu	90	90	90	90	90	90	90
3b-N	Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan	20	40	40	60	60	80	80
4a-CP	Indeks Kualitas LKPP dan LK BUN	100	100	100	100	100	100	100

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2026



	4b-CP	Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah	4	4	4	4	4	4	4 (skala 5)
	4c-N	Indeks Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating	3	3	3	3	3	3	3 (skala 5)
	5a-N	Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan	4	4	4	4	4	4	4 (skala 5)
	5b-N	Indeks Kualitas Penugasan BLU, Asistensi BLUD dan UMKM	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25 (skala 5)
	6a-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan	100	100	100	100	100	100	100
	7a-CP	Indeks Keberhasilan Transformasi	100	100	100	100	100	100	100
	7b-N	Persentase Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU	30%	40%	40%	50%	50%	60%	60%
KONSEKUENSI									
	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								
	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								



Jakarta, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Meirijal Nur

19680519 199403 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Astera Primanto Bhakti

19680120 199201 1 003

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2026



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA-015.08.1.527010/2025

A. Dasar Hukum :

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (015)	KEMENTERIAN KEUANGAN	
2. Unit Organisasi	: (08)	DITJEN PERBENDAHARAAN	
3. Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA	
4. Kode>Nama Satker	: (527010)	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	
Sebesar	:Rp.	912.233.531.000,00	(Sembilan Ratus Dua Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu RUPIAH)
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :			
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :			
01		PELAYANAN UMUM	
01.01		LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :			Jumlah Uang

TERLAMPIR

C. Sumber Dana Berasal Dari:

1. Rupiah Murni	Rp.	912.233.531.000,00	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0,00
2. PNBPNBPN TA Berjalan	Rp.	0,00	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0,00
			- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0,00
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0,00	5. Hibah Langsung	Rp.	0,00
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0,00	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0,00
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0,00	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0,00
			6. SBSN PBS	Rp.	0,00

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTAI	(019)	Rp.	912.233.531.000,00
------------------	-------	-----	--------------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA-015.08.1.527010/2025

Satker : (527010) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp.	28.526.686.000,00
CD.6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp.	11.654.141.000,00
CD.6213	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp.	6.097.072.000,00
CD.6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	Rp.	3.835.170.000,00
CD.6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	Rp.	1.145.311.000,00
CD.6216	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp.	5.794.992.000,00
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	883.706.845.000,00
WA.4711	Legislasi dan Litigasi	Rp.	176.126.000,00
WA.4715	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp.	346.562.130.000,00
WA.4718	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp.	3.116.329.000,00
WA.4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp.	83.195.072.000,00
WA.4722	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp.	940.314.000,00
WA.4725	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Rp.	449.716.874.000,00

DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERBENDAHARAAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode / Nama Satker : (527010) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Jakarta, 2 Desember 2024
Direktur Jenderal Perbendaharaan

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI
NIP. 196801201992011003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga: (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERBENDAHARAAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (527010) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

						Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	912.233.531.000,00	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0,00	Rp.	0,00
1. Rupiah Murni	Rp.	912.233.531.000,00			(2) RPLN	US\$	0,00	Rp.	0,00
2. PNBPN	Rp.	0,00		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0,00	Rp.	0,00
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0,00			(2) RHLN	US\$	0,00	Rp.	0,00
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0,00		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0,00		
5. Hibah Langsung	Rp.	0,00		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0,00		
6. SBSN PBS	Rp.	0,00		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0,00		
				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0,00		

2. Rincian Pinjaman/Hibah : (dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc. Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERBENDAHARAAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode / Nama Satker : (527010) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Kewenangan : (KP) KANTOR PUSAT

Halaman II.1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/AKTIVITAS/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	20.994.947,00	607.567.540,00	283.671.044,00	-	-	912.233.531,00	01.51	RM
015.08.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	-	28.526.686,00	-	-	-	28.526.686,00		
6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	-	11.654.141,00	-	-	-	11.654.141,00		
6212.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.194.991,00	-	-	-	4.194.991,00		
01	RM	-	4.194.991,00	-	-	-	4.194.991,00		
6212.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	6.156.571,00	-	-	-	6.156.571,00		
01	RM	-	6.156.571,00	-	-	-	6.156.571,00		
6212.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	722.595,00	-	-	-	722.595,00		
01	RM	-	722.595,00	-	-	-	722.595,00		
6212.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	493.972,00	-	-	-	493.972,00		
01	RM	-	493.972,00	-	-	-	493.972,00		
6212.UAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	86.012,00	-	-	-	86.012,00		
01	RM	-	86.012,00	-	-	-	86.012,00		
6213	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	-	6.097.072,00	-	-	-	6.097.072,00		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERBENDAHARAAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode / Nama Satker : (527010) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Kewenangan : (KP) KANTOR PUSAT

Halaman II.2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/AKTIVITAS/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6213.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.076.995,00	-	-	-	4.076.995,00	01.51	RM
01 RM		-	4.076.995,00	-	-	-	4.076.995,00	019@	
6213.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	28.986,00	-	-	-	28.986,00	01.51	
01 RM		-	28.986,00	-	-	-	28.986,00	019@	
6213.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.991.091,00	-	-	-	1.991.091,00	01.51	
01 RM		-	1.991.091,00	-	-	-	1.991.091,00	019@	
6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	-	3.835.170,00	-	-	-	3.835.170,00		
6214.AED	Perjanjian (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	18.000,00	-	-	-	18.000,00	01.51	
01 RM		-	18.000,00	-	-	-	18.000,00	019@	
6214.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.551.611,00	-	-	-	1.551.611,00	01.51	
01 RM		-	1.551.611,00	-	-	-	1.551.611,00	019@	
6214.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	810.411,00	-	-	-	810.411,00	01.51	RM
01 RM		-	810.411,00	-	-	-	810.411,00	019@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**

Kementerian Negara / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERBENDAHARAAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode / Nama Satker : (527010) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Kewenangan : (KP) KANTOR PUSAT

Halaman II.3
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
 TAHUN ANGGARAN 2025
 NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
 II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (08) DITJEN PERBENDAHARAAN
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode / Nama Satker : (527010) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
 Kewenangan : (KP) KANTOR PUSAT

Halaman II.4
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/AKTIVITAS/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01	RM	-	1.164.643,00	-	-	-	1.164.643,00	019@	RM
6216.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.502.973,00	-	-	-	2.502.973,00	01.51	
01	RM	-	2.502.973,00	-	-	-	2.502.973,00	019@	RM
015.08.WA	Program Dukungan Manajemen	20.994.947,00	579.040.854,00	283.671.044,00	-	-	883.706.845,00		
4711	Legislasi dan Litigasi	-	176.126,00	-	-	-	176.126,00		
4711.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	176.126,00	-	-	-	176.126,00	01.51	
01	RM	-	176.126,00	-	-	-	176.126,00	019@	RM
4715	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	-	230.264.707,00	116.297.423,00	-	-	346.562.130,00		
4715.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	829.139,00	-	-	829.139,00	01.51	
01	RM	-	-	829.139,00	-	-	829.139,00	019@	RM
4715.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	224.272.962,00	-	-	-	224.272.962,00	01.51	
01	RM	-	224.272.962,00	-	-	-	224.272.962,00	019@	RM
4715.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	999,00	115.468.284,00	-	-	115.469.283,00	01.51	
01	RM	-	999,00	115.468.284,00	-	-	115.469.283,00	019@	RM

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**

Kementerian Negara / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERBENDAHARAAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode / Nama Satker : (527010) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Kewenangan : (KP) KANTOR PUSAT

Halaman II.5
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
 TAHUN ANGGARAN 2025
 NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
 II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (08) DITJEN PERBENDAHARAAN
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode / Nama Satker : (527010) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
 Kewenangan : (KP) KANTOR PUSAT

Halaman II.6
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/AKTIVITAS/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4725.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	259.627.782,00	-	-	-	259.627.782,00	01.51	
01	RM	-	259.627.782,00	-	-	-	259.627.782,00	019@	RM
4725.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	22.715.471,00	167.373.621,00	-	-	190.089.092,00	01.51	
01	RM	-	22.715.471,00	167.373.621,00	-	-	190.089.092,00	019@	RM
	JUMLAH	20.994.947,00	607.567.540,00	283.671.044,00	-	-	912.233.531,00		

Jakarta, 2 Desember 2024
 Direktur Jenderal Perbendaharaan

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI
 NIP. 196801201992011003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
 TAHUN ANGGARAN 2025
 NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (08) DITJEN PERBENDAHARAAN
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode dan Nama Satker : (527010) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

No.	KODE	SATKER	RENCANA PENARIKAN DANA/PERKIRAAN PENERIMAAN												JUMLAH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN RENCANA PENARIKAN DANA	3.590.808	17.396.749	62.270.446	48.821.930	186.329.025	11.416.592	32.524.477	26.701.165	28.757.727	56.443.498	43.056.930	394.924.182	912.233.531
		51 BELANJA PEGAWAI	230.529	1.842.562	2.094.855	1.603.285	1.188.816	1.899.753	1.420.978	1.754.929	1.813.562	1.649.124	1.849.556	3.646.997	20.994.947
		52 BELANJA BARANG DAN	3.360.279	15.142.816	10.262.760	47.001.989	150.078.833	9.516.838	30.293.062	24.906.235	26.944.165	21.929.306	19.417.797	248.713.460	607.567.540
		53 BELANJA MODAL	0	411.371	49.912.831	216.657	35.061.376	0	810.438	40.000	0	32.865.068	21.789.578	142.563.725	283.671.044
		015.08.CD.6212 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	661.306	859.261	52.243	644.807	648.070	706.722	1.082.196	886.922	892.419	761.182	870.201	3.588.812	11.654.141
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	661.306	859.261	52.243	644.807	648.070	706.722	1.082.196	886.922	892.419	761.182	870.201	3.588.812	11.654.141
		015.08.CD.6213 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	274.631	275.231	327.022	499.366	530.642	538.404	541.747	559.865	562.121	535.151	633.622	819.269	6.097.072
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	274.631	275.231	327.022	499.366	530.642	538.404	541.747	559.865	562.121	535.151	633.622	819.269	6.097.072
		015.08.CD.6214 Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	122.717	227.717	552.477	269.497	272.993	258.993	271.089	278.988	278.545	280.298	296.458	725.398	3.835.170
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	122.717	227.717	552.477	269.497	272.993	258.993	271.089	278.988	278.545	280.298	296.458	725.398	3.835.170
		015.08.CD.6215 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	3.922	26.442	4.528	13.402	3.922	37.768	196.341	33.763	53.729	8.236	26.821	736.436	1.145.311
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	3.922	26.442	4.528	13.402	3.922	37.768	196.341	33.763	53.729	8.236	26.821	736.436	1.145.311
		015.08.CD.6216 Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	82.228	85.228	86.297	366.323	317.307	329.875	371.314	473.981	449.004	515.285	509.448	2.208.703	5.794.992
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	82.228	85.228	86.297	366.323	317.307	329.875	371.314	473.981	449.004	515.285	509.448	2.208.703	5.794.992
		015.08.WA.4711 Legislasi dan Litigasi	16.147	16.147	16.147	16.147	16.147	16.147	16.147	16.147	16.147	15.963	6.663	8.177	176.126
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	16.147	16.147	16.147	16.147	16.147	16.147	16.147	16.147	16.147	15.963	6.663	8.177	176.126
		015.08.WA.4715 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	883.755	1.059.931	2.621.433	16.227.786	22.222.237	3.843.518	17.972.930	13.059.570	15.751.360	6.023.026	13.496.269	233.400.317	346.562.130
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	883.755	648.560	21.832	16.011.129	16.251.537	3.843.518	17.835.052	13.019.570	15.751.360	5.084.771	708.472	140.205.152	230.264.707
		53 BELANJA MODAL	0	411.371	2.599.601	216.657	5.970.700	0	137.878	40.000	0	938.255	12.787.797	93.195.165	116.297.423
		015.08.WA.4718 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	260.147	260.147	260.147	260.147	260.147	257.959	195.329	195.329	150.637	136.923	161.822	717.595	3.116.329
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	260.147	260.147	260.147	260.147	260.147	257.959	195.329	195.329	150.637	136.923	161.822	717.595	3.116.329

DAFTAR ISI
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian	:(015)	KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi	:(08)	DITJEN PERBENDAHARAAN
Provinsi	:(01)	DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker	:(527010)	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Halaman : III.2
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian	:(015)	KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi	:(08)	DITJEN PERBENDAHARAAN
Provinsi	:(01)	DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker	:(527010)	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Halaman : III.3
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

Jakarta, 2 Desember 2024
Direktur Jenderal Perbendaharaan

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI
NIP. 196801201992011003

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
IV A. B L O K I R

Kementerian Negara / Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [08] Ditjen Perbendaharaan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode / Nama Satker : [527010] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N
527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN		522191 Belanja Jasa Lainnya (RM) 107.890,00
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 233.221.625,00		Catatan
	52 BELANJA BARANG DAN Rp. 176.893.557,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 107.890,00
	53 BELANJA MODAL Rp. 56.328.068,00		Inpres I Tahun 2025
015.08.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi		522191 Belanja Jasa Lainnya (RM) 166.476,00
6212.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi		Catatan
	521211 Belanja Bahan (RM) 959.927,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 83.258,00
	Catatan		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak dapat dicairkan Rp. 638.861,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522191 Belanja Jasa Lainnya (RM) 587.071,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Catatan
	522151 Belanja Jasa Profesi (RM) 8.000,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 373.297,00
	Catatan		S37MK.022025
	Tidak dapat dicairkan Rp. 640,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Inpres I Tahun 2025		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 1.378.715,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Catatan
	522151 Belanja Jasa Profesi (RM) 77.560,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 850.201,00
	Catatan		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak dapat dicairkan Rp. 48.660,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM) 107.221,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Catatan
	522151 Belanja Jasa Profesi (RM) 30.100,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 44.790,00
	Catatan		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak dapat dicairkan Rp. 30.100,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	S37MK.022025		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM) 443.597,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
IV A. B L O K I R

Kementerian Negara / Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [08] Ditjen Perbendaharaan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode / Nama Satker : [527010] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N
6212.FAC	Catatan		Tidak dapat dicairkan Rp. 42.000,00
	Tidak dapat dicairkan Rp. 206.001,00		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi (RM) 112.800,00
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM) 47.400,00		Catatan
	Catatan		Tidak dapat dicairkan Rp. 67.720,00
	Tidak dapat dicairkan Rp. 47.400,00		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi (RM) 361.800,00
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM) 78.590,00		Catatan
	Catatan		Tidak dapat dicairkan Rp. 88.900,00
	Tidak dapat dicairkan Rp. 0,00		S37MK.022025
	null		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522191 Belanja Jasa Lainnya (RM) 524.364,00
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara		Catatan
	521211 Belanja Bahan (RM) 595.260,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 524.364,00
	Catatan		Inpres I Tahun 2025
	Tidak dapat dicairkan Rp. 376.710,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522191 Belanja Jasa Lainnya (RM) 75.000,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Catatan
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (RM) 396.000,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 75.000,00
	Catatan		S37MK.022025
	Tidak dapat dicairkan Rp. 396.000,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	S37MK.022025		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 2.479.841,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Catatan
	522141 Belanja Sewa (RM) 42.000,00		
	Catatan		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
IV A. B L O K I R

Kementerian Negara / Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [08] Ditjen Perbendaharaan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode / Nama Satker : [527010] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N
	Tidak dapat dicairkanRp. 1.673.683,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM)66.000,00 Catatan Tidak dapat dicairkanRp. 66.000,00 S37MK.022025 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM)3.000,00 Catatan Tidak dapat dicairkanRp. 1.500,00 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM)68.400,00 Catatan Tidak dapat dicairkanRp. 41.040,00 S37MK.022025 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM)1.068.200,00 Catatan Tidak dapat dicairkanRp. 500.479,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM)215.434,00 Catatan	6212.FAH	Tidak dapat dicairkanRp. 215.434,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara 521211 Belanja Bahan (RM)32.933,00 Catatan Tidak dapat dicairkanRp. 22.098,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi (RM)4.860,00 Catatan Tidak dapat dicairkanRp. 2.160,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya (RM)155.610,00 Catatan Tidak dapat dicairkanRp. 155.610,00 S37MK.022025 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM)241.575,00 Catatan Tidak dapat dicairkanRp. 173.334,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM)210.100,00

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
IV A. B L O K I R

Kementerian Negara / Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [08] Ditjen Perbendaharaan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode / Nama Satker : [527010] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Halaman : IV.A. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N
6212.FAL	Catatan	6212.UAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan
	Tidak dapat dicairkan Rp. 210.100,00	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 83.252,00
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Catatan	
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak dapat dicairkan Rp. 36.720,00	
	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	521211 Belanja Bahan (RM) 110.995,00	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Catatan	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM) 2.760,00	
	Tidak dapat dicairkan Rp. 54.950,00	Catatan	
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak dapat dicairkan Rp. 2.760,00	
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	522151 Belanja Jasa Profesi (RM) 13.600,00	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Catatan	6213	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko
	Tidak dapat dicairkan Rp. 13.600,00	6213.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
	Inpres I Tahun 2025	521211	Belanja Bahan (RM) 267.812,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Catatan	
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 262.180,00	Tidak dapat dicairkan Rp. 48.145,00	
	Catatan	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Tidak dapat dicairkan Rp. 200.360,00	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522141 Belanja Sewa (RM) 21.000,00	
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Catatan	
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM) 41.046,00	Tidak dapat dicairkan Rp. 21.000,00	
	Catatan	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Tidak dapat dicairkan Rp. 25.482,00	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522151 Belanja Jasa Profesi (RM) 18.360,00	
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Catatan	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
IV A. B L O K I R

Kementerian Negara / Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [08] Ditjen Perbendaharaan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode / Nama Satker : [527010] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Halaman : IV.A. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N
	Tidak dapat dicairkanRp. 8.160,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya (RM)393.184,00 Catatan Tidak dapat dicairkanRp. 393.184,00 S37MK.022025 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM)172.800,00 Catatan Tidak dapat dicairkanRp. 86.400,00 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM)2.525.712,00 Catatan Tidak dapat dicairkanRp. 1.539.071,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM)3.600,00 Catatan Tidak dapat dicairkanRp. 1.800,00 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM)73.927,00 Catatan	6213.FAH	Tidak dapat dicairkanRp. 51.720,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM)87.600,00 Catatan Tidak dapat dicairkanRp. 43.800,00 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM)63.150,00 Catatan Tidak dapat dicairkanRp. 63.150,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara 521211 Belanja Bahan (RM)5.000,00 Catatan Tidak dapat dicairkanRp. 2.500,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM)19.236,00 Catatan Tidak dapat dicairkanRp. 14.542,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
IV A. B L O K I R

Kementerian Negara / Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [08] Ditjen Perbendaharaan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode / Nama Satker : [527010] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Halaman : IV.A. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N
6213.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan		Catatan
	521211 Belanja Bahan (RM) 53.010,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 120.000,00
	Catatan		Inpres I Tahun 2025
	Tidak dapat dicairkan Rp. 26.505,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Inpres I Tahun 2025		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 912.169,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Catatan
	521211 Belanja Bahan (RM) 252.915,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 645.113,00
	Catatan		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak dapat dicairkan Rp. 95.258,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM) 63.200,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Catatan
	521211 Belanja Bahan (RM) 131.056,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 63.200,00
	Catatan		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak dapat dicairkan Rp. 131.056,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Sesuai Inpres No 1 Tahun 2025	6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6214.AED	Perjanjian
521213 Belanja Honor Output Kegiatan (RM) 28.000,00			521211 Belanja Bahan (RM) 18.000,00
Catatan			Catatan
Tidak dapat dicairkan Rp. 7.200,00			Tidak dapat dicairkan Rp. 6.750,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522151 Belanja Jasa Profesi (RM) 396.901,00		6214.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
Catatan			521211 Belanja Bahan (RM) 152.220,00
Tidak dapat dicairkan Rp. 292.349,00			Catatan
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
522191 Belanja Jasa Lainnya (RM) 120.000,00			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
IV A. B L O K I R

Kementerian Negara / Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [08] Ditjen Perbendaharaan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode / Nama Satker : [527010] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Halaman : IV.A. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N
	Tidak dapat dicairkanRp. 78.432,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi (RM)38.060,00 Catatan Tidak dapat dicairkanRp. 13.260,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya (RM)197.081,00 Catatan Tidak dapat dicairkanRp. 197.081,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM)451.270,00 Catatan Tidak dapat dicairkanRp. 333.326,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM)23.867,00 Catatan Tidak dapat dicairkanRp. 15.600,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM)80.403,00 Catatan		Tidak dapat dicairkanRp. 17.220,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM)420.010,00 Catatan Tidak dapat dicairkanRp. 248.092,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 6214.FALPengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM)14.540,00 Catatan Tidak dapat dicairkanRp. 11.100,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM)2.544,00 Catatan Tidak dapat dicairkanRp. 2.544,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 6214.UAEPemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 521211 Belanja Bahan (RM)7.873,00 Catatan Tidak dapat dicairkanRp. 5.700,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
IV A. B L O K I R

Kementerian Negara / Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [08] Ditjen Perbendaharaan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode / Nama Satker : [527010] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Halaman : IV.A. 8
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N
	522151 Belanja Jasa Profesi (RM)20.400,00	6215.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara
	Catatan		521211 Belanja Bahan (RM)22.012,00
	Tidak dapat dicairkanRp. 10.800,00		Catatan
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak dapat dicairkanRp. 9.346,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522191 Belanja Jasa Lainnya (RM)500.000,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Catatan		521211 Belanja Bahan (RM)100.513,00
	Tidak dapat dicairkanRp. 500.000,00		Catatan
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak dapat dicairkanRp. 77.436,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		S37MK.022025
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM)712.043,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Catatan		521211 Belanja Bahan (RM)37.700,00
	Tidak dapat dicairkanRp. 482.236,00		Catatan
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak dapat dicairkanRp. 12.792,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		s37mk.022025
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM)29.178,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Catatan		522151 Belanja Jasa Profesi (RM)3.600,00
	Tidak dapat dicairkanRp. 15.078,00		Catatan
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak dapat dicairkanRp. 3.600,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		S37MK.022025
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM)185.654,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Catatan		522191 Belanja Jasa Lainnya (RM)392.616,00
	Tidak dapat dicairkanRp. 82.298,00		Catatan
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak dapat dicairkanRp. 392.616,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		S37MK.022025
	6215 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
 TAHUN ANGGARAN 2025
 NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
 IV A. B L O K I R

Kementerian Negara / Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : [08] Ditjen Perbendaharaan
 Provinsi : [01] DKI JAKARTA
 Kode / Nama Satker : [527010] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Halaman : IV.A. 9
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N
6216	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 258.624,00	6216.AAC	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM) 41.976,00
	Catatan		Catatan
	Tidak dapat dicairkan Rp. 145.758,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 25.186,00
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM) 11.768,00		Peraturan Pemerintah
	Catatan		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 28.800,00
	Tidak dapat dicairkan Rp. 7.384,00		Catatan
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak dapat dicairkan Rp. 28.800,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
6216.AAA	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM) 68.524,00	6216.AAG	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Catatan		Peraturan Menteri
	Tidak dapat dicairkan Rp. 54.654,00		521211 Belanja Bahan (RM) 17.010,00
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Catatan
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak dapat dicairkan Rp. 4.860,00
	6216 Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif		Inpres 1 Tahun 2025
	Undang-Undang		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan (RM) 48.855,00		521211 Belanja Bahan (RM) 271.240,00
	Catatan		Catatan
	Tidak dapat dicairkan Rp. 24.482,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 100.200,00
	S37MK.022025		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan (RM) 329.200,00		521213 Belanja Honor Output Kegiatan (RM) 94.600,00
	Catatan		Catatan
	Tidak dapat dicairkan Rp. 192.976,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 63.600,00
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
IV A. B L O K I R

Kementerian Negara / Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [08] Ditjen Perbendaharaan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode / Nama Satker : [527010] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Halaman : IV.A. 10
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N
6216.AAH	521213 Belanja Honor Output Kegiatan (RM)141.000,00		Catatan
	Catatan		Tidak dapat dicairkanRp.79.291,00
	Tidak dapat dicairkanRp.92.160,00		S37MK.022025
	S37MK.022025		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521213 Belanja Honor Output Kegiatan (RM)18.800,00
	522191 Belanja Jasa Lainnya (RM)186.000,00		Catatan
	Catatan		Tidak dapat dicairkanRp.14.336,00
	Tidak dapat dicairkanRp.186.000,00		S37MK.022025
	Inpres I Tahun 2025		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi (RM)33.800,00
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM)106.650,00		Catatan
	Catatan		Tidak dapat dicairkanRp.25.400,00
	Tidak dapat dicairkanRp.106.650,00		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522191 Belanja Jasa Lainnya (RM)169.568,00
6216.AAH	Peraturan lainnya		Catatan
	521211 Belanja Bahan (RM)7.290,00		Tidak dapat dicairkanRp.169.568,00
	Catatan		S37MK.022025
	Tidak dapat dicairkanRp.7.290,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Inpres I Tahun 2025		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM)123.480,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Catatan
	521211 Belanja Bahan (RM)160.520,00		Tidak dapat dicairkanRp.61.740,00
	Catatan		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Tidak dapat dicairkanRp.85.260,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM)157.552,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Catatan
	521211 Belanja Bahan (RM)101.609,00		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
IV A. B L O K I R

Kementerian Negara / Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [08] Ditjen Perbendaharaan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode / Nama Satker : [527010] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Halaman : IV.A. 11
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N
6216.FAE	<i>Tidak dapat dicairkan</i> Rp. 122.322,00 <i>Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i> <i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>		<i>Tidak dapat dicairkan</i> Rp. 63.520,00 <i>Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i> <i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM) 60.760,00		522191 Belanja Jasa Lainnya (RM) 150.000,00
	Catatan		Catatan
	<i>Tidak dapat dicairkan</i> Rp. 60.760,00 <i>Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i> <i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>		<i>Tidak dapat dicairkan</i> Rp. 150.000,00 <i>Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i> <i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM) 195.423,00		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 911.979,00
	Catatan		Catatan
	<i>Tidak dapat dicairkan</i> Rp. 106.908,00 <i>Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i> <i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>		<i>Tidak dapat dicairkan</i> Rp. 613.571,00 <i>Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i> <i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM) 25.260,00
	521211 Belanja Bahan (RM) 127.637,00		Catatan
	Catatan		<i>Tidak dapat dicairkan</i> Rp. 17.460,00 <i>Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i> <i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>
	<i>Tidak dapat dicairkan</i> Rp. 82.015,00 <i>Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i> <i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM) 80.400,00
	521211 Belanja Bahan (RM) 1.590,00		Catatan
	Catatan		<i>Tidak dapat dicairkan</i> Rp. 40.200,00 <i>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</i> <i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>
	<i>Tidak dapat dicairkan</i> Rp. 1.479,00 <i>S37MK.022025</i> <i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM) 248.542,00
	522151 Belanja Jasa Profesi (RM) 157.920,00		Catatan
	Catatan		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
IV A. B L O K I R

Kementerian Negara / Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [08] Ditjen Perbendaharaan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode / Nama Satker : [527010] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Halaman : IV.A. 12
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N
015.08.WA	Tidak dapat dicairkan Rp. 248.542,00	4715	Catatan
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak dapat dicairkan Rp. 900,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri (RM) 251.703,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Catatan		4715 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum
	Tidak dapat dicairkan Rp. 176.193,00		4715.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (RM) 829.139,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Catatan
	Program Dukungan Manajemen		Tidak dapat dicairkan Rp. 829.139,00
	4711 Legislasi dan Litigasi		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	4711.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan (RM) 11.250,00		4715.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
	Catatan		521111 Belanja Keperluan Perkantoran (RM) 6.345.497,00
	Tidak dapat dicairkan Rp. 11.250,00		Catatan
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak dapat dicairkan Rp. 3.031.671,00
4711	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4715	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 66.920,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Catatan		521111 Belanja Keperluan Perkantoran (RM) 217.200,00
	Tidak dapat dicairkan Rp. 33.460,00		Catatan
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak dapat dicairkan Rp. 176.880,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		S37MK.022025
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 91.620,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Catatan		521111 Belanja Keperluan Perkantoran (RM) 3.339.064,00
	Tidak dapat dicairkan Rp. 46.350,00		Catatan
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM) 1.800,00		

NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025

Unit Organisasi : [08] Ditjen Perbendaharaan

Kode / Nama Satker : [527010] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Halaman : IV.A. 13
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N
	<i>Tidak dapat dicairkan</i> Rp. 3.339.064,00 Sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (RM) 2.364.650,00 Catatan		<i>Tidak dapat dicairkan</i> Rp. 23.300,00 S37MK.022025 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya (RM) 57.736,00 Catatan
	<i>Tidak dapat dicairkan</i> Rp. 630.000,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (RM) 90.000,00 Catatan		<i>Tidak dapat dicairkan</i> Rp. 57.736,00 Sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521211 Belanja Bahan (RM) 1.212.931,00 Catatan
	<i>Tidak dapat dicairkan</i> Rp. 70.000,00 S37MK.022025 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (RM) 15.804.000,00 Catatan		<i>Tidak dapat dicairkan</i> Rp. 514.755,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521211 Belanja Bahan (RM) 315.660,00 Catatan
	<i>Tidak dapat dicairkan</i> Rp. 15.804.000,00 Sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya (RM) 5.152.477,00 Catatan		<i>Tidak dapat dicairkan</i> Rp. 158.080,00 S37MK.022025 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521211 Belanja Bahan (RM) 291.420,00 Catatan
	<i>Tidak dapat dicairkan</i> Rp. 3.264.202,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya (RM) 23.300,00 Catatan		<i>Tidak dapat dicairkan</i> Rp. 291.420,00 Sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (RM) 3.525.021,00 Catatan

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
IV A. B L O K I R

Kementerian Negara / Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [08] Ditjen Perbendaharaan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode / Nama Satker : [527010] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Halaman : IV.A. 14
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N
	Tidak dapat dicairkan Rp. 1.066.752,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (RM) 450.743,00 Catatan		Tidak dapat dicairkan Rp. 24.000,00 S37MK.022025 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522141 Belanja Sewa (RM) 350.000,00 Catatan
	Tidak dapat dicairkan Rp. 200.000,00 S37MK.022025 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522111 Belanja Langganan Listrik (RM) 50.466.502,00 Catatan		Tidak dapat dicairkan Rp. 260.000,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi (RM) 12.000,00 Catatan
	Tidak dapat dicairkan Rp. 17.878.584,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522112 Belanja Langganan Telepon (RM) 5.084.484,00 Catatan		Tidak dapat dicairkan Rp. 3.000,00 S37MK.022025 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya (RM) 168.430,00 Catatan
	Tidak dapat dicairkan Rp. 1.994.773,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522113 Belanja Langganan Air (RM) 2.008.010,00 Catatan		Tidak dapat dicairkan Rp. 85.180,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya (RM) 450.000,00 Catatan
	Tidak dapat dicairkan Rp. 1.092.000,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya (RM) 24.000,00 Catatan		Tidak dapat dicairkan Rp. 200.000,00 S37MK.022025 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (RM) 9.776.633,00 Catatan

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
IV A. B L O K I R

Kementerian Negara / Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [08] Ditjen Perbendaharaan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode / Nama Satker : [527010] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Halaman : IV.A. 15
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N
	Tidak dapat dicairkanRp. 1.903.552,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya (RM)552.687,00 Catatan Tidak dapat dicairkanRp. 125.489,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (RM)32.472.985,00 Catatan Tidak dapat dicairkanRp. 26.331.928,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM)4.766.324,00 Catatan Tidak dapat dicairkanRp. 2.835.706,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM)147.200,00 Catatan Tidak dapat dicairkanRp. 88.320,00 S37MK.022025 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM)39.100,00 Catatan	4715.EBB	Tidak dapat dicairkanRp. 19.550,00 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM)260.113,00 Catatan Tidak dapat dicairkanRp. 96.863,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri (RM)1.159.970,00 Catatan Tidak dapat dicairkanRp. 347.960,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Layanan Sarana dan Prasarana Internal 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (RM)26.015.407,00 Catatan Tidak dapat dicairkanRp. 23.009.155,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (RM)2.448.200,00 Catatan Pengadaaan Kendaraan Dinas Jabatan Kantor Vertikal DJPb Sebanyak 5 Unit Tidak dapat dicairkanRp. 141.400,00 S37MK.022025 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (RM)33.339.125,00

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
IV A. B L O K I R

Kementerian Negara / Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [08] Ditjen Perbendaharaan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode / Nama Satker : [527010] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Halaman : IV.A. 16
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N
4715.EBD	Catatan Perbaikan Gedung Kantor Seluas 8.687 M2		Tidak dapat dicairkan Rp. 50.000,00
	Tidak dapat dicairkan Rp. 19.535.659,00		S37MK.022025
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi (RM) 12.600,00
	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Catatan
	521211 Belanja Bahan (RM) 277.094,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 1.800,00
	Catatan		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak dapat dicairkan Rp. 99.214,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi (RM) 5.400,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Catatan
	521211 Belanja Bahan (RM) 2.200,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 2.700,00
	Catatan		Sesuai Inpres No 1 Tahun 2024
	Tidak dapat dicairkan Rp. 440,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	S37MK.022025		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 314.858,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Catatan
	521211 Belanja Bahan (RM) 22.680,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 157.429,00
	Catatan		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Tidak dapat dicairkan Rp. 11.340,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Sesuai Inpres No 1 Tahun 2024		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 2.542.485,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Catatan
	521211 Belanja Bahan (RM) 6.750,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 1.016.120,00
	Catatan		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak dapat dicairkan Rp. 1.125,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	s37mk.022025		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM) 83.920,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Catatan
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (RM) 100.000,00		
	Catatan		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
IV A. B L O K I R

Kementerian Negara / Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [08] Ditjen Perbendaharaan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode / Nama Satker : [527010] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N
4718 4718.BMB	Tidak dapat dicairkan Rp. 41.960,00 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak dapat dicairkan Rp. 11.200,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM) 23.030,00		522191 Belanja Jasa Lainnya (RM) 186.254,00
	Catatan		Catatan
	Tidak dapat dicairkan Rp. 17.594,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak dapat dicairkan Rp. 186.250,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM) 847.048,00		522191 Belanja Jasa Lainnya (RM) 620.000,00
	Catatan		Catatan
	Tidak dapat dicairkan Rp. 320.990,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak dapat dicairkan Rp. 500.000,00 S37MK.022025 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	4718 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 228.745,00
	-----		Catatan
	521211 Belanja Bahan (RM) 400.000,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 176.220,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Catatan		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM) 16.150,00
	Tidak dapat dicairkan Rp. 300.000,00 S37MK.022025 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Catatan
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (RM) 100.000,00	4719	Tidak dapat dicairkan Rp. 12.750,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Catatan		-----
	Tidak dapat dicairkan Rp. 100.000,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522151 Belanja Jasa Profesi (RM) 15.000,00		
	Catatan		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
IV A. B L O K I R

Kementerian Negara / Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [08] Ditjen Perbendaharaan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode / Nama Satker : [527010] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Halaman : IV.A. 18
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N
4719.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Catatan
	521211 Belanja Bahan (RM) 478.825,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 571.268,00
	Catatan		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak dapat dicairkan Rp. 409.262,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 296.166,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Catatan
	521211 Belanja Bahan (RM) 33.080,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 228.636,00
	Catatan		s37mk.022025
	Tidak dapat dicairkan Rp. 31.622,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	s37mk.022025		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM) 1.360,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Catatan
	522151 Belanja Jasa Profesi (RM) 45.896,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 680,00
	Catatan		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Tidak dapat dicairkan Rp. 45.896,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM) 858.860,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Catatan
	522191 Belanja Jasa Lainnya (RM) 292.990,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 858.860,00
	Catatan		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak dapat dicairkan Rp. 215.515,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM) 147.700,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Catatan
	522191 Belanja Jasa Lainnya (RM) 511.141,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 147.700,00
	Catatan		s37mk.022025
	Tidak dapat dicairkan Rp. 511.141,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	s37mk.022025		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM) 1.311.435,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Catatan
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 1.870.805,00		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
IV A. B L O K I R

Kementerian Negara / Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [08] Ditjen Perbendaharaan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode / Nama Satker : [527010] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N
4719.EBC	Tidak dapat dicairkan s37mk.022025 Rp. 1.311.435,00 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak dapat dicairkan S37MK.022025 Rp. 30.000,00 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Layanan Manajemen SDM Internal		522131 Belanja Jasa Konsultan (RM) Rp. 66.250,00
	521211 Belanja Bahan (RM) Rp. 258.775,00		Catatan
	Catatan		Tidak dapat dicairkan Rp. 13.750,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak dapat dicairkan Rp. 142.663,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi (RM) Rp. 4.000,00
	521211 Belanja Bahan (RM) Rp. 168.490,00		Catatan
	Catatan		Tidak dapat dicairkan Rp. 1.600,00 Inpres I Tahun 2025
	Tidak dapat dicairkan Rp. 87.765,00 S37MK.022025		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi (RM) Rp. 1.592.750,00
	521211 Belanja Bahan (RM) Rp. 11.750,00		Catatan
	Catatan		Tidak dapat dicairkan Rp. 290.960,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak dapat dicairkan Rp. 11.375,00 s37mk.022025		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi (RM) Rp. 86.400,00
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (RM) Rp. 559.399,00		Catatan
	Catatan		Tidak dapat dicairkan Rp. 36.360,00 S37MK.022025
	Tidak dapat dicairkan Rp. 473.690,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi (RM) Rp. 15.400,00
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (RM) Rp. 30.000,00		Catatan
	Catatan		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
 TAHUN ANGGARAN 2025
 NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
 IV A. B L O K I R

Kementerian Negara / Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : [08] Ditjen Perbendaharaan
 Provinsi : [01] DKI JAKARTA
 Kode / Nama Satker : [527010] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Halaman : IV.A. 20
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N
	Tidak dapat dicairkan Rp. 15.400,00 s37mk.022025 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya (RM) 407.067,00 Catatan		Tidak dapat dicairkan Rp. 4.668.805,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 115.860,00 Catatan
	Tidak dapat dicairkan Rp. 407.067,00 Inpres I Tahun 2025 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya (RM) 270.417,00 Catatan		Tidak dapat dicairkan Rp. 115.860,00 s37mk.022025 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM) 343.357,00 Catatan
	Tidak dapat dicairkan Rp. 210.181,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya (RM) 3.020.440,00 Catatan		Tidak dapat dicairkan Rp. 225.276,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM) 348.997,00 Catatan
	Tidak dapat dicairkan Rp. 3.020.440,00 S37MK.022025 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 12.020,00 Catatan		Tidak dapat dicairkan Rp. 179.561,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM) 636.395,00 Catatan
	Tidak dapat dicairkan Rp. 6.010,00 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 6.697.621,00 Catatan	4722	Tidak dapat dicairkan Rp. 636.026,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal -----

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
IV A. B L O K I R

Kementerian Negara / Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [08] Ditjen Perbendaharaan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode / Nama Satker : [527010] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N
4722.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4725.CCL	Catatan
	521211 Belanja Bahan (RM) 84.173,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 122.400,00
	Catatan		s37mk.022025
	Tidak dapat dicairkan Rp. 59.269,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM) 1.020,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Catatan
	521211 Belanja Bahan (RM) 15.000,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 340,00
	Catatan		s37mk.022025
	Tidak dapat dicairkan Rp. 7.500,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	S37MK.022025		4725 Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		4725.CCL OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
	522151 Belanja Jasa Profesi (RM) 720,00		522191 Belanja Jasa Lainnya (RM) 18.037.691,00
	Catatan		Catatan
	Tidak dapat dicairkan Rp. 720,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 10.569.466,00
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522191 Belanja Jasa Lainnya (RM) 95.175,00		522191 Belanja Jasa Lainnya (RM) 2.609.130,00
	Catatan		Catatan
	Tidak dapat dicairkan Rp. 95.175,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 2.554.384,00
	s37mk.022025		S37MK.022025
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 383.406,00		523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (RM) 151.555.541,00
	Catatan		Catatan
	Tidak dapat dicairkan Rp. 197.646,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 30.206.073,00
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 228.800,00		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
IV A. B L O K I R

Kementerian Negara / Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [08] Ditjen Perbendaharaan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode / Nama Satker : [527010] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N
4725.FAB	523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (RM) 1.166.983,00		Catatan
	Catatan		Tidak dapat dicairkan Rp. 25.640,00
	Tidak dapat dicairkan Rp. 69.778,00		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	S37MK.022025		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi (RM) 1.066.500,00
	Sistem Informasi Pemerintahan		Catatan
	521211 Belanja Bahan (RM) 7.290,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 939.600,00
	Catatan		S37MK.022025
	Tidak dapat dicairkan Rp. 7.290,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Inpres I Tahun 2025		522191 Belanja Jasa Lainnya (RM) 60.424,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Catatan
	521211 Belanja Bahan (RM) 43.813,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 60.424,00
	Catatan		Inpres I Tahun 2025
	Tidak dapat dicairkan Rp. 26.066,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522191 Belanja Jasa Lainnya (RM) 8.269.964,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Catatan
	521211 Belanja Bahan (RM) 2.049.180,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 7.869.964,00
	Catatan		S37MK.022025
	Tidak dapat dicairkan Rp. 1.266.569,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	S37MK.022025		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 79.800,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Catatan
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan (RM) 129.510,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 39.900,00
	Catatan		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Tidak dapat dicairkan Rp. 66.060,00		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 7.598.949,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Catatan
	522151 Belanja Jasa Profesi (RM) 28.340,00		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
IV A. B L O K I R

Kementerian Negara / Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [08] Ditjen Perbendaharaan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode / Nama Satker : [527010] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N
	Tidak dapat dicairkan Rp. 4.330.081,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 1.249.500,00 Catatan		Tidak dapat dicairkan Rp. 35.550,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak dapat dicairkan Rp. 749.700,00 S37MK.022025 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM) 567.748,00 Catatan		
	Tidak dapat dicairkan Rp. 562.447,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM) 182.400,00 Catatan		
	Tidak dapat dicairkan Rp. 109.249,00 S37MK.022025 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM) 292.398,00 Catatan		
	Tidak dapat dicairkan Rp. 199.888,00 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM) 35.550,00 Catatan		

Jakarta, 2 Desember 2024
Direktur Jenderal Perbendaharaan

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI
NIP. 196801201992011003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.08.1.527010/2025
IV B. C A T A T A N

Kementerian Negara / Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [08] Ditjen Perbendaharaan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode / Nama Satker : [527010] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N
527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN		
015.08.WA	Program Dukungan Manajemen		
4715	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		
4715.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp. 80.326.311,00		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	- Pengadaaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor Pusat DJPb Sebanyak 8 Unit Pengadaaan Kendaraan Dinas Operasional sebanyak 37 unit Rp. 15.165.500,00		
	- Pengadaaan Kendaraan Dinas Jabatan Kantor Vertikal DJPb Sebanyak 5 Unit Pengadaaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II sebanyak 1 unit, Kendaraan Dinas Jabatan Eselon III sebanyak 1 unit, Kendaraan Dinas Jabatan Kantor Vertikal sebanyak 47 Unit Rp. 23.834.570,00		
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Fungsional Roda 4 sebanyak 9 unit Rp. 4.569.228,00		
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		
	- Perbaikan Gedung Kantor Seluas 8.687 M2 Rp. 21.726.410,00		
	- Renovasi Rumah Negara Seluas 2.291 M2 Rp. 15.030.603,00		

Jakarta, 2 Desember 2024
Direktur Jenderal Perbendaharaan

ASTERA PRIMANTO BHAKTI
NIP. 196801201992011003



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DJPb
Indonesian Treasury



LAPORAN CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2025

Direktorat PPKBLU

DJPb (PPKBLU)	Pengelolaan Keuangan BLU yang Inklusif dan Produktif							
	1a-CP Indeks peningkatan efisiensi layanan BLU							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	Max/TLK
Realisasi	4,6							
Capaian	120							

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)				
Isu: Kebijakan efisiensi secara nasional mendukung tercapainya IKU komponen efisiensi biaya operasional, namun perhitungannya IKU ini tidak hanya terkait efisiensi biaya tetapi juga terkait peningkatan produktivitas layanan yang terdampak langsung atas kebijakan efisiensi.				
Implikasi: Kebijakan efisiensi secara otomatis berdampak pada penghematan biaya yang dilakukan oleh Satker BLU namun juga berimbas dengan produktivitas output layanan yang dihasilkan.				
Penjelasan Capaian :				
Layanan BLU	Belanja Layanan	Growth Layanan	Growth Efisiensi	
Kesehatan Rawat inap dan rawat jalan	Bertambah Rp128 M (3,45%)	Meningkat 105ribu (2.59%)	Menurun 180ribu (0,94%)	
Pendidikan Jumlah mahasiswa dan serapan lulusan	Bertambah Rp237 M (6,77%)	Meningkat 30ribu (2.59%)	Meningkat 5,3juta (2,11%)	
Pengelola Dana Penyaluran dagulir dan jumlah end user	Berkurang Rp12 M (48,36%)	Menurun 133juta (52,98%)	Menurun 166ribu (27,46%)	
Kawasan Jumlah pengunjung dan penyelenggaraan event	Berkurang Rp0,2 M (0,89%)	Meningkat 1,8juta (118,78%)	Meningkat 8ribu (36,41%)	
Barang dan Jasa Lainnya Jumlah penumpang dan layanan kargo	Berkurang Rp47 M (39,24%)	Meningkat 53ribu (6,04%)	Meningkat 20ribu (42,42%)	
	AVERAGE %	Meningkat 16,77% Indeks 5	Meningkat 10,51% Indeks 4,5	

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)
1. Kebijakan efisiensi secara menyeluruh memerlukan pendetailan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan. 2. Kurangnya monitoring terhadap kualitas layanan sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan efisiensi.

Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
Melaksanakan Rapat pembahasan definisi operasional KPI BLU tahun 2025 tanggal 3 Januari 2025 Berkoordinasi dengan pihak BLU terkait IKU baru ini dan memberikan pembinaan dalam rangka pelaksanaan efisiensi dalam rapat pembahasan kontrak kinerja pemimpin BLU tanggal 7 Februari 2025		
Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
One on One dengan Satker BLU yang dianggap kurang produktif untuk kemudian memberikan rekomendasi selaku pembina keuangan agar layanan tetap berkualitas.	PPKBLU I, II, III	Juni 2025, September 2025 dan Desember 2025

Penjelasan IKU



Peningkatan kinerja keuangan BLU yang lebih baik dan professional, untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Formula IKU



= 80%(Komponen 1) + 20%(Komponen 2)

Komponen 1: Indeks efisiensi layanan

Komponen 2: Indeks *growth* layanan

Perhitungan Capaian



Komponen	Target	Realisasi	Bobot	Indeks Capaian
Indeks Efisiensi Layanan	3	4.8	80%	3.84
Indeks <i>Growth</i> Layanan	3	3.1	20%	0.62
Realisasi				4.46

* : semakin kecil berarti semakin efisien
** : semakin besar berarti semakin baik

Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU



Analisis Capaian

LAYANAN BLU	KENAIKAN (PENURUNAN)		GABUNGAN INDEKS
	EFISIENSI LAYANAN* (80%)	GROWTH LAYANAN** (20%)	
Kesehatan			
Rawat inap dan rawat jalan	-11,4% Indeks 5	5,21% Indeks 3	Indeks 4.6
Pendidikan			
Mahasiswa aktif dan serapan lulusan	-7,39% Indeks 4	9,40% Indeks 3,5	Indeks 3.9
Pengelola Dana			
Penyaluran dagulir dan jumlah <i>end user</i>	-63,36% Indeks 5	-91,81% Indeks 1	Indeks 4.2
Kawasan			
Jumlah wisatawan dan penyelenggaraan event	-55,54% Indeks 5	118,78% Indeks 5	Indeks 5
Barang Jasa Lainnya			
Jumlah penumpang dan layanan pengujian/sertifikasi	-42,31% Indeks 5	6,04% Indeks 3	Indeks 4.6
AVERAGE GABUNGAN INDEKS			4.46

Efisiensi ini menghitung biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan layanan tertentu dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan *growth* layanan melihat pertumbuhan layanan dibandingkan tahun sebelumnya.



Risiko (Sedang)

Terdapat risiko Ketidakesuaian biaya operasional yang dikeluarkan dengan pertumbuhan layanan yang diberikan BLU yang ditetapkan pada level sedang. Perlu menjadi awareness khususnya terkait kebijakan efisiensi anggaran dapat berdampak pada layanan yang dihasilkan BLU kepada *stakeholders*, terutama berdampak pada rumpun kesehatan dan pendidikan.



Dampak Capaian

Kebijakan efisiensi secara otomatis berdampak pada penghematan biaya yang dilakukan oleh Satker BLU namun juga berimbas dengan produktivitas output layanan yang dihasilkan.



Current Issue

Kebijakan efisiensi secara nasional mendukung IKU tercapainya komponen efisiensi biaya, namun perhitungannya IKU ini tidak hanya terkait efisiensi biaya namun juga peningkatan produktivitas layanan yang terdampak langsung atas kebijakan efisiensi.



Rencana Aksi

Berkoordinasi dengan Satker BLU yang dianggap kurang produktif untuk kemudian memberikan rekomendasi selaku pembina keuangan agar layanan tetap berkualitas.

DJPb (PPKBLU)	Pengelolaan Keuangan BLU yang Inklusif dan Produktif							
	1b-N Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	Max/TLK
Realisasi	3.98							
Capaian	120							

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)					
Isu: IKU Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU telah mencapai target dari yang ditetapkan. Namun harus tetap menjaga capaian sepanjang tahun dimana terdapat isu bahwa penetapan peraturan dan regulasi dirancang dengan melibatkan banyak pihak, tidak hanya internal Direktorat PPKBLU sehingga memerlukan koordinasi lebih intensif.					
Implikasi: Koordinasi intensif kepada para pihak yang berwenang dan terkait dalam tahapan penyelesaian regulasi yang dirumuskan					
Penjelasan Capaian :					
RUMPUN	Indeks Akurasi Proyeksi (65%)	Indeks Rasio POBO (35%)	Indeks Pertumbuh an EBITDA	Capaian (sesuai bobot)	
KESEHATAN	3.50	5	N/A	4.02	
PENDIDIKAN	4.32	5	N/A	4.56	
PENGELOLA DANA	4.40	1	N/A	3.21	
KAWASAN	3.46	5	N/A	3.99	
BARANG JASA LAINNYA	3.67	5	N/A	4.13	
Gabungan (average)	3.87	4.2	N/A	3.98	

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)
Kurangnya koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait karena penetapan peraturan bergantung pada banyak pihak bahkan dari Kementerian/Lembaga di luar Kementerian Keuangan. Ditambah dengan adanya penggunaan aplikasi baru untuk perumusan peraturan.

Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Telah menyelesaikan legal drafting dan harmonisasi beberapa peraturan dalam bentuk KMK maupun PMK seperti PMK Tarif Kolektif UPBU dan BPDP.

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
Monev penetapan regulasi dengan tetap berkoordinasi dengan pihak berwenang tidak hanya secara formal namun juga secara informal menggunakan sarana komunikasi tercepat.	PST dan TRI	Juni 2025

Penjelasan IKU



Menghitung performa kinerja keuangan BLU dengan menggunakan tiga indikator, yaitu: *growth* EBITDA, akurasi proyeksi PNBPN, dan rasio POBO.

Perhitungan Capaian



= 65%(Komp 1) + 35%(Komp 2)
Perhitungan saat periode Triwulan II & IV
Komp 1: Indeks akurasi proyeksi PNBPN
Komp 2: Indeks rasio POBO

= 65%(Komp 1) + 30%(Komp 2) + 5%(Komp 3)

Perhitungan saat periode Triwulan II & IV
Komp 1: Indeks akurasi proyeksi PNBPN
Komp 2: Indeks rasio POBO
Komp 3: Indeks rasio *growth* EBITDA

	Target	Realisasi
Q1	3 (skala 5)	3,98
Q2	3 (skala 5)	-
Q3	3 (skala 5)	-
Q4	3 (skala 5)	-

Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU



Analisis Capaian

RUMPUN	Indeks Akurasi Proyeksi (65%)	Indeks Rasio POBO (35%)	Indeks Pertumbuhan EBITDA	Capaian (sesuai bobot)
KESEHATAN	3.50	5	N/A	4.02
PENDIDIKAN	4.32	5	N/A	4.56
PENGELOLA DANA	4.40	1	N/A	3.21
KAWASAN	3.46	5	N/A	3.99
BARANG JASA LAINNYA	3.67	5	N/A	4.13
Gabungan (<i>average</i>)	3.87	4.2	N/A	3.98

Data EBITDA diperoleh hanya saat pelaporan periode semesteran atau saat triwulan II dan triwulan IV. IKU ini bersifat TLKV sehingga capaian akhir yang menjadi penentu.

Untuk triwulan I & III hanya dihitung menggunakan 2 komponen yaitu: akurasi proyeksi pendapatan dan rasio POBO.



Risiko (Sangat Rendah)



Iku ini merupakan pengembangan dari IKU akurasi proyeksi pengesahan pendapatan BLU pada tahun sebelumnya. Jika berdasarkan data dan pertimbangan, risiko pada IKU ini dinilai sangat rendah. Hal ini karena pada tahun sebelumnya seluruh rumpun BLU telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Non-Cascading



Isu Utama

Pengumpulan data yang membutuhkan waktu karena tidak langsung tersaji dalam aplikasi.



Dampak

Penyajian realisasi capaian yang membutuhkan waktu lebih lama karena waktu pelaporan realisasi capaian dengan cut off data relatif pendek.



Rencana Aksi

Berkoordinasi dengan pengembang aplikasi agar dapat dibuat dashboard atau tampilan laporan yang dapat menyajikan olahan data terkait perhitungan IKU ini.

DJPb (PPKBLU)	Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif							
	2a-N Indeks Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Max/TLK
Realisasi	120%							
Capaian	120							

Isu Utama dan Implikasi *(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)*

Isu:
IKU ini bersifat mandatory dan capaiannya tanggung rentengdengan Unit Eselon II lain. Tahun 2025 ini Direktorat PPKBLU tidak memiliki kewajiban tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya. Data realisasi untuk komponen capaian HAI DJPb diambil dari aplikasi OMSPAN.

Implikasi:
Perlu optimalisasi teknologi untuk mendapatkan data dan pengolahan analisisnya yang sebagian besar dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya pegawai yang ada.

Penjelasan Capaian :

Subdirektorat	Nilai	$\begin{aligned} &= \frac{3,85}{3,2} \times 100\% \\ &= 120\% \end{aligned}$
PST	3,8	
TRI	3,73	
PPKBLU I	3,9	
PPKBLU II	3,9	
PPKBLU III	3,9	
Average	3,85	

Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>
Kurangnya responden survei

Tindakan yang Telah Dilaksanakan

1. Menyelesaikan setiap permasalahan pada Hai DJPb sebelum batas waktu

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
1. Menyiapkan target responden survei yang diacak tiap rumpun	Seluruh Subdit	Juni 2025

Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan

Mandatory

Penjelasan IKU



Pengukuran IKU untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat. pengguna layanan. dan stakeholders. Termasuk ke dalam komponen pengukuran adalah capaian HAI DJPb.

Perhitungan Capaian



Data realisasi capaian disediakan oleh Biro Umum Sekjen selaku pengusul dan pemberi *mandatory* IKU ini.

Sedangkan untuk komponen capaian HAI DJPb diambil dari aplikasi OMSPAN.

	Target	Realisasi
Q1	100%	120%
Q2	100%	-
Q3	100%	-
Q4	100%	-

Analisis Capaian



Penyelesaian Tindak Lanjut

IKU ini bersifat mandatory dan capaiannya tanggung renteng dengan Unit Eselon II lain. Tahun 2025 ini Direktorat PPKBLU tidak memiliki kewajiban tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

Namun tetap perlu dipersiapkan untuk penilaian triwulan akhir yang menghitung hasil IKPL (Indeks Kepuasan Pengguna Layanan) dan SKPK (Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan).

Capaian HAI DJPb:

Subdirektorat	Nilai
PST	3,8
TRI	3,73
PPKBLU I	3,9
PPKBLU II	3,9
PPKBLU III	3,9
Average	3,85

$$= \frac{3,85}{3,2} \times 100\% = 120\%$$



Risiko (Rendah)

Risiko pada IKU ini dinilai rendah. hal ini karena jika dilihat dari tren tahun-tahun sebelumnya. capaian dari IKU ini sangat baik dan penyebaran serta pengisian kuisioner juga dilakukan tepat waktu



Isu Utama

Pelaksanaan survei termasuk kegiatan yang diefisiensikan sehingga perlu membuat perencanaan ulang mengenai proses pengumpulan data. pengolahan dan analisisnya. serta penyajian laporan.



Dampak

Perlu optimalisasi teknologi untuk mendapatkan data dan pengolahan analisisnya yang sebagian besar dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya pegawai yang ada.



Rencana Aksi

Penyusunan rencana survei dan komponen yang lebih relevan dengan kondisi serta kebijakan pemerintah terkini.

DJPb (PPKBLU)	Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif							
	2b-N Tingkat Perkembangan Pendapatan BLU							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	109.64							
Capaian	109,64							

Isu Utama dan Implikasi *(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)*

Isu:
Kebijakan efisiensi secara nasional berimbas penyesuaian rencana dan kegiatan operasional Satker BLU.

Implikasi:
Butuh penyesuaian untuk dapat menjalankan kegiatan rutin dengan normal tanpa mengurangi kualitas output.

Penjelasan Capaian :

REALISASI DAN GRWOTH PNBPN					
Rumpun BLU	Target 2025 (Milyar)	Realisasi 2024 Q1 (Milyar)	Realisasi 2025 Q1 (Milyar)	% Realisasi	% Growth
Kesehatan	25.175	5.194	5.335	20.76	2.72
Pendidikan	15.344	4.727	4.878	31,79	3.21
Pengelola Dana	40.191	6.558	5.553	13.77	-15.32
Kawasan	2.613	475	472	18.08	-0.63
Barang Jasa Lainnya	5.175	582	878	16.97	50.77
Gabungan	99.385	17.536	17.116	17.89	-2.39%
Target				15.00	-2,5% s.d. 0% (Indeks 3)
Indeks Capaian SubIKU 1 & 2				119.27	100

Tindakan yang Telah Dilaksanakan

- Penandatanganan Kontrak Kinerja BLU dan Direktur Jenderal Perbendaharaan telah dilaksanakan.
- Mendorong BLU agar secepatnya melakukan pengesahan pada akhir Triwulan berkenaan

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
Berkoordinasi dengan Satker BLU yang mengalami penurunan PNBPN selaku pembina keuangan, agar dapat meningkatkan PNBPNya melalui optimalisasi aset-asetnya.	PK I, II, III	Triwulan II 2025

Akar Masalah *(Mengapa hal tersebut terjadi?)*

- Adanya keterlambatan mengesahkan pendapatan PNBPNya.
- Pengesahan yang dilakukan di akhir triwulan, biasanya data akan masuk ke periode triwulan berikutnya sehingga tidak realtime

Penjelasan IKU



Mengukur *growth* PNBPN BLU dibandingkan tahun sebelumnya (pada periode yang sama) dan tingkat pencapaian pendapatan BLU terhadap target yang dicanangkan pada UU APBN tahun 2025.

Perhitungan Capaian



$$= \frac{\text{IndeksCap SubIKU 1} + \text{IndeksCap SubIKU 2}}{2}$$

$$= \frac{119.27 + 100}{2} = 114.63$$

SubIKU 1 (Target 15%)

Mengukur tingkat pencapaian PNBPN BLU dibandingkan dengan target triwulanan

SubIKU 2 (Target Indeks 3: -2,5% s.d. 05%)

Mengukur *growth* PNBPN BLU dibandingkan tahun sebelumnya pada periode triwulanan yang sama.

	Target	Realisasi
Q1	100	109.64
Q2	100	-
Q3	100	-
Q4	100	-

Tingkat Perkembangan Pendapatan BLU



Analisis Capaian

REALISASI DAN GRWOTH PNBPN

Rumpun BLU	Target 2025 (Milyar)	Realisasi 2024 Q1 (Milyar)	Realisasi 2025 Q1 (Milyar)	% Realisasi	% Growth
Kesehatan	25.175	5.194	5.335	20.76	2.72
Pendidikan	15.344	4.727	4.878	31,79	3.21
Pengelola Dana	40.191	6.558	5.553	13.77	-15.32
Kawasan	2.613	475	472	18.08	-0.63
Barang Jasa Lainnya	5.175	582	878	16.97	50.77
Gabungan	99.385	17.536	17.116	17.89	-2.39%
Target				15.00	-2,5% s.d. 0% (Indeks 3)
Indeks Capaian SubIKU 1 & 2				119.26	100

Indeks Capaian SubIKU 1:

$$= \frac{\% \text{ Realisasi}}{\% \text{ Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{17,89\%}{15\%} \times 100\% = 119,26$$



Indeks Capaian SubIKU 2:

$$= \frac{\text{Avg Indeks}}{\text{Target Indeks}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Indeks 3}}{\text{Indeks 3}} \times 100\% = 100$$

Risiko (Rendah)

Pendapatan BLU sudah tercapai sesuai dengan target Triwulan I (di atas 15%) sehingga risiko dinilai rendah. namun demikian tetap perlu menjadi perhatian terutama untuk rumpun yang memiliki target pendapatan yang tinggi serta diharapkan trend realisasi pendapatan akan terus naik hingga triwulan IV

Non-Cascading



Isu Utama

Kebijakan efisiensi secara nasional berimbas penyesuaian rencana dan kegiatan operasional Satker BLU.



Dampak

Butuh penyesuaian untuk dapat menjalankan kegiatan rutin dengan normal tanpa mengurangi kualitas output.



Rencana Aksi

Berkoordinasi dengan Satker BLU yang mengalami penurunan PNBPN selaku pembina keuangan. agar dapat meningkatkan PNBPN nya melalui optimalisasi aset-asetnya.

DJPb (PPKBLU)	Formulasi Kebijakan yang Implementatif dan Aplikatif							
	3a-CP Indeks Kinerja Reformasi Hukum							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95.5	Max/TLK
Realisasi	120							
Capaian	120							

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>
Isu: Penetapan peraturan dan regulasi yang dirancang melibatkan banyak pihak. tidak hanya internal Direktorat PPKBLU. Implikasi: Koordinasi intensif kepada para pihak yang berwenang dan terkait dalam tahapan penyelesaian regulasi yang dirumuskan. Penjelasan Capaian : Terbit: 1. PMK Tarif Kolektif BPSDM Matra Darat 2. PMK Tarif Kolektif BPSDM Matra Udara 3. PMK Tarif Kolektif UPBU 4. PMK Tarif BPDP

Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>
Perlu koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait karena penetapan peraturan bergantung pada banyak pihak bahkan dari Kementerian/Lembaga di luar Kementerian Keuangan, ditambah dengan adanya penggunaan aplikasi baru untuk perumusan peraturan.

Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Telah menyelesaikan legal drafting dan harmonisasi beberapa peraturan dalam bentuk KMK maupun PMK.

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
Mengawasi setiap proses penetapan regulasi dengan tetap berkoordinasi dengan pihak berwenang tidak hanya secara formal namun juga secara informa menggunakan sarana komunikasi tercepat.	PST dan TRI	Triwulan II 2025

Penjelasan IKU

Mengukur penyelesaian regulasi (RPP, RPerpres, RPMK, RKMK)

Perhitungan Capaian

Realisasi capaian disampaikan melalui Nota Dinas dari Direktorat SP selaku koordinator IKU berdasarkan data dari Biro Hukum Sekjen.

Sampai saat ini belum mendapatkan ND dari Direktorat SP.

	Target	Realisasi
Q1	95.5	-
Q2	95.5	-
Q3	95.5	-
Q4	95.5	-

Indeks Kinerja Reformasi Hukum



Analisis Capaian

Peraturan yang dirumuskan oleh Direktorat PPKBLU tahun 2025

On progress:

1. RPMK Perubahan PMK 172 tahun 2021
2. RPMK Tarif Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor
3. RPMK Tarif Balai Pengujian Perkeretaapian
4. RPMK Tarif Kolektif Distrik Navigasi
5. RPMK Tarif Kolektif Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kemen ESDM
6. RPMK Tarif BPJPH
7. RPMK Tarif RS Adhyaksa
8. RKMK Remun -> BAKTI, BPKARSS, BPKFP, LPDP

Terbit:

1. PMK Tarif Kolektif BPSDM Matra Darat
2. PMK Tarif Kolektif BPSDM Matra Udara
3. PMK Tarif Kolektif UPBU
4. PMK Tarif BPDP



Risiko (Sangat Rendah)

Atas IKU ini Dit PPK BLU telah mengawal dan menyelesaikan peraturan-peraturan yang menjadi kewenangan Dit PPK BLU. Berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya, risiko atas IKU ini dinilai sangat rendah.



Isu Utama

Penetapan peraturan dan regulasi yang dirancang melibatkan banyak pihak, tidak hanya internal Direktorat PPKBLU.



Dampak

Koordinasi intensif kepada para pihak yang berwenang dan terkait dalam tahapan penyelesaian regulasi yang dirumuskan.



Rencana Aksi

Mengawasi setiap proses penetapan regulasi dengan tetap berkoordinasi dengan pihak berwenang tidak hanya secara formal namun juga secara informal menggunakan sarana komunikasi tercepat.

Direktorat PPKBLU	Formulasi Kebijakan yang Implementatif dan Aplikatif							
	3b-NTingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20	40	40	60	60	80	80	Max/TLK
Realisasi	20							
Capaian	100							
Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)					Tindakan yang Telah Dilaksanakan			
Isu Utama: Pengukuran dampak dengan metode RIA ini baru diterapkan untuk menjadi perhitungan IKU pada tahun ini. Implikasi: Perlu pemahaman terkait metode RIA agar hasil pengukuran kebijakan sesuai dengan yang diharapkan dan memiliki manfaat yang signifikan.					Mengirimkan informasi mengenai peraturan yang akan diuji kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku coordinator di kantor pusat DJPb.			
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)					Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode	
1. Perhitungan IKU ini merupakan yang pertama dan menjadi tantangan tersendiri karena dihitung oleh pihak eksternal. 2. Penyelesaian peraturan melibatkan beberapa unit					Berkoordinasi dengan Direktorat SP selaku pengampu dan pengusul IKU dengan jalur komunikasi formal maupun informal.	Seluruh Subdit	Triwulan II 2025	

Penjelasan IKU



Mengukur dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan dengan metode RIA (*Regulatory Impact Assessment*).

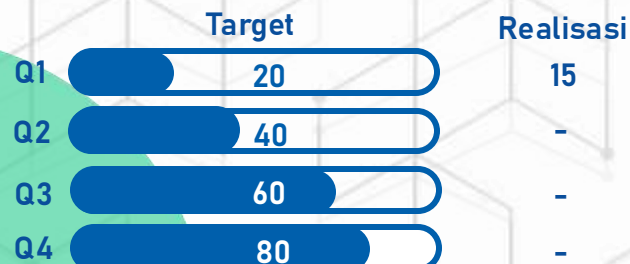
Koordinator IKU ini adalah Direktorat SP.

Perhitungan Capaian



Triwulan I dihitung berdasarkan waktu penyampaian Nota Dinas PMK & Perdirjen yang akan di Uji Dampak dari Direktorat Sistem Perbendaharaan kepada direktorat teknis.

Nilai 20 = disampaikan bulan Februari.
 Nilai 15 = disampaikan minggu ke-1 Maret.
 Nilai 10 = disampaikan minggu ke-2 Maret.
 Nilai 5 = disampaikan minggu ke-3 Maret.



Analisis Capaian

Direktorat SP menyampaikan ND nomor **ND-251/PB.7/2025** hal Permintaan Usulan Regulasi (PMK dan/atau Perdirjen) sebagai Sumber Data IKI Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan Tahun 2025 yang telah diterima tanggal 10 Maret 2025.

Kemudian ND balasan disampaikan melalui nota dinas nomor: **ND-155/PB.5/2025** tanggal 17 Maret 2025 hal Penyampaian Usulan Regulasi untuk Pelaksanaan Uji Dampak Peraturan Tahun 2025.

Triwulan berikutnya, akan ditingkatkan kembali sehingga nilainya menjadi maksimal.



Risiko (Rendah)

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2025. Risiko IKU ini dinilai rendah setelah melakukan koordinasi dengan Bagian KI dan DSP sebagai koordinator dan penanggungjawab IKU.



Isu Utama

Pengukuran dampak dengan metode RIA ini baru diterapkan untuk menjadi perhitungan IKU pada tahun ini.



Dampak

Perlu pemahaman terkait metode RIA agar hasil pengukuran kebijakan sesuai dengan yang diharapkan dan memiliki manfaat yang signifikan.



Rencana Aksi

Berkoordinasi dengan Direktorat SP selaku pengampu dan pengusul IKU dengan jalur komunikasi formal maupun informal.

Direktorat PPKBLU	Pengelolaan tugas khusus (special mission) yang efektif							
	4a-CP Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	10%	20%	20%	35%	35%	98,8%	98,8%	Max/TLK
Realisasi	62,5%							
Capaian	120							

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>	Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama: Rekomendasi yang diberikan perlu diselesaikan melalui kerja sama lintas unit Eselon II bahkan lintas Eselon I dan terkadang membutuhkan waktu cukup lama. Implikasi: Perlu berkoordinasi dengan pihak terkait yang memiliki wewenang dalam penyelesaian rekomendasi serta perlu menyamakan persepsi dengan pihak BPK agar memiliki pemahaman yang sama terutama terkait dengan regulasi maupun kebijakan.	1. Komunikasi dengan pihak lain yang terlibat dalam rekomendasi bersama. 2. Memonitor secara terus menerus terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan BPK kepada unit-unit lain yang terkait. 3. Melakukan koordinasi dengan Direktorat APK untuk memastikan bahwa seluruh tindak lanjut dapat disepakati selesai oleh BPK.

Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
1. Beberapa tindak lanjut atas rekomendasi BPK melibatkan unit-unit lain sering terdapat kesulitan dalam koordinasi. 2. Pada beberapa hal tertentu, masih terdapat perbedaan persepsi terkait pengelolaan BLU dan regulasi yang terkait. antara pihak BPK dengan Direktorat PPKBLU	Koordinasi dengan Direktorat APK selaku penghubung dengan pihak BPK agar rekomendasi yang telah diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.	PST	Triwulan II

Penjelasan IKU

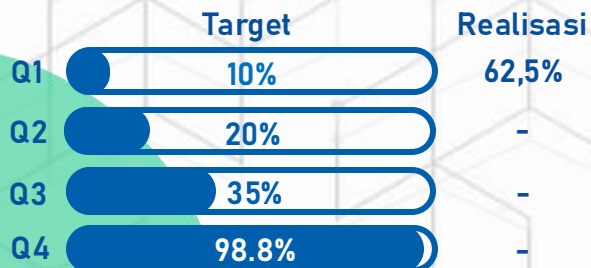


Mengukur progres penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK terhadap LKPP dan LKBUN. Persetujuan atas penyelesaian dan kesesuaian hasil tindak lanjut divalidasi oleh pihak BPK.

Perhitungan Capaian



Data realisasi capaian disediakan oleh Direktorat APK selaku koordinator dengan pihak BPK.



Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN



Analisis Capaian

JENIS REKOM	OUTSTANDING REKOM	REKOM DIUSULKAN	%
LKPP			
LKBUN			
Gabungan			

Tindak lanjut rekomendasi sudah dilaksanakan dan sebagian besar masih dalam proses, namun hasil validasi dari BPK masih menunggu Nota Dinas dari Direktorat APK.



Risiko (Sangat Rendah)

Rekomendasi dari BPK yang berada di kewenangan Dit. PPKBLU telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan segera sehingga dinilai sangat rendah. selain itu Dit. PPK BLU selalui berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.



Isu Utama

Rekomendasi yang diberikan perlu diselesaikan melalui kerja sama lintas unit Eselon II bahkan lintas Eselon I dan terkadang membutuhkan waktu cukup lama.



Dampak

Perlu berkoordinasi dengan pihak terkait yang memiliki wewenang dalam penyelesaian rekomendasi serta perlu menyamakan persepsi dengan pihak BPK agar memiliki pemahaman yang sama terutama terkait dengan regulasi maupun kebijakan.



Rencana Aksi

Koordinasi dengan Direktorat APK selaku penghubung dengan pihak BPK agar rekomendasi yang telah diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Direktorat PPKBLU	Pengelolaan tugas khusus (special mission) yang efektif							
	4b-N Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	111,54							
Capaian	111,54							
Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)					Tindakan yang Telah Dilaksanakan			
Isu Utama: Adanya penyesuaian dalam indikator penilaian maturity rating agar lebih sesuai dengan konteks dan kondisi terkini. Implikasi: Satker BLU perlu mempelajari kembali dan menjadi tantangan bagi Satker BLU yang kesulitan dalam meningkatkan nilai maturity ratingnya.					1. Mendorong BLU untuk segera menyelesaikan proses self assessment maturity rating. 2. Memberikan bimbingan teknis dan konsultasi baik secara langsung maupun melalui media komunikasi elektronik kepada Satker BLU			
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)					Rekomendasi Rencana Aksi		Penanggung jawab	Periode
1. Beberapa BLU baru belum terbiasa melakukan penilaian dengan sistem maturity rating. 2. Terdapat BLU yang akan dibekukan karena adanya restrukturisasi organisasinya sehingga tidak memiliki motivasi untuk menyelesaikan maturity rating.					Pembinaan intensif bagi Satker BLU baru dan yang memiliki permasalahan terkait nilai maturity rating ini.		Subdit PPK BLU I, II, III	Triwulan II

Penjelasan IKU

Mengukur kualitas tata kelola BLU menggunakan metode pengukuran *maturity rating assessment*. Standar penilaian setiap BLU harus memenuhi pada level “baik” dan memiliki peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

Perhitungan Capaian

$$= \frac{\text{IndeksCap SubIKU 1} + \text{IndeksCap SubIKU 2}}{2}$$

$$= \frac{103.09 + 120}{2} = 111.54$$

SubIKU 1 (Target 97%)

Mengukur persentase BLU yang memiliki *maturity rating* masuk ke dalam kategori “baik” atau di atasnya. namun periode awal tahun masih bersifat tahapan *self assessment*.

SubIKU 2 (Target Indeks 3.5)

Mengukur *growth* peningkatan nilai *maturity rating*. namun periode awal tahun masih bersifat tahapan evaluasi dan *self assessment*.

	Target	Realisasi
Q1	100	111.54
Q2	100	-
Q3	100	-
Q4	100	-

Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating



Analisis Capaian

SUBDIREKTORAT	PERSENTASE BLU KATEGORI “BAIK” ATAU DI ATASNYA	KENAIKAN NILAI MATRAT BLU (DALAM INDEKS)
PPKBLU I	100%	5
PPKBLU II	100%	5
PPKBLU III	100%	5
Gabungan	100%	5
Target	97%	3.5

Indeks Capaian SubIKU 1:

$$= \frac{\text{Avg \%}}{\text{Target \%}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{97\%} = 103.09$$

Indeks Capaian SubIKU 2:

$$= \frac{\text{Avg Indeks}}{\text{Target Indeks}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Indeks 5}}{\text{Indeks 3.5}} = 120 (\text{max})$$



Risiko (Sangat Rendah)

Secara keseluruhan berdasarkan hasil tahun sebelumnya. hasil penilaian terhadap *maturity rating* sangat baik. Sehingga. risiko berkaitan dengan IKU ini dinilai sangat rendah.

Non-Cascading



Isu Utama

Adanya penyesuaian dalam indikator penilaian *maturity rating* agar lebih sesuai dengan konteks dan kondisi terkini.



Dampak

Satker BLU perlu mempelajari kembali dan menjadi tantangan bagi Satker BLU yang kesulitan dalam meningkatkan nilai *maturity rating*nya.



Rencana Aksi

Pembinaan intensif bagi Satker BLU baru dan yang memiliki permasalahan terkait nilai *maturity rating* ini.

Direktorat PPKBLU	Komunikasi Publik dan Sinergi Antar-Organisasi yang Kolaboratif							
	5a –N Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	4	4	4	4	4	4	4	Max/TLK
Realisasi	5							
Capaian	120							
Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)					Tindakan yang Telah Dilaksanakan			
Isu Utama: Pelaksanaan edukasi dan komunikasi tidak hanya selesai pada satu kegiatan namun harus berkesinambungan dengan tetap memperhatikan sisi efisiensi. Implikasi: Penilaian pada kegiatan tertentu dengan metode pre dan post test atau survei peserta atau pun tingkat kualitas penyelesaian pelatihan hanya memberi potret sebagian proses edukasi dan komunikasi.					1. Publikasi informasi terkait pengelolaan keuangan BLU melalui website blu.djpb.kemenkeu.go.id 2. Menyediakan fitur helpdesk pada website blu.djpb.kemenkeu.go.id sebagai sarana peningkatan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan BLU 3. Meng-update petunjuk manual operasionalisasi BIOS. 4. Menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi dan komunikasi bekerja sama dengan BPPK melalui KLC.			
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)					Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode	
1. Pelaksanaan kegiatan edukasi dan komunikasi membutuhkan waktu yang lama 2. Pergantian Operator dan Approval aplikasi BIOS yang sering terjadi pada BLU 3. Konsep BLU merupakan hal yang baru bagi beberapa peserta bimtek dan sangat berbeda dengan pekerjaan mereka selama ini					Membuat perencanaan kegiatan seefisien mungkin dengan topik atau tema yang saling melengkapi dan berkelanjutan agar proses edukasi tidak terputus.	Seluruh Subdit	Triwulan II 2025	

Penjelasan IKU



Pengukuran tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi yang dilakukan melalui pre-test dan post-test bimbingan teknis atau survei atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau tingkat penyelesaian pelatihan. Capaian dihitung TLKV agar bisa melihat rangkaian keseluruhan.

Perhitungan Capaian



Rincian Indeks	Pelaksanaan Evaluasi Periode Sebelumnya
Indeks 5	Dilaksanakan sebelum Q1 berakhir
Indeks 4	Dilaksanakan minggu ke-1 setelah Q1 berakhir
Indeks 3	Dilaksanakan minggu ke-2 setelah Q1 berakhir
Indeks 2	Dilaksanakan minggu ke-3 setelah Q1 berakhir
Indeks 1	Tidak ada evaluasi

	Target	Realisasi
Q1	4 (skala 5)	5
Q2	4 (skala 5)	-
Q3	4 (skala 5)	-
Q4	4 (skala 5)	-

Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan



Analisis Capaian

Evaluasi yang dilaksanakan dan rencana ke depan

Subdirektorat	Kegiatan Evaluasi
PST	Evaluasi e-Learning Dewas yang tahun lalu telah dilakukan. Tahun ini direncanakan kegiatan: Bimtek pelaksanaan tugas Dewas pada bulan Agustus 2025
TRI	Evaluasi bimtek <i>refreshment</i> BIOS G2 telah dilakukan. Tahun ini direncanakan kegiatan: Pelatihan SAKTI BLU Modul Penganggaran untuk Kanwil DJPb pada triwulan II dan triwulan III
PK 1	Evaluasi bimtek <i>maturity rating</i> telah dilakukan. Tahun ini direncanakan kegiatan: Sosialisasi Perdirjen PER-6/PB.5/2025 tentang Kontrak Kinerja dan Evaluasi Kinerja Triwulanan
PK 2	Evaluasi <i>workshop</i> mekanisme pembelian melalui fasilitator telah dilakukan. Tahun ini direncanakan kegiatan: Sosialisasi Perdirjen PER-6/PB.5/2025 ttg kontrak kinerja dan evaluasi kinerja triwulanan
PK 3	Evaluasi sosialisasi pengelolaan kas BLU. Tahun ini direncanakan kegiatan: Sosialisasi Perluasan Pemasaran bagi UMKM pada triwulan II



Risiko (Sangat Rendah)

Seluruh subdit sudah melaksanakan evaluasi atas kegiatan yang direncanakan di Triwulan I dan diikuti oleh pemenuhan target peserta kegiatan sehingga risiko sangat rendah

Mandatory



Isu Utama

Pelaksanaan edukasi dan komunikasi tidak hanya selesai pada satu kegiatan namun harus berkesinambungan dengan tetap memperhatikan sisi efisiensi.



Dampak

Penilaian pada kegiatan tertentu dengan metode pre dan post test atau survei peserta atau pun tingkat kualitas penyelesaian pelatihan hanya memberi potret sebagian proses edukasi dan komunikasi.



Rencana Aksi

Membuat perencanaan kegiatan seefisien mungkin dengan topik atau tema yang saling melengkapi dan berkelanjutan agar proses edukasi tidak terputus.

Direktorat PPKBLU	Komunikasi Publik dan Sinergi Antar-Organisasi yang Kolaboratif							
	5b-N Indeks Kualitas Penugasan BLU, asistensi BLUD, dan UMKM							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	Max/TLK
Realisasi	4,96							
Capaian	120							

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>	Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama: Adanya kebijakan efisiensi dan penyesuaian pagu belanja diserahkan kepada masing-masing Kanwil DJPb serta adanya kebijakan simplifikasi pelaporan rutin pada Kanwil DJPb Implikasi: Alokasi belanja yang tidak seragam setiap Kanwil DJPb menjadi tantangan dalam pemenuhan IKU ini dan simplifikasi pelaporan akan membuat kesulitan bagi Direktorat PPKBLU selaku penilai karena isi laporan cenderung sama. .	- Menyampaikan informasi secara formal & informal terkait tindak lanjut atas sosialisasi pemberdayaan UMKM - Telah dilakukan pemberian feedback penilaian kepada masing-masing Kanwil untuk dilakukan perbaikan periode berikutnya.

Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
- Para pegawai kanwil yang baru dalam hal pekerjaan maupun dalam hal penempatan membutuhkan waktu dalam memahami IKU ini. - Menjalin komunikasi dengan BLUD yang notabene bukan kewenangan secara langsung Kanwil dalam melakukan pembinaan. - Kegiatan yang dilakukan selama ini hanya bersifat temporer (pameran, asistensi, sosialisasi, dll) belum ada kegiatan pemberdayaan yang komprehensif sampai dengan memantau perkembangan UMKM dan menentukan milestone capaian target bisnis secara rinci.	Berkoordinasi dengan Setditjen dan menjalin komunikasi yang baik dengan Kanwil DJPb untuk dapat menemukan solusi permasalahan terutama terkait IKU ini agar realisasi dapat dicapai dengan baik.	Subdit PST dan PPK BLU III	Triwulan III

Penjelasan IKU



Indikator Kinerja ini akan mengukur 3 (tiga) komponen yaitu kualitas pembinaan BLU. asistensi BLUD. dan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJPb.

Perhitungan Capaian



$$= \frac{Avg Indeks PA I + Avg Indeks PA II}{2}$$

$$= \frac{Indeks 5 + Indeks [50\%(5.00) + 50\%(4.84)]}{2}$$

$$= \frac{Indeks 5 + Indeks 4.92}{2} = Indeks 4.96$$

	Target	Realisasi
Q1	3.5 (skala 5)	4.96
Q2	3.5 (skala 5)	-
Q3	3.5 (skala 5)	-
Q4	3.5 (skala 5)	-



Analisis Capaian

Kanwil DJPb	PA I	PA II	
	Indeks Kualitas Penugasan BLU	Indeks Kualitas Asistensi BLUD	Indeks Kualitas Pemberdayaan UMKM
Avg Nilai (Avg Indeks)	5.00	5.00	4.84
	5.00	4.92	
Avg Indeks	4.96		

Capaian ini merupakan gabungan dari seluruh Kantor Wilayah DJPb yang diambil rata-rata capaian indeks masing-masing Kantor Wilayah. Detail ND ini sudah disampaikan pada ND-201/PB.5/2025. Bidang PA I hanya terdiri dari satu komponen penugasan BLU sedangkan Bidang PA II terdiri dari dua komponen yaitu asistensi BLUD serta pemberdayaan UMKM.



Risiko (Rendah)

Atas Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Dit PPK BLU. seluruh kanwil telah melaksanakan pembinaan BLU. asistensi BLUD. dan pemberdayaan UMKM di wilayahnya masing-masing sehingga risiko rendah.



Isu Utama

Adanya kebijakan efisiensi dan penyesuaian pagu belanja diserahkan kepada masing-masing Kanwil DJPb serta adanya kebijakan simplifikasi pelaporan rutin pada Kanwil DJPb.



Dampak

Alokasi belanja yang tidak seragam setiap Kanwil DJPb menjadi tantangan dalam pemenuhan IKU ini dan simplifikasi pelaporan akan membuat kesulitan bagi Direktorat PPKBLU selaku penilai karena isi laporan cenderung sama.



Rencana Aksi

Berkoordinasi dengan Setditjen dan menjalin komunikasi yang baik dengan Kanwil DJPb untuk dapat menemukan solusi permasalahan terutama terkait IKU ini agar realisasi dapat dicapai dengan baik.

Direktorat PPKBLU	Pengelolaan Organisasi dan Pengendalian Internal yang Optimal							
	6a-N Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	104,27							
Capaian	104,27							

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>	Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama: Ketiga komponen IKU ini memerlukan kerja sama seluruh pegawai Direktorat karena berkaitan dengan pemenuhan dokumen wajib yang bersifat individual. Implikasi: Setiap pegawai wajib disiplin dalam pemenuhan kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan penilaian kinerja organisasi ini.	- Menginformasikan kepada pegawai baik secara formal melalui nota dinas atau pun informal melalui media komunikasi elektronik - Membuat tautan yang berisi monitoring penyelesaian dan upload dokumen pendukung LO

Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
Secara umum, setiap komponen pada Tingkat Implementasi Learning Organization telah dijalankan oleh Dit. PPK BLU, namun perlu dilakukan pendokumentasian yang lebih komprehensif.	Membuat monitoring pemenuhan dokumen dan menginformasikan secara rutin melalui media komunikasi grup pada aplikasi daring serta membuat pengumpulan dokumen yang mudah diakses semua pegawai.	Subdit PST	Juni, September dan Desember

Penjelasan IKU



Mengukur kualitas pengelolaan kinerja organisasi dengan memperhitungkan tiga komponen yaitu nilai *Learning Organization*, nilai *Strategy Focused Organization*, nilai Kepatuhan Internal.

Perhitungan Capaian



$$= \frac{\text{Nilai Komponen}}{\text{Target Komponen}} \times 100\%$$

$$= \frac{31.28}{30} \times 100\% = 104,27\%$$

	Target	Realisasi
Q1	100	104,27
Q2	100	-
Q3	100	-
Q4	100	-

Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi

Mandatory



Analisis Capaian

Subkomponen Penilaian	Nilai
Pengorganisasian & Penyebarluasan	25
Analisa Kebutuhan Pembelajaran	N/A
Desain Pembelajaran	N/A
Evaluasi Pembelajaran	100
Structured Learning	83.33
Learning from Experience	98.83
Organizational Performances	N/A
Leaders as Teachers	9.52
Capaian Nilai Learning Organization (LO)	31.28

Periode	Q1	Q2	Q3	Q4
Target	30	50	70	90
Realisasi	31.28			

$$= \frac{31.28}{30} \times 100\%$$

$$= 104.27\%$$


Risiko (Rendah)



-Risiko pada IKU ini rendah, karena seluruh komponen pendukung telah diunggah sebelum batas waktu dan telah memenuhi target di setiap triwulan. Namun masih menjadi perhatian karena realisasi tersebut merupakan nilai triwulan I di mana terdapat beberapa indikator yang belum tersedia



Isu Utama

Ketiga komponen IKU ini memerlukan kerja sama seluruh pegawai Direktorat karena berkaitan dengan pemenuhan dokumen wajib yang bersifat individual.



Dampak

Setiap pegawai wajib disiplin dalam pemenuhan kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan penilaian kinerja organisasi ini.



Rencana Aksi

Membuat monitoring pemenuhan dokumen dan menginformasikan secara rutin melalui media komunikasi grup pada aplikasi daring serta membuat pengumpulan dokumen yang mudah diakses semua pegawai.

Direktorat PPKBLU	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	7a-CP Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120							
Capaian	120							
Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)					Tindakan yang Telah Dilaksanakan			
Isu Utama: Adanya kebijakan efisiensi yang berimbas pada persentase penyerapan karena banyak rencana kegiatan tidak dapat terrealisasi sedangkan jumlah pagu masih sama karena menunggu proses revisi di DJA. Implikasi: Perubahan dan penyesuaian rencana kegiatan dengan pengeluaran biaya seefisien mungkin namun penggunaan seefektif mungkin dengan output yang dihasilkan tetap optimal.					1. Melakukan koordinasi dengan masing-masing pengelola kegiatan untuk memastikan bahwa seluruh anggaran dapat terserap dan output kegiatan dapat tercapai; 2. Menyusun ulang rencana kegiatan 3. Melakukan koordinasi internal dan komunikasi terhadap seluruh unit dalam rangka memastikan target pelaksanaan anggaran dapat tercapai			
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)					Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode	
1. Kurangnya ketepatan dalam membuat rencana penyerapan. 2. Adanya kebijakan efisiensi yang perlu banyak dilakukan penyesuaian antara rencana dengan eksekusi kegiatan.					Melakukan koordinasi dengan Setditjen Perbendaharaan khususnya bagian Keuangan agar kegiatan yang dilaksanakan tetap sejalan dengan kebijakan efisiensi dan menyesuaikan RPD Halaman III DIPA pada triwulan berikutnya	PST	Triwulan II	

Penjelasan IKU



Mengukur kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada level unit Eselon II.

Perhitungan Capaian



Indeks	IKPA
120	Realisasi IKPA ≥ 98.00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0.15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0.5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79.9	Realisasi IKPA < 85

*Koefisien 0.15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/(indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (98-95) / (120-100)

** Koefisien 0.5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/(indeks capaian target – indeks capaian 80)

	Target	Realisasi
Q1	100	120
Q2	100	-
Q3	100	-
Q4	100	-

Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu



Analisis Capaian

INDIKATOR IKU	BOBOT	NILAI	HASIL
Revisi DIPA	0%	100%	
Halaman III DIPA	15%	100%	15.00%
Penyerapan Anggaran	0%	9.02%	
Belanja Kontraktual	10%	100%	10.00%
Penyelesaian Tagihan	10%	100%	10.00%
Pengelolaan UP dan TUP	0%	100%	
Dispensasi SPM	0%	100%	
Capaian Output	25%	100%	25.00%
Total	60%		60.00%
Nilai IKPA (Q1)	100.00		
Target Nilai IKPA	95		

Nilai halaman III DIPA ada dispensasi khusus karena kebijakan efisiensi, sehingga didapatkan nilai maksimal. Gambaran pagu sebagai berikut:

Pagu awal = 5.178.954.000
 Blokir dan efisiensi = 3.110.709.200
 Sisa pagu = 2.068.244.800



Risiko (Sangat Rendah)

Risiko atas IKU ini diukur pada kepatuhan pertanggungjawaban keuangan melalui aplikasi keuangan Setditjen. Berdasarkan pertimbangan dan data historis. risiko ini dinilai sangat rendah.



Isu Utama

Adanya kebijakan efisiensi yang berimbas pada persentase penyerapan karena banyak rencana kegiatan tidak dapat ter realisasi sedangkan jumlah pagu masih sama karena menunggu proses revisi di DJA.



Dampak

Perubahan dan penyesuaian rencana kegiatan dengan pengeluaran biaya seefisien mungkin namun penggunaan seefektif mungkin dengan output yang dihasilkan tetap optimal.



Rencana Aksi

1. Melakukan koordinasi dengan Setditjen Perbendaharaan khususnya bagian Keuangan agar kegiatan yang dilaksanakan tetap sejalan dengan kebijakan efisiensi.
2. Menyesuaikan RPD Halaman III DIPA pada triwulan berikutnya

Direktorat PPKBLU	Pengelolaan IT yang Andal dan Data yang Berkualitas							
	8a-CP Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	23,64%							
Capaian	118,20							

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>	Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama: Merupakan IKU baru yang monitoring progress dan perhitungan capaiannya disampaikan oleh pihak eksternal dalam hal ini CTO. Implikasi: Perlu pemahaman lebih dalam terkait IS RBTK Kementerian Keuangan yang terkait Direktorat PPKBLU dan pencapaiannya termasuk perhitungan IKUnya.	Koordinasi dengan pihak Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku pengusul dan Koordinator IKU.

Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
Implementasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan tidak dapat diselesaikan langsung secara mandiri, perlu pihak-pihak lain yang berkompeten untuk bisa bekerja sama mencapai tujuan.	Internalisasi IS RBTK level Kementerian Keuangan serta tata cara perhitungan IKU agar pada akhir tahun tetap tercapai karena IKU bersifat Take Last Known Value (TLKV)	Subdit PST dan TRI	Triwulan II

Penjelasan IKU

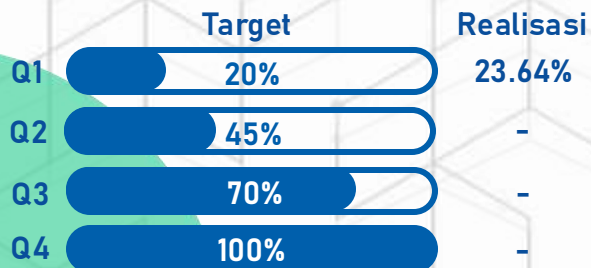


IKU ini untuk memonitor dan memastikan implementasi inisiatif strategis Kementerian Keuangan terlaksana sesuai dengan perencanaan baik dari sisi waktu dan kualitas.

Perhitungan Capaian



Seluruh data capaian diperoleh dari CTO Kemenkeu selaku pengampu dan pemberi *mandatory* IKU ini.



Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit



Analisis Capaian

IS RBTK level Kemenkeu tahun ini mengambil tema *A New Beginning: Transforming Ecosystem and Strengthening Strategic Linkage*. Transformasi yang dilakukan Kemenkeu dalam merespon tantangan domestik maupun ketidakpastian global perlu memperhatikan berbagai aspek, yaitu: kapasitas institusi, kredibilitas policy & regulasi, dan juga aspek Proses Bisnis (Probis), SDM dan IT.

IS Kemenkeu (PIC DJPb)	Capaian Utama Q1 2025
<i>Allocative Efficiency AP BN</i>	- Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penyusunan Proses Bisnis Pengembangan Central Mapper pada Penyaluran Bantuan Pemerintah - Identifikasi fungsi bisnis layanan pembayaran dan penerimaan <i>online</i> - Penyusunan laporan awal studi pengembangan SPP BUN
Kepemimpinan Kemenkeu dalam <i>Strategic Diamond</i>	- Keppres Progsun RPP Tahun 2025 yang didalamnya terdapat RPP Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah - Pembahasan Pra PAK bersama Bappenas, KemenpanRB, BPKP, Biro Hukum, DJA dan internal DJPb
Modernisasi Layanan	Penyusunan draft regulasi dalam rangka piloting E-Perjadin di lingkup Kemenkeu



Risiko (Rendah)

Risiko pada IKU ini dinilai rendah karena menurut tren IS Data Analytic pada tahun-tahun sebelumnya, capaian IS tersebut sangat baik. Tetapi, masih harus tetap dipantau karena IKU bersifat Take Last Known



Isu Utama

Merupakan IKU baru yang monitoring *progress* dan perhitungan capaiannya disampaikan oleh pihak eksternal dalam hal ini CTO.



Dampak

Perlu pemahaman lebih dalam terkait IS RBTK Kementerian Keuangan yang terkait Direktorat PPKBLU dan pencapaiannya termasuk perhitungan IKUnya.



Rencana Aksi

Internalisasi IS RBTK level Kementerian Keuangan serta tata cara perhitungan IKU agar pada akhir tahun tetap tercapai karena IKU bersifat *Take Last Known Value* (TLKV)

Direktorat PPKBLU	Pengelolaan IT yang Andal dan Data yang Berkualitas							
	8b-N Indeks Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	Max/TLK
Realisasi	2							
Capaian	66,67							
Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)					Tindakan yang Telah Dilaksanakan			
Isu Utama: IKU ini memperhatikan kualitas data yang ada di aplikasi BIOS dan pengembangan webservice Satker BLU yang datanya akan terintegrasi ke aplikasi BIOS. Implikasi: Perlu pengecekan dan validasi secara rutin oleh pembina keuangan bekerja sama dengan pembina teknis.					Melakukan berbagai kegiatan pendampingan dalam bentuk konsultasi, bimtek, pembinaan, pembelajaran dll kepada para stakeholder maupun pengguna layanan seintensif mungkin.			
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)					Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode	
1. Kurangnya koordinasi dengan BLU 2. Operator dan Approval baru pada Satker BLU karena alih tugas 3. Operator BLU baru yang tidak aware dengan target input/upload di BIOS					Kolaborasi antar Subdirektorat teknis dengan pengampu aplikasi BIOS agar dapat memperoleh data yang valid sehingga integritas data terjamin.	Subdit TRI, PPKBLU I, II, III	Januari – Desember	

Penjelasan IKU



IKU ini mengukur tingkat kelengkapan dan kualitas data pada aplikasi BIOS serta capaian *extra mile* dalam bentuk pengembangan *webservice* yang terintegrasi dengan aplikasi BIOS.

Perhitungan Capaian



Capaian yang dihitung adalah perhitungan pada akhir periode.

Rincian Indeks	%Capaian
Indeks 5	$90\% < Y$
Indeks 4	$80\% < Y \leq 90\%$
Indeks 3 (target)	$60\% < Y \leq 80\%$
Indeks 2	$30\% < Y \leq 60\%$
Indeks 1	$30\% \geq Y$

	Target	Realisasi
Q1	3 (skala 5)	2
Q2	3 (skala 5)	-
Q3	3 (skala 5)	-
Q4	3 (skala 5)	-

Indeks Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU

Non-Cascading



Analisis Capaian

SUBDIT	Kelengkapan dan Kualitas Data	<i>Extra Mile Webservice</i>	Indeks
PPKBLU I	49%	-	2
PPKBLU II	39%	-	2
PPKBLU III	36%	-	2
DIREKTORAT	41%	-	2

Progres sampai dengan triwulan I ini sudah cukup baik, diproyeksikan akan meningkat dan di akhir tahun minimal akan sampai ke sekitar 80% atau indeks 4. Nilai IKU ini diambil dari nilai yang paling akhir (Take Last Known Value).



Risiko (Sangat Rendah)

Risiko atas IKU ini dinilai sangat rendah. jika melihat dari tren tahun sebelumnya. keterisian data pada BIS akan meningkat seiring dengan berjalannya bulan. Pada tahun ini. di TW I memang masih rendah tetapi hal tersebut akan meningkat di triwulan-triwulan akhir ketika data sudah siap seluruhnya.



Isu Utama

IKU ini memperhatikan kualitas data yang ada di aplikasi BIOS dan pengembangan *webservice* Satker BLU yang datanya akan terintegrasi ke aplikasi BIOS.



Dampak

Perlu pengecekan dan validasi secara rutin oleh pembina keuangan bekerja sama dengan pembina teknis.



Rencana Aksi

Kolaborasi antar Subdirektorat teknis dengan pengampu aplikasi BIOS agar dapat memperoleh data yang valid sehingga integritas data terjamin.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DJPb
Indonesian Treasury



LAPORAN CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN II TAHUN 2025

Direktorat PPKBLU

PEMETAAN IKU 2025 DAN REALISASI CAPAIAN

No.	Uraian IKU	Target	Realisasi TW II	UIC				
				PST	TRI	PPK BLU I	PPK BLU II	PPK BLU III
	Cascading Kemenkeu-Wide							
1	Indeks Kinerja Reformasi Hukum	95.5	105,67	V	V			
2	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	20	75	V				
3	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu	100	99,52	V				
	Cascading Kemenkeu-One							
4	Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU	3 (skala 5)	3,9			V	V	V
5	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	45	54,69		V			
	IKU Mandatory							
6	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan	100	120	V	V	V	V	V
7	Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan	40	40,36	V	V			
8	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	100	120	V				
9	Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan	4 (skala 5)	5	V	V	V	V	V
	IKU Non-Cascading							
10	Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU	3 (skala 5)	4,22			V	V	V
11	Tingkat Perkembangan Pendapatan BLU	100	116,75			V	V	V
12	Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating	100	111,54			V	V	V
13	Indeks Kualitas Penugasan BLU, asistensi BLUD, dan UMKM	4 (skala 5)	4,99	V				V
14	Indeks Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU	3 (skala 5)	2		V	V	V	V

DJPb (PPKBLU)	Pengelolaan Keuangan BLU yang Inklusif dan Produktif							
	1a-CP Indeks peningkatan efisiensi layanan BLU							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	Max/TLK
Realisasi	4,6	3,9	3,9					
Capaian	120	120	120					

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)

Isu:

1. Blokir belanja pada triwulan I menjadikan realisasi belanja terakumulasi pada triwulan II.
2. Kebijakan efisiensi anggaran pada K/L dapat mempengaruhi output layanan BLU.

Implikasi:

Kebijakan efisiensi secara otomatis berdampak pada penghematan biaya yang dilakukan oleh Satker BLU namun juga berimbas dengan produktivitas output layanan yang dihasilkan.

Penjelasan Capaian :

Layanan BLU	Belanja Layanan	Growth Layanan	Growth Efisiensi
Kesehatan Rawat inap dan rawat jalan	Bertambah Rp8M (0.1%)	Meningkat 145ribu (7.87%)	Meningkat 641ribu (6.97%)
Pendidikan Jumlah mahasiswa dan serapan lulusan	Berkurang Rp794M (5.57%)	Meningkat 33ribu (1.43%)	Meningkat 6,5juta (6.82%)
Pengelola Dana Penyaluran dana bergulir dan jumlah end user	Berkurang Rp27M (26.28%)	Meningkat 1.2T (33.62%) Meningkat 305ribu (55.81%)	Meningkat 50ribu (48.76%)
Kawasan Jumlah pengunjung dan penyelenggaraan event	Berkurang Rp1.3M (2.13%)	Menurun 956ribu (30.28%) Menurun 32 event (11.31%)	Menurun 11.4juta (25.34%)
Barang dan Jasa Lainnya Jumlah penumpang dan layanan kargo	Bertambah Rp2.5M (1.45%)	Meningkat 398ribu (12.77%) Menurun 160ribu (0.33%)	Meningkat 2ribu (4.13%)
AVERAGE %		7.89% (Indeks 3.5)	8.27% (Indeks 4)

Tindakan yang Telah Dilaksanakan

1. Berkoordinasi dengan pihak BLU terkait IKU baru ini dan memberikan pembinaan dalam rangka pelaksanaan efisiensi.
2. Melaksanakan one on one dengan satker BLU

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
1. One on One dengan Satker BLU yang dianggap kurang produktif untuk kemudian memberikan rekomendasi selaku pembina keuangan agar layanan tetap berkualitas	PPKBLU I, II, III	September 2025 dan Desember 2025
2. Melaksanakan Monev Kinerja BLU		

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

1. Kebijakan efisiensi secara menyeluruh memerlukan pendetailan teknis untuk pedoman pelaksanaan.
2. Kurangnya monitoring terhadap kualitas layanan sehubungan adanya efisiensi



Kinerja Pembinaan Pelaksanaan Keuangan BLU

PENINGKATAN EFISIENSI LAYANAN BLU*

Layanan BLU	Belanja Layanan	Growth Layanan	Growth Efisiensi
Kesehatan Rawat inap dan rawat jalan	Bertambah Rp8M (0.1%)	Meningkat 145ribu (7.87%)	Meningkat 641ribu (6.97%)
Pendidikan Jumlah mahasiswa dan serapan lulusan	Berkurang Rp794M (5.57%)	Meningkat 33ribu (1.43%)	Meningkat 6,5juta (6.82%)
Pengelola Dana Penyaluran dana bergulir dan jumlah <i>end user</i>	Berkurang Rp27M (26.28%)	Meningkat 1.2T (33.62%) Meningkat 305ribu (55.81%)	Meningkat 50ribu (48.76%)
Kawasan Jumlah pengunjung dan penyelenggaraan <i>event</i>	Berkurang Rp1.3M (2.13%)	Menurun 956ribu (30.28%) Menurun 32 event (11.31%)	Menurun 11.4juta (25.34%)
Barang dan Jasa Lainnya Jumlah penumpang dan layanan kargo	Bertambah Rp2.5M (1.45%)	Meningkat 398ribu (12.77%) Menurun 160ribu (0.33%)	Meningkat 2ribu (4.13%)
AVERAGE %		7.89% (Indeks 3.5)	8.27% (Indeks 4)

1. Peningkatan belanja BLU umumnya dikarenakan banyak akun belanja pada triwulan I yang masih diblokir sehingga saat pembukaan blokir, banyak belanja yang tertunda kemudian direalisasikan di triwulan II.
2. Penurunan jumlah layanan pada BLU Kawasan karena berkurangnya jumlah event yang diselenggarakan dan jumlah pengunjung yang menurun utamanya pada BLU Danau Toba dan GBK.

	Target	Real.	Capaian
Q2	3	3.9	120

Komponen	Target	Realisasi	Bobot	Indeks Capaian
Indeks Efisiensi Layanan	3	4	80%	3.20
Indeks <i>Growth</i> Layanan	3	3.5	20%	0.70
Realisasi				3.90

IKU ini mengukur keberhasilan BLU dalam menerapkan kebijakan efisiensi yang diukur dengan 2 indikator:

1. Tingkat efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan BLU dibandingkan periode sebelumnya.
2. Tingkat pertumbuhan output layanan yang dihasilkan oleh BLU dibandingkan periode sebelumnya.

DJPb berkontribusi dalam pengawalan penerapan kebijakan efisiensi ini agar kualitas output layanan BLU kepada masyarakat tetap terjaga.

Isu Strategis

- Blokir belanja pada triwulan I menjadikan realisasi belanja terakumulasi pada triwulan II.
- Kebijakan efisiensi anggaran pada K/L dapat mempengaruhi output layanan BLU.

* IKU Baru

DJPb (PPKBLU)	Pengelolaan Keuangan BLU yang Inklusif dan Produktif							
	1b-N Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	Max/TLK
Realisasi	3.98	4.22	4.22					
Capaian	120	120	120					

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>
Isu Utama: Pengumpulan data yang membutuhkan waktu karena tidak langsung tersaji dalam aplikasi. Implikasi: Penyajian realisasi capaian yang membutuhkan waktu lebih lama karena waktu pelaporan realisasi capaian dengan cut off data relatif pendek.

Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>
Kurangnya koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait karena penetapan peraturan bergantung pada banyak pihak bahkan dari Kementerian/Lembaga di luar Kementerian Keuangan. Ditambah dengan adanya penggunaan aplikasi baru untuk perumusan peraturan.

Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Koordinasi dengan BLU untuk dapat memperhaitkan indikator-indikator yang mempengaruhi pencaiapaian IKU ini. Monev penetapan regulasi dengan tetap berkoordinasi dengan pihak berwenang tidak hanya secara formal namun juga secara informal menggunakan sarana komunikasi tercepat.

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
Monev penetapan regulasi dengan tetap berkoordinasi dengan pihak berwenang tidak hanya secara formal namun juga secara informal menggunakan sarana komunikasi tercepat.	PK I, II dan III	September 2025

Penjelasan IKU



Menghitung performa kinerja keuangan BLU dengan menggunakan tiga indikator, yaitu: *growth* EBITDA, akurasi proyeksi PNBPN, dan rasio POBO.

Perhitungan Capaian



= 65%(Komp 1) + 35%(Komp 2)
Perhitungan saat periode Triwulan II & IV
Komp 1: Indeks akurasi proyeksi PNBPN
Komp 2: Indeks rasio POBO

= 65%(Komp 1) + 30%(Komp 2) + 5%(Komp 3)
Perhitungan saat periode Triwulan II & IV
Komp 1: Indeks akurasi proyeksi PNBPN
Komp 2: Indeks rasio POBO
Komp 3: Indeks rasio *growth* EBITDA

	Target	Realisasi
Q1	3 (skala 5)	3,98
Q2	3 (skala 5)	4,22
Q3	3 (skala 5)	-
Q4	3 (skala 5)	-

Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU



Analisis Capaian

RUMPUN	Indeks Akurasi Proyeksi (65%)	Indeks Rasio POBO (30%)	Indeks Pertumbuhan EBITDA (5%)	Capaian (sesuai bobot)
KESEHATAN	4,36	5	5	4,60
PENDIDIKAN	4,28	3	1	3,73
PENGELOLA DANA	4,75	3	1,57	4,07
KAWASAN	4,21	5	1,36	4,31
BARANG JASA LAINNYA	4,26	5	2,73	4,41
Gabungan (<i>average</i>)	4,37	4,2	2,33	4,22

Target tiap komponen:

Akurasi Proyeksi : 10% – 12,5% (Indeks 3)
POBO : 75% – 80% (Indeks 3)
Growth EBITDA : 81% – 90% (Indeks 3)



Risiko (Sangat Rendah)

Iku ini merupakan pengembangan dari IKU akurasi proyeksi pengesahan pendapatan BLU pada tahun sebelumnya. Jika berdasarkan data dan pertimbangan, risiko pada IKU ini dinilai sangat rendah. Hal ini karena pada tahun sebelumnya seluruh rumpun BLU telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Non-Cascading



Isu Utama

Pengumpulan data yang membutuhkan waktu karena tidak langsung tersaji dalam aplikasi.



Dampak

Penyajian realisasi capaian yang membutuhkan waktu lebih lama karena waktu pelaporan realisasi capaian dengan cut off data relatif pendek.



Rencana Aksi

Berkoordinasi dengan pengembang aplikasi agar dapat dibuat dashboard atau tampilan laporan yang dapat menyajikan olahan data terkait perhitungan IKU ini.

DJPb (PPKBLU)	Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif							
	2a-N Indeks Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Max/TLK
Realisasi	120%	120%	120%					
Capaian	120	120	120					

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>
Isu Utama: IKU ini bersifat mandatory dan capaiannya tanggung rentengdengan Unit Eselon II lain. Tahun 2025 ini Direktorat PPKBLU tidak memiliki kewajiban tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya. Data realisasi untuk komponen capaian HAI DJPb diambil dari aplikasi OMSPAN Implikasi: Perlu optimalisasi teknologi untuk mendapatkan data dan pengolahan analisisnya yang sebagian besar dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya pegawai yang ada.

Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>
Perbedaan kuesioner karena ditentukan oleh pihak eksternal yang bisa jadi kurang relevan dengan kondisi yang ada saat ini.

Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
Menyelesaikan setiap permasalahan pada Hai DJPb sebelum batas waktu Membuat daftar responden		
Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
1. Menyelesaikan permasalahan pada Hai DJPb 2. Melaksanakan survei	Seluruh Subdit	Triwulan III

Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan

Mandatory

Penjelasan IKU



Pengukuran IKU untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat. pengguna layanan. dan stakeholders. Termasuk ke dalam komponen pengukuran adalah capaian HAI DJPb.

Perhitungan Capaian



Data realisasi capaian disediakan oleh Biro Umum Sekjen selaku pengusul dan pemberi *mandatory* IKU ini.

Sedangkan untuk komponen capaian HAI DJPb diambil dari aplikasi OMSPAN.

	Target	Realisasi
Q1	100%	120%
Q2	100%	120%
Q3	100%	-
Q4	100%	-

Analisis Capaian



Penyelesaian Tindak Lanjut

IKU ini bersifat mandatory dan capaiannya tanggung renteng dengan Unit Eselon II lain. Tahun 2025 ini Direktorat PPKBLU tidak memiliki kewajiban tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya. Sedangkan untuk triwulan I s.d. III, nilai capaian diperoleh dari kinerja Agen HAI DJPb tiap Subdirektorat.

Namun tetap perlu dipersiapkan untuk penilaian triwulan akhir yang menghitung hasil IKPL (Indeks Kepuasan Pengguna Layanan) dan SKPK (Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan).

Capaian HAI DJPb:

Subdirektorat	Nilai
PST	3,8
TRI	3,8
PPKBLU I	3,9
PPKBLU II	3,8
PPKBLU III	4
Average	3,86

$$= \frac{3,86}{3,2} \times 100\% = 120\%$$



Risiko (Rendah)

Risiko pada IKU ini dinilai rendah. hal ini karena jika dilihat dari tren tahun-tahun sebelumnya. capaian dari IKU ini sangat baik dan penyebaran serta pengisian kuisisioner juga dilakukan tepat waktu

Isu Utama



Pelaksanaan survei termasuk kegiatan yang diefisiensikan sehingga perlu membuat perencanaan ulang mengenai proses pengumpulan data, pengolahan dan analisisnya, serta penyajian laporan.

Dampak



Perlu optimalisasi teknologi untuk mendapatkan data dan pengolahan analisisnya yang sebagian besar dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya pegawai yang ada.

Rencana Aksi



Penyusunan rencana survei dan komponen yang lebih relevan dengan kondisi serta kebijakan pemerintah terkini.

DJPb (PPKBLU)	Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif							
	2b-N Tingkat Perkembangan Pendapatan BLU							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	109.64	116.75	116.75					
Capaian	109.64	116.75	116.75					

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)

Isu:

Kebijakan efisiensi secara nasional berimbas penyesuaian rencana dan kegiatan operasional Satker BLU.

Implikasi:

Butuh penyesuaian untuk dapat menjalankan kegiatan rutin dengan normal tanpa mengurangi kualitas output.

Penjelasan Capaian :

Rumpun BLU	Target 2025 (Milyar)	Realisasi 2024 Q2 (Milyar)	Realisasi 2025 Q2 (Milyar)	% Realisasi	% Growth
Kesehatan	25.175	11.426	12.655	50,27	9,71
Pendidikan	15.344	6.667	7.568	49,32	13,52
Pengelola Dana	40.191	15.409	14.937	37.17	-3.07
Kawasan	2.613	1.481	1.043	39.91	-29.58
Barang Jasa Lainnya	5.175	3.162	3.971	76.74	26
Gabungan	88.498	38.145	40.174	45,40	5,05
Target				40%	Indeks 3
Indeks Capaian SubIKU 1 & 2				113,49	120

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)
1. Adanya keterlambatan mengesahkan pendapatan PNBPNya. 2. Pengesahan yang dilakukan di akhir triwulan, biasanya data akan masuk ke periode triwulan berikutnya sehingga tidak realtime

Tindakan yang Telah Dilaksanakan
1. Penandatanganan Kontrak Kinerja BLU dan Direktur Jenderal Perbendaharaan telah dilaksanakan. 2. Mendorong BLU agar secepatnya melakukan pengesahan pada akhir Triwulan

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
Berkoordinasi dengan Satker BLU yang mengalami penurunan PNBPNya selaku pembina keuangan. agar dapat meningkatkan PNBPNya melalui optimalisasi aset-asetnya.	PK I, II, III	Triwulan III

Penjelasan IKU



Mengukur *growth* PNBP BLU dibandingkan tahun sebelumnya (pada periode yang sama) dan tingkat pencapaian pendapatan BLU terhadap target yang dicanangkan pada UU APBN tahun 2025.

Perhitungan Capaian



$$= \frac{\text{IndeksCap SubIKU 1} + \text{IndeksCap SubIKU 2}}{2}$$

$$= \frac{113,49 + 120}{2} = 116,75$$

SubIKU 1 (Target 40%)

Mengukur tingkat pencapaian PNBP BLU dibandingkan dengan target triwulanan

SubIKU 2 (Target Indeks 3: -2,5% s.d. 0,5%)

Mengukur *growth* PNBP BLU dibandingkan tahun sebelumnya pada periode triwulanan yang sama.

	Target	Realisasi
Q1	100	109,64
Q2	100	116,75
Q3	100	-
Q4	100	-

Tingkat Perkembangan Pendapatan BLU



Analisis Capaian

REALISASI DAN GRWOTH PNBP

Rumpun BLU	Target 2025 (Milyar)	Realisasi 2024 Q2 (Milyar)	Realisasi 2025 Q2 (Milyar)	% Realisasi	% Growth
Kesehatan	25.175	11.426	12.655	50,27	9,71
Pendidikan	15.344	6.667	7.568	49,32	13,52
Pengelola Dana	40.191	15.409	14.937	37,17	-3,07
Kawasan	2.613	1.481	1.043	39,91	-29,58
Barang Jasa Lainnya	5.175	3.162	3.971	76,74	26
Gabungan	88.498	38.145	40.174	45,40	5,05
Target				40%	Indeks 3
Indeks Capaian SubIKU 1 & 2				113,49	120

Indeks Capaian SubIKU 1:

$$= \frac{\% \text{ Realisasi}}{\% \text{ Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{45,4\%}{40\%} \times 100\% = 113,49$$



Indeks Capaian SubIKU 2:

$$= \frac{\text{Avg Indeks}}{\text{Target Indeks}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Indeks 4,5}}{\text{Indeks 3}} \times 100\% = 120$$

Risiko (Rendah)

Pendapatan BLU sudah tercapai sesuai dengan target Triwulan I (di atas 15%) sehingga risiko dinilai rendah. namun demikian tetap perlu menjadi perhatian terutama untuk rumpun yang memiliki target pendapatan yang tinggi serta diharapkan trend realisasi pendapatan akan terus naik hingga triwulan IV

Non-Cascading



Isu Utama

Kebijakan efisiensi secara nasional berimbas penyesuaian rencana dan kegiatan operasional Satker BLU.



Dampak

Butuh penyesuaian untuk dapat menjalankan kegiatan rutin dengan normal tanpa mengurangi kualitas output.



Rencana Aksi

Berkoordinasi dengan Satker BLU yang mengalami penurunan PNBP selaku pembina keuangan. agar dapat meningkatkan PNBP nya melalui optimalisasi aset-asetnya.

DJPb (PPKBLU)	Formulasi Kebijakan yang Implementatif dan Aplikatif							
	3a-CP Indeks Kinerja Reformasi Hukum							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95.5	Max/TLK
Realisasi	120	105.67	105.67					
Capaian	120	110.65	110.65					

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>
Isu: Penetapan peraturan dan regulasi yang dirancang melibatkan banyak pihak. tidak hanya internal Direktorat PPKBLU. Implikasi: Koordinasi intensif kepada para pihak yang berwenang dan terkait dalam tahapan penyelesaian regulasi yang dirumuskan. Penjelasan Capaian : 1. PMK Tarif PIP 2. PMK Tarif Kolektif Laboratorium Kesehatan Kemenkes 3. PMK Tarif Kolektif UPBU 4. PMK Tarif Kolektif Distrik Navigasi 5. PMK Tarif BPDP 6. KMK Remunerasi BPKARSS Kemenhub 7. KMK Remunerasi BAKTI

Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>
Perlu koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait karena penetapan peraturan bergantung pada banyak pihak bahkan dari Kementerian/Lembaga di luar Kementerian Keuangan. Ditambah dengan adanya penggunaan aplikasi baru untuk perumusan peraturan.

Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Telah menyelesaikan legal drafting dan harmonisasi beberapa peraturan dalam bentuk KMK maupun PMK. Mengawasi setiap proses penetapan regulasi

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
Mengawasi setiap proses penetapan regulasi dengan tetap berkoordinasi dengan pihak berwenang tidak hanya secara formal namun juga secara informa menggunakan sarana komunikasi tercepat.	PST dan TRI	Triwulan III

Penjelasan IKU

Mengukur penyelesaian regulasi (RPP, Rperpres, RPMK, RKMK)

Perhitungan Capaian

Realisasi capaian disampaikan melalui Nota Dinas dari Direktorat SP selaku koordinator IKU berdasarkan data dari Biro Hukum Sekjen.

	Target	Realisasi
Q1	95.5	120
Q2	95.5	105,67
Q3	95.5	-
Q4	95.5	-

Indeks Kinerja Reformasi Hukum



Analisis Capaian

Peraturan yang dirumuskan oleh Direktorat PPKBLU tahun 2025

On progress:

1. RPMK Perubahan PMK 172 tahun 2021
2. RPMK Perubahan PMK 202 tahun 2022 (proses harmonisasi)
3. RPMK Tarif Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor
4. RPMK Tarif Balai Pengujian Perkeretaapian
5. RPMK Tarif Kolektif Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kemen ESDM
6. RPMK Tarif BPJPH
7. RPMK Tarif RS Adhyaksa

Terbit:

1. PMK Tarif PIP
2. PMK Tarif Kolektif Laboratorium Kesehatan Kemenkes
3. PMK Tarif Kolektif UPBU
4. PMK Tarif Kolektif Distrik Navigasi
5. PMK Tarif BPDP
6. KMK Remunerasi BPKARSS Kemenhub
7. KMK Remunerasi BAKTI



Risiko (Sangat Rendah)

Atas IKU ini Dit PPK BLU telah mengawal dan menyelesaikan peraturan-peraturan yang menjadi kewenangan Dit. PPKBLU. Berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya, risiko atas IKU ini dinilai sangat rendah.

Kemenkeu - Wide



Isu Utama

Penetapan peraturan dan regulasi yang dirancang melibatkan banyak pihak, tidak hanya internal Direktorat PPKBLU.



Dampak

Koordinasi intensif kepada para pihak yang berwenang dan terkait dalam tahapan penyelesaian regulasi yang dirumuskan.



Rencana Aksi

Mengawasi setiap proses penetapan regulasi dengan tetap berkoordinasi dengan pihak berwenang tidak hanya secara formal namun juga secara informal menggunakan sarana komunikasi tercepat.

Direktorat PPKBLU	Formulasi Kebijakan yang Implementatif dan Aplikatif							
	3b-NTingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20	40	40	60	60	80	80	Max/TLK
Realisasi	20	40.36	40.36					
Capaian	100	100.90	100.90					
Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)					Tindakan yang Telah Dilaksanakan			
Isu Utama: Pengukuran dampak dengan metode RIA ini baru diterapkan untuk menjadi perhitungan IKU pada tahun ini. Implikasi: Perlu pemahaman terkait metode RIA agar hasil pengukuran kebijakan sesuai dengan yang diharapkan dan memiliki manfaat yang signifikan.					Mengirimkan informasi mengenai peraturan yang akan diuji kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku koordinator di kantor pusat DJPb.			
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)					Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode	
1. Perhitungan IKU ini merupakan yang pertama dan menjadi tantangan tersendiri karena dihitung oleh pihak eksternal. 2. Penyelesaian peraturan melibatkan beberapa unit					Berkoordinasi dengan Direktorat SP selaku pengampu dan pengusul IKU dengan jalur komunikasi formal maupun informal.	Seluruh Subdit	Triwulan III 2025	

Penjelasan IKU



Mengukur dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan dengan metode RIA (*Regulatory Impact Assessment*).

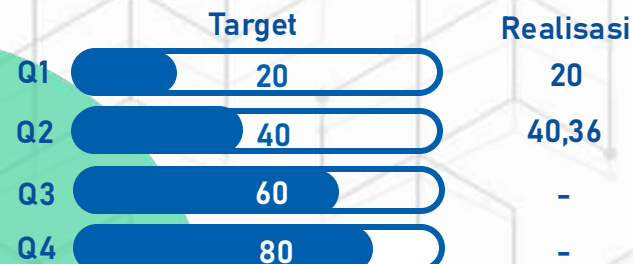
Koordinator IKU ini adalah Direktorat SP.

Perhitungan Capaian



Capaian TW II dihitung berdasarkan rekapitulasi hasil kuisoner oleh direktorat pemrakarsa regulasi kepada stakeholders.

Capaian TW II = Nilai x 25%



Analisis Capaian

Peraturan yang menjadi objek penilaian efektivitas pada Direktorat PPKBLU yaitu **PER-11/PB/2021 tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola dan Kinerja (Tingkat Maturitas) Badan Layanan Umum**

Triwulan II ini, capaian dihitung berdasarkan **rekapitulasi hasil kuesioner** yang disebarkan kepada stakeholders terkait efektivitas penerapan peraturan. Isian dan konsep kuesioner ini ditentukan oleh Direktorat SP selaku koordinator IKU ini.

Kuesioner telah disampaikan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan (SP) kepada setiap direktorat pemrakarsa aturan sebagaimana terdapat dalam nota dinas Direktur SP nomor **ND-597/PB.7/2025**.

Hasil triwulan II Direktorat PPKBLU mendapatkan nilai **40,36** sebagaimana telah disampaikan melalui nota dinas Direktur SP nomor **ND-713/PB.7/2025**.



Risiko (Rendah)

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2025. Risiko IKU ini dinilai rendah setelah melakukan koordinasi dengan Bagian KI dan DSP sebagai koordinator dan penanggungjawab IKU.



Isu Utama

Pengukuran dampak dengan metode RIA ini baru diterapkan untuk menjadi perhitungan IKU pada tahun ini.



Dampak

Perlu pemahaman terkait metode RIA agar hasil pengukuran kebijakan sesuai dengan yang diharapkan dan memiliki manfaat yang signifikan.



Rencana Aksi

Berkoordinasi dengan Direktorat SP selaku pengampu dan pengusul IKU dengan jalur komunikasi formal maupun informal.

Direktorat PPKBLU	Pengelolaan tugas khusus (special mission) yang efektif							
	4a-CP Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	10%	20%	20%	35%	35%	98,8%	98,8%	Max/TLK
Realisasi	62,5%	75%	75%					
Capaian	120	120	120					

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>	Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama: Rekomendasi yang diberikan perlu diselesaikan melalui kerja sama lintas unit Eselon II bahkan lintas Eselon I dan terkadang membutuhkan waktu cukup lama. Implikasi: Perlu berkoordinasi dengan pihak terkait yang memiliki wewenang dalam penyelesaian rekomendasi serta perlu menyamakan persepsi dengan pihak BPK agar memiliki pemahaman yang sama terutama terkait dengan regulasi maupun kebijakan.	1. Komunikasi dengan pihak lain yang terlibat dalam rekomendasi bersama. 2. Memonitor secara terus menerus terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan BPK kepada unit-unit lain yang terkait. 3. Melakukan koordinasi dengan Direktorat APK untuk memastikan bahwa seluruh tindak lanjut dapat disepakati selesai oleh BPK.

Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
1. Beberapa tindak lanjut atas rekomendasi BPK melibatkan unit-unit lain sering tersapat kesulitan dalam koordinasi. 2. Pada beberapa hal tertentu, masih terdapat perbedaan persepsi terkait pengelolaan BLU dan regulasi yang terkait. antara pihak BPK dengan Direktorat PPKBLU	Koordinasi dengan Direktorat APK selaku penghubung dengan pihak BPK agar rekomendasi yang telah diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.	PST	Triwulan III

Penjelasan IKU



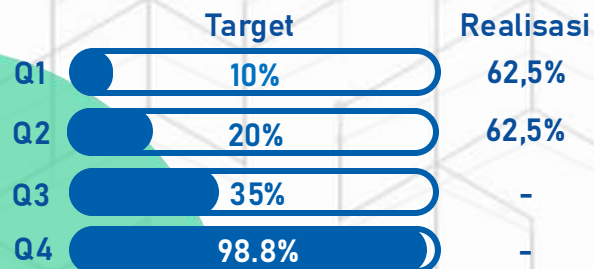
Mengukur progres penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK terhadap LKPP dan LKBUN. Persetujuan atas penyelesaian dan kesesuaian hasil tindak lanjut divalidasi oleh pihak BPK.

Perhitungan Capaian



Data realisasi capaian disediakan oleh Direktorat APK selaku koordinator dengan pihak BPK.

Saat ini belum ada informasi resmi terupdate untuk hasil penyelesaian rekomendasi. Sementara masih menggunakan capaian sebelumnya.



Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN



Analisis Capaian

JENIS REKOM	OUTSTANDING REKOM	REKOM DISELESAIKAN	%
LKPP	2	2	100%
LKBUN	4	1	25%
Gabungan	6	3	62,5%

Tindak lanjut rekomendasi sudah dilaksanakan dan diberitahukan ke Direktorat APK melalui ND-340/PB.5/2025 tanggal 23 Juni 2025 hal Penyampaian Progres Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKBUN Tahun 2023 dan Tahun-Tahun Sebelumnya. Namun hasil validasi dari BPK apakah sesuai atau tidak, masih menunggu informasi melalui Nota Dinas dari Direktorat APK.



Risiko (Sangat Rendah)

Rekomendasi dari BPK yang berada di kewenangan Dit. PPKBLU telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan segera sehingga risiko dinilai sangat rendah. selain itu Dit. PPK BLU selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.



Isu Utama

Rekomendasi yang diberikan perlu diselesaikan melalui kerja sama lintas unit Eselon II bahkan lintas Eselon I dan terkadang membutuhkan waktu cukup lama.



Dampak

Perlu berkoordinasi dengan pihak terkait yang memiliki wewenang dalam penyelesaian rekomendasi serta perlu menyamakan persepsi dengan pihak BPK agar memiliki pemahaman yang sama terutama terkait dengan regulasi maupun kebijakan.



Rencana Aksi

Koordinasi dengan Direktorat APK selaku penghubung dengan pihak BPK agar rekomendasi yang telah diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Direktorat PPKBLU	Pengelolaan tugas khusus (special mission) yang efektif							
	4b-N Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	111.54	111.54	111.54					
Capaian	111.54	111.54	111.54					
Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)					Tindakan yang Telah Dilaksanakan			
Isu Utama: Adanya penyesuaian dalam indikator penilaian maturity rating agar lebih sesuai dengan konteks dan kondisi terkini. Implikasi: Satker BLU perlu mempelajari kembali dan menjadi tantangan bagi Satker BLU yang kesulitan dalam meningkatkan nilai maturity ratingnya.					1. Mendorong BLU untuk segera menyelesaikan proses self assessment maturity rating. 2. Memberikan bimbingan teknis dan konsultasi baik secara langsung maupun melalui media komunikasi elektronik kepada Satker BLU 3. Pembinaan intensif			
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)					Rekomendasi Rencana Aksi		Penanggung jawab	Periode
1. Beberapa BLU baru belum terbiasa melakukan penilaian dengan sistem maturity rating. 2. Terdapat BLU yang akan dibekukan karena adanya restrukturisasi organisasinya sehingga tidak memiliki motivasi untuk menyelesaikan maturity rating.					Pembinaan intensif bagi Satker BLU baru dan yang memiliki permasalahan terkait nilai maturity rating ini.		Subdit PPKBLU I, II, III	Juli s.d. September 2025

Penjelasan IKU

Mengukur kualitas tata kelola BLU menggunakan metode pengukuran *maturity rating assessment*. Standar penilaian setiap BLU harus memenuhi pada level “baik” dan memiliki peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

Perhitungan Capaian

$$= \frac{\text{IndeksCap SubIKU 1} + \text{IndeksCap SubIKU 2}}{2}$$

$$= \frac{103,09 + 120}{2} = 111,54$$

SubIKU 1 (Target 97%)

Mengukur persentase BLU yang memiliki *maturity rating* masuk ke dalam kategori “baik” atau di atasnya. namun periode awal tahun masih bersifat tahapan *self assessment*.

SubIKU 2 (Target Indeks 3.5)

Mengukur *growth* peningkatan nilai *maturity rating*. namun periode awal tahun masih bersifat tahapan evaluasi dan *self assessment*.

	Target	Realisasi
Q1	100	111.54
Q2	100	111,54
Q3	100	-
Q4	100	-

Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating



Analisis Capaian

SUBDIREKTORAT	PERSENTASE BLU KATEGORI “BAIK” ATAU DI ATASNYA	KENAIKAN NILAI MATRAT BLU (DALAM INDEKS)
PPKBLU I	100%	5
PPKBLU II	100%	5
PPKBLU III	100%	5
Gabungan	100%	5
Target	100%	5

Indeks Capaian SubIKU 1:

$$= \frac{\text{Avg \%}}{\text{Target \%}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{97\%} = 103,09$$

Indeks Capaian SubIKU 2:

$$= \frac{\text{Avg Indeks}}{\text{Target Indeks}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Indeks 5}}{\text{Indeks 3,5}} = 120 (\text{max})$$



Risiko (Sangat Rendah)

Secara keseluruhan berdasarkan hasil tahun sebelumnya. hasil penilaian terhadap *maturity rating* sangat baik. Sehingga. risiko berkaitan dengan IKU ini dinilai sangat rendah.

Non-Cascading



Isu Utama

Adanya penyesuaian dalam indikator penilaian *maturity rating* agar lebih sesuai dengan konteks dan kondisi terkini.



Dampak

Satker BLU perlu mempelajari kembali dan menjadi tantangan bagi Satker BLU yang kesulitan dalam meningkatkan nilai *maturity rating*nya.



Rencana Aksi

Pembinaan intensif bagi Satker BLU baru dan yang memiliki permasalahan terkait nilai *maturity rating* ini.

Direktorat PPKBLU	Komunikasi Publik dan Sinergi Antar-Organisasi yang Kolaboratif							
	5a –N Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	4	4	4	4	4	4	4	Max/TLK
Realisasi	5	5	5					
Capaian	120	120	120					

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>					Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
Isu Utama: Pelaksanaan edukasi dan komunikasi tidak hanya selesai pada satu kegiatan namun harus berkesinambungan dengan tetap memperhatikan sisi efisiensi. Implikasi: Penilaian pada kegiatan tertentu dengan metode pre dan post test atau survei peserta atau pun tingkat kualitas penyelesaian pelatihan hanya memberi potret sebagian proses edukasi dan komunikasi.					1. Publikasi informasi terkait pengelolaan keuangan BLU melalui website blu.djpb.kemenkeu.go.id 2. Menyediakan fitur helpdesk pada website blu.djpb.kemenkeu.go.id sebagai sarana peningkatan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan BLU 3. Meng-update petunjuk manual operasionalisasi BIOS. 4. Menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi dan komunikasi bekerja sama dengan BPPK melalui KLC.		
Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>					Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
1. Pelaksanaan kegiatan edukasi dan komunikasi membutuhkan waktu yang lama 2. Pergantian Operator dan Approval aplikasi BIOS yang sering terjadi pada BLU 3. Konsep BLU merupakan hal yang baru bagi beberapa peserta bimtek dan sangat berbeda dengan pekerjaan mereka selama ini					Membuat perencanaan kegiatan seefisien mungkin dengan topik atau tema yang saling melengkapi dan berkelanjutan agar proses edukasi tidak terputus.	Seluruh Subdit	Triwulan III



Pengukuran tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi yang dilakukan melalui pre-test dan post-test bimbingan teknis atau survei atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau tingkat penyelesaian pelatihan. Capaian dihitung TLKV agar bisa melihat rangkaian keseluruhan.

Perhitungan Capaian



Triwulan II ini menghitung persentase penyelesaian perumusan kurikulum atau materi edukasi, sosialisasi, atau bimbingan teknis.

	Target	Realisasi
Q1	4 (skala 5)	5
Q2	4 (skala 5)	5
Q3	4 (skala 5)	-
Q4	4 (skala 5)	-

Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan



Analisis Capaian

Triwulan II telah dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:

1. **Bimtek SAKTI BLU** mengundang perwakilan dari Kanwil DJPb pada tanggal 28 – 30 April 2025.
2. **Pelatihan Pendampingan Pemasaran Produk UMKM** bekerja sama dengan PIP pada tanggal 30 April 2025.

Dari kedua kegiatan tersebut diperoleh hasil yang cukup baik yang mengindikasikan efektivitas edukasi yang dilaksanakan. Hasil post-test menunjukkan peningkatan dari hasil pre-test. Survey kepuasan juga mendapatkan respon mayoritas dengan nilai “sangat baik”.

Kemudian telah dilaksanakan rapat pembahasan desain pembelajaran kegiatan pelatihan pada Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU dengan Pusdiklat AP pada tanggal 13 Juni 2025. Kegiatan ini salah satu yang akan dilaksanakan adalah Pelatihan Jarak Jauh Pengelolaan Keuangan BLU bagi Pejabat Keuangan BLU serta e-learning bagi Dewan Pengawas BLU.



Risiko (Sangat Rendah)

Seluruh subdit sudah melaksanakan evaluasi atas kegiatan yang direncanakan di Triwulan I dan diikuti oleh pemenuhan target peserta kegiatan sehingga risiko sangat rendah

Mandatory



Isu Utama

Pelaksanaan edukasi dan komunikasi tidak hanya selesai pada satu kegiatan namun harus berkesinambungan dengan tetap memperhatikan sisi efisiensi.



Dampak

Penilaian pada kegiatan tertentu dengan metode pre dan post test atau survei peserta atau pun tingkat kualitas penyelesaian pelatihan hanya memberi potret sebagian proses edukasi dan komunikasi.



Rencana Aksi

Membuat perencanaan kegiatan seefisien mungkin dengan topik atau tema yang saling melengkapi dan berkelanjutan agar proses edukasi tidak terputus.

Direktorat PPKBLU	Komunikasi Publik dan Sinergi Antar-Organisasi yang Kolaboratif							
	5b-N Indeks Kualitas Penugasan BLU, asistensi BLUD, dan UMKM							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	Max/TLK
Realisasi	4.96	4.98	4.98					
Capaian	120	120	120					

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>	Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama: Adanya kebijakan efisiensi dan penyesuaian pagu belanja diserahkan kepada masing-masing Kanwil DJPb serta adanya kebijakan simplifikasi pelaporan rutin pada Kanwil DJPb Implikasi: Alokasi belanja yang tidak seragam setiap Kanwil DJPb menjadi tantangan dalam pemenuhan IKU ini dan simplifikasi pelaporan akan membuat kesulitan bagi Direktorat PPKBLU selaku penilai karena isi laporan cenderung sama. .	- Menyampaikan informasi secara formal & informal terkait tindak lanjut atas sosialisasi pemberdayaan UMKM - Telah dilakukan pemberian feedback penilaian kepada masing-masing Kanwil untuk dilakukan perbaikan periode berikutnya. - Berkoordinasi dengan Setditjen

Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
- Para pegawai kanwil yang baru dalam hal pekerjaan maupun dalam hal penempatan membutuhkan waktu dalam memahami IKU ini. - Menjalin komunikasi dengan BLUD yang notabene bukan kewenangan secara langsung Kanwil dalam melakukan pembinaan. - Kegiatan yang dilakukan selama ini hanya bersifat temporer (pameran, asistensi, sosialisasi, dll) belum ada kegiatan pemberdayaan yang komprehensif sampai dengan memantau perkembangan UMKM dan menentukan milestone capaian target bisnis secara rinci.	- Berkoordinasi dengan Setditjen dan menjalin komunikasi yang baik dengan Kanwil DJPb untuk dapat menemukan solusi permasalahan terutama terkait IKU ini agar realisasi dapat dicapai dengan baik. - Rapat bersama Kanwil Binaan	Subdit PST dan PPK III	Triwulan III

Penjelasan IKU



Indikator Kinerja ini akan mengukur 3 (tiga) komponen yaitu kualitas pembinaan BLU. asistensi BLUD. dan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJPb.

Perhitungan Capaian



$$= \frac{Avg Indeks PA I + Avg Indeks PA II}{2}$$

$$= \frac{Indeks 5 + Indeks [50\%(5,00) + 50\%(4,98)]}{2}$$

$$= \frac{Indeks 5 + Indeks 4,99}{2} = Indeks 4,99$$

	Target	Realisasi
Q1	3.5 (skala 5)	4,96
Q2	3.5 (skala 5)	4,99
Q3	3.5 (skala 5)	-
Q4	3.5 (skala 5)	-



Analisis Capaian

Kanwil DJPb	PA I	PA II	
	Indeks Kualitas Penugasan BLU	Indeks Kualitas Asistensi BLUD	Indeks Kualitas Pemberdayaan UMKM
Avg Nilai (Avg Indeks)	5	5	4,98
	5	4,99	
Avg Indeks	4,99		

Capaian ini merupakan gabungan dari seluruh Kantor Wilayah DJPb yang diambil rata-rata capaian indeks masing-masing Kantor Wilayah. Bidang PA I hanya terdiri dari satu komponen penugasan BLU sedangkan Bidang PA II terdiri dari dua komponen yaitu asistensi BLUD serta pemberdayaan UMKM.



Risiko (Rendah)

Atas Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Dit PPK BLU. seluruh kanwil telah melaksanakan pembinaan BLU. asistensi BLUD. dan pemberdayaan UMKM di wilayahnya masing-masing sehingga risiko rendah.



Isu Utama

Adanya kebijakan efisiensi dan penyesuaian pagu belanja diserahkan kepada masing-masing Kanwil DJPb serta adanya kebijakan simplifikasi pelaporan rutin pada Kanwil DJPb.



Dampak

Alokasi belanja yang tidak seragam setiap Kanwil DJPb menjadi tantangan dalam pemenuhan IKU ini dan simplifikasi pelaporan akan membuat kesulitan bagi Direktorat PPKBLU selaku penilai karena isi laporan cenderung sama.



Rencana Aksi

Berkoordinasi dengan Setditjen dan menjalin komunikasi yang baik dengan Kanwil DJPb untuk dapat menemukan solusi permasalahan terutama terkait IKU ini agar realisasi dapat dicapai dengan baik.

Direktorat PPKBLU	Pengelolaan Organisasi dan Pengendalian Internal yang Optimal							
	6a-N Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	104.27	120	120					
Capaian	104.27	120	120					

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>	Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama: Ketiga komponen IKU ini memerlukan kerja sama seluruh pegawai Direktorat karena berkaitan dengan pemenuhan dokumen wajib yang bersifat individual. Implikasi: Setiap pegawai wajib disiplin dalam pemenuhan kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan penilaian kinerja organisasi ini.	1. Menginformasikan kepada pegawai baik secara formal melalui nota dinas atau pun informal melalui media komunikasi elektronik 2. Membuat tautan yang berisi monitoring penyelesaian dan upload dokumen pendukung LO 3. Monitoring pemenuhan dokumen

Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
Secara umum, setiap komponen pada Tingkat Implementasi Learning Organization telah dijalankan oleh Dit. PPK BLU, namun perlu dilakukan pendokumentasian yang lebih komprehensif.	Membuat monitoring pemenuhan dokumen dan menginformasikan secara rutin melalui media komunikasi grup pada aplikasi daring serta membuat pengumpulan dokumen yang mudah diakses semua pegawai. Supervisi pelaksanaan CNC	Subdit PST	September dan Desember

Penjelasan IKU



Mengukur kualitas pengelolaan kinerja organisasi dengan memperhitungkan tiga komponen yaitu nilai *Learning Organization*, nilai *Strategy Focused Organization*, nilai Kepatuhan Internal.

Perhitungan Capaian



$$= \frac{\text{Nilai Komponen}}{\text{Target Komponen}} \times 100\%$$

$$= \frac{6,36}{50} \times 100\%$$

$$= 12,72\%$$

	Target	Realisasi
Q1	100	104,27
Q2	100	120
Q3	100	-
Q4	100	-

Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi

Mandatory



Analisis Capaian

Subkomponen Penilaian	Nilai
Pengorganisasian & Penyebarluasan	50
Analisa Kebutuhan Pembelajaran	100
Desain Pembelajaran	98,67
Evaluasi Pembelajaran	95,65
Structured Learning	100
Learning from Experience	100
Pemenuhan Jam Pembelajaran	65
Organizational Performances	0
Leaders as Teachers	92,59
Leaders as Role Model	50
Capaian Nilai Learning Organization (LO)	68,36

Periode	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	30	50	70	90	= $\frac{68,36}{50} \times 100\%$
Realisasi	31,28	68,36			= 120%

Realisasi capaian ini diperoleh melalui nota dinas Sekretaris DJPb nomor ND-2220/PB.1/2025



Risiko (Rendah)



Risiko pada IKU ini rendah, karena seluruh komponen pendukung telah diunggah sebelum batas waktu dan telah memenuhi target di setiap triwulan. Namun masih menjadi perhatian karena realisasi tersebut merupakan nilai triwulan II di mana terdapat beberapa indikator yang belum tersedia



Isu Utama

Ketiga komponen IKU ini memerlukan kerja sama seluruh pegawai Direktorat karena berkaitan dengan pemenuhan dokumen wajib yang bersifat individual.



Dampak

Setiap pegawai wajib disiplin dalam pemenuhan kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan penilaian kinerja organisasi ini.



Rencana Aksi

Membuat monitoring pemenuhan dokumen dan menginformasikan secara rutin melalui media komunikasi grup pada aplikasi daring serta membuat pengumpulan dokumen yang mudah diakses semua pegawai.

Direktorat PPKBLU	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	7a-CP Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	99.52	99.52					
Capaian	120	99.52	99.52					
Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)					Tindakan yang Telah Dilaksanakan			
Isu Utama: Adanya kebijakan efisiensi yang berimbas pada persentase penyerapan karena banyak rencana kegiatan tidak dapat terrealisasi sedangkan jumlah pagu masih sama karena menunggu proses revisi di DJA. Implikasi: Perubahan dan penyesuaian rencana kegiatan dengan pengeluaran biaya seefisien mungkin namun penggunaan seefektif mungkin dengan output yang dihasilkan tetap optimal.					1. Melakukan koordinasi dengan masing-masing pengelola kegiatan untuk memastikan bahwa seluruh anggaran dapat terserap dan output kegiatan dapat tercapai; 2. Menyusun ulang rencana kegiatan di Triwulan 2 3. Melakukan koordinasi internal dan komunikasi terhadap seluruh unit dalam rangka memastikan target pelaksanaan anggaran dapat tercapai			
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)					Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode	
1. Kurangnya ketepatan dalam membuat rencana penyerapan. 2. Adanya kebijakan efisiensi yang perlu banyak dilakukan penyesuaian antara rencana dengan eksekusi kegiatan					Melakukan koordinasi dengan Setditjen Perbendaharaan khususnya bagian Keuangan agar kegiatan yang dilaksanakan tetap sejalan dengan kebijakan efisiensi dan menyesuaikan RPD Halaman III DIPA pada triwulan berikutnya Mengikuti Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	PST	Triwulan III	

Penjelasan IKU



Mengukur kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada level unit Eselon II.

Perhitungan Capaian



Indeks	IKPA
120	Realisasi IKPA ≥ 98.00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0.15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0.5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79.9	Realisasi IKPA < 85

*Koefisien 0.15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/(indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (98-95) / (120-100)

** Koefisien 0.5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/(indeks capaian target – indeks capaian 80)

	Target	Realisasi
Q1	100	120
Q2	100	99.52
Q3	100	-
Q4	100	-

Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu



Analisis Capaian

INDIKATOR IKU	BOBOT	NILAI	HASIL
Revisi DIPA	0%	100%	
Halaman III DIPA	15%	59.64%	8.95%
Penyerapan Anggaran	0%	14.16%	
Belanja Kontraktual	10%	100%	10.00%
Penyelesaian Tagihan	10%	100%	10.00%
Pengelolaan UP dan TUP	0%	100%	
Dispensasi SPM	0%	100%	
Capaian Output	25%	111%	27.78%
Total	60%		56.72%
Nilai IKPA (Q2)		94.54	
Target Nilai IKPA		95	

Nilai halaman III DIPA tidak tercapai karena beberapa kegiatan yang direncanakan di triwulan II diundur menjadi triwulan III seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja BLU dan pelaksanaan konsinyering mengenai aturan BLU.



Risiko (Sangat Rendah)

Risiko atas IKU ini diukur pada kepatuhan pertanggungjawaban keuangan melalui aplikasi keuangan Setditjen. Berdasarkan pertimbangan dan data historis, risiko ini dinilai sangat rendah.

Kemenkeu-Wide



Isu Utama

Adanya kebijakan efisiensi yang berimbas pada persentase penyerapan karena banyak rencana kegiatan tidak dapat ter realisasi sedangkan jumlah pagu masih sama karena menunggu proses revisi di DJA.



Dampak

Perubahan dan penyesuaian rencana kegiatan dengan pengeluaran biaya seefisien mungkin namun penggunaan seefektif mungkin dengan output yang dihasilkan tetap optimal.



Rencana Aksi

1. Melakukan koordinasi dengan Setditjen Perbendaharaan khususnya bagian Keuangan agar kegiatan yang dilaksanakan tetap sejalan dengan kebijakan efisiensi.
2. Menyesuaikan RPD Halaman III DIPA pada triwulan berikutnya

Direktorat PPKBLU	Pengelolaan IT yang Andal dan Data yang Berkualitas							
	8a-CP Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	23,64%	54.69%	54.69%					
Capaian	118,20	120	120					

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>	Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
Isu Utama: Merupakan IKU baru yang monitoring progress dan perhitungan capaiannya disampaikan oleh pihak eksternal dalam hal ini CTO. Implikasi: Perlu pemahaman lebih dalam terkait IS RBTK Kementerian Keuangan yang terkait Direktorat PPKBLU dan pencapaiannya termasuk perhitungan IKUnya.	Koordinasi dengan pihak Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku pengusul dan Koordinator IKU. Internalisasi IS RBTK		
Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
Implementasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan tidak dapat diselesaikan langsung secara mandiri, perlu pihak-pihak lain yang berkompeten untuk bisa bekerja sama mencapai tujuan.	Internalisasi IS RBTK level Kementerian Keuangan serta tata cara perhitungan IKU agar pada akhir tahun tetap tercapai karena IKU bersifat Take Last Known Value (TLKV)	Subdit PST dan TRI	Triwulan III

Penjelasan IKU

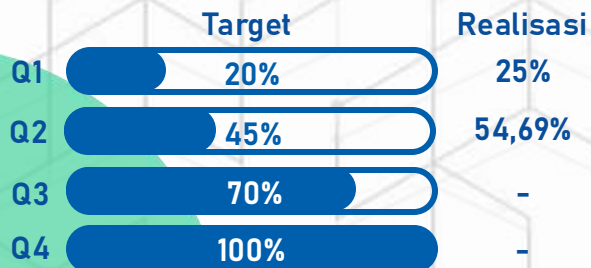


IKU ini untuk memonitor dan memastikan implementasi inisiatif strategis Kementerian Keuangan terlaksana sesuai dengan perencanaan baik dari sisi waktu dan kualitas.

Perhitungan Capaian



Seluruh data capaian diperoleh dari CTO Kemenkeu selaku pengampu dan pemberi *mandatory* IKU ini. Sedangkan di lingkup DJPb, yang berperan sebagai koordinator adalah Direktorat SP.



Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit



Analisis Capaian

IS RBTK level Kemenkeu tahun ini mengambil tema *A New Beginning: Transforming Ecosystem and Strengthening Strategic Linkage*. Transformasi yang dilakukan Kemenkeu dalam merespon tantangan domestik maupun ketidakpastian global perlu memperhatikan berbagai aspek. yaitu: kapasitas institusi, kredibilitas policy & regulasi, dan juga aspek Proses Bisnis (Probis), SDM dan IT. Sebagai turunan dari IS RBTK level Kemenkeu, DJPb memiliki lima IS RBTK:

1. Allocative Efficiency APBN untuk Mendukung Visi Presiden dan Mendorong Pertumbuhan
2. Kepemimpinan Kemenkeu dalam Strategic Diamond
3. Penguatan Peran SMV sebagai Arm's Length Kemenkeu
4. Pengembangan Modern Treasury
5. Modernisasi Layanan

Direktorat PPKBLU ambil bagian pada IS RBTK nomor 3 terkait Penguatan Peran SMV sebagai Arm's Length Kemenkeu.

Inisiatif Strategis	Capaian Utama s.d. Q2 2025
Penguatan Peran SMV sebagai Arm's Length Kementerian Keuangan	1. Initial meeting dengan PIP, BPD LH, BPD P bersama dengan Dit. SMI 2. Pemetaan kajian leveraging terkait PIP, BPD LH, BPD P
Akselerasi WBS	Tidak terdapat akselerasi WBS
WBS Terlambat	Tidak terdapat WBS terlambat



Risiko (Rendah)

Risiko pada IKU ini dinilai rendah karena menurut tren IS Data Analytic pada tahun-tahun sebelumnya. capaian IS tersebut sangat baik. Tetapi. masih harus tetap dipantau karena IKU bersifat Take Last Known



Isu Utama

Merupakan IKU baru yang monitoring *progress* dan perhitungan capaiannya disampaikan oleh pihak eksternal dalam hal ini CTO.

Perlu kolaborasi dengan BLU, khususnya BLU DJPb.



Dampak

Perlu pemahaman lebih dalam terkait IS RBTK Kementerian Keuangan yang terkait Direktorat PPKBLU dan pencapaiannya termasuk perhitungan IKUnya.



Rencana Aksi

Internalisasi IS RBTK level Kementerian Keuangan serta tata cara perhitungan IKU agar pada akhir tahun tetap tercapai karena IKU bersifat *Take Last Known Value* (TLKV)

Direktorat PPKBLU	Pengelolaan IT yang Andal dan Data yang Berkualitas							
	8b-N Indeks Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	Max/TLK
Realisasi	2	2	2					
Capaian	66.67	66.67	66.67					
Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)					Tindakan yang Telah Dilaksanakan			
Isu Utama: IKU ini memperhatikan kualitas data yang ada di aplikasi BIOS dan pengembangan webservice Satker BLU yang datanya akan terintegrasi ke aplikasi BIOS. Implikasi: Perlu pengecekan dan validasi secara rutin oleh pembina keuangan bekerja sama dengan pembina teknis.					Melakukan berbagai kegiatan pendampingan dalam bentuk konsultasi, bimtek, pembinaan, pembelajaran dll kepada para stakeholder maupun pengguna layanan seintensif mungkin.			
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)					Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode	
1. Operator dan Approval baru pada Satker BLU karena alih tugas 2. Koordinasi internal dalam manajemen data pada Satker BLU 3. Operator BLU baru yang tidak aware dengan target input/upload di BIOS					1. Kolaborasi antar Subdirektorat teknis dengan pengampu aplikasi BIOS agar dapat memperoleh data yang valid sehingga integritas data terjamin. 2. Koordinasi dengan SITP dalam pengembangan BIOS	Subdit TRI, PPKBLU I, II, III	Triwulan III	

Penjelasan IKU



IKU ini mengukur tingkat kelengkapan dan kualitas data pada aplikasi BIOS serta capaian *extra mile* dalam bentuk pengembangan *webservice* yang terintegrasi dengan aplikasi BIOS.

Perhitungan Capaian



Capaian yang dihitung adalah perhitungan pada akhir periode.

Rincian Indeks	%Capaian
Indeks 5	$90\% < Y$
Indeks 4	$80\% < Y \leq 90\%$
Indeks 3 (target)	$60\% < Y \leq 80\%$
Indeks 2	$30\% < Y \leq 60\%$
Indeks 1	$30\% \geq Y$

	Target	Realisasi
Q1	3 (skala 5)	2
Q2	3 (skala 5)	2
Q3	3 (skala 5)	-
Q4	3 (skala 5)	-

Indeks Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU

Non-Cascading



Analisis Capaian

SUBDIT	Kelengkapan dan Kualitas Data	<i>Extra Mile Webservice</i>	Indeks
PPKBLU I	68,70%	-	3
PPKBLU II	43,59%	-	2
PPKBLU III	36%	-	2
DIREKTORAT	49,43%	-	2

IKU ini berfokus pada kualitas data yang diinput oleh BLU di aplikasi BIOS mulai dari profil BLU, dewasa, RBA, dokumen kinerja, hingga pelaporan implementasi tarif dan remunerasi.

Pergantian pegawai secara internal pada masing-masing BLU yang menjadi operator BIOS, merupakan salah satu tantangan ketercapaian IKU ini.

Progres sampai dengan triwulan II ini sudah cukup baik, diproyeksikan akan meningkat dan di akhir tahun minimal akan sampai ke sekitar 80% atau indeks 4. Nilai IKU ini diambil dari nilai yang paling akhir (Take Last Known Value).



Risiko (Sangat Rendah)



Risiko atas IKU ini dinilai sangat rendah. jika melihat dari tren tahun sebelumnya. keterisian data pada BIS akan meningkat seiring dengan berjalannya bulan. Pada tahun ini. di TW II memang masih rendah tetapi hal tersebut akan meningkat di triwulan-triwulan akhir ketika data sudah siap seluruhnya.



Isu Utama

IKU ini memperhatikan kualitas data yang ada di aplikasi BIOS dan pengembangan *webservice* Satker BLU yang datanya akan terintegrasi ke aplikasi BIOS.



Dampak

Perlu pengecekan dan validasi secara rutin oleh pembina keuangan bekerja sama dengan pembina teknis.



Rencana Aksi

Kolaborasi antar Subdirektorat teknis dengan pengampu aplikasi BIOS agar dapat memperoleh data yang valid sehingga integritas data terjamin.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DJPb
Indonesian Treasury



Laporan Capaian Kinerja

TRIWULAN III TAHUN 2025

Direktorat PPKBLU



PEMETAAN IKU 2025 DAN REALISASI CAPAIAN

No.	Uraian IKU	Target	Realisasi TW III	UIC					
				PST	TRI	PPK BLU I	PPK BLU II	PPK BLU III	
	Cascading Kemenkeu-Wide								
1	Indeks Kinerja Reformasi Hukum	95.5	115,66	V	V				
2	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	35	75	V					
3	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu	100	120	V					
	Cascading Kemenkeu-One								
4	Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU	3 (skala 5)	4.6			V	V	V	
5	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	70	78,30		V				
	IKU Mandatory								
6	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan	100	120	V	V	V	V	V	
7	Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan	60	68,36	V	V				
8	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	100	108,81	V					
9	Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan	4 (skala 5)	5	V	V	V	V	V	
	IKU Non-Cascading								
10	Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU	3 (skala 5)	4,09			V	V	V	
11	Tingkat Perkembangan Pendapatan BLU	100	118,33			V	V	V	
12	Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating	100	111,54			V	V	V	
13	Indeks Kualitas Penugasan BLU, asistensi BLUD, dan UMKM	4 (skala 5)	N/A	V				V	
14	Indeks Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU	3 (skala 5)	3		V	V	V	V	

DJPb (PPKBLU)	Pengelolaan Keuangan BLU yang Inklusif dan Produktif							
	1a-CP Indeks peningkatan efisiensi layanan BLU							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	Max/TLK
Realisasi	4,6	3,9	3,9	4.6	4.6			
Capaian	120	120	120	120	120			

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)

Isu:

- Kebijakan buka blokir yang mengakibatkan belanja operasional meningkat
- Arahan dari Menteri Koperasi LPDB terkait pengajuan pinjaman yang terpusat pada KDMP
- Kebijakan maskapai yang menurunkan jumlah flight

Implikasi:

Kebijakan efisiensi secara otomatis berdampak pada penghematan biaya yang dilakukan oleh Satker BLU namun juga berimbas dengan produktivitas output layanan yang dihasilkan.

Penjelasan Capaian :

Layanan BLU	Belanja Operasional	Growth Layanan	Growth Efisiensi
Kesehatan Rawat inap dan rawat jalan	Bertambah Rp372M (2,72%)	Naik 1,38 juta (32,2%)	Turun 2,07 Juta (-22,13%)
Pendidikan Jumlah mahasiswa dan serapan lulusan	Bertambah Rp804M (5.66%)	Naik 46ribu (5.25%)	Naik 893 ribu (0.40%)
Pengelola Dana Penyaluran dana bergulir dan jumlah <i>end user</i>	Bertambah 28M (11,91%)	Turun 2,3T (-22,48%) Turun 487ribu (-27,54%)	Naik 37ribu (49,37%)
Kawasan Jumlah pengunjung dan penyelenggaraan <i>event</i>	Berkurang Rp101M (-47,05%)	Naik 1,1juta (12.99%) Turun 7 event (-1,63%)	Turun 115juta (-49,66%)
Barang dan Jasa Lainnya Jumlah penumpang dan layanan kargo	Berkurang Rp489M (-64,53%)	Naik 434ribu (14,16%) Turun 3,6juta (-6.93%)	Turun 76 ribu (-65,31%)
AVERAGE %		4,23% (Indeks 3)	-17,47% (Indeks 5)

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Kebijakan efisiensi secara menyeluruh memerlukan pendetailan teknis untuk pedoman pelaksanaan.
- Kurangnya monitoring terhadap kualitas layanan sehubungan adanya efisiensi

Tindakan yang Telah Dilaksanakan

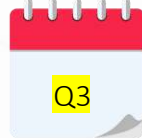
- Berkoordinasi dengan pihak BLU terkait IKU baru ini dan memberikan pembinaan dalam rangka pelaksanaan efisiensi.
- Melaksanakan one on one dengan satker BLU

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
One on One dengan Satker BLU yang dianggap kurang produktif untuk kemudian memberikan rekomendasi selaku pembina keuangan agar layanan tetap berkualitas	PPKBLU I, II, III	Desember 2025

PENINGKATAN EFISIENSI LAYANAN BLU*

Layanan BLU	Belanja Layanan	Growth Layanan	Growth Efisiensi
Kesehatan Rawat inap dan rawat jalan	Bertambah Rp372M (2,72%)	Naik 1,38 juta (32,2%)	Turun 2,07 Juta (-22,13%)
Pendidikan Jumlah mahasiswa dan serapan lulusan	Bertambah Rp804M (5.66%)	Naik 46ribu (5.25%)	Naik 893 ribu (0.40%)
Pengelola Dana Penyaluran dana bergulir dan jumlah <i>end user</i>	Bertambah 28M (11,91%)	Turun 2,3T (-22,48%)	Naik 37ribu (49,37%)
		Turun 487ribu (-27,54%)	
Kawasan Jumlah pengunjung dan penyelenggaraan <i>event</i>	Berkurang Rp101M (-47,05%)	Naik 1,1juta (12.99%)	Turun 115juta (-49,66%)
		Turun 7 event (-1,63%)	
Barang dan Jasa Lainnya Jumlah penumpang dan layanan kargo	Berkurang Rp489M (-64,53%)	Naik 434ribu (14,16%)	Turun 76 ribu (-65,31%)
		Turun 3.6juta (-6.93%)	
AVERAGE %		4,23% (Indeks 3)	-17,47% (Indeks 5)

1. Belanja BLU mulai meningkat akibat pembukaan blokir. Secara umum belanja operasional masih turun.
2. Terjadi penurunan pada growth layanan BLU rumpun Pengelola Dana. Jumlah penyaluran dan end user LPMUKP Tahun 2025 lebih rendah dibandingkan periode yang sama Tahun 2024 lalu karena sisa dana kelolaan LPMUKP yang sudah menipis sementara itu penambahan dana kelolaan yang berasal dari saldo kas belum mendapat persetujuan. Jumlah penyaluran LPDB Tahun 2025 lebih rendah dibandingkan periode yang sama Tahun 2024 karena arahan dari Menteri Koperasi LPDB pada Triwulan II 2025 diarahkan untuk proses pengajuan pinjaman pada Mock Up - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga untuk sementara freeze penyaluran ke koperasi lainnya
3. Pada BLU Rumpun Kawasan sudah terdapat peningkatan pengunjung pada GBK namun terdapat penurunan pengunjung pada BPO Bajo, karena belum ada administrasi pencatatan pengunjung, sehingga walau terjadi peningkatan jumlah event, namun secara jumlah pengunjung mengalami penurunan
4. Pada BLU Barjas Lainnya, terjadi penurunan growth layanan kargo, akibat kebijakan penurunan jumlah flight oleh maskapai pada UPBU Mozes, Rendani dan Juwata

	Target	Real.	Capaian
Q3	3	4.6	120

Komponen	Target	Realisasi	Bobot	Indeks Capaian
Indeks Efisiensi Layanan	3	5	80%	4.00
Indeks <i>Growth</i> Layanan	3	3	20%	0.60
Realisasi				4.60

IKU ini mengukur keberhasilan BLU dalam menerapkan kebijakan efisiensi yang diukur dengan 2 indikator:

1. Tingkat efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan BLU dibandingkan periode sebelumnya.
2. Tingkat pertumbuhan output layanan yang dihasilkan oleh BLU dibandingkan periode sebelumnya.

DJPb berkontribusi dalam pengawalan penerapan kebijakan efisiensi ini agar kualitas output layanan BLU kepada masyarakat tetap terjaga.

Isu Strategis

- Blokir belanja pada triwulan II yang baru mulai dibuka dan hanya meingkat pada rumpun pendidikan
- Arahan dari Menteri Koperasi LPDB terkait pengajuan pinjaman yang terpusat pada KDMP
- Kebijakan maskapai yang menurunkan jumlah flight

DJPb (PPKBLU)	Pengelolaan Keuangan BLU yang Inklusif dan Produktif							
	1b-N Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	Max/TLK
Realisasi	3.98	4.22	4.22	4.09	4.09			
Capaian	120	120	120	120	120			

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)				
Isu Utama: Pengumpulan data yang membutuhkan waktu karena tidak langsung tersaji dalam aplikasi. Implikasi: Penyajian realisasi capaian yang membutuhkan waktu lebih lama karena waktu pelaporan realisasi capaian dengan cut off data relatif pendek.				
RUMPUN	Indeks Akurasi Proyeksi (65%)	Indeks Rasio POBO (30%)	Indeks Pertumbuhan EBITDA (5%)	Capaian (sesuai bobot)
KESEHATAN	4,58	5	5	4,72
PENDIDIKAN	4,21	5	1	4,29
PENGELOLA DANA	4,68	2,5	1	3,84
KAWASAN	4,11	5	1,57	4,25
BARANG JASA LAINNYA	4,31	4,5	2,06	3,34
Gabungan (average)	4,38	4,4	10,63	4,09

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)
Kurangnya koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait karena penetapan peraturan bergantung pada banyak pihak bahkan dari Kementerian/Lembaga di luar Kementerian Keuangan. Ditambah dengan adanya penggunaan aplikasi baru untuk perumusan peraturan.

Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Koordinasi dengan BLU untuk dapat memperhaitkan indikator-indikator yang mempengaruhi pencaiapaian IKU ini. Monev implementasi Tarif dan kinerja BLU tanggal 15 sd. 19 September 2025

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
Melaksanakan Monev kinerja BLU	PPK I	November 2025
Melaksanakan rakor dengan BLU	TRI	November 2025

Penjelasan IKU



Menghitung performa kinerja keuangan BLU dengan menggunakan tiga indikator, yaitu: *growth* EBITDA, akurasi proyeksi PNBP, dan rasio POBO.

Perhitungan Capaian



= 65%(Komp 1) + 35%(Komp 2)
Perhitungan saat periode Triwulan II & IV
Komp 1: Indeks akurasi proyeksi PNBP
Komp 2: Indeks rasio POBO

= 65%(Komp 1) + 30%(Komp 2) + 5%(Komp 3)
Perhitungan saat periode Triwulan II & IV
Komp 1: Indeks akurasi proyeksi PNBP
Komp 2: Indeks rasio POBO
Komp 3: Indeks rasio *growth* EBITDA

	Target	Realisasi
Q1	3 (skala 5)	3,98
Q3	3 (skala 5)	4,22
Q3	3 (skala 5)	4,09
Q4	3 (skala 5)	-

Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU



Analisis Capaian

RUMPUN	Indeks Akurasi Proyeksi (65%)	Indeks Rasio POBO (30%)	Indeks Pertumbuhan EBITDA (5%)	Capaian (sesuai bobot)
KESEHATAN	4,58	5	5	4,72
PENDIDIKAN	4,21	5	1	4,29
PENGELOLA DANA	4,68	2,5	1	3,84
KAWASAN	4,11	5	1,57	4,25
BARANG JASA LAINNYA	4,31	4,5	2,06	3,34
Gabungan (<i>average</i>)	4,38	4,4	10,63	4,09

Target tiap komponen:

Akurasi Proyeksi : 10% – 12,5% (Indeks 3)
POBO : 75% – 80% (Indeks 3)
Growth EBITDA : 81% – 90% (Indeks 3)



Risiko (Sangat Rendah)



Iku ini merupakan pengembangan dari IKU akurasi proyeksi pengesahan pendapatan BLU pada tahun sebelumnya. Jika berdasarkan data dan pertimbangan, risiko pada IKU ini dinilai sangat rendah. Hal ini karena pada tahun sebelumnya seluruh rumpun BLU telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Non-Cascading



Isu Utama

Pengumpulan data yang membutuhkan waktu karena tidak langsung tersaji dalam aplikasi. Pertumbuhan EBITDA pada Pengelola Dana paling kecil karena meningkatnya realisasi Belanja Insentif Bio Diesel pada BPDP.



Dampak

Penyajian realisasi capaian yang membutuhkan waktu lebih lama karena waktu pelaporan realisasi capaian dengan cut off data relatif pendek.



Rencana Aksi

Berkoordinasi dengan pengembang aplikasi agar dapat dibuat dashboard atau tampilan laporan yang dapat menyajikan olahan data terkait perhitungan IKU ini.

DJPb (PPKBLU)	Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif							
	2a-N Indeks Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Max/TLK
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%			
Capaian	120	120	120	120%	120%			

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)	
Isu Utama: IKU ini bersifat mandatory dan capaiannya tanggung rentengdengan Unit Eselon II lain. Tahun 2025 ini Direktorat PPKBLU tidak memiliki kewajiban tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya. Data realisasi untuk komponen capaian HAI DJPb diambil dari aplikasi OMSPAN Implikasi: Perlu optimalisasi teknologi untuk mendapatkan data dan pengolahan analisisnya yang sebagian besar dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya pegawai yang ada.	
Subdirektorat	Nilai
PST	3,8
TRI	3,8
PPKBLU I	3,9
PPKBLU II	3,8
PPKBLU III	3,9
Average	3,84

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)
Perbedaan kuesioner karena ditentukan oleh pihak eksternal yang bisa jadi kurang relevan dengan kondisi yang ada saat ini.

Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
Menyelesaikan setiap permasalahan pada Hai DJPb sebelum batas waktu Membuat daftar responden Monitoring secara berkala		
Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
1. Menyelesaikan permasalahan pada Hai DJPb 2. Mengolah hasil survei kepuasan	Seluruh Subdit	Triwulan IV

Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan

Mandatory

Penjelasan IKU



Pengukuran IKU untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat. pengguna layanan. dan stakeholders. Termasuk ke dalam komponen pengukuran adalah capaian HAI DJPb.

Perhitungan Capaian



Data realisasi capaian disediakan oleh Biro Umum Sekjen selaku pengusul dan pemberi *mandatory* IKU ini.

Sedangkan untuk komponen capaian HAI DJPb diambil dari aplikasi OMSPAN.

	Target	Realisasi
Q1	100%	120%
Q3	100%	120%
Q3	100%	120%
Q4	100%	-

Analisis Capaian



Penyelesaian Tindak Lanjut

IKU ini bersifat mandatory dan capaiannya tanggung renteng dengan Unit Eselon II lain. Tahun 2025 ini Direktorat PPKBLU tidak memiliki kewajiban tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya. Sedangkan untuk triwulan I s.d. III, nilai capaian diperoleh dari kinerja Agen HAI DJPb tiap Subdirektorat.

Namun tetap perlu dipersiapkan untuk penilaian triwulan akhir yang menghitung hasil IKPL (Indeks Kepuasan Pengguna Layanan) dan SKPK (Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan).

Capaian HAI DJPb:

Subdirektorat	Nilai	
PST	3,8	$= \frac{3,84}{3,2} \times 100\%$
TRI	3,8	
PPKBLU I	3,9	$= 120\%$
PPKBLU II	3,8	
PPKBLU III	3,9	
Average	3,84	



Risiko (Rendah)

Risiko pada IKU ini dinilai rendah. hal ini karena jika dilihat dari tren tahun-tahun sebelumnya. capaian dari IKU ini sangat baik dan penyebaran serta pengisian kuisioner juga dilakukan tepat waktu

Isu Utama



Pelaksanaan survei termasuk kegiatan yang diefisiensikan sehingga perlu membuat perencanaan ulang mengenai proses pengumpulan data, pengolahan dan analisisnya, serta penyajian laporan.

Dampak



Perlu optimalisasi teknologi untuk mendapatkan data dan pengolahan analisisnya yang sebagian besar dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya pegawai yang ada.

Rencana Aksi



Penyusunan rencana survei dan komponen yang lebih relevan dengan kondisi serta kebijakan pemerintah terkini.

DJPb (PPKBLU)	Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif							
	2b-N Tingkat Perkembangan Pendapatan BLU							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	109.64	116.75	116.75	118.33	118.33			
Capaian	109.64	116.75	116.75	118.33	118.33			

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)						
Isu: Kebijakan efisiensi secara nasional berimbas penyesuaian rencana dan kegiatan operasional Satker BLU.						
Implikasi: Butuh penyesuaian untuk dapat menjalankan kegiatan rutin dengan normal tanpa mengurangi kualitas output.						
Penjelasan Capaian :						
Rumpun BLU	Target 2025 (Milyar)	Realisasi 2024 Q3 (Milyar)	Realisasi 2025 Q3 (Milyar)	% Realisasi	% Growth	
Kesehatan	25.268	18.089	20.392	80,70	12,73	
Pendidikan	15.344	13.438	14.854	96.60	10.53	
Pengelola Dana	40.191	31.375	32.003	79.63	2	
Kawasan	2.613	2.237	1.747	66.85	-22	
Barang Jasa Lainnya	5.175	7.638	5.026	97.17	-34	
Gabungan	88.591	72.777	74.022	83,55%	1,71 %	
				Target	60%	Indeks 3
Indeks Capaian SubIKU 1 & 2				120	3,5	

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)
1. Adanya keterlambatan mengesahkan pendapatan PNBPNya. 2. Pengesahan yang dilakukan di akhir triwulan, biasanya data akan masuk ke periode triwulan berikutnya sehingga tidak realtime

Tindakan yang Telah Dilaksanakan
1. Penandatanganan Kontrak Kinerja BLU dan Direktur Jenderal Perbendaharaan telah dilaksanakan pada bulan Januari 2025 2. Mendorong BLU agar secepatnya melakukan pengesahan pada akhir Triwulan melalui himbauan pada saat rapat

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
Berkoordinasi dengan Satker BLU yang mengalami penurunan PNBPNya agar dapat meningkatkan PNBPNya melalui optimalisasi aset-asetnya.	PK I, II, III	Triwulan IV

Penjelasan IKU



Mengukur *growth* PNBP BLU dibandingkan tahun sebelumnya (pada periode yang sama) dan tingkat pencapaian pendapatan BLU terhadap target yang dicanangkan pada UU APBN tahun 2025.

Perhitungan Capaian



$$= \frac{\text{IndeksCap SubIKU 1} + \text{IndeksCap SubIKU 2}}{2}$$

$$= \frac{120 + 116,67}{2}$$

SubIKU 1 (Target 60%)

Mengukur tingkat pencapaian PNBP BLU dibandingkan dengan target triwulanan

SubIKU 2 (Target Indeks 3: -2,5% s.d. 0,5%)

Mengukur *growth* PNBP BLU dibandingkan tahun sebelumnya pada periode triwulanan yang sama.

	Target	Realisasi
Q1	100	109,64
Q3	100	116,75
Q3	100	118,33
Q4	100	-

Tingkat Perkembangan Pendapatan BLU



Analisis Capaian

REALISASI DAN GROWTH PNBP

Rumpun BLU	Target 2025 (Milyar)	Realisasi 2024 Q3 (Milyar)	Realisasi 2025 Q3 (Milyar)	% Realisasi	% Growth
Kesehatan	25.268	18.089	20.392	80,70	12,73
Pendidikan	15.344	13.438	14.854	96.60	10.53
Pengelola Dana	40.191	31.375	32.003	79.63	2
Kawasan	2.613	2.237	1.747	66.85	-22
Barang Jasa Lainnya	5.175	7.638	5.026	97.17	-34
Gabungan	88.591	72.777	74.022	83,55%	1,71 %
Target				60%	Indeks 3
Indeks Capaian SubIKU 1 & 2				120	3,5

Indeks Capaian SubIKU 1:

$$= \frac{\% \text{ Realisasi}}{\% \text{ Target}} \times 100\%$$

$$\frac{83,55\%}{60\%} \times 100\% = 120$$



Risiko (Rendah)

Pendapatan BLU sudah tercapai sesuai dengan target Triwulan I (di atas 15%) sehingga risiko dinilai rendah. namun demikian tetap perlu menjadi perhatian terutama untuk rumpun yang memiliki target pendapatan yang tinggi serta diharapkan trend realisasi pendapatan akan terus naik hingga triwulan IV

Indeks Capaian SubIKU 2:

$$= \frac{\text{Avg Indeks}}{\text{Target Indeks}} \times 100\%$$

$$\frac{5}{3} \times 100\% = 120$$

Non-Cascading



Isu Utama

Pada Pengelola dana, *growth* pnbp masih rendah karena menurunnya penyaluran dana LPMUKP yang disebabkan saldo dana kelolaan yang menipis. Pada kawasan, *growth* PNBP mengalami penurunan karena pada 2024 ada penerimaan SPAM di BP Batam dan tidak terjadi lagi di tahun ini. Penurunan juga terjadi pada BPO Borobudur karena even tahun 2025 belum sebanyak tahun 2024. Pada Barjas Lainnya, beberapa satker BLU masih belum melakukan pengesahan pendapatan, sehingga *growth* PNBP lebih rendah dibanding tahun lalu. Selain itu pada BAKTI tahun lalu terdapat pengembalian belanja yang signifikan dan tidak terjadi lagi di tahun ini.



Dampak

Butuh penyesuaian untuk dapat menjalankan kegiatan rutin dengan normal tanpa mengurangi kualitas output.



Rencana Aksi

Berkoordinasi dengan Satker BLU yang mengalami penurunan PNBP selaku pembina keuangan. agar dapat meningkatkan PNBP nya melalui optimalisasi aset-asetnya. Selain itu perlu mendorong satker BLU agar rutin dalam mengesahkan pendapatannya.

DJPb (PPKBLU)	Formulasi Kebijakan yang Implementatif dan Aplikatif							
	3a-CP Indeks Kinerja Reformasi Hukum							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95.5	Max/TLK
Realisasi	120	105.67	105.67	115.66	115.66			
Capaian	120	110.65	110.65	120	120			

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>
Isu: Penetapan peraturan dan regulasi yang dirancang melibatkan banyak pihak. tidak hanya internal Direktorat PPKBLU. Implikasi: Koordinasi intensif kepada para pihak yang berwenang dan terkait dalam tahapan penyelesaian regulasi yang dirumuskan. Penjelasan Capaian : 1. PMK Tarif PIP 2. PMK Tarif Kolektif Laboratorium Kesehatan Kemenkes 3. PMK Tarif Kolektif UPBU 4. PMK Tarif Kolektif Distrik Navigasi 5. PMK Tarif BPDP 6. KMK Remunerasi BPKARSS Kemenhub 7. KMK Remunerasi BAKTI

Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>
Perlu koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait karena penetapan peraturan bergantung pada banyak pihak bahkan dari Kementerian/Lembaga di luar Kementerian Keuangan. Ditambah dengan adanya penggunaan aplikasi baru untuk perumusan peraturan.

Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Telah menyelesaikan legal drafting dan harmonisasi beberapa peraturan dalam bentuk KMK maupun PMK. Mengawasi setiap proses penetapan regulasi

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
1. Berkoordinasi dengan pihak berwenang tidak hanya secara formal namun juga secara informal menggunakan sarana komunikasi tercepat. 2. Rapat Harmonisasi peraturan	PST dan TRI	Triwulan IV

Penjelasan IKU

Mengukur penyelesaian regulasi (RPP, Rperpres, RPMK, RKMK)

Perhitungan Capaian

Realisasi capaian disampaikan melalui Nota Dinas dari Direktorat SP selaku koordinator IKU berdasarkan data dari Biro Hukum Sekjen.

	Target	Realisasi
Q1	95.5	120
Q3	95.5	105,67
Q3	95.5	115,66
Q4	95.5	-

Indeks Kinerja Reformasi Hukum



Analisis Capaian

Peraturan yang dirumuskan oleh Direktorat PPKBLU tahun 2025

On progress:

1. RPMK Perubahan PMK 172 tahun 2021
2. RPMK Perubahan PMK 202 tahun 2022 (proses harmonisasi)
3. RPMK Tarif Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor
4. RPMK Tarif Balai Pengujian Perkeretaapian
5. RPMK Tarif Kolektif Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kemen ESDM
6. RPMK Tarif BPJPH
7. RPMK Tarif RS Adhyaksa

Terbit:

1. PMK Tarif PIP
2. PMK Tarif Kolektif Laboratorium Kesehatan Kemenkes
3. PMK Tarif Kolektif UPBU
4. PMK Tarif BPSDM Kemenhub
5. PMK Tarif Kolektif Distrik Navigasi
6. PMK Tarif BPDP
7. KMK Remunerasi BPKARSS Kemenhub
8. KMK Remunerasi BAKTI



Risiko (Sangat Rendah)

Atas IKU ini Dit PPK BLU telah mengawal dan menyelesaikan peraturan-peraturan yang menjadi kewenangan Dit. PPKBLU. Berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya, risiko atas IKU ini dinilai sangat rendah.

Kemenkeu - Wide



Isu Utama

Penetapan peraturan dan regulasi yang dirancang melibatkan banyak pihak, tidak hanya internal Direktorat PPKBLU.



Dampak

Koordinasi intensif kepada para pihak yang berwenang dan terkait dalam tahapan penyelesaian regulasi yang dirumuskan.



Rencana Aksi

Mengawasi setiap proses penetapan regulasi dengan tetap berkoordinasi dengan pihak berwenang tidak hanya secara formal namun juga secara informal menggunakan sarana komunikasi tercepat.

Direktorat PPKBLU	Formulasi Kebijakan yang Implementatif dan Aplikatif							
	3b-N Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20	40	40	60	60	80	80	Max/TLK
Realisasi	20	40.36	40.36	68.36	68.36			
Capaian	100	100.9	100.9	113.93	113.93			
Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)					Tindakan yang Telah Dilaksanakan			
Isu Utama: Pengukuran dampak dengan metode RIA ini baru diterapkan untuk menjadi perhitungan IKU pada tahun ini. Implikasi: Perlu pemahaman terkait metode RIA agar hasil pengukuran kebijakan sesuai dengan yang diharapkan dan memiliki manfaat yang signifikan. Hasil penilaian uji dampak peraturan telah disampaikan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan (SP) kepada setiap direktorat pemrakarsa aturan sebagaimana terdapat dalam nota dinas Direktur SP nomor ND-1119/PB.7/2025. Hasil triwulan III Direktorat PPKBLU mendapatkan nilai 68,36 sebagaimana telah disampaikan mela ui nota dinas Direktur SP nomor ND-1119/PB.7/2025.					Mengirimkan informasi mengenai peraturan yang akan diuji kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku koordinator di kantor pusat DJPb.			
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)					Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode	
1. Perhitungan IKU ini merupakan yang pertama dan menjadi tantangan tersendiri karena dihitung oleh pihak eksternal. 2. Penyelesaian peraturan melibatkan beberapa unit					Berkoordinasi dengan Direktorat SP selaku pengampu dan pengusul IKU dengan jalur komunikasi formal maupun informal.	Seluruh Subdit	Triwulan IV 2025	

Penjelasan IKU



Mengukur dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan dengan metode RIA (*Regulatory Impact Assessment*).

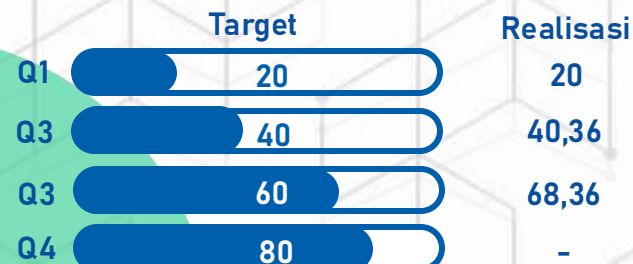
Koordinator IKU ini adalah Direktorat SP.

Perhitungan Capaian



Capaian TW III dihitung berdasarkan rekapitulasi hasil kuisioner oleh direktorat pemrakarsa regulasi kepada stakeholders.

Capaian TW III = Nilai x 35%



Analisis Capaian

Peraturan yang menjadi objek penilaian efektivitas pada Direktorat PPKBLU yaitu **PER-11/PB/2021 tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola dan Kinerja (Tingkat Maturitas) Badan Layanan Umum**

Penilaian tingkat efektivitas peraturan perbendaharaan dilaksanakan dengan menggunakan metode Regulatory Impact Assessment (RIA) oleh pihak eksternal yang diselenggarakan oleh Direktorat SP selaku koordinator IKU ini.

Hasil penilaian uji dampak peraturan telah disampaikan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan (SP) kepada setiap direktorat pemrakarsa aturan sebagaimana terdapat dalam nota dinas Direktur SP nomor **ND-1119/PB.7/2025**.

Hasil triwulan III Direktorat PPKBLU mendapatkan nilai **68,36** sebagaimana telah disampaikan melalui nota dinas Direktur SP nomor **ND-1119/PB.7/2025**.



Risiko (Rendah)

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2025. Risiko IKU ini dinilai rendah setelah melakukan koordinasi dengan Bagian KI dan DSP sebagai koordinator dan penanggungjawab IKU.



Isu Utama

Pengukuran dampak dengan metode RIA ini baru diterapkan untuk menjadi perhitungan IKU pada tahun ini.



Dampak

Perlu pemahaman terkait metode RIA agar hasil pengukuran kebijakan sesuai dengan yang diharapkan dan memiliki manfaat yang signifikan.



Rencana Aksi

Berkoordinasi dengan Direktorat SP selaku pengampu dan pengusul IKU dengan jalur komunikasi formal maupun informal.

Direktorat PPKBLU	Pengelolaan tugas khusus (special mission) yang efektif							
	4a-CP Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	10%	20%	20%	35%	35%	98,8%	98,8%	Max/TLK
Realisasi	62,5%	75%	75%	75%	75%			
Capaian	120	120	120	120	120			

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>	Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama: Rekomendasi yang diberikan perlu diselesaikan melalui kerja sama lintas unit Eselon II bahkan lintas Eselon I dan terkadang membutuhkan waktu cukup lama. Implikasi: Perlu berkoordinasi dengan pihak terkait yang memiliki wewenang dalam penyelesaian rekomendasi serta perlu menyamakan persepsi dengan pihak BPK agar memiliki pemahaman yang sama terutama terkait dengan regulasi maupun kebijakan. Capaian IKU: Jumlah pegawai ya	1. Komunikasi dengan pihak lain yang terlibat dalam rekomendasi bersama. 2. Memonitor secara terus menerus terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan BPK kepada unit-unit lain yang terkait. 3. Melakukan koordinasi dengan Direktorat APK untuk memastikan bahwa seluruh tindak lanjut dapat disepakati selesai oleh BPK.

Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
1. Beberapa tindak lanjut atas rekomendasi BPK melibatkan unit-unit lain sering tersapat kesulitan dalam koordinasi. 2. Pada beberapa hal tertentu, masih terdapat perbedaan persepsi terkait pengelolaan BLU dan regulasi yang terkait antara pihak BPK dengan Direktorat PPKBLU	Koordinasi dengan Direktorat APK selaku penghubung dengan pihak BPK agar rekomendasi yang telah diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Koordinasi dengan SITP selaku pengembang aplikasi sesuai dengan tindak lanjut	PST	Triwulan IV

Penjelasan IKU

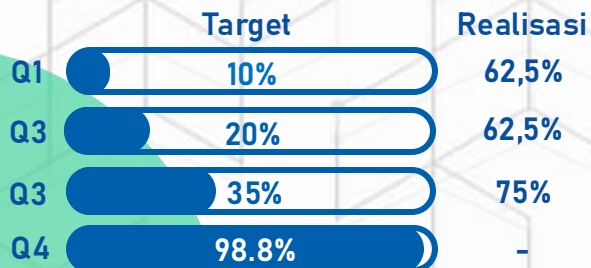


Mengukur progres penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK terhadap LKPP dan LKBUN. Persetujuan atas penyelesaian dan kesesuaian hasil tindak lanjut divalidasi oleh pihak BPK.

Perhitungan Capaian



Data realisasi capaian disediakan oleh Direktorat APK selaku koordinator dengan pihak BPK.



Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN



Analisis Capaian

JENIS REKOM	OUTSTANDING REKOM	REKOM DISELESAIKAN	%
LKPP	2	2	100%
LKBUN	4	2	50%
Gabungan	6	4	75%

Hasil capaian triwulan III berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-324/PB/2025 hal Penyampaian Capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti Triwulan III Tahun 2025.



Risiko (Sangat Rendah)

Rekomendasi dari BPK yang berada di kewenangan Dit. PPKBLU telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan segera sehingga risiko dinilai sangat rendah. selain itu Dit. PPK BLU selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.



Isu Utama

Rekomendasi yang diberikan perlu diselesaikan melalui kerja sama lintas unit Eselon II bahkan lintas Eselon I dan terkadang membutuhkan waktu cukup lama.



Dampak

Perlu berkoordinasi dengan pihak terkait yang memiliki wewenang dalam penyelesaian rekomendasi serta perlu menyamakan persepsi dengan pihak BPK agar memiliki pemahaman yang sama terutama terkait dengan regulasi maupun kebijakan.



Rencana Aksi

Koordinasi dengan Direktorat APK selaku penghubung dengan pihak BPK agar rekomendasi yang telah diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Direktorat PPKBLU	Pengelolaan tugas khusus (special mission) yang efektif							
	4b-N Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	111,54	111.54	111.54	111.54	111.54			
Capaian	111,54	111.54	111.54	111.54	111.54			
Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)					Tindakan yang Telah Dilaksanakan			
Isu Utama: Adanya penyesuaian dalam indikator penilaian maturity rating agar lebih sesuai dengan konteks dan kondisi terkini. Implikasi: Satker BLU perlu mempelajari kembali dan menjadi tantangan bagi Satker BLU yang kesulitan dalam meningkatkan nilai maturity ratingnya.					1. Mendorong BLU untuk segera menyelesaikan proses self assessment maturity rating. 2. Memberikan bimbingan teknis dan konsultasi baik secara langsung maupun melalui media komunikasi elektronik kepada Satker BLU 3. Pembinaan intensif			
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)					Rekomendasi Rencana Aksi		Penanggung jawab	Periode
1. Beberapa BLU baru belum terbiasa melakukan penilaian dengan sistem maturity rating. 2. Terdapat BLU yang akan dibekukan karena adanya restrukturiasi organisasinya sehingga tidak memiliki motivasi untuk menyelesaikan maturity rating.					1. Pembinaan intensif bagi Satker BLU baru dan yang memiliki permasalahan terkait nilai maturity rating ini. 2. Pembuatan 9 box		Subdit PPK BLU I, II, III	Oktober s.d. November

Penjelasan IKU



Mengukur kualitas tata kelola BLU menggunakan metode pengukuran *maturity rating assessment*. Standar penilaian setiap BLU harus memenuhi pada level “baik” dan memiliki peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

Perhitungan Capaian



$$= \frac{\text{IndeksCap SubIKU 1} + \text{IndeksCap SubIKU 2}}{2}$$

$$= \frac{103,09 + 120}{2} = 111,54$$

SubIKU 1 (Target 97%)

Mengukur persentase BLU yang memiliki *maturity rating* masuk ke dalam kategori “baik” atau di atasnya. namun periode awal tahun masih bersifat tahapan *self assessment*.

SubIKU 2 (Target Indeks 3.5)

Mengukur *growth* peningkatan nilai *maturity rating*. namun periode awal tahun masih bersifat tahapan evaluasi dan *self assessment*.

	Target	Realisasi
Q1	100	111.54
Q3	100	111,54
Q3	100	111,54
Q4	100	-

Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating



Analisis Capaian

SUBDIREKTORAT	PERSENTASE BLU KATEGORI “BAIK” ATAU DI ATASNYA	KENAIKAN NILAI MATRAT BLU (DALAM INDEKS)
PPKBLU I	100%	5
PPKBLU II	100%	5
PPKBLU III	100%	5
Gabungan	100%	5
Target	100%	5

Indeks Capaian SubIKU 1:

$$= \frac{\text{Avg \%}}{\text{Target \%}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{97\%} = 103,09$$

Indeks Capaian SubIKU 2:

$$= \frac{\text{Avg Indeks}}{\text{Target Indeks}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Indeks 5}}{\text{Indeks 3,5}} = 120 (\text{max})$$



Risiko (Sangat Rendah)

Secara keseluruhan berdasarkan hasil tahun sebelumnya. hasil penilaian terhadap *maturity rating* sangat baik. Sehingga. risiko berkaitan dengan IKU ini dinilai sangat rendah.

Non-Cascading



Isu Utama

Adanya penyesuaian dalam indikator penilaian *maturity rating* agar lebih sesuai dengan konteks dan kondisi terkini.



Dampak

Satker BLU perlu mempelajari kembali dan menjadi tantangan bagi Satker BLU yang kesulitan dalam meningkatkan nilai *maturity rating*nya.



Rencana Aksi

Pembinaan intensif bagi Satker BLU baru dan yang memiliki permasalahan terkait nilai *maturity rating* ini.

Direktorat PPKBLU	Komunikasi Publik dan Sinergi Antar-Organisasi yang Kolaboratif							
	5a –N Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	4	4	4	4	4	4	4	Max/TLK
Realisasi	5	5	5	5	5			
Capaian	120	120	120	120	120			
Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)					Tindakan yang Telah Dilaksanakan			
Isu Utama: Pelaksanaan edukasi dan komunikasi tidak hanya selesai pada satu kegiatan namun harus berkesinambungan dengan tetap memperhatikan sisi efisiensi. Implikasi: Penilaian pada kegiatan tertentu dengan metode pre dan post test atau survei peserta atau pun tingkat kualitas penyelesaian pelatihan hanya memberi potret sebagian proses edukasi dan komunikasi.					1. Publikasi informasi terkait pengelolaan keuangan BLU melalui website blu.djpb.kemenkeu.go.id 2. Menyediakan fitur helpdesk pada website blu.djpb.kemenkeu.go.id sebagai sarana peningkatan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan BLU 3. Meng-update petunjuk manual operasionalisasi BIOS. 4. Menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi dan komunikasi bekerja sama dengan BPPK melalui KLC. 5. Membuat perencanaan kegiatan			
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)					Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode	
1. Pelaksanaan kegiatan edukasi dan komunikasi membutuhkan waktu yang lama 2. Pergantian Operator dan Approval aplikasi BIOS yang sering terjadi pada BLU 3. Konsep BLU merupakan hal yang baru bagi beberapa peserta bimtek dan sangat berbeda dengan pekerjaan mereka selama ini					1. Membuat perencanaan kegiatan seefisien mungkin dengan topik atau tema yang saling melengkapi dan berkelanjutan agar proses edukasi tidak terputus. 2. Melaksanakan e-learning untuk pengelola keuangan	Seluruh Subdit	Triwulan IV	

Penjelasan IKU



Pengukuran tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi yang dilakukan melalui pre-test dan post-test bimbingan teknis atau survei atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau tingkat penyelesaian pelatihan. Capaian dihitung TLKV agar bisa melihat rangkaian keseluruhan.

Perhitungan Capaian



Triwulan III ini menghitung Persentase pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ pembelajaran/pelatihan/diklat dengan kolaborasi bersama BPPK atau pihak lainnya

	Target	Realisasi
Q1	4 (skala 5)	5
Q3	4 (skala 5)	5
Q3	4 (skala 5)	5
Q4	4 (skala 5)	-

Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan



Analisis Capaian

Triwulan III telah dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:

1. **Bimtek SAKTI BLU** mengundang perwakilan dari Kanwil DJPb pada tanggal 28 – 30 April 2025.
2. **Pelatihan Pendampingan Pemasaran Produk UMKM** bekerja sama dengan PIP pada tanggal 30 April 2025.
3. **E-learning dewan pengawas BLU** pada tanggal 4- 15 Agustus 2025.



Risiko (Sangat Rendah)

Seluruh subdit sudah melaksanakan evaluasi atas kegiatan yang direncanakan di Triwulan I dan diikuti oleh pemenuhan target peserta kegiatan sehingga risiko sangat rendah

Mandatory



Isu Utama

Pelaksanaan edukasi dan komunikasi tidak hanya selesai pada satu kegiatan namun harus berkesinambungan dengan tetap memperhatikan sisi efisiensi.



Dampak

Penilaian pada kegiatan tertentu dengan metode pre dan post test atau survei peserta atau pun tingkat kualitas penyelesaian pelatihan hanya memberi potret sebagian proses edukasi dan komunikasi.



Rencana Aksi

Membuat perencanaan kegiatan seefisien mungkin dengan topik atau tema yang saling melengkapi dan berkelanjutan agar proses edukasi tidak terputus.

Direktorat PPKBLU	Komunikasi Publik dan Sinergi Antar-Organisasi yang Kolaboratif							
	5b-N Indeks Kualitas Penugasan BLU, asistensi BLUD, dan UMKM							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	Max/TLK
Realisasi	4,96	4.99	4.99	5	5			
Capaian	120	120	120	120	120			

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>	Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama: Adanya kebijakan efisiensi dan penyesuaian pagu belanja diserahkan kepada masing-masing Kanwil DJPb serta adanya kebijakan simplifikasi pelaporan rutin pada Kanwil DJPb Implikasi: Alokasi belanja yang tidak seragam setiap Kanwil DJPb menjadi tantangan dalam pemenuhan IKU ini dan simplifikasi pelaporan akan membuat kesulitan bagi Direktorat PPKBLU selaku penilai karena isi laporan cenderung sama. .	1. Menyampaikan informasi secara formal & informal terkait tindak lanjut atas sosialisasi pemberdayaan UMKM 2. Telah dilakukan pemberian feedback penilaian kepada masing-masing Kanwil untuk dilakukan perbaikan periode berikutnya. 3. Berkoordinasi dengan Setditjen

Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
1. Para pegawai kanwil yang baru dalam hal pekerjaan maupun dalam hal penempatan membutuhkan waktu dalam memahami IKU ini. 2. Menjalin komunikasi dengan BLUD yang notabene bukan kewenangan secara langsung Kanwil dalam melakukan pembinaan. 3. Kegiatan yang dilakukan selama ini hanya bersifat temporer (pameran, asistensi, sosialisasi, dll) belum ada kegiatan pemberdayaan yang komprehensif sampai dengan memantau perkembangan UMKM dan menentukan milestone capaian target bisnis secara rinci.	Menjalin komunikasi yang baik dengan Kanwil DJPb untuk dapat menemukan solusi permasalahan terutama terkait IKU ini agar realisasi dapat dicapai dengan baik.	Subdit PST dan PPK III	Triwulan IV

Penjelasan IKU



Indikator Kinerja ini akan mengukur 3 (tiga) komponen yaitu kualitas pembinaan BLU. asistensi BLUD. dan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJPb.

Perhitungan Capaian



$$= \frac{Avg Indeks PA I + Avg Indeks PA II}{2}$$

	Target	Realisasi
Q1	3.5 (skala 5)	4,96
Q3	3.5 (skala 5)	4,99
Q3	3.5 (skala 5)	5
Q4	3.5 (skala 5)	-



Analisis Capaian

Kanwil DJPb	PA I	PA II	
	Indeks Kualitas Penugasan BLU	Indeks Kualitas Asistensi BLUD	Indeks Kualitas Pemberdayaan UMKM
Avg Nilai (Avg Indeks)	5	5	5
	5	5	
Avg Indeks	5		

Capaian ini merupakan gabungan dari seluruh Kantor Wilayah DJPb yang diambil rata-rata capaian indeks masing-masing Kantor Wilayah. Capaian UMKM belum dapat dinilai karena batas waktu penyampaian Laporan Perbendaharaan Regional adalah 11 Oktober 2025, sesuai dengan ND Sekretaris DJPb Nomor ND-3365/PB.1/2025



Risiko (Rendah)

Atas Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Dit PPK BLU. seluruh kanwil telah melaksanakan pembinaan BLU. asistensi BLUD. dan pemberdayaan UMKM di wilayahnya masing-masing sehingga risiko rendah.



Isu Utama

Adanya kebijakan efisiensi dan penyesuaian pagu belanja diserahkan kepada masing-masing Kanwil DJPb serta adanya kebijakan simplifikasi pelaporan rutin pada Kanwil DJPb.



Dampak

Alokasi belanja yang tidak seragam setiap Kanwil DJPb menjadi tantangan dalam pemenuhan IKU ini dan simplifikasi pelaporan akan membuat kesulitan bagi Direktorat PPKBLU selaku penilai karena isi laporan cenderung sama.



Rencana Aksi

Berkoordinasi dengan Setditjen dan menjalin komunikasi yang baik dengan Kanwil DJPb untuk dapat menemukan solusi permasalahan terutama terkait IKU ini agar realisasi dapat dicapai dengan baik.

Direktorat PPKBLU	Pengelolaan Organisasi dan Pengendalian Internal yang Optimal							
	6a-N Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	104,27	120	120	108.81	108.81			
Capaian	104,27	120	120	108.81	108.81			

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>	Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama: Ketiga komponen IKU ini memerlukan kerja sama seluruh pegawai Direktorat karena berkaitan dengan pemenuhan dokumen wajib yang bersifat individual. Implikasi: Setiap pegawai wajib disiplin dalam pemenuhan kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan penilaian kinerja organisasi ini.	1. Menginformasikan kepada pegawai baik secara formal melalui nota dinas atau pun informal melalui media komunikasi elektronik 2. Membuat tautan yang berisi monitoring penyelesaian dan upload dokumen pendukung LO 3. Monitoring pemenuhan dokumen

Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
Secara umum, setiap komponen pada Tingkat Implementasi Learning Organization telah dijalankan oleh Dit. PPK BLU, namun perlu dilakukan pendokumentasian yang lebih komprehensif.	1. Membuat monitoring pemenuhan dokumen dan menginformasikan secara rutin melalui media komunikasi grup pada aplikasi daring serta membuat pengumpulan dokumen yang mudah diakses semua pegawai. 2. Monitoring pelaksanaan Diklat	Subdit PST	Desember

Penjelasan IKU



Mengukur kualitas pengelolaan kinerja organisasi dengan memperhitungkan tiga komponen yaitu nilai *Learning Organization*, nilai *Strategy Focused Organization*, nilai Kepatuhan Internal.

Perhitungan Capaian



$$= \frac{\text{Nilai Komponen}}{\text{Target Komponen}} \times 100\%$$

$$= \frac{76,17}{70} \times 100\%$$

$$= 108,81$$

	Target	Realisasi
Q1	100	104,27
Q3	100	120
Q3	100	108,81
Q4	100	-

Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi

Mandatory



Analisis Capaian

Subkomponen Penilaian	Nilai
Pengorganisasian & Penyebarluasan	50
Analisa Kebutuhan Pembelajaran	100
Desain Pembelajaran	98,67
Evaluasi Pembelajaran	95,65
Structured Learning	100
Learning from Experience	100
Pemenuhan Jam Pembelajaran	65
Organizational Performances	0
Leaders as Teachers	92,59
Leaders as Role Model	50
Capaian Nilai Learning Organization (LO)	68,36

Periode	Q1	Q3	Q3	Q4	
Target	30	50	70	90	$= \frac{76,17}{70} \times 100\%$
Realisasi	31,28	68,36	76,17		= 108,81%

Realisasi capaian ini diperoleh melalui perhitungan capaian di Aplikasi Training dan akan ada ND resmi dari Setditjen



Risiko (Rendah)



Risiko pada IKU ini rendah, karena seluruh komponen pendukung telah diunggah sebelum batas waktu dan telah memenuhi target di setiap triwulan. Namun masih menjadi perhatian karena realisasi tersebut merupakan nilai triwulan III di mana terdapat beberapa indikator yang belum tersedia



Isu Utama

Ketiga komponen IKU ini memerlukan kerja sama seluruh pegawai Direktorat karena berkaitan dengan pemenuhan dokumen wajib yang bersifat individual.



Dampak

Setiap pegawai wajib disiplin dalam pemenuhan kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan penilaian kinerja organisasi ini.



Rencana Aksi

Membuat monitoring pemenuhan dokumen dan menginformasikan secara rutin melalui media komunikasi grup pada aplikasi daring serta membuat pengumpulan dokumen yang mudah diakses semua pegawai.

Direktorat PPKBLU	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	7a-CP Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	99.52	99.52	120	120			
Capaian	120	99.52	99.52	120	120			

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>	Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama: Adanya kebijakan efisiensi yang berimbas pada persentase penyerapan karena banyak rencana kegiatan tidak dapat ter realisasi sedangkan jumlah pagu masih sama karena menunggu proses revisi di DJA. Implikasi: Perubahan dan penyesuaian rencana kegiatan dengan pengeluaran biaya seefisien mungkin namun penggunaan seefektif mungkin dengan output yang dihasilkan tetap optimal.	- Melakukan koordinasi dengan masing-masing pengelola kegiatan untuk memastikan bahwa seluruh anggaran dapat terserap dan output kegiatan dapat tercapai; - Menyusun ulang rencana kegiatan di Triwulan 2 - Melakukan koordinasi internal dan komunikasi terhadap seluruh unit dalam rangka memastikan target pelaksanaan anggaran dapat tercapai

Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
- Kurangnya ketepatan dalam membuat rencana penyerapan. - Adanya kebijakan efisiensi yang perlu banyak dilakukan penyesuaian antara rencana dengan eksekusi kegiatan	- Melakukan koordinasi dengan Setditjen Perbendaharaan khususnya bagian Keuangan agar kegiatan yang dilaksanakan tetap sejalan dengan kebijakan efisiensi dan menyesuaikan RPD Halaman III DIPA pada triwulan berikutnya - Rapat dengan Subdit untuk penetapan RPD	PST	Triwulan IV

Penjelasan IKU



Mengukur kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada level unit Eselon II.

Perhitungan Capaian



Indeks	IKPA
120	Realisasi IKPA ≥ 98.00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0.15 *$ ($95 < x < 98$)
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0.5 **$ ($85 < x < 95$)
80	Realisasi IKPA = 85
79.9	Realisasi IKPA < 85

*Koefisien 0.15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/(indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (98-95) / (120-100)

** Koefisien 0.5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/(indeks capaian target – indeks capaian 80)

	Target	Realisasi
Q1	100	120
Q3	100	99.52
Q3	100	120
Q4	100	-

Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu



Analisis Capaian

INDIKATOR IKU	BOBOT	NILAI	HASIL
Revisi DIPA	0%	100%	
Halaman III DIPA	15%	68,03%	10,20%
Penyerapan Anggaran	0%	58,67%	
Belanja Kontraktual	10%	100%	10.00%
Penyelesaian Tagihan	10%	100%	10.00%
Pengelolaan UP dan TUP	0%	100%	
Dispensasi SPM	0%	100%	
Capaian Output	25%	114,42%	28,61%
Total	60%		58,81%
Nilai IKPA (Q3)		98,02	
Target Nilai IKPA		95	

Target IKU telah tercapai, namun demikian masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal. Nilai halaman III DIPA dan penyerapan anggaran belum optimal disebabkan karena beberapa kegiatan yang direncanakan dilaksanakan pada triwulan III masih berjalan dan diperkirakan baru selesai pada bulan Oktober.



Risiko (Sangat Rendah)

Risiko atas IKU ini diukur pada kepatuhan pertanggungjawaban keuangan melalui aplikasi keuangan Setditjen. Berdasarkan pertimbangan dan data historis. risiko ini dinilai sangat rendah.

Kemenkeu-Wide



Isu Utama

Adanya kebijakan efisiensi yang berimbas pada penyerapan karena banyak rencana kegiatan tidak dapat ter realisasi s.d. triwulan II, sehingga menumpuk pada triwulan III dan IV



Dampak

Perubahan dan penyesuaian rencana kegiatan dengan pengeluaran biaya seefisien mungkin namun penggunaan seefektif mungkin dengan output yang dihasilkan tetap optimal.



Rencana Aksi

1. Melakukan koordinasi dengan Setditjen Perbendaharaan khususnya bagian Keuangan agar kegiatan yang dilaksanakan tetap sejalan dengan kebijakan efisiensi.
2. Menyesuaikan RPD Halaman III DIPA pada triwulan berikutnya

Direktorat PPKBLU	Pengelolaan IT yang Andal dan Data yang Berkualitas							
	8a-CP Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	23,64%	54.69%	54.69%	78.30%	78.30%			
Capaian	118,20	120	120	111.86	111.86			
Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)					Tindakan yang Telah Dilaksanakan			
Isu Utama: Merupakan IKU baru yang monitoring progress dan perhitungan capaiannya disampaikan oleh pihak eksternal dalam hal ini CTO. Implikasi: Perlu pemahaman lebih dalam terkait IS RBTK Kementerian Keuangan yang terkait Direktorat PPKBLU dan pencapaiannya termasuk perhitungan IKUnya.					Koordinasi dengan pihak Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku pengusul dan Koordinator IKU. Internalisasi IS RBTK			
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)					Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode	
Implementasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan tidak dapat diselesaikan langsung secara mandiri, perlu pihak-pihak lain yang berkompeten untuk bisa bekerja sama mencapai tujuan.					1. Internalisasi IS RBTK level Kementerian Keuangan serta tata cara perhitungan IKU agar pada akhir tahun tetap tercapai karena IKU bersifat Take Last Known Value (TLKV) 2. Melaksanakan BIImtek Data analitik	Subdit PST dan TRI	Triwulan IV	

Penjelasan IKU

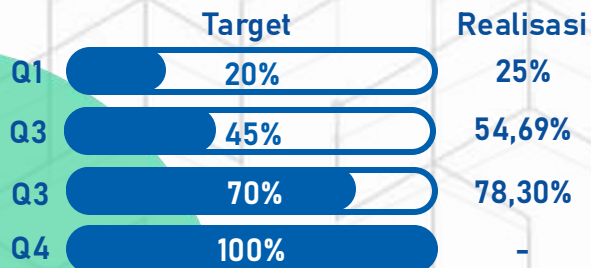


IKU ini untuk memonitor dan memastikan implementasi inisiatif strategis Kementerian Keuangan terlaksana sesuai dengan perencanaan baik dari sisi waktu dan kualitas.

Perhitungan Capaian



Seluruh data capaian diperoleh dari BaTii selaku pengampu dan pemberi *mandatory* IKU ini. Sedangkan di lingkup DJPb, yang berperan sebagai koordinator adalah Direktorat SP.



Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit



Analisis Capaian

IS RBTK level Kemenkeu tahun ini mengambil tema *A New Beginning: Transforming Ecosystem and Strengthening Strategic Linkage*. Transformasi yang dilakukan Kemenkeu dalam merespon tantangan domestik maupun ketidakpastian global perlu memperhatikan berbagai aspek. yaitu: kapasitas institusi, kredibilitas policy & regulasi, dan juga aspek Proses Bisnis (Probis), SDM dan IT. Sebagai turunan dari IS RBTK level Kemenkeu, DJPb memiliki lima IS RBTK:

1. Allocative Efficiency APBN untuk Mendukung Visi Presiden dan Mendorong Pertumbuhan
2. Kepemimpinan Kemenkeu dalam Strategic Diamond
3. Penguatan Peran SMV sebagai Arm's Length Kemenkeu
4. Pengembangan Modern Treasury
5. Modernisasi Layanan

Direktorat PPKBLU ambil bagian pada IS RBTK nomor 3 terkait Penguatan Peran SMV sebagai Arm's Length Kemenkeu.

Inisiatif Strategis	Capaian Utama s.d. Q3 2025
Penguatan Peran SMV sebagai Arm's Length Kementerian Keuangan	1. Initial meeting dengan PIP, BPD LH, BPDP dan Dit. SMI 2. Kajian leveraging terkait PIP, BPD LH, BPDP



Risiko (Rendah)

Risiko pada IKU ini dinilai rendah karena menurut tren IS Data Analytic pada tahun-tahun sebelumnya. capaian IS tersebut sangat baik. Tetapi. masih harus tetap dipantau karena IKU bersifat Take Last Known



Isu Utama

Merupakan IKU baru yang monitoring *progress* dan perhitungan capaiannya disampaikan oleh pihak eksternal dalam hal ini BaTii.

Perlu kolaborasi dengan BLU, khususnya BLU DJPb.



Dampak

Perlu pemahaman lebih dalam terkait IS RBTK Kementerian Keuangan yang terkait Direktorat PPKBLU dan pencapaiannya termasuk perhitungan IKUnya.



Rencana Aksi

Internalisasi IS RBTK level Kementerian Keuangan serta tata cara perhitungan IKU agar pada akhir tahun tetap tercapai karena IKU bersifat *Take Last Known Value* (TLKV)

Direktorat PPKBLU	Pengelolaan IT yang Andal dan Data yang Berkualitas							
	8b-N Indeks Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	Max/TLK
Realisasi	2	2	2	3	3			
Capaian	66,67	66.67	66.67	100	100			

Isu Utama dan Implikasi (<i>Apa yang Terjadi dan Implikasinya?</i>)	Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama: IKU ini memperhatikan kualitas data yang ada di aplikasi BIOS dan pengembangan webservice Satker BLU yang datanya akan terintegrasi ke aplikasi BIOS. Implikasi: Perlu pengecekan dan validasi secara rutin oleh pembina keuangan bekerja sama dengan pembina teknis.	1. Melakukan berbagai kegiatan pendampingan dalam bentuk konsultasi, bimtek, pembinaan, pembelajaran dll kepada para stakeholder maupun pengguna layanan seintensif mungkin. 2. Melakukan kolaborasi dengan para pembina

[illegible]

Penjelasan IKU



IKU ini mengukur tingkat kelengkapan dan kualitas data pada aplikasi BIOS serta capaian *extra mile* dalam bentuk pengembangan *webservice* yang terintegrasi dengan aplikasi BIOS.

Perhitungan Capaian



Capaian yang dihitung adalah perhitungan pada akhir periode.

Rincian Indeks	%Capaian
Indeks 5	$90\% < Y$
Indeks 4	$80\% < Y \leq 90\%$
Indeks 3 (target)	$60\% < Y \leq 80\%$
Indeks 2	$30\% < Y \leq 60\%$
Indeks 1	$30\% \geq Y$

	Target	Realisasi
Q1	3 (skala 5)	2
Q3	3 (skala 5)	2
Q3	3 (skala 5)	3
Q4	3 (skala 5)	-

Indeks Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU

Non-Cascading



Analisis Capaian

SUBDIT	Kelengkapan dan Kualitas Data	<i>Extra Mile Webservice</i>	Indeks
PPKBLU I	76,80%	4,20%	4
PPKBLU II	56.68%	3,55%	2
PPKBLU III	64%	4%	3
DIREKTORAT	71,16%	3,92%	3

IKU ini berfokus pada kualitas data yang diinput oleh BLU di aplikasi BIOS mulai dari profil BLU, dewasa, RBA, dokumen kinerja, hingga pelaporan implementasi tarif dan remunerasi.

Pergantian pegawai secara internal pada masing-masing BLU yang menjadi operator BIOS, merupakan salah satu tantangan ketercapaian IKU ini.

Progres sampai dengan triwulan III ini sudah cukup baik, diproyeksikan akan meningkat dan di akhir tahun minimal akan sampai ke sekitar 80% atau indeks 4. Nilai IKU ini diambil dari nilai yang paling akhir (Take Last Known Value).



Risiko (Sangat Rendah)



Risiko atas IKU ini dinilai sangat rendah. jika melihat dari tren tahun sebelumnya. keterisian data pada BIS akan meningkat seiring dengan berjalannya bulan. Pada tahun ini. di TW II memang masih rendah tetapi hal tersebut akan meningkat di triwulan-triwulan akhir ketika data sudah siap seluruhnya.



Isu Utama

IKU ini memperhatikan kualitas data yang ada di aplikasi BIOS dan pengiriman data melalui mekanisme *webservice* BIOS. Peran Pembina memastikan Satker BLU menyelesaikan proses di BIOS, serta mendorong interkoneksi data melalui *webservice*.



Dampak

Perlu pengecekan dan validasi secara rutin oleh pembina keuangan bekerja sama dengan pembina teknis.



Rencana Aksi

Kolaborasi antar Subdirektorat teknis dengan pengampu aplikasi BIOS agar dapat memperoleh data yang valid sehingga integritas data terjamin.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DJPb
Indonesian Treasury



Laporan Capaian Kinerja

TRIWULAN IV TAHUN 2025

Direktorat PPKBLU



Kemenkeu-Two Direktorat PPK BLU, memiliki **8 Sasaran Strategis (SS)** dan **14 Indikator Kinerja Utama (IKU)** dengan rincian:

- 5 (lima) IKU *Cascading Peta* (diturunkan dari *Kemenkeu-Wide* dan *Kemenkeu-One*)
- 9 (sembilan) IKU *Non Cascading*



Sampai dengan triwulan IV, terdapat 14 (empat belas) IKU yang telah memiliki capaian dan seluruhnya **mencapai target**, sehingga NKO s.d. triwulan IV sebesar 116,25.



Terdapat **1 (satu) IKU Kemenkeu-One** yang menjadi **tanggung jawab Direktorat PPK BLU**, yaitu:

- Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU (T:3, R: 3,9)



Pada tahun 2025, terdapat **15 (lima belas) risk events** yang telah ditetapkan pada Piagam Risiko Direktorat PPK BLU Tahun 2025, dengan rincian **4 Risiko perlu dimitigasi** dan 11 Risiko tidak perlu dimitigasi.

Sampai dengan triwulan IV 2025, terdapat **1 risiko** yang masih pada level tinggi, yaitu:

- Ownership pegawai terhadap organisasi (19)

NKO

116,25

Stakeholder (30%) **120,00**

Customer (20%) **113,48**

Internal Process (25%) **115,50**

Learning & Growth (25%) **114,68**

*) NKO menggunakan data capaian cut-off per 14 Jan 2026

Tren Nilai Kinerja Organisasi



NKO tahun 2025 mencapai 115,70 lebih tinggi dibandingkan NKO tahun 2024 sebesar 113,9

PEMETAAN IKU 2025 DAN REALISASI CAPAIAN

No.	Uraian IKU	Target	Realisasi TW IV	UIC				
				PST	TRI	PPK BLU I	PPK BLU II	PPK BLU III
	Cascading Kemenkeu-Wide							
1	Indeks Kinerja Reformasi Hukum	95.5	116,25	V	V			
2	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	92	100	V				
3	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu	100	120	V				
	Cascading Kemenkeu-One							
4	Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU	3 (skala 5)	3,9			V	V	V
5	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100	120		V			
	IKU Mandatory							
6	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan	100	104,68	V	V	V	V	V
7	Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan	80	88,36	V	V			
8	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	100	114,05	V				
9	Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan	4 (skala 5)	5	V	V	V	V	V
	IKU Non-Cascading							
10	Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU	3 (skala 5)	4,12			V	V	V
11	Tingkat Perkembangan Pendapatan BLU	100	119,97			V	V	V
12	Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating	100	113,85			V	V	V
13	Indeks Kualitas Penugasan BLU, asistensi BLUD, dan UMKM	4 (skala 5)	4,92	V				V
14	Indeks Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU	3 (skala 5)	3		V	V	V	V

DJPb (PPKBLU)	Pengelolaan Keuangan BLU yang Inklusif dan Produktif							
	1a-CP Indeks peningkatan efisiensi layanan BLU							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	Max/TLK
Realisasi	4,6	3,9	3,9	4.6	4.6	3,9	3,9	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)
Isu: - Terjadi penurunan pada growth layanan BLU rumpun Pengelola Dana. Growth layanan BLU Rumpun pengelola dana paling kecil dibandingkan BLU Kawasan dan Barjas lainnya. - Penurunan Growth Layanan pada BLU Pengelola dana berasal dari PIP, LPDB dan LPMUKP. Pada LPDB KUMKM terjadi penundaan penyaluran Dagulir pada Semester I karena sesuai arahan Pembina Teknis (Menteri Koperasi) untuk fokus pada KDMP. Pada PIP terjadi penurunan jumlah end user yang disebabkan karena penyalur belum melakukan penginputan pada SIKP. - Pada LPMUKP penurunan terjadi karena dana kelolaan pada BA 999.03 pada awal tahun 2025 hanya tersedia sebesar Rp60 miliar sehingga dengan pengembalian dana di 2025 hanya mampu menyalurkan dana sebesar Rp131 miliar - Penurunan growth layanan rumpun kawasan berasal dari PPK GBK yang jumlah even masih didominasi even lari, sedangkan even musik masih tidak sebanyak tahun lalu, dan BPO Borobudur yang mengalami penurunan peserta even lari. - Pada Rumpun Kesehatan, terdapat kenaikan belanja operasional tahun 2025 sebesar 1,40% yoy. Kontributor utama kenaikan belanja operasional tahun 2025 bersumber dari peningkatan belanja pegawai pada Kementerian Kesehatan , yaitu terdapat peningkatan pegawai PPPK sebanyak 1.194 orang pada tahun 2025. Selain itu, terdapat penyesuaian layanan rawat inap rumah sakit sehubungan dengan pemberlakuan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) - Pada rumpun pendidikan, secara garis besar belanja operasional mengalami peningkatan. Peningkatan belanja operasional paling besar terjadi pada BLU lingkup Kemendiktisaintek yaitu mencapai 9%. Peningkatan belanja operasional pada Kemendiktisaintek tidak diimbangi dengan peningkatan output layanan yang tinggi, sehingga menghasilkan growth efisiensi layanan yang kecil dibanding K/L lain seperti Kemenag, Kemenhub, Kemenkes. Bahkan pada layanan jumlah mahasiswa aktif perbandingan belanja operasional dan output layanan semakin meningkat dibanding tahun 2024 yang artinya semakin tidak efisien. - Di akhir tahun 2025, serapan lulusan mahasiswa kurang terserap dengan baik sehingga menyebabkan output layanan serapan mahasiswa mengalami penurunan Implikasi: - Penurunan growth layanan pada BLU Rumpun Pengelola Dana dan kawasan berpengaruh pada Nilai Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU Rumpun Pengelola Dana dan Kawasan yang lebih kecil dibanding BLU Barang/Jasa lainnya. - Growth efisiensi pada BLU lingkup kemendiktisaintek memiliki presentasi lebih kecil dibandingkan dengan BLU pada K/L lain karena peningkatan output layanan tidak setinggi peningkatan belanja operasional

Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
- Koordinasi dengan BLU terkait output layanan yang dihasilkan pada Triwulan IV 2025 - Melakukan evaluasi pada BLU rumpun pendidikan saat desk KPI agar BLU dapat lebih efisien terutama dalam belanja operasional. - Melakukan evaluasi pada BLU rumpun Pengelola Dana dan Kawasan agar lebih efisien dalam belanja operasional dan memperhatikan growth layanan jumlah end user dan even agar dapat meningkat. - Pembinaan kepada BLU agar dapat memaksimalkan potensi asetnya dalam rangka peningkatan layanan utama - Melakukan evaluasi terhadap seluruh BLU pendidikan pada aspek rasio dosen mahasiswa, jika rasio masih rendah maka bisa dimungkinkan untuk meningkatkan penerimaan jumlah mahasiswa baru		
Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
1. Melakukan koordinasi dengan Kemendiktisaintek agar BLU lebih efisien dalam penggunaan belanja operasional dan berusaha meningkatkan jumlah mahasiswa dengan tetap memperhatikan rasio dosen terhadap mahasiswa	PPKBLU I, II, III	2026
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)		
- Arahan dari Menteri Koperasi LPDB terkait pengajuan pinjaman yang terpusat pada Koperasi Desa/Merah Putih - Menipisnya saldo pada LPMUKP - Kurang tertib dalam penginputan data end user pada SIKP - Peningkatan belanja operasional BLU Kemendiktisaintek tidak diimbangi dengan peningkatan output layanan		

Layanan BLU	Belanja Layanan	Growth Layanan	Growth Efisiensi
Kesehatan Rawat inap dan rawat jalan	Naik 281M (1,4%)	Naik 548 rb (8,16%)	Turun 517 rb (-6,21%)
Pendidikan Jumlah mahasiswa dan serapan lulusan	Naik 1,2T (5,78%)	naik 75 rb (12,43%)	Turun 5,7 jt (-5,66%)
Pengelola Dana Penyaluran dana bergulir dan jumlah <i>end user</i>	Naik 2,1M (0,23%)	Naik 1,3 T (10%)	Turun 6 rb (-2,76%)
		Turun 70 rb (-3%)	
Kawasan Jumlah pengunjung dan penyelenggaraan <i>event</i>	Naik 6,9M (3,73%)	Naik 2,1 jt (22%)	Turun 15 jt (-2,48%)
		Turun 34 (-6%)	
Barang dan Jasa Lainnya Jumlah penumpang dan layanan kargo	Turun 39M (-14,25%)	Naik 81 rb (1%)	Turun 3 rb (-20,73%)
		Naik 12,1 jt (16%)	
AVERAGE %		8,17% (Indeks 3,5)	-7,57% (Indeks 4)

	Target	Real.	Capaian
Q4	3	3,9	120

Komponen	Target	Realisasi	Bobot	Indeks Capaian
Indeks Efisiensi Layanan	3	4	80%	3,2
Indeks <i>Growth</i> Layanan	3	3,5	20%	0,7
Realisasi				3,9

IKU ini mengukur keberhasilan BLU dalam menerapkan kebijakan efisiensi yang diukur dengan 2 indikator:

1. Tingkat efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan BLU dibandingkan periode sebelumnya.
2. Tingkat pertumbuhan output layanan yang dihasilkan oleh BLU dibandingkan periode sebelumnya.

DJPb berkontribusi dalam pengawalan penerapan kebijakan efisiensi ini agar kualitas output layanan BLU kepada masyarakat tetap terjaga.

Isu Strategis

- Pada BLU Rumpun Kesehatan diperlukan standar baku biaya per layanan sebagai acuan bersama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja keuangan.
- Arahan dari Menteri Koperasi LPDB terkait pengajuan pinjaman yang terpusat pada Koperasi Desa/Merah Putih dan Menipisnya saldo pada LPMUKP

Penjelasan Capaian:

1. Terjadi penurunan pada growth layanan BLU rumpun Pengelola Dana dan kawasan. Pada LPDB KUMKM terjadi penundaan penyaluran Dagulir pada Semester I karena sesuai arahan Pembina Teknis (Menteri Koperasi) untuk fokus pada KDMP. Pada LPMUKP penurunan terjadi karena dana kelolaan pada BA 999.03 pada awal tahun 2025 hanya tersedia sebesar Rp60 miliar sehingga dengan pengembalian dana di 2025 hanya mampu menyalurkan dana sebesar Rp131 miliar. Pada PPK GBK, even masih didominasi even lari, sedangkan even musik masih tidak sebanyak tahun lalu, dan BPO Borobudur mengalami penurunan peserta even lari.
2. Pada Rumpun Kesehatan, terdapat kenaikan belanja operasional tahun 2025 sebesar 1,40% yoy. Kontributor utama kenaikan belanja operasional tahun 2025 bersumber dari peningkatan belanja pegawai pada Kementerian Kesehatan, yaitu terdapat peningkatan pegawai PPPK sebanyak 1.194 orang pada tahun 2025. Selain itu, terdapat penyesuaian layanan rawat inap rumah sakit sehubungan dengan pemberlakuan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)
3. Pada rumpun pendidikan, secara garis besar belanja operasional mengalami peningkatan. Peningkatan belanja operasional paling besar terjadi pada BLU lingkup Kemendikisaintek yaitu mencapai 9%. Peningkatan belanja operasional pada Kemendikisaintek tidak diimbangi dengan peningkatan output layanan yang tinggi, sehingga menghasilkan growth efisiensi layanan yang kecil dibanding K/L lain seperti Kemenag, Kemenhub, Kemenkes. Bahkan pada layanan jumlah mahasiswa aktif perbandingan belanja operasional dan output layanan semakin meningkat dibanding tahun 2024 yang artinya semakin tidak efisien.

DJPb (PPKBLU)	Pengelolaan Keuangan BLU yang Inklusif dan Produktif							
	1b-N Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	Max/TLK
Realisasi	3.98	4.22	4.22	4.09	4.09	4,12	4,12	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>				
Isu Utama: Akurasi proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja telah melampaui target, namun masih diperlukan penguatan standardisasi metode proyeksi agar capaian tersebut konsisten dan merata diseluruh BLU Implikasi: Akurasi pengesahan yang tinggi mendukung pengendalian anggaran dan mengurangi deviasi antara rencana dan realisasi				
RUMPUN	Indeks Akurasi Proyeksi (65%)	Indeks Rasio POBO (30%)	Indeks Pertumbuhan EBITDA (5%)	Capaian (sesuai bobot)
KESEHATAN	4	5	5	4,59
PENDIDIKAN	4,25	2,5	2,5	3,64
PENGELOLA DANA	4,50	5	3,50	4,60
KAWASAN	4,43	5	2,14	4,49
BARANG JASA LAINNYA	4,36	1	3,51	3,31
Gabungan <i>(average)</i>	4,38	3,7	3,3	4,12

Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>
Terkadang proyeksi kurang akurat dengan pengesahan yang dilakukan

Tindakan yang Telah Dilaksanakan
1. Melakukan evaluasi atas kinerja keuangan BLU 2. Melakukan monev kepada BLU secara on desk maupun onsite

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
Mempertahankan proyeksi pengesahan yang digunakan saat ini. Pengisian proyeksi diharapkan bisa dilakukan melalui SAKTI/BIOS	PK I, II dan III	Tahun 2026

Penjelasan IKU



Menghitung performa kinerja keuangan BLU dengan menggunakan tiga indikator, yaitu: *growth* EBITDA, akurasi proyeksi PNBP, dan rasio POBO.

Perhitungan Capaian



= 65%(Komp 1) + 35%(Komp 2)
Perhitungan saat periode Triwulan II & IV
Komp 1: Indeks akurasi proyeksi PNBP
Komp 2: Indeks rasio POBO

= 65%(Komp 1) + 30%(Komp 2) + 5%(Komp 3)
Perhitungan saat periode Triwulan II & IV
Komp 1: Indeks akurasi proyeksi PNBP
Komp 2: Indeks rasio POBO
Komp 3: Indeks rasio *growth* EBITDA

	Target	Realisasi
Q1	3 (skala 5)	3,98
Q3	3 (skala 5)	4,22
Q3	3 (skala 5)	4,09
Q4	3 (skala 5)	4,12

Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU



Analisis Capaian

RUMPUN	Indeks Akurasi Proyeksi (65%)	Indeks Rasio POBO (30%)	Indeks Pertumbuhan EBITDA (5%)	Capaian (sesuai bobot)
KESEHATAN	4	5	5	4,59
PENDIDIKAN	4,25	2,5	2,5	3,64
PENGELOLA DANA	4,50	5	3,50	4,60
KAWASAN	4,43	5	2,14	4,49
BARANG JASA LAINNYA	4,36	1	3,51	3,31
Gabungan (<i>average</i>)	4,38	3,7	3,3	4,12

Target tiap komponen:

Akurasi Proyeksi : 10% – 12,5% (Indeks 3)
POBO : 75% – 80% (Indeks 3)
Growth EBITDA : 81% – 90% (Indeks 3)



Risiko (Sangat Rendah)

Iku ini merupakan pengembangan dari IKU akurasi proyeksi pengesahan pendapatan BLU pada tahun sebelumnya. Jika berdasarkan data dan pertimbangan, risiko pada IKU ini dinilai sangat rendah. Hal ini karena pada tahun sebelumnya seluruh rumpun BLU telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Non-Cascading



Isu Utama

Akurasi proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja telah melampaui target, namun masih diperlukan penguatan standarisasi metode proyeksi agar capaian tersebut konsisten dan merata di seluruh BLU. (PK!)



Dampak

Akurasi pengesahan yang tinggi mendukung pengendalian anggaran dan mengurangi deviasi antara rencana dan realisasi. (PK1)



Rencana Aksi

Mempertahankan proyeksi pengesahan yang digunakan saat ini. Pengisian proyeksi diharapkan bisa dilakukan melalui SAKTI/Bios. (PK1)

DJPb (PPKBLU)	Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif							
	2a-N Indeks Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Max/TLK
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	104,68%	104,68%	
Capaian	120	120	120	120%	120%	104,68%	104,68%	

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)			
Isu Utama: IKU ini bersifat mandatory dan capaiannya tanggung renteng dengan Unit Eselon II lain. Triwulan IV ini, capaian telah melampaui target namun tetap perlu melakukan peningkatan layanan Implikasi: Capaian Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan yang melampaui target mencerminkan bahwa kualitas layanan DJPb telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi ekspektasi pengguna layanan dan pemangku kepentingan			
Ket	Komponen I (80%)		Komponen II (20%)
	E-SKPL (90%)	SKPK (10%)	Hai DJPb
Target	4.67	4	3,2
Realisasi	4,69	4	3,9
Capaian Sub Komponen	100,43	100	121,88
Capaian Komponen	100,39		24,38

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)
Kurangnya responden

Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
- Menyelesaikan setiap permasalahan pada Hai DJPb sebelum batas waktu - Memperkuat sinergi dan koordinasi lintas unit kerja DJPb dan pihak eksternal		
Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
- Menyelesaikan permasalahan pada Hai DJPb - Melakukan evaluasi secara berkala atas hasil kepuasan pengguna layanan - Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM	Seluruh Subdit	Tahun 2026

Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan

Mandatory

Penjelasan IKU



Pengukuran IKU untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat. pengguna layanan. dan stakeholders. Termasuk ke dalam komponen pengukuran adalah capaian HAI DJPb.

Perhitungan Capaian



$$\begin{aligned}
 R &= (\text{Komponen I} \times 80\%) + (\text{Komponen II} \times 20\%) \\
 &= (100,39 \times 80\%) + 24,38 \\
 &= 80,31 + 24,38 \\
 &= 104,68
 \end{aligned}$$



Analisis Capaian



Ket	Komponen I (80%)		Komponen II (20%)
	E-SKPL (90%)	SKPK (10%)	Hai DJPb
Target	4.67	4	3,2
Realisasi	4,69	4	3,9
Capaian Sub Komponen	100,43	100	121,88
Capaian Komponen	100,39		24,38

Data realisasi capaian pada komponen I disediakan oleh Biro Umum Sekjen selaku pengusul dan pemberi *mandatory* IKU ini. Hasil capaian Komponen I berdasarkan ND Sekretaris Ditjen Perbendaharaan nomor ND-118/PB.1/2026 hal Koordinasi terkait Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan Pemangku Kepentingan (SKPLPK) lingkup Kantor Pusat dan BLU DJPb Periode Triwulan IV Tahun 2025.



Risiko (Rendah)

Risiko pada IKU ini dinilai rendah. hal ini karena jika dilihat dari tren tahun-tahun sebelumnya. capaian dari IKU ini sangat baik dan penyebaran serta pengisian kuisioner juga dilakukan tepat waktu

Isu Utama



Capaian telah melampaui target namun tetap perlu melakukan perbaikan atas layanan yang ada saat ini

Dampak



Capaian Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan yang melampaui target mencerminkan bahwa kualitas layanan DJPb telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi ekspektasi pengguna layanan dan pemangku kepentingan

Rencana Aksi



1. Melakukan evaluasi secara berkala atas hasil kepuasan pengguna layanan
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM

DJPb (PPKBLU)	Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif							
	2b-N Tingkat Perkembangan Pendapatan BLU							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	109.64	116.75	116.75	118.33	118.33	119,97	119,97	
Capaian	109.64	116.75	116.75	118.33	118.33	119,97	119,97	

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)

Isu:

1. Realisasi PNBP BLU Rumpun Kesehatan telah melampaui target dan menunjukkan pertumbuhan positif, namun keberlanjutan pertumbuhan tersebut perlu dijaga melalui penguatan perencanaan dan optimalisasi potensi penerimaan secara merata di seluruh BLU. (PK1)

2. Pada growth PNBP Rumpun kawasan terjadi pertumbuhan minus dikarenakan pada BP Batam terjadi penurunan karena ada pendapatan dari BU SPAM di April 2024 sebesar Rp328 miliar yang tidak terulang lagi di 2025

Implikasi:

Capaian realisasi dan pertumbuhan PNBP yang tinggi meningkatkan kapasitas pendanaan layanan dan memperkuat kemandirian keuangan BLU.

Rumpun BLU	Target 2025 (Milyar)	Realisasi 2024 Q4 (Milyar)	Realisasi 2025 Q4 (Milyar)	% Realisasi	% Growth
Kesehatan	25.322	26.017	29.408	116	13
Pendidikan	15,344	16,630	18,034	108,45	8,45
Pengelola Dana	40,191	47,733	52,359	130.27	9,69
Kawasan	2,614	2,869	2,724	104.21	-5,05
Barang Jasa Lainnya	5,172	6,212	6,747	130,45	9
Gabungan	88.645	99.463	109.275	123,27%	9,87%
Target				100%	Indeks 3
Indeks Capaian SubIKU 1 & 2				123.27	5

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)
Pertumbuhan PNPB antar tahun tidak tentu ketika ada program tahunan

Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
1. Penandatanganan Kontrak Kinerja BLU dan Direktur Jenderal Perbendaharaan telah dilaksanakan pada bulan Januari 2025		
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara on desk dan on site		

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
Melakukan pembinaan terhadap BLU melalui reviu penetapan target PNBP berbasis potensi layanan, replikasi praktik terbaik BLU dengan kinerja tinggi, serta penguatan monitoring realisasi PNBP secara berkala untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan pertumbuhan	PK I, II, III	Tahun 2026

Penjelasan IKU



Mengukur *growth* PNPB BLU dibandingkan tahun sebelumnya (pada periode yang sama) dan tingkat pencapaian pendapatan BLU terhadap target yang dicanangkan pada UU APBN tahun 2025.

Perhitungan Capaian



$$= \frac{\text{IndeksCap SubIKU 1} + \text{IndeksCap SubIKU 2}}{2}$$

$$= \frac{123,27 + 116,67}{2}$$

SubIKU 1 (Target 100%)

Mengukur tingkat pencapaian PNPB BLU dibandingkan dengan target triwulanan

SubIKU 2 (Target Indeks 3: -2,5% s.d. 0,5%)

Mengukur *growth* PNPB BLU dibandingkan tahun sebelumnya pada periode triwulanan yang sama.

	Target	Realisasi
Q1	100	109,64
Q3	100	116,75
Q3	100	118,33
Q4	100	119,97

Tingkat Perkembangan Pendapatan BLU



Analisis Capaian

REALISASI DAN GROWTH PNPB

Rumpun BLU	Target 2025 (Milyar)	Realisasi 2024 Q4 (Milyar)	Realisasi 2025 Q4 (Milyar)	% Realisasi	% Growth
Kesehatan	25.322	26.017	29.408	116	13
Pendidikan	15,344	16,630	18,034	108,45	8,45
Pengelola Dana	40,191	47,733	52,359	130,27	9,69
Kawasan	2,614	2,869	2,724	104,21	-5,05
Barang Jasa Lainnya	5,172	6,212	6,747	130,45	9
Gabungan	88.645	99.463	109.275	123,27%	9,87%
Target				100%	Indeks 3
Indeks Capaian SubIKU 1 & 2				123,27	5

Indeks Capaian SubIKU 1:

$$= \frac{\% \text{ Realisasi}}{\% \text{ Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{123,27\%}{100\%} \times 100\% = 123,27$$



Indeks Capaian SubIKU 2:

$$= \frac{\text{Avg Indeks}}{\text{Target Indeks}} \times 100\%$$

$$= \frac{5}{3} \times 100\% = 116,67$$

Risiko (Rendah)

Pendapatan BLU sudah tercapai sesuai dengan target Triwulan I (di atas 15%) sehingga risiko dinilai rendah. namun demikian tetap perlu menjadi perhatian terutama untuk rumpun yang memiliki target pendapatan yang tinggi serta diharapkan trend realisasi pendapatan akan terus naik hingga triwulan IV

Non-Cascading



Isu Utama

1. Realisasi PNPB BLU Rumpun Kesehatan telah melampaui target dan menunjukkan pertumbuhan positif, namun keberlanjutan pertumbuhan tersebut perlu dijaga melalui penguatan perencanaan dan optimalisasi potensi penerimaan secara merata di seluruh BLU. (PK1)
2. Pada growth PNPB Rumpun kawasan terjadi pertumbuhan minus dikarenakan pada BP Batam terjadi penurunan karena ada pendapatan dari BU SPAM di April 2024 sebesar Rp328 miliar yang tidak terulang lagi di 2025



Dampak

Capaian realisasi dan pertumbuhan PNPB yang tinggi meningkatkan kapasitas pendanaan layanan dan memperkuat kemandirian keuangan BLU. (PK1)



Rencana Aksi

Melakukan pembinaan terhadap BLU melalui reviu penetapan target PNPB berbasis potensi layanan, replikasi praktik terbaik BLU dengan kinerja tinggi, serta penguatan monitoring realisasi PNPB secara berkala untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan pertumbuhan. (PK1)

DJPb (PPKBLU)	Formulasi Kebijakan yang Implementatif dan Aplikatif							
	3a-CP Indeks Kinerja Reformasi Hukum							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95.5	Max/TLK
Realisasi	120	105.67	105.67	115.66	115.66	116,25	116,25	
Capaian	120	110.65	110.65	120	120	120	120	

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)	
Isu: Penetapan peraturan dan regulasi yang dirancang melibatkan banyak pihak. tidak hanya internal Direktorat PPKBLU. Implikasi: Keterlibatan banyak pihak dalam proses penetapan regulasi mendorong kualitas peraturan yang lebih komprehensif dan akuntabel, namun memerlukan pengelolaan koordinasi yang efektif agar penetapan regulasi tetap tepat waktu. Peraturan yang dirumuskan oleh Dit PPK BLU tahun 2025: On progress: 1.RPMK Perubahan PMK 172 tahun 2021 2.RPMK Tarif Balai Pengujian Perkeretaapian 3.RPMK Tarif Kolektif Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kemen ESDM 4.RPMK Tarif BPJPH Terbit: 1.PMK Nomor 76 Tahun 2025 (Perubahan PMK 129/2020) 2.PMK Tarif PIP 3.PMK Tarif Kolektif Laboratorium Kesehatan Kemenkes 4.PMK Tarif Kolektif UPBU 5.PMK Tarif BPSDM Kemenhub 6.PMK Tarif Kolektif Distrik Navigasi 7.PMK Tarif BPDP 8.PMK Tarif RSU Adhyaksa 9.PMK Tarif BPSDM Kemenperin 10.PMK Tarif Balai Kesehatan Penerbangan 11.PMK Tarif BPLJSKB 12.KMK Remunerasi BPKARSS Kemenhub 13.KMK Remunerasi BAKTI	

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)
Perlu koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait karena penetapan peraturan bergantung pada banyak pihak bahkan dari Kementerian/Lembaga di luar Kementerian Keuangan. Ditambah dengan adanya penggunaan aplikasi baru untuk perumusan peraturan.

Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Telah menyelesaikan legal drafting dan harmonisasi beberapa peraturan dalam bentuk KMK maupun PMK. Mengawasi setiap proses penetapan regulasi

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
1. Berkoordinasi dengan pihak berwenang tidak hanya secara formal namun juga secara informal menggunakan sarana komunikasi tercepat.	PST dan TRI	Tahun 2026

Penjelasan IKU



Mengukur penyelesaian regulasi (RPP, RPerpres, RPMK, RKMK)

Perhitungan Capaian



Realisasi capaian disampaikan melalui Nota Dinas dari Direktorat SP selaku koordinator IKU berdasarkan data dari Biro Hukum, Sekjen Kemenkeu.

	Target	Realisasi
Q1	95.5	120
Q3	95.5	105,67
Q3	95.5	115,66
Q4	95.5	116,25

Indeks Kinerja Reformasi Hukum



Analisis Capaian

Peraturan yang dirumuskan oleh Direktorat PPKBLU tahun 2025

On progress:

1. RPMK Perubahan PMK 172 tahun 2021
2. RPMK Tarif Balai Pengujian Perkeretaapian
3. RPMK Tarif Kolektif Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kemen ESDM
4. RPMK Tarif BPIPH

Terbit:

1. PMK Nomor 76 Tahun 2025 (Perubahan PMK 129/2020)
2. PMK Tarif PIP
3. PMK Tarif Kolektif Laboratorium Kesehatan Kemenkes
4. PMK Tarif Kolektif UPBU
5. PMK Tarif BPSDM Kemenhub
6. PMK Tarif Kolektif Distrik Navigasi
7. PMK Tarif BPDP
8. PMK Tarif RSUD Adhyaksa
9. PMK Tarif BPSDM Kemenperin
10. PMK Tarif Balai Kesehatan Penerbangan
11. PMK Tarif BPLJSKB
12. KMK Remunerasi BPKARSS Kemenhub
13. KMK Remunerasi BAKTI



Risiko (Sangat Rendah)



Atas IKU ini Dit PPK BLU telah mengawal dan menyelesaikan peraturan-peraturan yang menjadi kewenangan Dit. PPKBLU. Berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya, risiko atas IKU ini dinilai sangat rendah.

Kemenkeu-Wide



Isu Utama

Penetapan peraturan dan regulasi yang dirancang melibatkan pihak eksternal, tidak hanya internal Direktorat PPKBLU.



Dampak

Koordinasi intensif kepada para pihak yang berwenang dan terkait dalam tahapan penyelesaian regulasi yang dirumuskan.



Rencana Aksi

Monitoring setiap proses penetapan regulasi dengan tetap berkoordinasi dengan pihak berwenang tidak hanya secara formal namun juga secara informal menggunakan sarana komunikasi tercepat.

Direktorat PPKBLU	Formulasi Kebijakan yang Implementatif dan Aplikatif							
	3b-N Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20	40	40	60	60	80	80	Max/TLK
Realisasi	20	40.36	40.36	68.36	68.36	88,36	88,36	
Capaian	100	100.9	100.9	113.93	113.93	110,45	110,45	
Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)					Tindakan yang Telah Dilaksanakan			
Isu Utama: Pengukuran dampak dengan metode RIA ini baru diterapkan untuk menjadi perhitungan IKU pada tahun ini. Implikasi: Perlu pemahaman terkait metode RIA agar hasil pengukuran kebijakan sesuai dengan yang diharapkan dan memiliki manfaat yang signifikan. Penjelasan capaian: Peraturan yang menjadi objek penilaian efektivitas pada Direktorat PPKBLU yaitu PER-11/PB/2021 tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola dan Kinerja (Tingkat Maturitas) Badan Layanan Umum Hasil penilaian tindak lanjut telah disampaikan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan kepada setiap direktorat pemrakarsa aturan sebagaimana terdapat dalam nota dinas Direktur SP nomor ND-28/PB.7/2026. Hasil triwulan IV Direktorat PPKBLU mendapatkan nilai 88,36 sebagaimana telah disampaikan melalui nota dinas Direktur SP nomor ND-28/PB.7/2026					Mengirimkan informasi mengenai peraturan yang akan diuji kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku koordinator di kantor pusat DJPb.			
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)					Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode	
1. Perhitungan IKU ini merupakan yang pertama dan menjadi tantangan tersendiri karena dihitung oleh pihak eksternal. 2. Penyelesaian peraturan melibatkan beberapa unit					Berkoordinasi dengan Direktorat SP selaku pengampu dan pengusul IKU dengan jalur komunikasi formal maupun informal.	Seluruh Subdit	Tahun 2026	

Penjelasan IKU



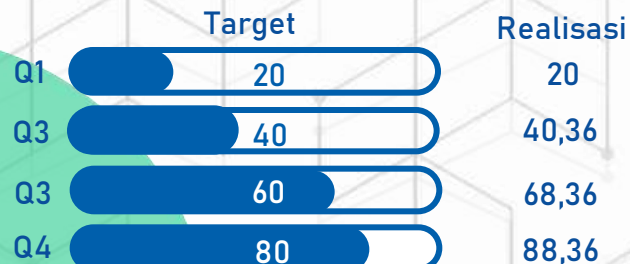
Mengukur dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan dengan metode RIA (*Regulatory Impact Assessment*).

Koordinator IKU ini adalah Direktorat SP.

Perhitungan Capaian



Dihitung berdasarkan penyampaian nota dinas tentang kajian dan rencana tindak lanjut regulasi yang telah dilakukan uji dampak pada tahun 2025 berdasarkan hasil kuisioner dan penilaian profesional pada triwulan II dan III



Analisis Capaian

Peraturan yang menjadi objek penilaian efektivitas pada Direktorat PPKBLU yaitu PER-11/PB/2021 tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola dan Kinerja (Tingkat Maturitas) Badan Layanan Umum

Hasil penilaian tindak lanjut telah disampaikan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan kepada setiap direktorat pemrakarsa aturan sebagaimana terdapat dalam nota dinas Direktur SP nomor **ND-28/PB.7/2026**.

Hasil triwulan IV Direktorat PPKBLU mendapatkan nilai 88,36 sebagaimana telah disampaikan melalui nota dinas Direktur SP nomor **ND-28/PB.7/2026**



Risiko (Rendah)

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2025. Risiko IKU ini dinilai rendah setelah melakukan koordinasi dengan Bagian KI dan DSP sebagai koordinator dan penanggungjawab IKU.



Isu Utama

Pengukuran dampak dengan metode RIA ini baru diterapkan untuk menjadi perhitungan IKU pada tahun ini.



Dampak

Perlu pemahaman terkait metode RIA agar hasil pengukuran kebijakan sesuai dengan yang diharapkan dan memiliki manfaat yang signifikan.



Rencana Aksi

Berkoordinasi dengan Direktorat SP selaku pengampu dan pengusul IKU dengan jalur komunikasi formal maupun informal.

Direktorat PPKBLU	Pengelolaan tugas khusus (special mission) yang efektif							
	4a-CP Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%	Max/TLK
Realisasi	62,5%	75%	75%	75%	75%	100%	100%	
Capaian	120	120	120	120	120	101,21%	101,21%	
Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)					Tindakan yang Telah Dilaksanakan			
Isu Utama: Rekomendasi yang diberikan perlu diselesaikan melalui kerja sama lintas unit Eselon II bahkan lintas Eselon I dan terkadang membutuhkan waktu cukup lama. Implikasi: Perlu berkoordinasi dengan pihak terkait yang memiliki wewenang dalam penyelesaian rekomendasi serta perlu menyamakan persepsi dengan pihak BPK agar memiliki pemahaman yang sama terutama terkait dengan regulasi maupun kebijakan.					1. Komunikasi dengan pihak lain yang terlibat dalam rekomendasi bersama. 2. Memonitor secara terus menerus terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan BPK kepada unit-unit lain yang terkait. 3. Melakukan koordinasi dengan Direktorat APK untuk memastikan bahwa seluruh tindak lanjut dapat disepakati selesai oleh BPK.			
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)					Rekomendasi Rencana Aksi		Penanggung jawab	Periode
1. Beberapa tindak lanjut atas rekomendasi BPK melibatkan unit-unit lain sering tersapat kesulitan dalam koordinasi. 2. Pada beberapa hal tertentu, masih terdapat perbedaan persepsi terkait pengelolaan BLU dan regulasi yang terkait antara pihak BPK dengan Direktorat PPKBLU					Koordinasi dengan Direktorat APK selaku penghubung dengan pihak BPK agar rekomendasi yang telah diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Koordinasi dengan SITP selaku pengembang aplikasi sesuai dengan tindak lanjut		PST	Tahun 2026

Penjelasan IKU

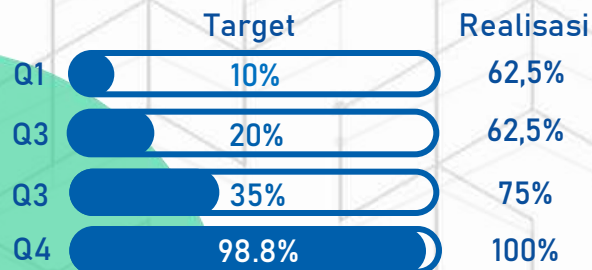


Mengukur progres penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK terhadap LKPP dan LKBUN. Persetujuan atas penyelesaian dan kesesuaian hasil tindak lanjut divalidasi oleh pihak BPK.

Perhitungan Capaian



Data realisasi capaian disediakan oleh Direktorat APK selaku koordinator dengan pihak BPK.



Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN



Analisis Capaian

JENIS REKOM	OUTSTANDING REKOM	REKOM DISELESAIKAN	%
LKPP	2	2	100
LKBUN	4	4	100
Gabungan	6	6	100

Hasil capaian triwulan IV berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-10/PB/2026 hal Penyampaian Capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti Triwulan IV Tahun 2026 yaitu 100%



Risiko (Sangat Rendah)

Rekomendasi dari BPK yang berada di kewenangan Dit. PPKBLU telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan segera sehingga risiko dinilai sangat rendah. selain itu Dit. PPK BLU selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.



Isu Utama

Rekomendasi yang diberikan perlu diselesaikan melalui kerja sama lintas unit Eselon II bahkan lintas Eselon I dan terkadang membutuhkan waktu cukup lama.



Dampak

Perlu berkoordinasi dengan pihak terkait yang memiliki wewenang dalam penyelesaian rekomendasi serta perlu menyamakan persepsi dengan pihak BPK agar memiliki pemahaman yang sama terutama terkait dengan regulasi maupun kebijakan.



Rencana Aksi

Koordinasi dengan Direktorat APK selaku penghubung dengan pihak BPK agar rekomendasi yang telah diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Direktorat PPKBLU	Pengelolaan tugas khusus (special mission) yang efektif							
	4b-N Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	111,54	111.54	111.54	111.54	111.54	113,85	113,85	
Capaian	111,54	111.54	111.54	111.54	111.54	113,85	113,85	

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>	Tindakan yang Telah Dilaksanakan																			
Isu Utama: - Maturity Rating perlu dimaknai tidak sekadar sebagai penilaian tahunan, melainkan sebagai indikator kualitas tata kelola BLU yang berkelanjutan - Isu pada kenaikan nilai matrat berasal dari BLU LPDUK yang sudah mengisi beberapa data di modul maturity rating tetapi tidak disampaikan ke kanwil sesuai batas waktu yang ditentukan Implikasi: Satker BLU perlu mempelajari kembali dan menjadi tantangan bagi Satker BLU yang kesulitan dalam meningkatkan nilai maturity ratingnya. <table> <tr> <th>SUBDIREKTORAT</th><th>PERSENTASE BLU KATEGORI "BAIK" ATAU DI ATASNYA</th><th>KENAIKAN NILAI MATRAT BLU (DALAM INDEKS)</th></tr> <tr> <td>PPKBLU I</td><td>100%</td><td>5</td></tr> <tr> <td>PPKBLU II</td><td>97,86%</td><td>5</td></tr> <tr> <td>PPKBLU III</td><td>98,11%</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Gabungan</td><td>98,66%</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Target</td><td>97,66%</td><td>3,5</td></tr> </table>	SUBDIREKTORAT	PERSENTASE BLU KATEGORI "BAIK" ATAU DI ATASNYA	KENAIKAN NILAI MATRAT BLU (DALAM INDEKS)	PPKBLU I	100%	5	PPKBLU II	97,86%	5	PPKBLU III	98,11%	5	Gabungan	98,66%	5	Target	97,66%	3,5	- Mendorong BLU untuk segera menyelesaikan proses self assessment maturity rating. - Memberikan bimbingan teknis dan konsultasi baik secara langsung maupun melalui media komunikasi elektronik kepada Satker BLU - Pendampingan kepada satker BLU baru maupun nilai matratnya dibawah kategori baik	
SUBDIREKTORAT	PERSENTASE BLU KATEGORI "BAIK" ATAU DI ATASNYA	KENAIKAN NILAI MATRAT BLU (DALAM INDEKS)																		
PPKBLU I	100%	5																		
PPKBLU II	97,86%	5																		
PPKBLU III	98,11%	5																		
Gabungan	98,66%	5																		
Target	97,66%	3,5																		

Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>
- Beberapa BLU baru belum terbiasa melakukan penilaian dengan sistem maturity rating. - Terdapat BLU yang akan dibekukan karena adanya restrukturiasi organisasinya sehingga tidak memiliki motivasi untuk menyelesaikan maturity rating.

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
Pembinaan intensif bagi Satker BLU baru dan yang memiliki permasalahan terkait nilai maturity rating ini. Khususnya pembinaan kepada BLU LPDUK terkait pemenuhan penyampaian dokumen yang wajib kepada BLU	Subdit PPK BLU I, II, III	Tahun 2026

Penjelasan IKU

Mengukur kualitas tata kelola BLU menggunakan metode pengukuran *maturity rating assessment*. Standar penilaian setiap BLU harus memenuhi pada level “baik” dan memiliki peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

Perhitungan Capaian

$$\text{IndeksCap SubIKU 1} + \text{IndeksCap SubIKU 2} = \frac{101,71 + 120}{2} = 113,85$$

SubIKU 1 (Target 97%)

Mengukur persentase BLU yang memiliki *maturity rating* masuk ke dalam kategori “baik” atau di atasnya. namun periode awal tahun masih bersifat tahapan *self assessment*.

SubIKU 2 (Target Indeks 3.5)

Mengukur *growth* peningkatan nilai *maturity rating*. namun periode awal tahun masih bersifat tahapan evaluasi dan *self assessment*.

	Target	Realisasi
Q1	100	111.54
Q3	100	111,54
Q3	100	111,54
Q4	100	113,85

Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating

Non-Cascading



Analisis Capaian

SUBDIREKTORAT	PERSENTASE BLU KATEGORI “BAIK” ATAU DI ATASNYA	KENAIKAN NILAI MATRAT BLU (DALAM INDEKS)
PPKB LU I	100%	5
PPKB LU II	97,86%	5
PPKB LU III	98,11%	5
Gabungan	98,66%	5
Target	97,66%	3,5

Indeks Capaian SubIKU 1:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Avg \%}}{\text{Target \%}} \times 100\% \\ &= \frac{98,66\%}{97\%} \times 100\% \\ &= 101,71 \end{aligned}$$

Indeks Capaian SubIKU 2:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Avg Indeks}}{\text{Target Indeks}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Indeks 5}}{\text{Indeks 3,5}} = 120 \text{ (max)} \end{aligned}$$



Risiko (Sangat Rendah)

Secara keseluruhan berdasarkan hasil tahun sebelumnya. hasil penilaian terhadap *maturity rating* sangat baik. Sehingga. risiko berkaitan dengan IKU ini dinilai sangat rendah.



Isu Utama

1. Maturity Rating perlu dimaknai tidak sekadar sebagai penilaian tahunan, melainkan sebagai indikator kualitas tata kelola BLU yang berkelanjutan
2. Isu pada kenaikan nilai matrat berasal dari BLU LPDUK yang sudah mengisi beberapa data di modul *maturity rating* tetapi tidak disampaikan ke kanwil sesuai batas waktu yang ditentukan



Dampak

Satker BLU perlu mempelajari kembali dan menjadi tantangan bagi Satker BLU yang kesulitan dalam meningkatkan nilai *maturity rating*nya.



Rencana Aksi

Pembinaan intensif bagi Satker BLU baru dan yang memiliki permasalahan terkait nilai *maturity rating* ini. Khususnya pembinaan kepada BLU LPDUK terkait pemenuhan penyampaian dokumen yang wajib kepada BLU

Direktorat PPKBLU	Komunikasi Publik dan Sinergi Antar-Organisasi yang Kolaboratif							
	5a –N Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	4	4	4	4	4	4	4	Max/TLK
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)			Tindakan yang Telah Dilaksanakan																							
Isu Utama: Pelaksanaan edukasi dan komunikasi tidak hanya selesai pada satu kegiatan namun harus berkesinambungan dengan tetap memperhatikan sisi efisiensi. Implikasi: Penilaian pada kegiatan tertentu dengan metode pre dan post test atau survei peserta atau pun tingkat kualitas penyelesaian pelatihan hanya memberi potret sebagian proses edukasi dan komunikasi.			1. Publikasi informasi terkait pengelolaan keuangan BLU melalui website blu.djpb.kemenkeu.go.id 2. Menyediakan fitur helpdesk pada website blu.djpbn.kemenkeu.go.id sebagai sarana peningkatan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan BLU 3. Meng-update petunjuk manual operasionalisasi BIOS. 4. Menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi dan komunikasi bekerja sama dengan BPPK melalui KLC. 5. Membuat perencanaan kegiatan																							
<table><tr><th>No</th><th>Kegiatan</th><th>Hasil</th></tr><tr><td>1.</td><td>Bimtek SAKTI BLU</td><td>87,37</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pelatihan Pendampingan Pemasaran Produk UMKM</td><td>96,21</td></tr><tr><td>3.</td><td>E-Learning Dewan Pengawas BLU</td><td>95,4</td></tr><tr><td colspan="2">Average</td><td>92,99</td></tr></table>			No	Kegiatan	Hasil	1.	Bimtek SAKTI BLU	87,37	2.	Pelatihan Pendampingan Pemasaran Produk UMKM	96,21	3.	E-Learning Dewan Pengawas BLU	95,4	Average		92,99	<table><tr><th>Rekomendasi Rencana Aksi</th><th>Penanggung jawab</th><th>Periode</th></tr><tr><td>1. Membuat perencanaan kegiatan seefisien mungkin dengan topik atau tema yang saling melengkapi dan berkelanjutan agar proses</td><td>Seluruh Subdit</td><td>Tahun 2026</td></tr></table>			Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode	1. Membuat perencanaan kegiatan seefisien mungkin dengan topik atau tema yang saling melengkapi dan berkelanjutan agar proses	Seluruh Subdit	Tahun 2026
No	Kegiatan	Hasil																								
1.	Bimtek SAKTI BLU	87,37																								
2.	Pelatihan Pendampingan Pemasaran Produk UMKM	96,21																								
3.	E-Learning Dewan Pengawas BLU	95,4																								
Average		92,99																								
Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode																								
1. Membuat perencanaan kegiatan seefisien mungkin dengan topik atau tema yang saling melengkapi dan berkelanjutan agar proses	Seluruh Subdit	Tahun 2026																								

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
1. Pelaksanaan kegiatan edukasi dan komunikasi membutuhkan waktu yang lama 2. Pergantian Operator dan Approval aplikasi BIOS yang sering terjadi pada BLU 3. Konsep BLU merupakan hal yang baru bagi beberapa peserta bimtek dan sangat berbeda dengan pekerjaan mereka selama ini	1. Membuat perencanaan kegiatan seefisien mungkin dengan topik atau tema yang saling melengkapi dan berkelanjutan agar proses edukasi tidak terputus. 2. Melaksanakan e-learning untuk pengelola keuangan	Seluruh Subdit	Tahun 2026



Pengukuran tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi yang dilakukan melalui pre-test dan post-test bimbingan teknis atau survei atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau tingkat penyelesaian pelatihan. Capaian dihitung TLKV agar bisa melihat rangkaian keseluruhan.

Perhitungan Capaian



Triwulan IV ini menghitung nilai rata-rata hasil pre-test & post-test atau hasil survey kepada responden atau persentase penyelesaian kegiatan pembelajaran (dikonversi dalam persentase)

	Target	Realisasi
Q1	4 (skala 5)	5
Q3	4 (skala 5)	5
Q3	4 (skala 5)	5
Q4	4 (skala 5)	5

Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan



Analisis Capaian

Triwulan III telah dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:

1. **Bimtek SAKTI BLU** mengundang perwakilan dari Kanwil DJPb pada tanggal 28 – 30 April 2025.
2. **Pelatihan Pendampingan Pemasaran Produk UMKM** bekerja sama dengan PIP pada tanggal 30 April 2025.
3. **E-learning dewan pengawas BLU** pada tanggal 4- 15 Agustus 2025.

No	Kegiatan	Hasil
1.	Bimtek SAKTI BLU	87,37
2.	Pelatihan Pendampingan Pemasaran Produk UMKM	96,21
3.	E-Learning Dewan Pengawas BLU	95,4
Average		92,99



Risiko (Sangat Rendah)

Seluruh subdit sudah melaksanakan evaluasi atas kegiatan yang direncanakan di Triwulan I dan diikuti oleh pemenuhan target peserta kegiatan sehingga risiko sangat rendah

Mandatory



Isu Utama

Pelaksanaan edukasi dan komunikasi tidak hanya selesai pada satu kegiatan namun harus berkesinambungan dengan tetap memperhatikan sisi efisiensi.



Dampak

Penilaian pada kegiatan tertentu dengan metode pre dan post test atau survei peserta atau pun tingkat kualitas penyelesaian pelatihan hanya memberi potret sebagian proses edukasi dan komunikasi.



Rencana Aksi

Membuat perencanaan kegiatan seefisien mungkin dengan topik atau tema yang saling melengkapi dan berkelanjutan agar proses edukasi tidak terputus.

Direktorat PPKBLU	Komunikasi Publik dan Sinergi Antar-Organisasi yang Kolaboratif							
	5b-N Indeks Kualitas Penugasan BLU, asistensi BLUD, dan UMKM							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	4	4	4	4	4	4	4	Max/TLK
Realisasi	4,96	4.99	4.99	5	5	4,92	4,92	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)					Tindakan yang Telah Dilaksanakan			
Isu Utama: Adanya kebijakan efisiensi dan penyesuaian pagu belanja diserahkan kepada masing-masing Kanwil DJPb serta adanya kebijakan simplifikasi pelaporan rutin pada Kanwil DJPb Implikasi: Alokasi belanja yang tidak seragam setiap Kanwil DJPb menjadi tantangan dalam pemenuhan IKU ini dan simplifikasi pelaporan akan membuat kesulitan bagi Direktorat PPKBLU selaku penilai karena isi laporan cenderung sama. .					1. Menyampaikan informasi secara formal & informal terkait tindak lanjut atas sosialisasi pemberdayaan UMKM 2. Telah dilakukan pemberian feedback penilaian kepada masing-masing Kanwil untuk dilakukan perbaikan periode berikutnya. 3. Berkoordinasi dengan Setditjen			
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)					Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode	
1. Para pegawai kanwil yang baru dalam hal pekerjaan maupun dalam hal penempatan membutuhkan waktu dalam memahami IKU ini. 2. Menjalin komunikasi dengan BLUD yang notabene bukan kewenangan secara langsung Kanwil dalam melakukan pembinaan. 3. Kegiatan yang dilakukan selama ini hanya bersifat temporer (pameran, asistensi, sosialisasi, dll) belum ada kegiatan pemberdayaan yang komprehensif sampai dengan memantau perkembangan UMKM dan menentukan milestone capaian target bisnis secara rinci.					Berkoordinasi dengan Setditjen dan menjalin komunikasi yang baik dengan Kanwil DJPb untuk dapat menemukan solusi permasalahan terutama terkait IKU ini.	Subdit PST dan PPK III	Tahun 2026	

Penjelasan IKU



Indikator Kinerja ini akan mengukur 3 (tiga) komponen yaitu kualitas pembinaan BLU. asistensi BLUD. dan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJPb.

Perhitungan Capaian



$$= \frac{\text{Avg Indeks PA I} + \text{Avg Indeks PA II}}{2}$$

$$= \frac{4,84 + 5}{2}$$

$$= 4,92$$

	Target	Realisasi
Q1	3.5 (skala 5)	4,96
Q3	3.5 (skala 5)	4,99
Q3	3.5 (skala 5)	5
Q4	3.5 (skala 5)	4,92



Analisis Capaian

Kanwil DJPb	PA I	PA II	
	Indeks Kualitas Penugasan BLU	Indeks Kualitas Asistensi BLUD	Indeks Kualitas Pemberdayaan UMKM
Avg Nilai (Avg Indeks)	4,84	5	5
	4,84	5	
Avg Indeks	4,92		



Risiko (Rendah)

Atas Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Dit PPK BLU. seluruh kanwil telah melaksanakan pembinaan BLU. asistensi BLUD. dan pemberdayaan UMKM di wilayahnya masing-masing sehingga risiko rendah.



Isu Utama

Indeks kualitas penugasan BLU Triwulan IV 2025 diperoleh berdasarkan kualitas penugasan, berupa monitoring penggunaan saldo kas, rata-rata kenaikan nilai BLU SMART, dan kualitas laporan analisis dampak efisiensi belanja BLU. Sedangkan Indeks Kualitas Asistensi UMKM dan Kualitas Pemberdayaan UMKM Triwulan IV seharusnya diperoleh berdasarkan kualitas penyampaian LPR Triwulan IV 2025. Namun, mengikuti ND Sesditjen Nomor ND-149/PB.1/2026, pengukuran capaian mengikuti capaian IKU Triwulan III 2025.



Dampak

Alokasi belanja yang tidak seragam setiap Kanwil DJPb menjadi tantangan dalam pemenuhan IKU ini dan simplifikasi pelaporan akan membuat kesulitan bagi Direktorat PPKBLU selaku penilai karena isi laporan cenderung sama.



Rencana Aksi

Berkoordinasi dengan Setditjen dan menjalin komunikasi yang baik dengan Kanwil DJPb untuk dapat menemukan solusi permasalahan terutama terkait IKU ini.

Direktorat PPKBLU	Pengelolaan Organisasi dan Pengendalian Internal yang Optimal							
	6a-N Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	104,27	120	120	108.81	108.81	114,05	114,05	
Capaian	104,27	120	120	108.81	108.81	114,05	114,05	

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)			Tindakan yang Telah Dilaksanakan														
Isu Utama: Ketiga komponen IKU ini memerlukan kerja sama seluruh pegawai Direktorat karena berkaitan dengan pemenuhan dokumen wajib yang bersifat individual. Implikasi: Setiap pegawai wajib disiplin dalam pemenuhan kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan penilaian kinerja organisasi ini. <table><tr><th>Subkomponen Penilaian</th><th>Target</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>Nilai <u>Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis SFO</u></td><td>90</td><td>92,49</td></tr><tr><td>Nilai <u>Implementasi Learning Organization</u></td><td>85</td><td>109,59</td></tr><tr><td>Nilai Hasil <u>Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal</u></td><td>86</td><td>95,96</td></tr></table>			Subkomponen Penilaian	Target	Nilai	Nilai <u>Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis SFO</u>	90	92,49	Nilai <u>Implementasi Learning Organization</u>	85	109,59	Nilai Hasil <u>Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal</u>	86	95,96	1. Menginformasikan kepada pegawai baik secara formal melalui nota dinas atau pun informal melalui media komunikasi elektronik 2. Membuat tautan yang berisi monitoring penyelesaian dan upload dokumen pendukung LO 3. Monitoring pemenuhan dokumen		
Subkomponen Penilaian	Target	Nilai															
Nilai <u>Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis SFO</u>	90	92,49															
Nilai <u>Implementasi Learning Organization</u>	85	109,59															
Nilai Hasil <u>Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal</u>	86	95,96															
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)			Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode												
Secara umum, setiap komponen pada Tingkat Implementasi Learning Organization telah dijalankan oleh Dit. PPK BLU, namun perlu dilakukan pendokumentasian yang lebih komprehensif.			1. Membuat monitoring pemenuhan dokumen dan menginformasikan secara rutin melalui media komunikasi grup pada aplikasi daring serta membuat pengumpulan dokumen yang mudah diakses semua pegawai. 2. Menertibkan administrasi dalam pengelolaan kinerja berbasis SFO	Subdit PST	Tahun 2026												

Penjelasan IKU



Mengukur kualitas pengelolaan kinerja organisasi dengan memperhitungkan tiga komponen yaitu nilai *Learning Organization*, nilai *Strategy Focused Organization*, nilai Kepatuhan Internal.

Perhitungan Capaian



= Rata-rata capaian seluruh sub iku

$$= \frac{108,81 + 121,77 + 111,58}{3}$$

$$= 114,05$$

	Target	Realisasi
Q1	100	104,27
Q3	100	120
Q3	100	108,81
Q4	100	114,05

Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi

Mandatory



Analisis Capaian

Subkomponen Penilaian	Target	Nilai	Capaian
Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis SFO	90	92,49	108,81
Nilai Implementasi Learning Organization	85	109,59	121,77
Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal	86	95,96	111,58

Realisasi nilai impelmentasi LO diperoleh melalui ND Setditjen nomor ND-21/PB.1/2026 hal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Implementasi Learning Organization Direktorat Jenderal Perbendaharaan Triwulan IV 2025

Realisasi Kualitas SFO diperoleh melalui Keputusan Setditjen nomor KEP-14/PB.1/2026 hal Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Manajemen Kinerja di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2025

Realisasi PTKI diperoleh melalui Keputusan Ditjen Perbendaharaan nomor KEP-80/PBB/2025

Risiko (Rendah)



Risiko pada IKU ini rendah, karena seluruh komponen pendukung telah diunggah sebelum batas waktu dan telah memenuhi target di setiap triwulan. Namun masih menjadi perhatian karena realisasi tersebut merupakan nilai triwulan III di mana terdapat beberapa indikator yang belum tersedia



Isu Utama

Ketiga komponen IKU ini memerlukan kerja sama seluruh pegawai Direktorat karena berkaitan dengan pemenuhan dokumen wajib yang bersifat individual.



Dampak

Setiap pegawai wajib disiplin dalam pemenuhan kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan penilaian kinerja organisasi ini.



Rencana Aksi

Membuat monitoring pemenuhan dokumen dan menginformasikan secara rutin melalui media komunikasi grup pada aplikasi daring serta membuat pengumpulan dokumen yang mudah diakses semua pegawai.

Direktorat PPKBLU	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	7a-CP Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	99.52	99.52	120	120	99,64	99,64	
Capaian	120	99.52	99.52	120	120	120	120	

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)				Tindakan yang Telah Dilaksanakan																																																		
Isu Utama: Adanya kebijakan efisiensi yang berimbas pada penyerapan karena banyak rencana kegiatan tidak dapat ter realisasi s.d. triwulan II, sehingga menumpuk pada triwulan III dan IV Implikasi: Perubahan dan penyesuaian rencana kegiatan dengan pengeluaran biaya seefisien mungkin namun penggunaan seefektif mungkin dengan output yang dihasilkan tetap optimal.  Analisis Capaian <table><tr><th>INDIKATOR IKU</th><th>BOBOT</th><th>NILAI</th><th>HASIL</th></tr><tr><td>Revisi DIPA</td><td>0%</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>Halaman III DIPA</td><td>15%</td><td>69.13</td><td>10,37%</td></tr><tr><td>Penyerapan Anggaran</td><td>0%</td><td>71</td><td></td></tr><tr><td>Belanja Kontraktual</td><td>10%</td><td>100</td><td>10%</td></tr><tr><td>Penyelesaian Tagihan</td><td>10%</td><td>100</td><td>10%</td></tr><tr><td>Pengelolaan UP dan TL</td><td>0%</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>Dispensasi SPM</td><td>0%</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>Capaian Output</td><td>25%</td><td>117.65</td><td>29,41%</td></tr><tr><td>Total</td><td>60%</td><td></td><td>59,78%</td></tr><tr><td>Nilai IKPA (Q4)</td><td></td><td>99,64%</td><td></td></tr><tr><td>Target Nilai IKPA</td><td></td><td>95</td><td></td></tr></table>				INDIKATOR IKU	BOBOT	NILAI	HASIL	Revisi DIPA	0%	100		Halaman III DIPA	15%	69.13	10,37%	Penyerapan Anggaran	0%	71		Belanja Kontraktual	10%	100	10%	Penyelesaian Tagihan	10%	100	10%	Pengelolaan UP dan TL	0%	100		Dispensasi SPM	0%	100		Capaian Output	25%	117.65	29,41%	Total	60%		59,78%	Nilai IKPA (Q4)		99,64%		Target Nilai IKPA		95		- Melakukan koordinasi dengan masing-masing pengelola kegiatan untuk memastikan bahwa seluruh anggaran dapat terserap dan output kegiatan dapat tercapai; - Menyusun ulang rencana kegiatan di Triwulan 2 - Melakukan koordinasi internal dan komunikasi terhadap seluruh unit dalam rangka memastikan target pelaksanaan anggaran dapat tercapai - Membuat monitoring atas realisasi keuangan		
INDIKATOR IKU	BOBOT	NILAI	HASIL																																																			
Revisi DIPA	0%	100																																																				
Halaman III DIPA	15%	69.13	10,37%																																																			
Penyerapan Anggaran	0%	71																																																				
Belanja Kontraktual	10%	100	10%																																																			
Penyelesaian Tagihan	10%	100	10%																																																			
Pengelolaan UP dan TL	0%	100																																																				
Dispensasi SPM	0%	100																																																				
Capaian Output	25%	117.65	29,41%																																																			
Total	60%		59,78%																																																			
Nilai IKPA (Q4)		99,64%																																																				
Target Nilai IKPA		95																																																				
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)				Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode																																																
- Kurangnya ketepatan dalam membuat rencana penyerapan. - Adanya kebijakan efisiensi yang perlu banyak dilakukan penyesuaian antara rencana dengan eksekusi kegiatan				- Melakukan koordinasi dengan Setditjen Perbendaharaan khususnya bagian Keuangan agar kegiatan yang dilaksanakan tetap sejalan dengan kebijakan efisiensi dan menyesuaikan RPD Halaman III DIPA pada triwulan berikutnya - Rapat dengan Subdit untuk penetapan RPD	PST	Tahun 2026																																																

Penjelasan IKU



Mengukur kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada level unit Eselon II.

Perhitungan Capaian



Indeks	IKPA
120	Realisasi IKPA ≥ 98.00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0.15 *$ ($95 < x < 98$)
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0.5 **$ ($85 < x < 95$)
80	Realisasi IKPA = 85
79.9	Realisasi IKPA < 85

*Koefisien 0.15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/(indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (98-95) / (120-100)

** Koefisien 0.5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/(indeks capaian target – indeks capaian 80)

	Target	Realisasi
Q1	100	120
Q3	100	99.52
Q3	100	120
Q4	100	120

Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu



Analisis Capaian

INDIKATOR IKU	BOBOT	NILAI	HASIL
Revisi DIPA	0%	100	
Halaman III DIPA	15%	69.13	10,37%
Penyerapan Anggaran	0%	71	
Belanja Kontraktual	10%	100	10%
Penyelesaian Tagihan	10%	100	10%
Pengelolaan UP dan TUP	0%	100	
Dispensasi SPM	0%	100	
Capaian Output	25%	117.65	29,41%
Total	60%		59,78%
Nilai IKPA (Q4)		99,64%	
Target Nilai IKPA		95	

Pada triwulan IV, kinerja anggaran kemenkeu telah mencapai target dengan realisasi capaian sebesar 99,64%. Indikator halaman III DIPA dan penyerapan anggaran belum optimal karena anggaran yang cenderung baru direlalisasi pada akhir tahun anggaran.



Risiko (Sangat Rendah)

Risiko atas IKU ini diukur pada kepatuhan pertanggungjawaban keuangan melalui aplikasi keuangan Setditjen. Berdasarkan pertimbangan dan data historis, risiko ini dinilai sangat rendah.

Kemenkeu-Wide



Isu Utama

Adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan sehingga menyebabkan indikator halaman III DIPA kurang optimal. Selain itu, penyerapan anggaran masih menumpuk di triwulan IV.



Dampak

Perubahan dan penyesuaian rencana kegiatan dengan pengeluaran biaya seefisien mungkin namun penggunaan seefektif mungkin dengan output yang dihasilkan tetap optimal.



Rencana Aksi

1. Melakukan koordinasi dengan Setditjen Perbendaharaan khususnya bagian Keuangan agar kegiatan yang dilaksanakan tetap sejalan dengan kebijakan efisiensi.
2. Menyesuaikan RPD Halaman III DIPA pada triwulan berikutnya

Direktorat PPKBLU	Pengelolaan IT yang Andal dan Data yang Berkualitas							
	8a-CP Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	23,64%	54.69%	54.69%	78.30%	78.30%	120	120	
Capaian	118,20	120	120	111.86	111.86	120	120	

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>	Tindakan yang Telah Dilaksanakan	
Isu Utama: Merupakan IKU baru yang monitoring progress dan perhitungan capaiannyadisampaikan oleh pihak eksternal dalam hal ini BaTii. Implikasi: Perlu pemahaman lebih dalam terkait IS RBTK Kementerian Keuangan yang terkait Direktorat PPKBLU dan pencapaiannya termasuk perhitungan IKUnya.	Koordinasi dengan pihak Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku pengusul dan Koordinator IKU. Internalisasi IS RBTK	
	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab
	Periode	

Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>	1. Internalisasi IS RBTK level Kementerian Keuangan serta tata cara perhitungan IKU agar pada akhir tahun tetap tercapai karena IKU bersifat Take Last Known Value (TLKV)	Subdit PST dan TRI	Tahun 2026
Implementasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan tidak dapat diselesaikan langsung secara mandiri, perlu pihak-pihak lain yang berkompeten untuk bisa bekerja sama mencapai tujuan.	2. Melaksanakan Blmtek Data analitik		

Penjelasan IKU

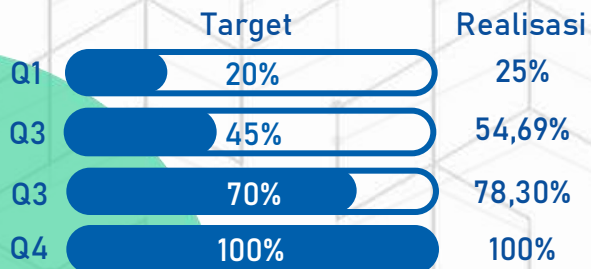


IKU ini untuk memonitor dan memastikan implementasi inisiatif strategis Kementerian Keuangan terlaksana sesuai dengan perencanaan baik dari sisi waktu dan kualitas.

Perhitungan Capaian



Seluruh data capaian diperoleh dari BaTii selaku pengampu dan pemberi *mandatory* IKU ini. Sedangkan di lingkup DJPb, yang berperan sebagai koordinator adalah Direktorat SP.



Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit



Analisis Capaian

IS RBTK level Kemenkeu tahun ini mengambil tema *A New Beginning: Transforming Ecosystem and Strengthening Strategic Linkage*. Transformasi yang dilakukan Kemenkeu dalam merespon tantangan domestik maupun ketidakpastian global perlu memperhatikan berbagai aspek. yaitu: kapasitas institusi, kredibilitas policy & regulasi, dan juga aspek Proses Bisnis (Probis), SDM dan IT. Sebagai turunan dari IS RBTK level Kemenkeu, DJPb memiliki lima IS RBTK:

1. Allocative Efficiency APBN untuk Mendukung Visi Presiden dan Mendorong Pertumbuhan
2. Kepemimpinan Kemenkeu dalam Strategic Diamond
3. Penguatan Peran SMV sebagai Arm's Length Kemenkeu
4. Pengembangan Modern Treasury
5. Modernisasi Layanan

Direktorat PPKBLU ambil bagian pada IS RBTK nomor 3 terkait Penguatan Peran SMV sebagai Arm's Length Kemenkeu.

Hasil capaian berdasarkan ND Kepala Pusat Manajemen Transformasi dan Perubahan nomor ND-1/TI.1/2026 tanggal 5 Januari 2026 hal : Penyampaian Capaian Implementasi Inisiatif Strategis (IS) Kemenkeu Periode Triwulan IV Tahun 2025



Risiko (Rendah)

Risiko pada IKU ini dinilai rendah karena menurut tren IS Data Analytic pada tahun-tahun sebelumnya. capaian IS tersebut sangat baik. Tetapi. masih harus tetap dipantau karena IKU bersifat Take Last Known



Isu Utama

Merupakan IKU baru yang monitoring *progress* dan perhitungan capaiannya disampaikan oleh pihak eksternal dalam hal ini BaTii.

Perlu kolaborasi dengan BLU, khususnya BLU DJPb.



Dampak

Perlu pemahaman lebih dalam terkait IS RBTK Kementerian Keuangan yang terkait Direktorat PPKBLU dan pencapaiannya termasuk perhitungan IKUnya.



Rencana Aksi

Internalisasi IS RBTK level Kementerian Keuangan serta tata cara perhitungan IKU agar pada akhir tahun tetap tercapai karena IKU bersifat *Take Last Known Value* (TLKV)

Direktorat PPKBLU	Pengelolaan IT yang Andal dan Data yang Berkualitas							
	8b-N Indeks Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	Max/TLK
Realisasi	2	2	2	3	3	3	3	
Capaian	66,67	66.67	66.67	100	100	100	100	

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)				Tindakan yang Telah Dilaksanakan																												
Isu Utama: 1. Compliance Satker BLU dalam memenuhi kelengkapan dan kualitas data pada BIOS yang masih bisa ditingkatkan. 2. Pemenuhan kepatuhan (compliance) Satker BLU perlu diimbangi dengan mekanisme reward and punishment yang jelas dan terukur agar BLU terdorong untuk mematuhi ketentuan secara konsisten Implikasi: Perlu pengecekan dan validasi secara rutin oleh pembina keuangan bekerja sama dengan pembina teknis.				1. Melakukan berbagai kegiatan pendampingan dalam bentuk konsultasi, bimtek, pembinaan, pembelajaran dll kepada para stakeholder maupun pengguna layanan seintensif mungkin. 2. Melakukan kolaborasi internal antar subdit dan eksternal dalam hal ini pembina teknis																												
<table><tr><th>SUBDIT</th><th>Kelengkapan dan Kualitas Data</th><th>Extra Mile Webservice</th><th>Indeks</th></tr><tr><td>PPKBLU I</td><td>77,16</td><td>6,02</td><td>4</td></tr><tr><td>PPKBLU II</td><td>60,01</td><td>5,21</td><td>3</td></tr><tr><td>PPKBLU III</td><td>67,67</td><td>8,97</td><td>3</td></tr><tr><td>DIREKTORAT</td><td>68,28</td><td>6,73</td><td>3</td></tr></table>				SUBDIT	Kelengkapan dan Kualitas Data	Extra Mile Webservice	Indeks	PPKBLU I	77,16	6,02	4	PPKBLU II	60,01	5,21	3	PPKBLU III	67,67	8,97	3	DIREKTORAT	68,28	6,73	3	<table><tr><th>Rekomendasi Rencana Aksi</th><th>Penanggung jawab</th><th>Periode</th></tr><tr><td>1. Kolaborasi antar Subdirektorat teknis dengan pengampu aplikasi BIOS agar dapat memperoleh data yang valid sehingga integritas data</td><td>Subdit TRI, PPKBLU I, II, III</td><td>Tahun 2026</td></tr></table>			Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode	1. Kolaborasi antar Subdirektorat teknis dengan pengampu aplikasi BIOS agar dapat memperoleh data yang valid sehingga integritas data	Subdit TRI, PPKBLU I, II, III	Tahun 2026
SUBDIT	Kelengkapan dan Kualitas Data	Extra Mile Webservice	Indeks																													
PPKBLU I	77,16	6,02	4																													
PPKBLU II	60,01	5,21	3																													
PPKBLU III	67,67	8,97	3																													
DIREKTORAT	68,28	6,73	3																													
Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode																														
1. Kolaborasi antar Subdirektorat teknis dengan pengampu aplikasi BIOS agar dapat memperoleh data yang valid sehingga integritas data	Subdit TRI, PPKBLU I, II, III	Tahun 2026																														

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)			Rekomendasi Rencana Aksi		Penanggung jawab	Periode
- Operator dan Approval baru pada Satker BLU karena alih tugas - Koordinasi internal dalam manajemen data pada Satker BLU - Pemimpin BLU yang tidak aware dengan target input/upload di BIOS			- Kolaborasi antar Subdirektorat teknis dengan pengampu aplikasi BIOS agar dapat memperoleh data yang valid sehingga integritas data terjamin. - Melakukan sosialisasi dan monitoring berkala - Monev kinerja BLU		Subdit TRI, PPKBLU I, II, III	Tahun 2026



IKU ini mengukur tingkat kelengkapan dan kualitas data pada aplikasi BIOS serta capaian *extra mile* dalam bentuk pengembangan *webservice* yang terintegrasi dengan aplikasi BIOS.

Perhitungan Capaian



Capaian yang dihitung adalah perhitungan pada akhir periode.

Rincian Indeks	%Capaian
Indeks 5	$90\% < Y$
Indeks 4	$80\% < Y \leq 90\%$
Indeks 3 (target)	$60\% < Y \leq 80\%$
Indeks 2	$30\% < Y \leq 60\%$
Indeks 1	$30\% \geq Y$

	Target	Realisasi
Q1	3 (skala 5)	2
Q3	3 (skala 5)	2
Q3	3 (skala 5)	3
Q4	3 (skala 5)	3

Indeks Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU

Non-Cascading



Analisis Capaian

SUBDIT	Kelengkapan dan Kualitas Data	<i>Extra Mile Webservice</i>	Indeks
PPKBLU I	77,16	6,02	4
PPKBLU II	60,01	5,21	3
PPKBLU III	67,67	8,97	3
DIREKTORAT	68,28	6,73	3

IKU ini berfokus pada *compliance* Satker BLU dalam menginput data di aplikasi BIOS mulai dari profil BLU, dewasa, RBA, dokumen kinerja, hingga pelaporan implementasi tarif dan remunerasi (80%) serta integrasi data melalui *webservice* pada masing-masing BLU (Extra Mile 20%)

Pergantian pegawai secara internal pada masing-masing BLU yang menjadi operator BIOS dan admin *webservice* merupakan salah satu tantangan ketercapaian IKU ini.



Risiko (Sangat Rendah)



Risiko atas IKU ini dinilai sangat rendah. jika melihat dari tren tahun sebelumnya. keterisian data pada BIOS akan meningkat seiring dengan berjalannya bulan. Pada awal tahun memang masih rendah tetapi hal tersebut akan meningkat di triwulan-triwulan akhir ketika data sudah siap seluruhnya.



Isu Utama

Compliance Satker BLU dalam memenuhi kelengkapan dan kualitas data pada BIOS yang masih bisa ditingkatkan.

Pemenuhan kepatuhan (*compliance*) Satker BLU perlu diimbangi dengan mekanisme reward and punishment yang jelas dan terukur agar BLU terdorong untuk mematuhi ketentuan secara konsisten



Dampak

- Perlu dorongan dan validasi secara rutin oleh pembina keuangan bekerja sama dengan pembina teknis.
- Penerapan mekanisme reward and punishment yang jelas akan mendorong peningkatan kepatuhan Satker BLU terhadap ketentuan pengelolaan keuangan dan tata kelola.



Rencana Aksi

melakukan sosialisasi dan monitoring berkala

Laporan Inisiatif Strategis

SS/IKU	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi
IS	SAKTI BLU
Periode IS	Januari s.d. Desember 2025
Output	Aplikasi yang telah dikembangkan untuk digunakan khusus oleh Satker BLU dan dapat digunakan untuk melaksanakan siklus pengelolaan keuangan dari perencanaan hingga pelaporan. dan pada tahun ini dikhususkan untuk modul perencanaan.

Progress s.d. Triwulan IV		On-track		Anggaran			
Penjelasan Sampai dengan Triwulan IV telah dilaksanakan <i>piloting</i> untuk 11 Satker BLU terpilih untuk mengimplementasikan Modul Komitmen dan Modul Pembayaran menggunakan mekanisme LS Kendala/Akar Masalah Pengembangan Aplikasi memerlukan waktu dan tenaga ahli di Direktorat SITP serta Pendefinisian Proses Bisnis yang tepat oleh Direktorat PPK BLU, sehingga diperlukan sinergi pengembangan yang efektif dan efisien antara Direktorat PPK BLU dengan Direktorat SITP, agar proses pengembangan dapat berjalan dengan lancar, sesuai kebutuhan proses bisnis dan target rentang waktu yang disepakati.	Output: Piloting SAKTI BLU Modul Komitmen dan Pembayaran bagi 11 Satker BLU			Pagu		Realisasi	
				-		-	
				Rencana Aksi		Penanggung jawab	Periode
				Pendampingan <i>piloting</i> implementasi SAKTI BLU bagi 11 Satker BLU		Subdirektorat TRI	Sepanjang tahun 2025

*) Status penyelesaian IS:

- **Selesai.** jika pada saat periode pelaporan. IS atau langkah pelaksanaan IS dimaksud telah diselesaikan;
- **On-Track.** jika pada saat periode pelaporan. IS atau langkah pelaksanaan IS belum jatuh tempo;
- **Off-Track.** jika pada saat periode pelaporan. IS atau langkah pelaksanaan IS masih dalam proses pelaksanaan tapi telah jatuh tempo.

**) Warna status

- **Selesai :** Hijau
- **On-Track:** Kuning
- **Off-Track:** Merah

Pemantauan Risiko

Sasaran : Pengelolaan Organisasi dan Pengendalian Internal yang Optimal

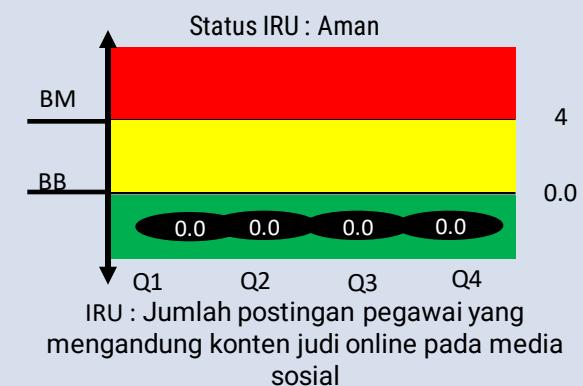
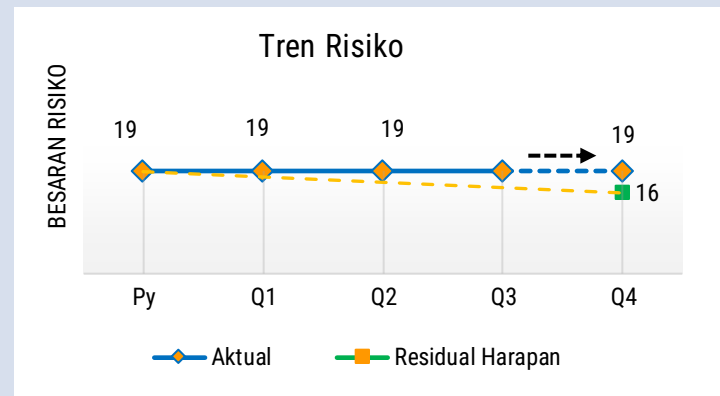
Risiko : Ownership pegawai terhadap organisasi

Besaran/Level Risiko Aktual

- Risiko “Ownership pegawai terhadap organisasi” pada awal tahun 2025 memiliki risiko pada level Tinggi dengan nilai risiko 19. Pada Triwulan IV tahun 2025 level risiko tetap pada level Tinggi dengan nilai risiko 19.
- Level kemungkinan “**Sering Terjadi**”, hal ini diindikasikan dari adanya hukuman disiplin pada Dit. PPK BLU selama 24 bulan terakhir. Level dampak “**Signifikan**”, hal ini diindikasikan karena hukuman disiplin yang diterima oleh pegawai tersebut adalah hukuman disiplin sedang. Sesuai dengan SE-2/MK.1/2023, adanya hukuman disiplin sedang berdampak bagi reputasi pada level signifikan.
- Sampai dengan triwulan IV 2025, tidak ada pegawai yang melakukan posting terkait judi online sehingga IRU berstatus aman.
- Sebagai mitigasi risiko pada triwulan IV, telah dilakukan pembinaan mental, FGD antikorupsi, imbauan pengendalian gratifikasi, dan kegiatan peningkatan kapasitas pegawai.

Tren Risiko

Proyeksi risiko ownership pegawai terhadap organisasi pada tahun 2026 tetap bernilai tinggi, dengan level kemungkinan sering terjadi mengingat masih termasuk dalam periode 24 bulan sejak adanya hukuman disiplin pegawai. Level dampak tetap pada level signifikan sehubungan dengan tingkat hukdis yang dijatuhkan adalah hukdis sedang. Pengendalian internal dengan pelaksanaan penguatan integritas dan bintal tetap dilakukan untuk menjaga besaran risiko selama tahun 2026.



Sasaran : Pengelolaan Organisasi dan Pengendalian Internal yang Optimal

Risiko : Ownership pegawai terhadap organisasi

Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

1. Telah dilaksanakan pembinaan mental oleh seluruh Kasubdit kepada para pejabat pengawas dan pelaksana di lingkup Subdit masing-masing selama triwulan IV 2025
2. Telah dilaksanakan FGD dalam rangka Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 pada 9 Desember 2025
3. Telah disampaikan Imbauan Pengendalian Gratifikasi dalam Menghadapi Hari Raya Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 kepada pegawai oleh Direktur PPK BLU melalui ND-770/PB.5/2025
4. Telah dilakukan kegiatan peningkatan sinergi antar generasi oleh masing-masing Subdit pada triwulan IV 2025
5. Telah dilaksanakan kegiatan yang membangun kebersamaan pegawai seperti olahraga bersama pada bulan Oktober dan November 2025

Rekomendasi

Risiko ini menjadi risiko mandatory serta masih termasuk risiko level tinggi sehingga pada tahun 2026 dapat melanjutkan mitigasi antara lain:

1. Kegiatan pembinaan mental atau penguatan integritas pegawai
2. Menyampaikan himbauan penguatan integritas dan pengendalian gratifikasi

Sasaran : Pengelolaan Organisasi dan Pengendalian Internal yang Optimal

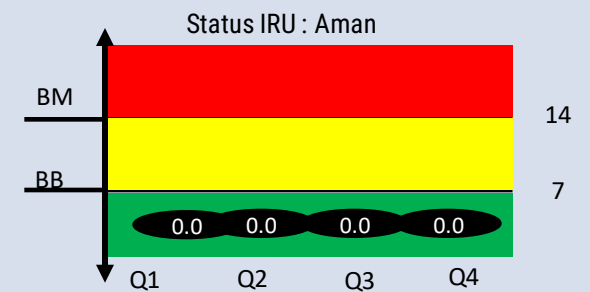
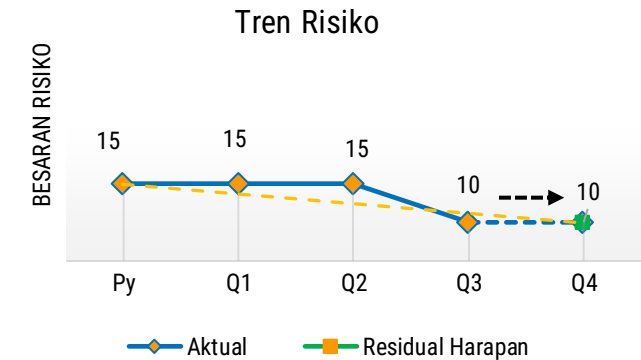
Risiko : Persepsi negatif masyarakat atas pemberitaan di media massa dan media sosial

Besaran/Level Risiko Aktual

- Risiko persepsi negatif masyarakat atas pemberitaan di media massa dan media sosial pada awal tahun memiliki risiko level sedang dengan nilai 15. Pada triwulan IV risiko berada pada level **rendah** dengan nilai 10.
- Level kemungkinan “hampir tidak terjadi”, diindikasikan dengan tidak adanya pemberitaan negatif di media massa dan media sosial mengenai Direktorat PPK BLU. Level dampak “Moderat” diindikasikan dari data historis hasil kepuasan masyarakat triwulanan selama 2025 yang bernilai >4, namun demikian, hal ini tetap menjadi perhatian pimpinan.
- Realisasi IRU berstatus aman dimana tidak ada pemberitaan negatif mengenai Direktorat PPK BLU pada media sosial maupun media cetak.
- Sebagai mitigasi risiko pada triwulan IV, Direktorat PPK BLU aktif menyampaikan konten mengenai PPK BLU yang berkonotasi positif baik melalui Instagram maupun Website Dit.PPKBLU.

Tren Risiko

Pada tahun 2026 diproyeksikan risiko menunjukkan tren yang membaik. Hal ini tercermin dari penurunan level risiko dari awal tahun s.d. akhir tahun 2025, serta minimnya pemberitaan negatif pada media massa dan media sosial mengenai Dit PPK BLU. Namun demikian risiko ini termasuk risiko mandatory dan menjadi perhatian pimpinan.



IRU : Jumlah pengaduan dan berita berkonotasi negatif tentang pegawai Direktorat PPK BLU pada media sosial maupun media cetak

Sasaran : Pengelolaan Organisasi dan Pengendalian Internal yang Optimal

Risiko : Persepsi negatif masyarakat atas pemberitaan di media massa dan media sosial

Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

1. Telah disampaikan konten tolak gratifikasi pada Website Direktorat PPK BLU
2. Telah dibuat empat konten positif pada Instagram @ppkblu dan empat konten pada Website Direktorat PPK BLU
3. Telah ditambahkan pesan anti korupsi pada Surat Direktur kepada pihak eksternal selama triwulan IV
4. Telah disampaikan Surat Komitmen Anti Gratifikasi dalam rangka Menyambut Peringatan Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dari Direktur PPK BLU kepada Stakeholder melalui Surat nomor S-222/PB.5/2025

Rekomendasi

Mitigasi yang dilaksanakan telah berhasil menjaga level risiko, namun demikian risiko ini termasuk risiko mandatory dan menjadi perhatian pimpinan sehingga pada tahun 2026 ditetapkan kembali dan dilanjutkan mitigasi dengan:

- Menyampaikan konten positif yang membangun citra baik Dit PPK BLU

Sasaran : Pengelolaan Organisasi dan Pengendalian Internal yang Optimal

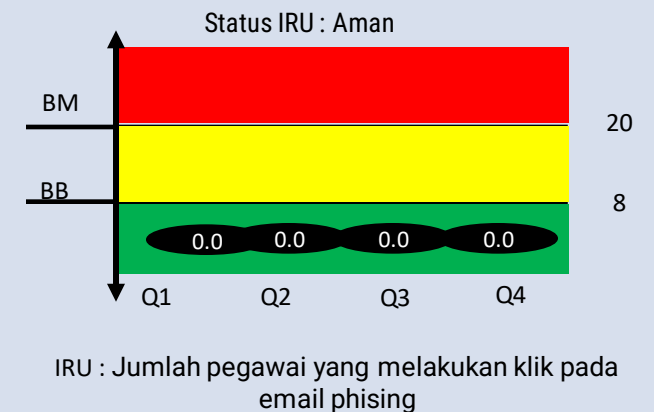
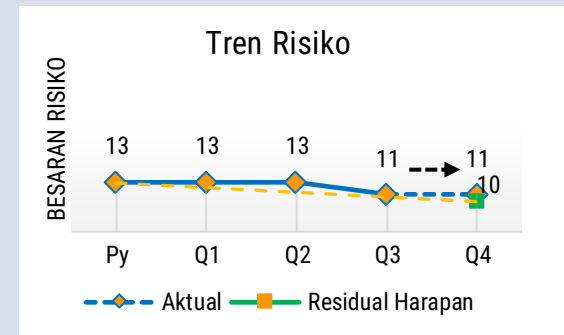
Risiko : Kebocoran data dan informasi bersifat konfidensial/rahasia

Besaran/Level Risiko Aktual

- Risiko kebocoran data dan informasi bersifat konfidensial/rahasia pada awal tahun 2025 termasuk risiko pada level Sedang dengan nilai risiko 13. Pada triwulan IV 2025, level risiko turun pada level Rendah dengan nilai risiko 11.
- Level kemungkinan “**Jarang Terjadi**”, hal ini diindikasikan dari adanya ND dari Dit SITP mengenai informasi compromised account satu pegawai Dit PPKBLU ($1\% < p \leq 10\%$) meskipun hal tersebut bukan karena email phishing. Level Dampak “**Moderat**” yang diindikasikan dari data historis hasil survei kepuasan triwulanan selama 2025 bernilai > 4 , namun demikian hal ini menjadi perhatian pimpinan.
- Realisasi IRU berstatus aman dengan nilai 0 sebab compromised account tersebut bukan disebabkan karena pegawai melakukan klik email phishing
- Sebagai mitigasi pada triwulan IV telah dilakukan pembuatan konten untuk meningkatkan security awareness dan digital banner untuk internal pegawai.

Tren Risiko

Proyeksi risiko kebocoran data dan informasi bersifat konfidensial/rahasia pada tahun 2026 diperkirakan menunjukkan tren yang positif, namun demikian risiko ini tetap menjadi perhatian sehubungan adanya informasi compromised account salah satu pegawai pada triwulan IV 2025 serta merupakan risiko mandatory pada tingkat Direktorat.



Sasaran : Pengelolaan Organisasi dan Pengendalian Internal yang Optimal

Risiko : Kebocoran data dan informasi bersifat konfidensial/rahasia

Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

1. Telah dibuat konten reminder bagi internal pegawai mengenai ancaman umum cyber security, cara aman berselancar di internet, lindungi data mulai dari hal sederhana, dan waspada modus penipuan sepanjang triwulan IV 2025.
2. Telah ditampilkan digital banner untuk internal pegawai mengenai Do's and Don'ts keamanan informasi

Rekomendasi

Mitigasi yang dilaksanakan berhasil menjaga level risiko tahun 2025 pada level Rendah, namun mengingat termasuk risiko mandatory dan masih menjadi perhatian, pada tahun 2026 ditetapkan kembali dengan melanjutkan mitigasi antara lain:

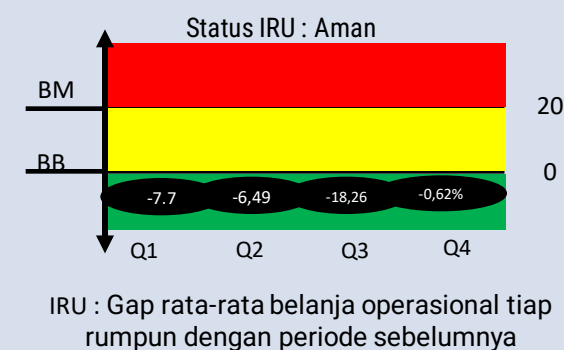
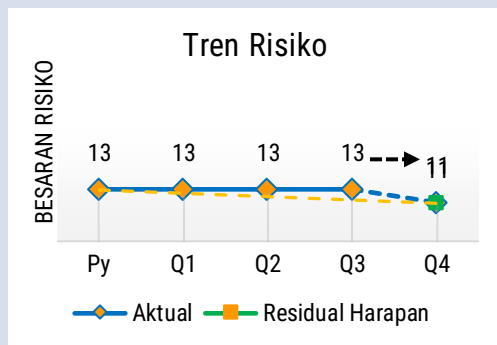
- Melaksanakan FGD security awareness
- Menyampaikan reminder mengenai security awareness kepada pegawai

Sasaran : Pengelolaan Keuangan BLU yang Inklusif dan Produktif

Risiko : Ketidaksesuaian biaya operasional yang dikeluarkan dengan pertumbuhan layanan yang diberikan BLU

Besaran/Level Risiko Aktual

- Risiko ketidaksesuaian biaya operasional yang dikeluarkan dengan pertumbuhan layanan yang diberikan BLU pada awal tahun memiliki risiko level sedang dengan nilai risiko 13. Pada triwulan IV 2025, level risiko turun pada level rendah dengan nilai risiko 11.
- Level kemungkinan "Jarang terjadi", hal ini diindikasikan dari growth belanja operasional tiap rumpun tahun 2025 dengan rata-rata sebesar -0,62% (yoy). Terdapat kenaikan belanja tiap rumpun namun tetap diiringi dengan kenaikan layanan, sehingga kinerja tetap tercapai melebihi target.
- Pada rumpun kesehatan terjadi kenaikan belanja sebesar 1,4% yoy dan diiringi kenaikan layanan sebesar 8%. Rumpun pendidikan mengalami kenaikan belanja tertinggi yaitu sebesar 5,78% yang disumbang dari adanya kenaikan belanja pegawai akibat dropping PPPK, namun diiringi pula dengan kenaikan layanan tertinggi sebesar 12%. Rumpun pengelola dana mengalami kenaikan belanja sebesar 0,23% yang diiringi peningkatan layanan jumlah penyaluran, walaupun jumlah end user mengalami penurunan sehubungan dengan kebijakan dalam PMK 130/2024. Pada rumpun kawasan terjadi peningkatan belanja sebesar 3,77% yang diiringi kenaikan layanan sebesar 8%. Rumpun barang jasa lainnya terjadi efisiensi belanja yang ditandai dengan turunnya belanja operasional sebesar -14,25% yoy, dari sisi layanan, rumpun barjas lainnya mengalami peningkatan sebesar 9%.
- Level dampak "Moderat", yang diindikasikan apabila risiko terjadi akan menyebabkan penurunan kinerja 10-20%
- Realisasi IRU berstatus aman dengan nilai gap rata-rata belanja operasional tiap rumpun dengan periode sebelumnya sebesar -0,62%
- Mitigasi risiko telah dilaksanakan di triwulan IV dengan menyelenggarakan FGD untuk meningkatkan kinerja BLU, forum diskusi dengan pembina teknis dan BLU, serta monev kinerja BLU baik on desk maupun on site.



Tren Risiko

Risiko ketidaksesuaian biaya operasional yang dikeluarkan dengan pertumbuhan layanan yang diberikan BLU diproyeksikan menunjukkan tren yang stabil namun perlu menjadi perhatian pada tahun 2026, hal ini karena terjadi kenaikan belanja pada empat rumpun, meskipun kenaikan belanja tidak signifikan dan tetap diiringi dengan peningkatan layanan BLU. Risiko ini tetap menjadi perhatian sehubungan dengan alasan tersebut serta indikator kinerja utama atas risiko ini yang tergolong baru.

Sasaran : Pengelolaan Organisasi dan Pengendalian Internal yang Optimal

Risiko : Ketidaksesuaian biaya operasional yang dikeluarkan dengan pertumbuhan layanan yang diberikan BLU

Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

1. Melaksanakan FGD BLU Preneur pada 25 November 2025 dalam rangka upaya peningkatan kinerja BLU
2. Telah dilaksanakan rapat pembahasan kinerja maupun rencana bisnis anggaran 2027 yang melibatkan pembina teknis BLU pada bulan Desember 2025 dari tanggal 3 s.d. 13 Desember 2025.
3. Telah dilaksanakan monev BLU secara on site pada triwulan IV 2025 berdasarkan ST-227/PB.5/2025, ST-407/PB.5/2025, dan ST-419/PB.5/2025
4. Telah dilaksanakan monev on desk melalui Aplikasi BIOS dan Sintesa selama triwulan IV 2025

Rekomendasi

Mitigasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 dinilai cukup efektif dalam menjaga level risiko. Namun demikian, mengingat indikator kinerja utama (IKU) ini merupakan IKU yang relatif baru dan perlu menjadi perhatian sehingga risiko perlu ditetapkan kembali dengan beberapa refinement untuk dilakukan pemantauan. Oleh karena itu, pada tahun 2026 mitigasi risiko akan tetap dilanjutkan, antara lain:

- pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja BLU
- penguatan koordinasi dengan pembina teknis BLU.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM
NOMOR KEP-6/PB.5/2025

TENTANG

STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM TAHUN
2025

DIREKTUR PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, perlu membentuk Struktur Manajemen Kinerja untuk mendukung pelaksanaan Manajemen Kinerja pada unit kerja di lingkungan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tentang Struktur Manajemen Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM TENTANG STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Struktur Manajemen Kinerja di lingkungan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ini.
- KEDUA : Struktur Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- KETIGA : Dalam hal terdapat perubahan komposisi pejabat yang mengakibatkan kekosongan jabatan pada Struktur Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Struktur Manajemen Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ini.
- KEEMPAT : Masa Kerja Struktur Manajemen Kinerja di Lingkungan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2024 ditetapkan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KELIMA : Keputusan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

Keputusan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
3. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 27 Februari 2025
Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum,



Ditandatangani secara elektronik
Ririn Kadariyah



LAMPIRAN
Keputusan Direktur Pembinaan
Pengelolaan Keuangan BLU
Nomor : KEP-6/PB.5/2025
Tanggal : 27 Februari 2025

STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM TAHUN 2025

No.	Jabatan	Kedudukan
1.	Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU)	Manajer Kinerja Unit Pemilik Kinerja (UPK)-Two
2.	Kepala Subdirektorat Peraturan dan Standardisasi Teknis Badan Layanan Umum	Koordinator Kinerja Organisasi (KKO) dan Koordinator Kinerja Pegawai (KKP)
3.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Administrator Kinerja Organisasi (AKO) dan Administrator Kinerja Pegawai (AKP)
4.	Pelaksana Subbagian Tata Usaha – Shibghotullah Syubbanur Robbani	Pendukung Administrator Kinerja Organisasi (PAKO)
5.	Subbagian Tata Usaha – Tri Noviantoro	Pendukung Administrator Kinerja Pegawai (PAKP)
6.	Kepala Seksi Informasi BLU	Liaison Officers (LO) Kinerja Subdirektorat Tarif, Remunerasi, dan Informasi BLU
7.	Kepala Seksi PPKBLU I-A	Liaison Officers (LO) Kinerja Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU I
8.	Kepala Seksi PPKBLU II-C	Liaison Officers (LO) Kinerja Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU II
9.	Kepala Seksi PPKBLU III-B	Liaison Officers (LO) Kinerja Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU III
10.	Pelaksana Seksi Penelitian dan Pengembangan BLU – Vania Amalia Saraswati	Pendukung LO Subdirektorat Peraturan dan Standardisasi Teknis BLU
11.	Pelaksana Seksi Informasi BLU – Swanda Dwika Sambodo	Pendukung LO Kinerja Subdirektorat Tarif, Remunerasi, dan Informasi BLU
12.	Pelaksana Seksi PPKBLU I-A – Muhammad Helmy Muqoffa	Pendukung LO Subdirektorat PPKBLU I
13.	Pelaksana Seksi PPKBLU II-A – Yunita Wikansari	Pendukung LO Subdirektorat PPKBLU II
14.	Pelaksana Seksi PPKBLU III-B – Khansa Rifa Zahiyah	Pelaksana Seksi PPKBLU III-B – Khansa Rifa Zahiyah

Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum,



Ditandatangani secara elektronik
Ririn Kadariyah



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM

NOMOR KEP-24/PB.5/2025

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR KEP-6/PB.5/2025
TENTANG STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM TAHUN 2025

DIREKTUR PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, perlu membentuk Struktur Manajemen Kinerja untuk mendukung pelaksanaan Manajemen Kinerja pada unit kerja di lingkungan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tentang Struktur Manajemen Kinerja di lingkungan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2025.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR KEP-6/PB.5/2025 TENTANG STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Struktur Manajemen Kinerja di lingkungan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ini.

KEDUA : Struktur Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

KETIGA : Dalam hal terdapat perubahan komposisi pejabat yang mengakibatkan ekosongan jabatan pada Struktur Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Struktur Manajemen Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ini.

KEEMPAT : Masa Kerja Struktur Manajemen Kinerja di Lingkungan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2025 terhitung sejak mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ini disampaikan kepada:

1. Sekrertaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
3. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2025

DIREKTUR PEMBINAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM,



Ditandatangani secara elektronik
MEIRIJAL NUR



LAMPIRAN

Keputusan Direktur Pembinaan
Pengelolaan Keuangan BLU

Nomor : 20 Oktober 2025

Tanggal : KEP-24/PB.5/2025

STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM TAHUN 2025

No.	Jabatan	Kedudukan
1.	Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU)	Manajer Kinerja Unit Pemilik Kinerja (UPK) Two
2.	Kepala Subdirektorat Peraturan dan Standardisasi Teknis Badan Layanan Umum	Koordinator Kinerja Organisasi (KKO) dan Koordinator Kinerja Pegawai (KKP)
3.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Administrator Kinerja Organisasi (AKO) dan Administrator Kinerja Pegawa (AKP)
4.	Pelaksana Subbagian Tata Usaha – Chichilia Dwiningsih	Pendukung Administrator Kinerja Organisasi (PAKO) dan Pendukung Administrator Kinerja Pegawai (PAKP)
5.	Kepala Seksi Informasi BLU	Liaison Officers (LO) Kinerja Subdirektorat Tarif, Remunerasi, dan Informasi BLU
6.	Kepala Seksi PPKBLU I-A	Liaison Officers (LO) Kinerja Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU I
7.	Kepala Seksi PPKBLU II-C	Liaison Officers (LO) Kinerja Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU II
8.	Kepala Seksi PPKBLU III-B	Liaison Officers (LO) Kinerja Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU III
9.	Pelaksana Seksi Penelitian dan Pengembangan BLU – Vania Amalia Saraswati	Pendukung LO Subdirektorat Peraturan dan Standardisasi Teknis BLU
10.	Pelaksana Seksi Informasi BLU – Shelma Aulia Safira	Pendukung LO Kinerja Subdirektorat Tarif, Remunerasi, dan Informasi BLU
11.	Pelaksana Seksi PPKBLU I-A – Yohanes Kurniawan	Pendukung LO Subdirektorat PPKBLU I
12.	Pelaksana Seksi PPKBLU II-A – Yunita Wikansari	Pendukung LO Subdirektorat PPKBLU II
13.	Pelaksana Seksi PPKBLU III-B – Khansa Rifa Zahiyah	Pendukung LO Subdirektorat PPKBLU III

Direktur Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum,



Ditandatangani secara elektronik
Meirijal Nur

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Periode s.d. Bulan Maret Tahun 2025

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C*	Bobot	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
Stakeholder (30.00)								120.00
Pengelolaan Keuangan BLU yang Inklusif dan Produktif								120.00
1a-CP	Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU	3.00	4.60	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
1b-N	Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU	3.00	4.46	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
Customer (20.00)								114.82
Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif								114.82
2a-N	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan	100.00	120.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
2b-N	Tingkat Perkembangan Pendapatan BLU	100.00	109.64	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	109.64
Internal Process (25.00)								115.26
Formulasi Kebijakan yang Implementatif dan Aplikatif								110.00
3a-CP	Indeks Kinerja Reformasi Hukum	95.50	120.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
3b-N	Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan	20.00	20.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	100.00
Pengelolaan tugas khusus (special mission) yang efektif								115.77
4a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	10.00	62.50	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
4b-N	Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating	100.00	111.54	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	111.54
Komunikasi Publik dan Sinergi Antar-Organisasi yang Kolaboratif								120.00
5a-N	Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan	4.00	5.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
5b-N	Indeks Kualitas Penugasan BLU, asistensi BLUD dan UMKM	3.50	4.96	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
Learning and Growth (25.00)								105.87
Pengelolaan Organisasi dan Pengendalian Internal yang Optimal								104.27
6a-N	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	100.00	104.27	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	104.27
Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel								120.00
7a-CP	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu	100.00	120.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	120.00
Pengelolaan IT yang Andal dan Data yang Berkualitas								93.34
8a-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	20.00	25.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
8b-N	Indeks Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU	3.00	2.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	66.67
NILAI KINERJA ORGANISASI								114.25

Tanggal pembuatan 18-06-2025 16:55:17

Jakarta, 06-07-2023
Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Ditandatangani secara digital

Meirijal Nur, S.E., M.B.A.
NIP. 196805191994031001

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Periode s.d. Bulan Juni Tahun 2025

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C*	Bobot	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
Stakeholder (30.00)								120.00
Pengelolaan Keuangan BLU yang Inklusif dan Produktif								120.00
1a-CP	Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU	3.00	3.90	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
1b-N	Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU	3.00	4.22	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
Customer (20.00)								118.38
Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif								118.38
2a-N	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan	100.00	120.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
2b-N	Tingkat Perkembangan Pendapatan BLU	100.00	116.75	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	116.75
Internal Process (25.00)								113.85
Formulasi Kebijakan yang Implementatif dan Aplikatif								105.78
3a-CP	Indeks Kinerja Reformasi Hukum	95.50	105.67	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	110.65
3b-N	Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan	40.00	40.36	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	100.90
Pengelolaan tugas khusus (special mission) yang efektif								115.77
4a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	20.00	75.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
4b-N	Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating	100.00	111.54	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	111.54
Komunikasi Publik dan Sinergi Antar-Organisasi yang Kolaboratif								120.00
5a-N	Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan	4.00	5.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
5b-N	Indeks Kualitas Penugasan BLU, asistensi BLUD dan UMKM	3.50	4.98	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
Learning and Growth (25.00)								104.29
Pengelolaan Organisasi dan Pengendalian Internal yang Optimal								120.00
6a-N	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	100.00	120.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	120.00
Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel								99.52
7a-CP	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu	100.00	99.52	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	99.52
Pengelolaan IT yang Andal dan Data yang Berkualitas								93.34
8a-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	45.00	54.69	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
8b-N	Indeks Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU	3.00	2.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	66.67
NILAI KINERJA ORGANISASI								114.21

Tanggal pembuatan 31-07-2025 15:29:12

Jakarta, 31-07-2025
Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum



Ditandatangani secara elektronik
Meirijal Nur
NIP. 196805191994031001



NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Periode s.d. Bulan September Tahun 2025

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C*	Bobot	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
Stakeholder (30.00)								120.00
Pengelolaan Keuangan BLU yang Inklusif dan Produktif								120.00
1a-CP	Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU	3.00	4.60	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
1b-N	Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU	3.00	4.09	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
Customer (20.00)								119.17
Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif								119.17
2a-N	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan	100.00	120.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
2b-N	Tingkat Perkembangan Pendapatan BLU	100.00	118.33	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	118.33
Internal Process (25.00)								117.58
Formulasi Kebijakan yang Implementatif dan Aplikatif								116.97
3a-CP	Indeks Kinerja Reformasi Hukum	95.50	115.66	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
3b-N	Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan	60.00	68.36	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	113.93
Pengelolaan tugas khusus (special mission) yang efektif								115.77
4a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	35.00	75.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
4b-N	Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating	100.00	111.54	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	111.54
Komunikasi Publik dan Sinergi Antar-Organisasi yang Kolaboratif								120.00
5a-N	Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan	4.00	5.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
5b-N	Indeks Kualitas Penugasan BLU, asistensi BLUD dan UMKM	3.50	4.98	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
Learning and Growth (25.00)								111.58
Pengelolaan Organisasi dan Pengendalian Internal yang Optimal								108.81
6a-N	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	100.00	108.81	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	108.81
Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel								120.00
7a-CP	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu	100.00	120.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	120.00
Pengelolaan IT yang Andal dan Data yang Berkualitas								105.93
8a-CP	Persentase Implementasi IS RBTk dan Data Analytics Unit	70.00	78.30	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	111.86
8b-N	Indeks Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU	3.00	3.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	100.00
NILAI KINERJA ORGANISASI								117.13

Tanggal pembuatan 13-10-2025 17:21:19

Jakarta, 13-10-2025
Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum



Ditandatangani secara elektronik
Meirijal Nur
NIP. 196805191994031001



NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Periode s.d. Bulan Desember Tahun 2025

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C*	Bobot	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
Stakeholder (30.00)								120.00
Pengelolaan Keuangan BLU yang Inklusif dan Produktif								120.00
1a-CP	Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU	3.00	3.90	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	42.42%	120.00
1b-N	Indeks Tingkat Pencapaian Performansi Kinerja Keuangan BLU	3.00	4.12	Maximize	Proxy Low	19.00%	57.58%	120.00
Customer (20.00)								113.48
Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif								113.48
2a-N	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan	100.00	104.68	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	42.42%	104.68
2b-N	Tingkat Perkembangan Pendapatan BLU	100.00	119.97	Maximize	Proxy Low	19.00%	57.58%	119.97
Internal Process (25.00)								115.50
Formulasi Kebijakan yang Implementatif dan Aplikatif								115.23
3a-CP	Indeks Kinerja Reformasi Hukum	95.50	116.25	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
3b-N	Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan	80.00	88.36	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	110.45
Pengelolaan tugas khusus (special mission) yang efektif								111.28
4a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	92.00	100.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	108.70
4b-N	Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU Berdasarkan Maturity Rating	100.00	113.85	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	113.85
Komunikasi Publik dan Sinergi Antar-Organisasi yang Kolaboratif								120.00
5a-N	Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan	4.00	5.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
5b-N	Indeks Kualitas Penugasan BLU, asistensi BLUD dan UMKM	4.00	4.97	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
Learning and Growth (25.00)								114.68
Pengelolaan Organisasi dan Pengendalian Internal yang Optimal								114.05
6a-N	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	100.00	114.05	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	114.05
Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel								120.00
7a-CP	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu	100.00	120.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	120.00
Pengelolaan IT yang Andal dan Data yang Berkualitas								110.00
8a-CP	Persentase Implementasi IS RBTk dan Data Analytics Unit	100.00	120.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
8b-N	Indeks Tingkat Digitalisasi dan Modernisasi BLU	3.00	3.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	100.00
NILAI KINERJA ORGANISASI								116.25

Tanggal pembuatan 22-01-2026 17:22:37

Jakarta, 06-07-2023
Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Ditandatangani secara digital

Meirijal Nur, S.E., M.B.A.
NIP. 196805191994031001